

Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RPJMD

KOTA BLITAR

2021 - 2026

2021

PEMERINTAH KOTA BLITAR



Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RPJMD

KOTA BLITAR

2021 - 2026

2021

PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

6

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
21. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6617);
32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagan Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10);
51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Blitar.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar.
14. Dinas Pendidikan atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan pendidikan.
15. Dinas Kesehatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan kesehatan.

16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan perumahan dan permukiman.
18. Dinas Sosial atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan bidang sosial.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
21. Dinas Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup.
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
23. Dinas Perhubungan atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan perhubungan darat.
24. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan bidang komunikasi, Informatika dan Statistik.
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
26. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
28. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan Kebudayaan dan Pariwisata.
29. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian.
30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.
31. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut dengan nama lain adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran.
32. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Kota Blitar yang dipimpin oleh camat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
35. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
36. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

37. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, yang selanjutnya disebut RPJMD 2021-2026, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026
40. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
41. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
44. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
45. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

47. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
50. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
51. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
52. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
53. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
54. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
55. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
56. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

57. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
58. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
59. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
60. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
61. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
62. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
63. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
64. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
65. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
66. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
67. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
68. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

69. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
70. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
71. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
72. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
73. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
74. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
75. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
76. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
77. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
78. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

79. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
80. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
81. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
82. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
83. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
84. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

BAB II
PRINSIP, AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun RPJMD 2021-2026 sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan menggunakan prinsip:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirumuskan secara:

a. transparan;
b. responsif;
c. efisien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasan lingkungan; dan
j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 6

RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan pada:

a. Manfaat;
b. Keterpaduan; dan
c. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 7

RPJMD 2021-2026 memiliki tujuan untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi, dan RPJMN dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 8

Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup:

a. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. RPJMD 2021-2026;
c. Pelaksanaan RPJMD 2021-2026; dan
d. Pengendalian Dan Evaluasi.

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1) Perencanaan pembangunan daerah memiliki orientasi:
    a. Proses; dan
    b. Substansi.
(2) Perencanaan pembangunan daerah dengan orientasi pada proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan pendekatan:
    a. Teknokratik;
    b. Partisipatif;
    c. Politis;

d. Atas bawah atau *top-down*; dan

e. Bawah atas atau *bottom up*.

(3) Perencanaan pembangunan daerah dengan orientasi pada substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan pendekatan:

a. Holistik-Tematik;

b. Integratif;

c. Spasial.

Pasal 10

Perencanaan pembangunan daerah dengan orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026

BAB IV

RPJMD 2021-2026

Pasal 11

(1) RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan mulai dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, maupun tahunan daerah terintegrasi dengan dokumen perencanaan menengah (Renstra) Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

(2) RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sistematika:

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	:	Gambaran pengelolaan Keuangan Daerah
Bab IV	:	Permasalahan dan Isu Strategis
Bab V	:	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab VI	:	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
Bab VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Bab VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bab IX	:	Penutup

(3) Isi beserta uraian sistematika RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau dokumen teknis operasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pelaksanaan program RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta pelaksanaan atas perencanaan pembangunan daerah lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perencanaan pembangunan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Dalam hal perangkat daerah tidak melaksanakan atau sudah melaksanakan tetapi belum memenuhi ketentuan tindaklanjut hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi untuk penanganannya kepada Walikota.

Pasal 15

Tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dicantumkan dalam dokumen evaluasi program pembangunan daerah.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 16

(1) Perubahan RPJMD 2021-2026 dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;
   b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

(1) Program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(1) Program dalam RKPD Tahun 2021 yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 25 Agustus 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 131-4/2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19670909 199803 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berlaku pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana uraian diatas, maka dengan Peraturan Daerah ini mengatur antara lain, Orientasi Perencanaan Pembangunan Daerah, sampai dengan Pengendalian Dan Evaluasi dari Pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan membentuk Rancangan teknokratik RPJMD, yakni rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
b. Partisipatif adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna (*Quasi-Perfect Information*) dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi.
c. Politis adalah sebuah sebuah pendekatan dimana masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam
d. Atas bawah atau *top-down* adalah sebuah pendekatan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat secara proporsional
e. Bawah atas atau *bottom up* adalah sebuah pendekatan partisipatif dan pendayagunaan aspirasi masyarakat secara terukur dan terstruktur

Ayat (3)

a. Holistik-Tematik adalah sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada keselurah sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan dalam pembangunan. Holistik tematik tersebut didukung paradigma spasial yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan berdsarkan daya dukung ruang.

b. Integratif adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan keselarasan, kesatuan dan kesepahaman melalui pelembagaan musyawarah mufakat.
c. Politis adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan aspek kedaulatan Negara dan masyarakat didalamnya
d. Spasial adalah sebuah pendekatan dengan mempertimbangkan aspek ruang dan waktu.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

RPJMD 2021-2026, dilaksanakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program RPJMD, penyusun RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan program RPJMD, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RKPD. Dalam penyusunan Rencana Strategis, Renja dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, Perangkat Daerah wajib melaksanakan konsultasi dan koordinasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau dokumen teknis operasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4



Pemerintah Kota Blitar
Provinsi Jawa Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar

Tahun 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Drs. H Santoso, M.Pd dan Ir. H Tjutjuk Sunario, MM dalam merespon persoalan publik di Kota Blitar dan berbagai isu strategis. Penyusunan RPJMD didasarkan pada beberapa pendekatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up.*

Dokumen RPJMD ini juga menyajikan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program perangkat daerah sesuai dengan muatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RPJMD dirumuskan melalui kolaborasi dan sinergi yang harmonis antar Perangkat Daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Dokumen RPJMD kemudian menjadi petunjuk dan panduan perencanaan pada level perangkat daerah yaitu Renstra Perangkat Daerah.

Kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kota Blitar 2021-2026. Dengan semangat Blitar Keren, mari bergotong-royong mewujudkan visi misi dalam RPJMD demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Wali Kota Blitar

ttd

Drs. H. SANTOSO, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR TABEL **vi**

DAFTAR GRAFIK **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 10
1.4. Maksud dan Tujuan 13
1.4.1. Maksud 13
1.4.2. Tujuan 14
1.5. Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana 5
2.1.3. Demografi 6
2.1.4. Potensi Sumber Daya 9
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 11
2.2.1. Pertumbuhan PDRB 11
2.2.2. Laju Inflasi 19
2.2.3. PDRB Per Kapita 20
2.2.4. Indeks Gini 22
2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia 23
2.2.6. Persentase Penduduk Miskin 25
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 28
2.2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 30
2.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 32
2.2.10. Angka Harapan Lama Sekolah 33
2.2.11. Angka Harapan Hidup 34
2.2.12. Prevalensi Balita Gizi Buruk 36
2.3. Aspek Pelayanan Umum 38
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 38
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 82
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan 132
2.3.4. Unsur Pendukung 141
2.3.5. Unsur Penunjang 145

2.3.6. Unsur Kewilayahan 155
2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum 157
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 159
2.4.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan 159
2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 160
2.4.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita 161
2.4.4. Indeks Reformasi Birokrasi 162
2.4.5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 162
2.4.6. Rasio Ketergantungan 163
2.4.7. Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 190
2.4.8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 198
2.5. PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 204

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 1
3.1.2. Neraca Daerah 12
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 24
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 24
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah 31
3.3. KERANGKA PENDANAAN 34
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 35
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan 46
3.4. ALTERNATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER NON-APBD KOTA 56
3.5. PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 57

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 1
4.1.1. Perumusan Permasalahan Secara Holistik-Tematik 2
4.1.2. Perumusan Permasalahan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 7
4.1. ISU STRATEGIS 34
4.1.1. Telaahan Isu Internasional 35
4.1.2. Isu Strategis Kota Blitar Dalam KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 41
4.1.3. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB 43
4.1.4. Telaahan Isu/Kebijakan Nasional 51
4.1.5. Telaahan Isu/Kebijakan Provinsi 55
4.1.6. Telaahan Isu/Kebijakan Daerah 59
4.2.7. Telaahan Kebijakan Daerah Sekitar 77
4.2.8. Penetapan Isu Strategis Kota Blitar 2021-2026 80

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN V

5.1. VISI 1
5.2. MISI 3
5.3. TUJUAN DAN SASARAN 10

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH **VI**

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 4
6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 21
6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 24
6.4. INTEGRASI PROGRAM REKOMENDASI KLHS 75

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH **VII**

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **VIII**

8.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH 1
8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH 3
8.3. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IKK) 12

BAB IX PENUTUP **1X**

DAFTAR TABEL

(II)
Tabel 2. 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan Kota Blitar Tahun 2019 2
Tabel 2. 2. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Blitar 4
Tabel 2. 3. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Blitar Tahun 2016-2020 7
Tabel 2. 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Blitar Tahun 2020 8
Tabel 2. 5. PDRB Kota Blitar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 12
Tabel 2. 6. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Blitar Tahun 2016-2020 14
Tabel 2. 7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar Menurut Lapangan UsahaTahun 2016-2020 17
Tabel 2. 8. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 18
Tabel 2. 9. PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2016-2020 21
Tabel 2. 10. Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2016-2020 26
Tabel 2. 11. Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2016-2020 29
Tabel 2. 12. Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016-2020 30
Tabel 2. 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2016-2020 30
Tabel 2. 14. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Blitar Tahun 2016-2020 32
Tabel 2. 15. Angka Harapan Lama SekolahKota Blitar Tahun 2016-2020 34
Tabel 2. 16. Angka Harapan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2020 35
Tabel 2. 17. Balita Gizi Buruk di Kota Blitar Tahun 2016-2020 37
Tabel 2. 18. Angka Partisipasi Sekolah Kota Blitar Tahun 2016-2020 39
Tabel 2. 19. Angka Partisipasi Kasar Kota Blitar Tahun 2016-2020 40
Tabel 2. 20. APM SD/MI/Paket A Kota Blitar Tahun 2016-2020 40
Tabel 2. 21. APM SMP/MTsN/SMPLB/Paket B Kota Blitar Tahun 2016-2020 41
Tabel 2. 22. Angka Kelulusan Kota Blitar Tahun 2016-2020 44
Tabel 2. 23. Angka melanjutkan SD ke SMPKota Blitar Tahun 2016-2020 45
Tabel 2. 24. Angka melanjutkan SMP ke SMA/Kota Blitar Tahun 2016-2020 45
Tabel 2. 25. Angka Rata-Rata UN/USBN SDKota Blitar Tahun 2016-2020 46
Tabel 2. 26. Angka Rata-Rata UN/USBN SMP Kota Blitar Tahun 2016-2020 46
Tabel 2. 27. Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2018-2020 48
Tabel 2. 28. Fasilitas Kesehatan menurut Jenisnya Tahun 2016-2020 48
Tabel 2. 29. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Blitar Tahun 2016-2020 49
Tabel 2. 30. Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Blitar Tahun 2016-2020 50

Tabel 2. 31. Angka Kematian Bayi (AKB)Kota Blitar Tahun 2016-2020 51
Tabel 2. 32. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2016-2020 52
Tabel 2. 33. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota BlitarTahun 2016-2020 54
Tabel 2. 34. Capaian Indikator SPM Kota Blitar Tahun 2016-2020 54
Tabel 2. 35. Bed Occupancy Rate (BOR) Kota Blitar Tahun 2016-2020 55
Tabel 2. 36. Average Length of Stay (ALOS) Kota Blitar Tahun 2016-2020 55
Tabel 2. 37. Turn Over Internal (TOI) Kota Blitar Tahun 2016- 2020 56
Tabel 2. 38. Bed Turn Over (BTO) Kota Blitar Tahun 2016-2020 56
Tabel 2. 39. Net Death Rate (NDR) Kota Blitar Tahun 2016-2020 57
Tabel 2. 40. Nilai Gross Death Rate (GDR)Kota Blitar Tahun 2016-2020 57
Tabel 2. 41. Persentase Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020 58
Tabel 2. 42. Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan Kota Blitar Tahun 2016-2020 58
Tabel 2. 43. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020 59
Tabel 2. 44. Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Sesuai Standar Kota Blitar Tahun 2016-2020 60
Tabel 2. 45. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air BersihKota Blitar Tahun 2016-2020 61
Tabel 2. 46. Persentase Jaringan Air Minum Yang Terbangun di Kota Blitar Tahun 2016-2020 61
Tabel 2. 47. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Limbah Kota Blitar Tahun 2016-2020 62
Tabel 2. 48. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kota Blitar Tahun 2016-2020 63
Tabel 2. 49. Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020 63
Tabel 2. 50. Jumlah Sampah Terolah di TPA Tahun 2016-2020 64
Tabel 2. 51. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2020 66
Tabel 2. 52. Cakupan Rumah Layak Huni dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani Kota Blitar Tahun 2016-2020 68
Tabel 2. 53. Persentase Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020 69
Tabel 2. 54. Persentase Backlog Perumahan Kota Blitar Tahun 2017-2020 70
Tabel 2. 55. Persentase Kawasan Permukiman Rawan Kumuh Kota Blitar Tahun 2016-2020 71
Tabel 2. 56. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016-2020 71
Tabel 2. 57. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda Kota Blitar Tahun 2016-2020 72
Tabel 2. 58. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Blitar Tahun 2016-2020 74
Tabel 2. 59. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Blitar Tahun 2016-2020 74
Tabel 2. 60. Persentase Respon Penanggulangan Kebakaran yang Sesuai SOP, SPP, dan SPMKota Blitar Tahun 2016-2020 75

Tabel 2. 61. Data SDM dan Sarpras Pendukung Penanganan Kebakaran Kota Blitar Tahun 2020 76
Tabel 2. 62. Capaian kinerja Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2016-2020 77
Tabel 2. 63. Persentase Penurunan PMKS Kota Blitar Tahun 2016-2020 79
Tabel 2. 64. Persentase PMKSYang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2020 80
Tabel 2. 65. Persentase PSKS yang Dibina dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2020 82
Tabel 2. 66. Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Blitar Tahun 2016-2020 83
Tabel 2. 67. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 84
Tabel 2. 68. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Di Kota Blitar Tahun 2016-2020 85
Tabel 2. 69. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 86
Tabel 2. 70. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 87
Tabel 2. 71. Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Kota Blitar Tahun 2016-2020 88
Tabel 2. 72. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Blitar Tahun 2016-2020 89
Tabel 2. 73. Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Blitar Tahun 2016-2020 90
Tabel 2. 74. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Blitar Tahun 2016-2020 91
Tabel 2. 75. Persentase Tanah Aset Bersertifikat Kota Blitar Tahun 2016-2020 92
Tabel 2. 76. Data Aset Tanah Kota Blitar Tahun 2019 92
Tabel 2. 77. Capaian Urusan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2020 93
Tabel 2. 78. Jenis dan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar Tahun 2020 96
Tabel 2. 79. Jasa Ekosistem Berdasarkan Enam Muatan KLHS 99
Tabel 2. 80. Distribusi Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Blitar 100
Tabel 2. 81. Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penting Kota Blitar 101
Tabel 2. 82. Perbandingan Luas Lahan dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kota Blitar 102
Tabel 2. 83. Kebutuhan Air Total di Kota Blitar 103
Tabel 2. 84. Pencapaian TPB Berdasarkan Pengelompokan Kota Blitar terhadap Target Nasional 105
Tabel 2. 85. Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016-2020 110
Tabel 2. 86. Capaian indikator pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 112
Tabel 2. 87. Capaian indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2020 113
Tabel 2. 88. Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016–2020 114

Tabel 2. 89. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Tahun 2016–2020 116
Tabel 2. 90. Persentase Peningkatan PDRB Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2016–2020 119
Tabel 2. 91. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Dibina Kota Blitar Tahun 2016-2020 120
Tabel 2. 92. Persentase Koperasi Aktif Yang Sehat Kota Blitar Tahun 2016-2020 120
Tabel 2. 93. Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri Kota Blitar Tahun 2017-2020 121
Tabel 2. 94. Nilai Investasi dan SKM Pelayanan Perizinan Kota Blitar Tahun 2016–2020 121
Tabel 2. 95. Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif Dan Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kota Blitar Tahun 2016–2020 124
Tabel 2. 96. Persentase Data Statistik Yang Terlayani Melalui E-Governance Kota Blitar Tahun 2016-2020 125
Tabel 2. 97. Persentase Informasi Pemerintah Yang Terfasilitasi Keamanan Informasi Kota Blitar Tahun 2016–2020 126
Tabel 2. 98. Persentase Warisan Budaya yang DilestarikanKota Blitar Tahun 2016–2020 128
Tabel 2. 99. Indeks Minat Baca Kota Blitar Tahun 2016–2020 131
Tabel 2. 100. Persentase Arsip Daerah Yang Dilakukan Penyelamatan Dan Pelestarian 131
Tabel 2. 101. Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Blitar Tahun 2016–2020 133
Tabel 2. 102. Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2016–2020 134
Tabel 2. 103. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Blitar Tahun 2016-2020 136
Tabel 2. 104. Capaian Urusan Pertanian Kota Blitar Tahun 2016–2020 136
Tabel 2. 105. Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Blitar Tahun 2016-2020 138
Tabel 2. 106. Perkembangan Urusan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016–2020 139
Tabel 2. 107. Perkembangan Sektor Industri Kota Blitar Tahun 2016–2020 140
Tabel 2. 108. Capaian Indikator Urusan Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016–2020 143
Tabel 2. 109. Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2016-2020 145
Tabel 2. 110. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kota Blitar tahun 2016–2020 146
Tabel 2. 111. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Blitar Tahun 2016-2020 148
Tabel 2. 112. Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kota Blitar Tahun 2016–2020 150
Tabel 2. 113. Capaian Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Blitar Tahun 2016–2020 151
Tabel 2. 114. Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Blitar Tahun 2016-2020 152
Tabel 2. 115. Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kota Blitar Tahun 2016-2020 154

Tabel 2. 116. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan KecamatanKota Blitar Tahun 2016-2020 156
Tabel 2. 117. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota BlitarTahun 2016-2020 158
Tabel 2. 118. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Blitar Tahun 2016-2020 159
Tabel 2. 119. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) 160
Tabel 2. 120. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Blitar Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) 161
Tabel 2. 121. Persentase Pengeluaran Perkapita Makanan dan Bukan Makanan Kota Blitar Tahun 2016-2020 161
Tabel 2. 122. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar Tahun 2016-2020 162
Tabel 2. 123. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota BlitarTahun 2016-2020 163
Tabel 2. 124. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2016 s.d 2020 163
Tabel 2. 125. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKota Blitar Tahun 2016-2020 165
Tabel 2. 126. Capaian Indikator Tujuan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2020 191
Tabel 2. 127. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2020 193
Tabel 2. 128. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Blitar Tahun 2019 - 2020 199
Tabel 2. 129. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2019 – 2020 200
Tabel 2. 130. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Blitar Tahun 2019 - 2020 201
Tabel 2. 131. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2019 – 2020 202
Tabel 2. 132. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Blitar Tahun 2019 – 2020 203
Tabel 2. 133. Capaian SPM Bidang Sosial Kota Blitar Tahun 2019 – 2020 203

(III)

Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Blitar Tahun 2016-2020 3
Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020 7
Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020 10
Tabel 3. 4. Neraca Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020 13
Tabel 3. 5. Daftar Rasio Lancar Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 19
Tabel 3. 6. Daftar Rasio Cepat Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016–2020 20
Tabel 3. 7. Daftar Rasio Hutang Terhadap Total Aset Tahun Anggaran 2016–2020 22
Tabel 3. 8. Daftar Rasio Hutang Terhadap Modal Tahun Anggaran 2016–2020 23
Tabel 3. 9. Analisis Rasio Keuangan Kota Blitar Tahun 2016-2020 23

Tabel 3. 10. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Blitar Tahun 2016-2020 25
Tabel 3. 11. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Blitar Tahun 2016-2020 28
Tabel 3. 12. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Blitar Tahun 2016-2020 29
Tabel 3. 13. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Kota Blitar Tahun 2016-2020 30
Tabel 3. 14. Penutup Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Blitar Tahun 2017-2020 31
Tabel 3. 15. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Blitar Tahun 2017-2020 32
Tabel 3. 16. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Blitar Tahun 2017-2020 33
Tabel 3. 17. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Blitar Tahun Berkenaan Tahun 2017-2020 34
Tabel 3. 18. Alokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19 Kota Blitar Tahun 2020 39
Tabel 3. 19. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 41
Tabel 3. 20. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2021-2026 (Rupiah) 47
Tabel 3. 21. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Blitar Tahun 2021-2026 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 50
Tabel 3. 22. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota BlitarTahun 2021-2026 (Rupiah) 53
Tabel 3. 23. Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Rupiah) 55

(IV)

Tabel 4. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah 8
Tabel 4. 2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Blitar 38
Tabel 4. 3. Isu Strategis Kota Blitar Berdasarkan Analisis dalam KLHS 42
Tabel 4. 4. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Sosial 43
Tabel 4. 5. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Ekonomi 46
Tabel 4. 6. Tabel Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Lingkungan 48
Tabel 4. 7. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Tata Kelola 49

(V)

Tabel 5. 1. Keterkaitan antar Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJM Nasional 8
Tabel 5. 2. Indikator Tujuan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 21
Tabel 5. 3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 23

(VI)

Tabel 6. 1. Tabel Analisis SWOT RPJMD Kota Blitar 2
Tabel 6. 2. Tabel Pengelompokan Strategi pada Analisis SWOT RPJMD Kota Blitar 3

Tabel 6. 3. Strategi dan Arah Kebijakan 6
Tabel 6. 4. Program Pembangunan Daerah 25
Tabel 6. 5. Sapta Program Prioritas/Program Unggulan Inovatif Kota Blitar 2021-2026 71
Tabel 6. 6. Integrasi Rekomendasi Program KLHS dalam RPJMDKota Blitar 2021-2026 76
Tabel 6. 7. Rekomendasi Program KLHS yang secara substansi telah diakomodir dalam RPJMD 83

(VII)
Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 1
Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 3

(VIII)
Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 2
Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 4
Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2022 - 2026 13

DAFTAR GRAFIK

(II)

Grafik 2. 1. Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2016-2020 6
Grafik 2. 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar Tahun 2016-2020 7
Grafik 2. 3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Blitar Tahun 2020 9
Grafik 2. 4. PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) 12
Grafik 2. 5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen) 16
Grafik 2. 6. Laju Inflasi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 20
Grafik 2. 7. Indeks Gini Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 23
Grafik 2. 8. Pemerataan Pendapatan Kota Blitar Tahun 2019 25
Grafik 2. 9. Angka Kemiskinan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 27
Grafik 2. 10. IPM Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 29
Grafik 2. 11. IKLH Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 31
Grafik 2. 12. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016–2020 33
Grafik 2. 13. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016–2020 34
Grafik 2. 14.Angka Harapan Hidup Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016–2020 36
Grafik 2. 15. Grafik Rasio Murid Terhadap Ketersediaan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Blitar 2016-2020 43
Grafik 2. 16. Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016-2020 44
Grafik 2. 17. Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Blitar Tahun 2016-2020 47
Grafik 2. 18. Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2016-2020 164

DAFTAR GAMBAR

(I)
Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan RPJMD 12

(II)
Gambar 2. 2. Peta Rawan Bencana Gunung Kelud Kota Blitar 5

(V)
Gambar 5. 1. Keterkaitan antara Kalimat Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 7
Gambar 5. 2. Keterkaitan antara Isu Strategis dengan Misi dan Tujuan RPJMD Kota Blitar 11
Gambar 5. 3. Logframe Tujuan 1 12
Gambar 5. 4. Logframe Tujuan 2 13
Gambar 5. 5. Logframe Tujuan 3 14
Gambar 5. 6. Logframe Tujuan 4 15
Gambar 5. 7. Logframe Tujuan 5 16
Gambar 5. 8. Logframe Tujuan 6 17
Gambar 5. 9. Logframe Tujuan 7 18
Gambar 5. 10. Logframe Tujuan 8 19
Gambar 5. 11. Logframe Tujuan 9 20

(VI)
Gambar 6. 1. Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kota Blitar 2021-2026 24



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah perlu didukung oleh perencanaan yang baik, berkualitas, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dengan prinsip-prinsip, meliputi : a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih yaitu pasangan Drs. H. Santoso, M.Pd dan Drs. H. Tjutjuk Sunario,MM yang dilantik berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.35 – 312 tertanggal 23 Februari dan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021 masa bakti Tahun 2021-2026.

RPJMD Kota Blitar merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Secara proses, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan 6 (enam) tahapan, yaitu : a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 merupakan periode keempat atau periode terakhir dalam periode RPJP Kota Blitar 2005 – 2025. RPJMD ini merupakan kesatuan integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Disusun dengan memperhatikan dokumen RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMN, dan RTRW Kota Blitar. Dokumen RPJMD ini disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Di antaranya melalui Proses Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang yang berjalan dengan dinamis.

Perbedaan penting RPJMD ini dengan RPJMD sebelumnya adalah RPJMD Kota Blitar ini disusun di saat pandemi covid-19 masih terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Beberapa proses penyusunan RPJMD dilakukan secara hybrid dengan metode dalam jaringan *(daring)* dan luar jaringan *(luring)*. Beberapa data juga sempat mengalami anomali dari trend beberapa tahun sebelumnya.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen strategis untuk merealisasikan visi misi dan janji kepala daerah terpilih. RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan Renstra Perangkat Daerah. Lebih dari itu, RPJMD merupakan instrument untuk menilai kinerja Kepala Daerah sampai akhir periode kepemimpinanya. Muaranya dokumen ini dapat menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi dan misi yang dicita – citakan Pemerintah dan masyarakat Kota Blitar.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 berdasarkan sejumlah peraturan perundang–undangan, meliputi :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
29. Peraturan Presiden Nomor 59Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1) ;
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar, RTRW Kota Blitar dan RPJMN. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur, KLHS RPJMD, RPJMD daerah sekitar, dan beberapa dokumen perencanaan Kota Blitar lain seperti perencanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar memberikan arah pembangunan daerah selama 20 tahun sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. Pembangunan jangka menengah periode 2021-2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan periode keempat dari RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan Rancangan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

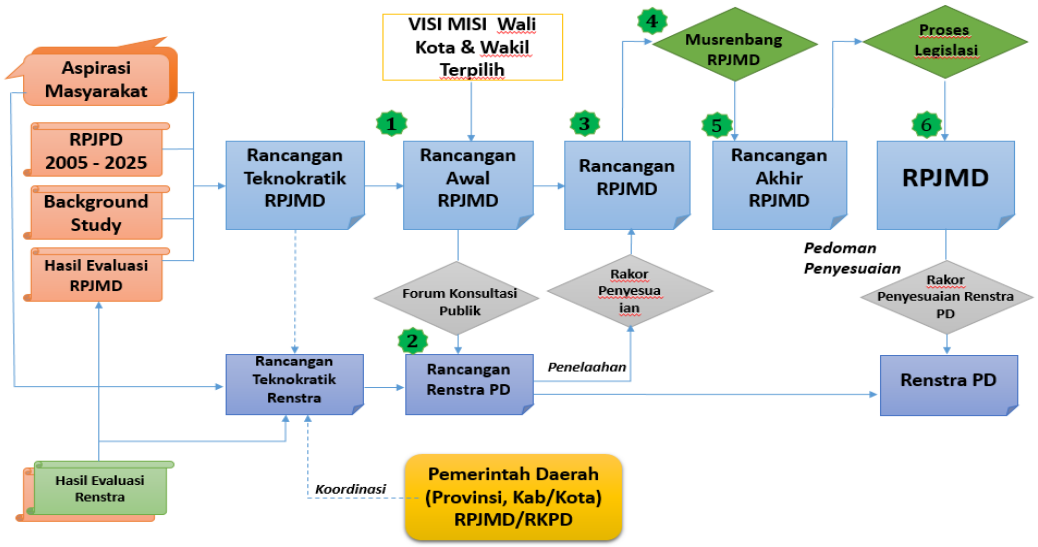
Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD ini mempedomani RTRW dalam penyusunannya melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Sementara mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Selanjutnya, mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Salah satu dokumen yang juga dimanfaatkan untuk diperhatikan dalam menghasilkan dokumen RPJMD yaitu RPJMD daerah lain atau daerah sekitar. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya.

Tahapan penyusunan dokumen RPJMD secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan RPJMD

Sumber: Bappeda Kota Blitar, 2020

Hubungan antar dokumen RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional.
b. RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024

karena pembangunan di Kota Blitar adalah bagian dari pembangunan provinsi Jawa Timur. Tujuan pembangunan provinsi Jawa Timur akan tercapai jika didukung oleh pembangunan di tiap tiap kabupaten/kota yang selaras dengan tujuan pembangunan provinsi.

c. RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras dengan RTRW Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024. Kota Blitar dalam dalam arah kebijakan pengembangan wilayah RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 berada di dalam klaster Wilis Selatan.
d. RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 memperhatikan dan selaras RPJPD Kota Blitar 2005 – 2025. RPJMD 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari RPJPD tahap IV.
e. RPJMD Kota Blitar – 2026 mengacu pada RTRW Kota Blitar 2011 – 2030. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota Blitar.
f. Pada pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun.
g. RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Blitar sekaligus sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kota Blitar 2021 - 2026.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, yaitu:

a. Sebagai dasar perumusan strategi, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan Kota Blitar selama lima tahun ke depan;
b. Sebagai acuan dasar dalam penyusunan rencana kerja yang bersifat tahunan;
c. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam merumuskan Rencana strategis selama lima tahun ke depan.
d. Menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen RPJMD.

Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi

dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu.

Bab III: Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan Kota Blitar periode 2021-2026.

Bab IV: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan isu strategis daerah memperhatikan isu atau kebijakan internasional, nasional, regional Provinsi Jawa Timur, dan internal Kota Blitar.

Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat uraian visi dan misi kepala daerah terpilih serta rumusan tujuan dan sasaran yang menunjang ketercapaian visi dan misi tersebut secara lebih detail.

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan rumusan strategi dan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat penjelasan terkait program perangkat daerah yang disusun berdasarkan hasil rumusan strategi pembangunan beserta target capaian kinerja dari masing-masing indikatornya.

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi tentang uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai melalui indikator kinerja utama pemerintah

daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator kinerja kunci.

Bab IX : Penutup

Bab ini memuat telaah singkat terkait RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Pedoman Transisi.



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Blitar merupakan wilayah yang memiliki luas 32,57km^2. Wilayah Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) wilayah adminsitrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan. Batas wilayah administrasi Kota Blitar meliputi:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
2. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Kota Blitar terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Masing-masing kecamatan tersebut

terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan. Adapun luas masing-masing kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan Kota Blitar Tahun 2019

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km^2)
1. Kepanjenkidul	Kepanjenkidul	10,50
2. Sukorejo	Sukorejo	9,92
3. Sananwetan	Sananwetan	12,15
Kota Blitar		**32,57**

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan. Kota Blitar berjarak kurang lebih 160 km sebelah Tenggara Kota Surabaya, 80 km sebelah Barat Kota Malang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar karena posisi Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Ditinjau dari kondisi topografi wilayah yang berada di ketinggian rata-rata 156 meter dpl, maka Kota Blitar merupakan daerah dataran rendah.

2.1.1.3. Topografi

Tingkat kemiringan Kota Blitar di bagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°.Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

2.1.1.4. Geologi

Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75 persen dari seluruh wilayah kota. Jenis tanah regosol berasal dari bahan vulkanis serta batuan endapan

kapur, dimana tanah regosol di Kota Blitar berasosiasi dengan tanah litosol yang berasal dari batuan beku basis sampai *intermediet*.

Tanah litosol mempunyai konsistensi gembur, porositas, daya tahan untuk menahan air dan tahan terhadap erosi. Sedangkan tanah regosol mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar dengan tingkat kesuburan yang cukup baik akibat pengaruh dari debu vulkanis Gunung Kelud sehingga sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya.

2.1.1.5. Hidrologi

Kota Blitar dilalui oleh 3 (tiga) wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu:

a. DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
b. DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan
c. DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat.

2.1.1.6. Klimatologi

Kota Blitar berada pada iklim C-3 yaitu iklim tropis. Rata-rata curah hujan per bulan yang tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 32 mm sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Januari dengan total hari hujan sebanyak 24 hari. Puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober. Kota Blitar memiliki udara cukup sejuk yaitu berkisar antara 24° C - 34° C, dengan kelembapan antara 64 – 96 persen.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Blitar didominasi oleh Kawasan perumahan sebesar 1670,34 Ha, sesuai tabel di bawah ini :

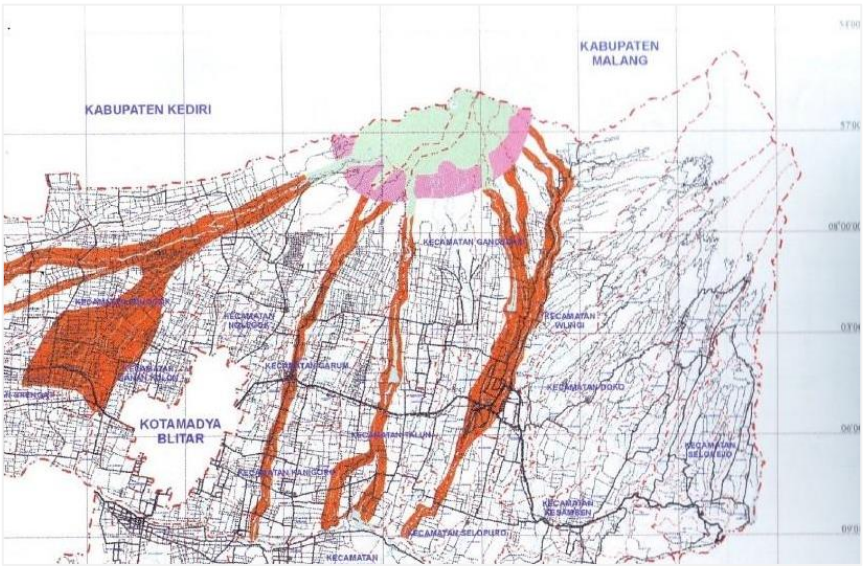
Tabel 2. 2. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Blitar

No	Penggunaan Lahan	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Kepanjen kidul	Kecamatan Sananwetan	Total (Ha)
1	Kawasan Industri dan Pergudangan	39,83	6,92	4,08	50,83
2	Kawasan Olahraga	8,34	13,26	9,77	31,37
3	Kawasan Pariwisata	5,04		3,13	8,17
4	Kawasan Pelayanan Kesehatan	1,30	6,21	6,29	13,8
5	Kawasan Pelayanan Pendidikan	11,96	16,11	25,07	53,14
6	Kawasan Pelayanan Peribadatan	0,61	1,15	1,31	3,07
7	Kawasan peruntukan khusus		1,63	7,95	9,58
8	Kawasan sosial budaya	0,35			0,35
9	Kawasan perdagangan dan jasa	100,86	107,44	76,30	284,6
10	Kawasan perkantoran	3,45	9,73	26,58	39,76
11	Kawasan pertahanan dan keamanan	0,19	1,37	11,85	13,41
12	Kawasan pertanian	193,29	20,51	258,95	472,75
13	Kawasan perumahan	485,55	451,2	733,59	1670,34
14	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	18,07	7,2	733,59	758,86
15	Kawasan Terminal Angkutan			3,47	3,47
16	Sempadan Mata Air	44,75	17,13	23,90	85,78
17	Sempadan Rel Kereta Api	7,38	2,35	11,41	21,14
18	Sempadan Sungai	32,07	59,83	63,15	155,05
19	Sempadan SUTT	8,82	19,96	1,46	30,24
20	Sempadan Embung		0,26		0,26
21	TPA			0,23	0,23
22	Kawasan suaka alam dan cagar budaya	0,24	13,26		13,5
Jumlah		**962,1**	**755,52**	**2.002,08**	**3.257,00**

Sumber: RTRW Kota Blitar Tahun 2011-2030

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Blitar tidak terlepas dari keberadaan Gunung Kelud, yang merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur. Gunung Kelud memiliki ketinggian sebesar 1.731 meter dengan kondisi yang masih aktif. Gunung Kelud berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) km dari Kota Blitar. Cukup jauhnya jarak dari Gunung Kelud menjadikan Kota Blitar relatif aman dari ancaman bahaya lahar panas gunung berapi dibandingkan dengan Kabupaten Blitar. Namun demikian, Kota Blitar rawan dari ancaman lahar dingin sebab adanya sungai di Kota Blitar yang mengalir dari Gunung Kelud, yaitu Sungai Lahar. Dengan demikian, daerah-daerah di sepanjang Sungai Lahar termasuk dalam kawasan rawan bencana gunung berapi.



Gambar 2. 2. Peta Rawan Bencana Gunung Kelud Kota Blitar

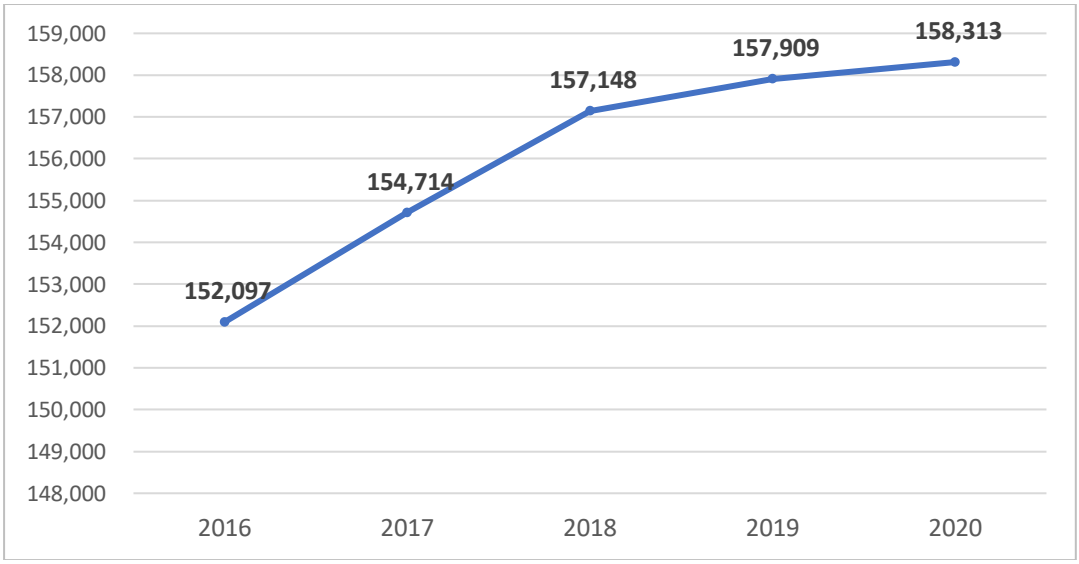
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Blitar 2019 – 2024, 2019

Selain gunung berapi, Kajian Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur juga menyebutkan bahwa Kota Blitar (seperti wilayah perkotaan lainnya) merupakan salah satu wilayah yang rawan kebakaran. Data historis menunjukkan kawasan yang rawan kebakaran adalah kawasan perdagangan dan jasa dan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

2.1.3. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Penduduk Kota Blitar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 152.097 jiwa menjadi 158.313 jiwa di tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 12.15 jiwa, dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,47% per tahun.

Grafik 2. 1. Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2016-2020



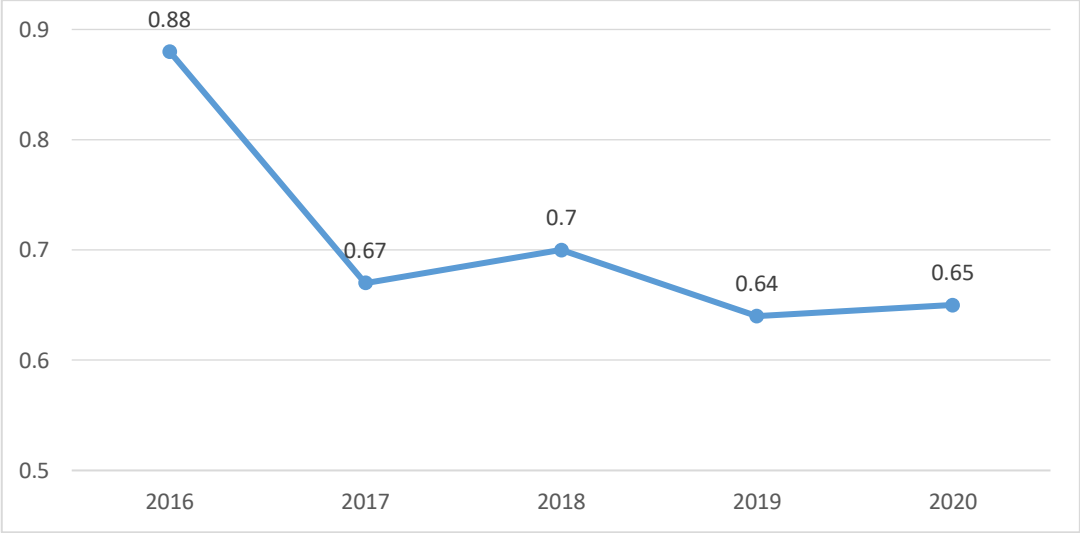
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada Tahun 2020 ditargetkan laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar pada angka 1,22, sementara capaiannya sebesar 0,65. Artinya laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 telah melampaui target yang ditentukan dan tergolong dalam laju pertumbuhan rendah karena mencapai angka kurang dari 1.

Melihat data tahun 2016 – 2020, laju pertumbuhan penduduk di Kota Blitar menunjukkan data yang fluktuatif. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh beberapa faktor selain faktor kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh tingginya migrasi penduduk ke luar dari Kota Blitar. Oleh karena itu masih diperlukan langkah–langkah untuk menekan laju migrasi penduduk melalui kerjasama lintas sektor. Selain

itu upaya pembinaan kepada remaja dan keluarga remaja sangat diperlukan dalam rangka pendewasaan usia pernikahan. Secara rinci angka laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada Tahun 2020 sebesar 99,05. Ini berarti bahwa rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki. Terdapat beberapa sebab rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen, diantaranya adalah angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki – laki, serta karena faktor migrasi penduduk laki-laki lebih tinggi terutama pada penduduk usia produktif.

Tabel 2. 3. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)			Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
	Perempuan	Laki-laki	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	76.368	75.729	152.097	0,88	99,16
2017	77.663	77.051	154.714	0,67	99,21
2018	78.880	78.268	157.148	0,70	99,22
2019	79.275	78.634	157.909	0,64	99,19
2020	79.460	78.853	158.313	0,65	99,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 32,57 km^2 yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan. Berdasarkan distribusinya, penduduk Kota Blitar tahun 2020 sekitar 30% berada di Kecamatan Kepanjenkidul, kemudian sekitar 32,6% berada di Kecamatan Sukorejo, sedangkan 37,5% sisanya berada di Kecamatan Sananwetan. Namun, jika dilihat kepadatan penduduknya, Kecamatan Sukorejo merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yaitu sekitar 5.236 jiwa per km^2. Sementara itu, Kecamatan Sananwetan memiliki kepadatan penduduk sekitar 4.566 jiwa per km^2 dan Kecamatan Kepanjenkidul sekitar 3.969 jiwa per km^2.

Tabel 2. 4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Blitar Tahun 2020

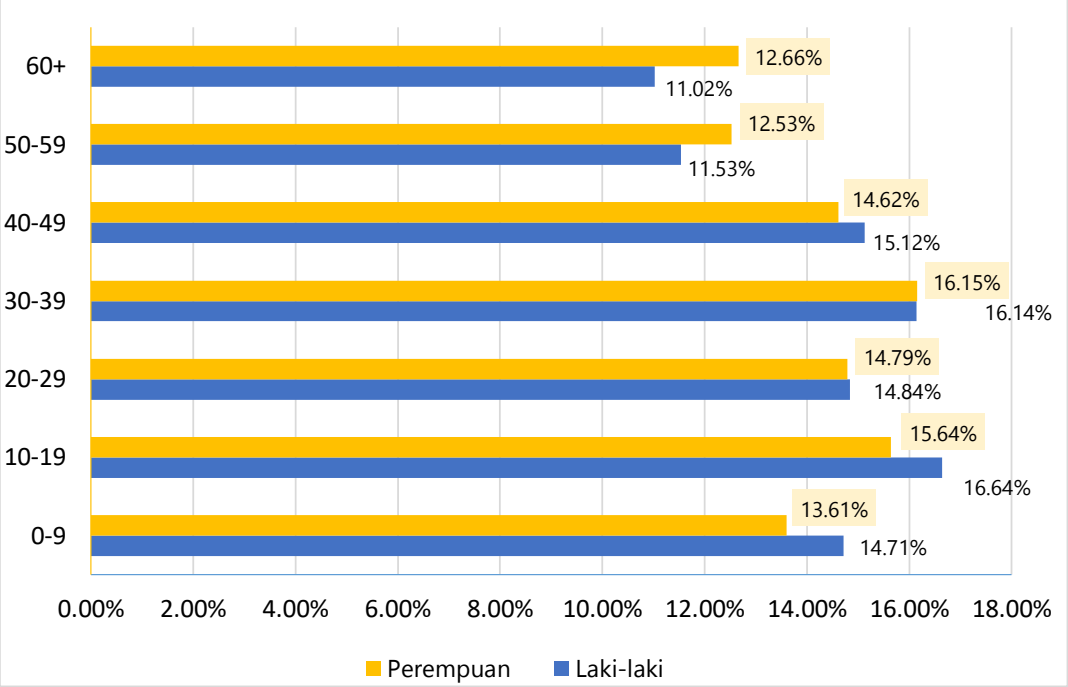
Wilayah	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan
	Km^2	% Terhadap Luas	Jumlah	% Terhadap Jumlah	
Kecamatan Sukorejo	9,92	30.48	54.039	34,86	5.236
Kecamatan Kepanjenkidul	10,50	32.23	45.409	27,95	3.969
Kecamatan Sananwetan	12,15	37.29	58.865	37,19	4.566
Kota Blitar	32,57	100	158.313	100	4.860

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Berdasarkan data Tahun 2020, distribusi penduduk Kota Blitar cukup merata di hampir semua kelompok umur. Persentase penduduk di seluruh kelompok umur berkisar 11,85% sampai dengan 16,14%. Penduduk dengan kelompok usia 30-39 mempunyai persentase yang tertinggi yaitu 16,14%, disusul dengan kelompok usia 10-19 (16,13%), dan kelompok usia 40-49 (14,87%). Komposisi penduduk Kota Blitar pada Tahun 2020 cukup menunjukkan proporsi penduduk produktif masih lebih banyak dibanding penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Lebih lanjut, persentase penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah.

Grafik 2. 3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur (10 Tahunan) dan Jenis Kelamin di Kota Blitar Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

2.1.4. Potensi Sumber Daya

Potensi unggulan Kota Blitar berada disektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang menjadi penggerak utama ekonomi kota. Selain dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah kebangsaan karena menjadi salah satu tempat bersejarah Indonesia sebagai tempat peristirahatan terakhir presiden RI yang pertama yaitu Ir. Soekarno, Kota Blitar juga diarahkan pada pengembangan wisata buatan. Destinasi wisata eksisting seperti ini terus dikembangkan melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk pengembangan destinasi wisata baru diarahkan pada Kampung Wisata Kreatif Maya Juwita yang tahap demi tahap sudah direalisasikan pembangunan fisiknya baik

atas inisiatif Pemerintah Kota Blitar maupun melalui swadaya masyarakat. Potensi wisata lain yang dikembangkan adalah atraksi wisata seperti Grebeg Pancasila, Peringatan Pemberontakan PETA, Haul Bung Karno dan Hari Jadi Kota, yang diselenggarakan sesuai agenda kota. Beragam jenis produk unggulan yang dihasilkan dari industri pengolahan menjadi souvenir atau cinderamata ikon Kota Blitar yang dapat melengkapi pengembangan daya tarik wisata Kota Blitar. Ikon tersebut antara lain yaitu : ikan koi, wajik kletik, buah belimbing beserta produk olahannya (sirup, dodol, dsb), kerajinan bubut kayu, sambel pecel, gula merah/gula kelapa, tahu dan tempe, kerajinan batu onix, industri pande besi/baja, kerajinan perak, kerajinan batik, kerajinan batok kelapa.

Sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB Kota Blitar. Pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan terhadap nilai PDRB sebesar 23,55%. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengalami kontraksi sebesar 6,71%, hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid19 yang berakibat pada menurunnya aktivitas perdagangan dan sektor vital lainnya di Kota Blitar. Meskipun demikian, sektor perdagangan memiliki porsi yang besar terhadap lajunya perekonomian, sehinggaberpotensi cepat tumbuh dan menjadi sektor unggulan yang dapat membangkitkan sekaligus menggerakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menguatkan peran Kota Blitar sebagai Pusat Wilayah Pengembangan Blitar yang melayani Kabupaten Blitar dan sekitarnya.

Kawasan perdagangan di Kota Blitar diarahkan untuk kegiatan pasar rakyat, pusat perbelanjaan modern serta toko dan ritel modern. Pengembangan pasar rakyat eksisting seperti Pasar Legi, Pasar Terpadu Dimoro, Pasar Pon, Pasar Wage, Pasar Pahing, Pasar Karangtengah dan Pasar Templek, dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarananya. Ke depan juga dimungkinkan akan dikembangkan pasar-pasar tradisional baru lainnya. Selain pasar rakyat, pengembangan pusat perbelanjaan

modern yang mendukung penetapan kawasan ini sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kota Blitar.

Meskipun sektor pertanian bukan menjadi sektor perekonomian prioritas, namun Pemerintah Kota Blitar memiliki komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Secara keseluruhan luas lahan pertanian di Kota Blitar terus mengalami penurunan yang berimplikasi pada produksi yang menurun juga. Pemerintah Kota Blitar terus melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas baik untuk tanaman pangan, dan holtikultura. Sementara untuk usaha peternakan banyak dikembangkan di wilayah pinggiran kota. Walaupun potensinya tidak terlalu besar namun secara keseluruhan populasi dan produksi hasil peternakan terus mengalami peningkatan. Dua komoditi utama yang dapat diandalkan menjadi produk komoditi pertanian di skala regional provinsi dan nasional yaitu ikan hias dan Buah Belimbing Karangsari.

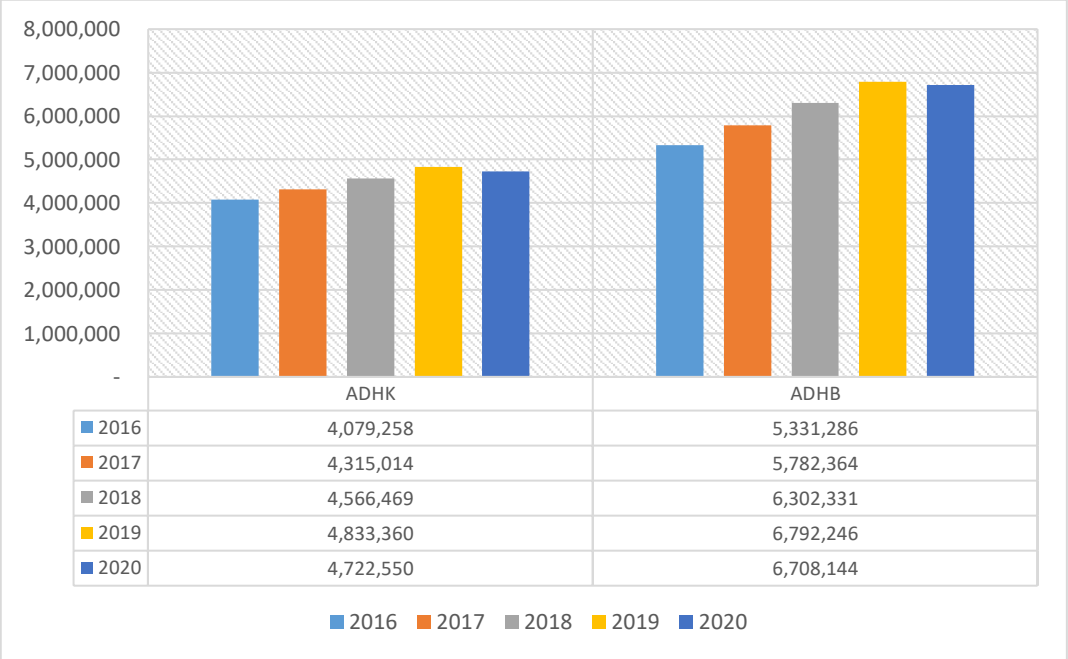
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Selain itu, PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima olah faktor produksi yang dimiliki oleh penduduknya. Berdasarkan data Tahun 2016 – 2019, perekonomian Kota Blitar berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 baik PDRB ADHK maupun PDRB ADHB mengalami penurunan, untuk PDRB ADHB menurun sebesar 1,24%, sedangkan PDRB ADHK menurun sebesar

2,29%. Perekonomian Kota Blitar berdasarkan PDRB ADHK 2010 Tahun 2020 mencapai Rp4.722.550 juta dan ADHB mencapai Rp6.708.144 juta rupiah.

Grafik 2. 4. PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, PDRB Kota Blitar baik dilihat dari ADHB maupun ADHK terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan berada di kisaran angka 5,68% sampai dengan 5,84% per tahun.

Tabel 2. 5. PDRB Kota Blitar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	117.873,96	118.736,39	119.172,75	120.752,56	120.956,29
B	Pertambangan dan Penggalian	265,13	263,5	261,63	259,71	244,35
C	Industri Pengolahan	373.779,16	396.880,76	420.576,85	444.149,91	431.234,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.972,85	3.083,61	3.225,34	3.406,09	8.077,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.767,76	7.063,25	7.351,43	7.700,59	120.956,29
F	Konstruksi	286.454,81	306.094,12	324.674,03	342.691,48	321.093,78

Kategori	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	980.198,85	1.046.380,69	1.116.910,18	1.190.847,98	1.110.558,07
H	Transportasi dan Pergudangan	161.944,82	173.325,14	185.211,7	201.349,43	190.377,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	202.751,35	219.871,63	236.875,12	253.737,5	230.163,95
J	Informasi dan Komunikasi	507.961,79	542.915,82	579.345,47	620.921,91	664.745,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	424.290,99	444.991,01	464.670,99	479.224,45	480.950,08
L	Real Estate	162.527,22	170.222,02	180.197,03	191.685,76	195.917,82
M,N	Jasa Perusahaan	32.293,64	34.935,65	37.405,6	39.849,93	37.080,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	264.450,18	270.559,92	281.355,26	292.611,65	289.576,76
P	Jasa Pendidikan	269.017,36	281.548,92	296.358,4	314.690,95	326.237,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.311,36	82.347,63	87.609,65	93.249,59	102.431,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	207.397,6	215.794,76	225.268,15	236.231,51	209.507,79
Produk Domestik Regional Bruto		**4.079.258,84**	**4.315.014,82**	**4.566.469,58**	**4.833.360,99**	**4.722.554,24**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar pada tahun 2019 semakin meningkat menjadi 5,84% dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Selain itu juga karena adanya pertumbuhan hampir pada semua lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 0,73%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selama Tahun 2020 menurun dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan pada sebagian besar sektor vital lapangan usaha, terbesar di antaranya seperti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-9,29), sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-6,71) dan sektor Jasa lainnya

(-11,31). Sedangkan penyumbang pertumbuhan ekonomi tahun 2020 paling besar berasal dari sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 9,85%.

Lapangan Usaha sektor Informasi dan Komunikasi meskipun pertumbuhannya mengalami penurunan di tahun 2020, namun perkembangan sektor ini selama tahun 2016 – 2020 cenderung konsisten dengan pertumbuhan 7,06 di tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kebutuhan informasi dan komunikasi di segala bidang baik dari sektor formal dan non formal. Begitu pula dengan sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, selama tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami pertumbuhan positif dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 14,9%. Selengkapnya, laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kota Blitar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Blitar Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,82	0,73	0,37	1,33	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,23	-0,62	-0,71	-0,73	-5,92
C	Industri Pengolahan	5.52	6,18	5,97	5,60	-2,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,75	3,73	4,60	5,60	-0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,98	4,37	4,08	4,75	4,90
F	Konstruksi	4,85	6,86	6,07	5,55	-6,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,12	6,75	6,74	6,62	-6,71
H	Transportasi dan Pergudangan	6,28	7,03	6,86	8,71	-5,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,68	8,44	7,73	7,12	-9,29
J	Informasi dan Komunikasi	6,93	6,88	6,71	7,18	7,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,03	4,88	4,42	3,13	0,36
L	Real Estate	6,06	4,73	5,86	6,38	2,21
M,N	Jasa Perusahaan	4,07	8,18	7,07	6,53	-6,95

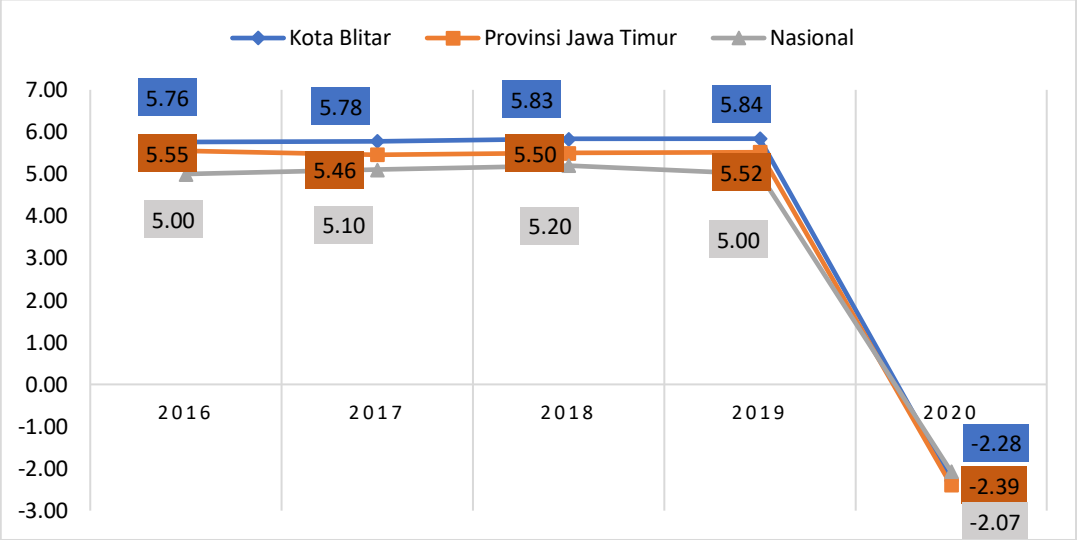
Kategori	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	2,31	3,99	4,00	-1,04
P	Jasa Pendidikan	6,72	4,66	5,26	6,19	3,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,55	5,15	6,39	6,44	9,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,75	4,05	4,39	4,87	-11,31
PDRB ADHK		**5,76**	**5,78**	**5,83**	**5,84**	**-2,28**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama kurun waktu tahun 2016–2019 selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Data Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tumbuh sebesar 5,84% di atas nasional yang tumbuh sebesar 5,52%.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami penurunan signifikan dengan kontraksi sebesar 2,28%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Blitar berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa timur (-2,39%) dan di bawah Nasional (-2,07%). Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 5. Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Secara nominal, nilai PDRB ADHB Kota Blitar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya perputaran perekonomian di sektor perdagangan dan jasa akibat pandemi Covid19. Sementara itu, perkembangan PDRB ADHB Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2016-2020 ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 2. 7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar Menurut Lapangan UsahaTahun 2016-2020

Kategori	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	172.914.90	178.373.21	186.040.74	193.059.93	195.645,46
B	Pertambangan dan Penggalian	335.77	341.81	361.69	368.14	349,41
C	Industri Pengolahan	502.362.53	552.608.39	607.975.83	659.375.39	654.040,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.297.87	3.915.36	4.274.54	4.586.14	4.482,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.709.92	8.192.13	8.621.86	9.059.76	9.536,59
F	Konstruksi	414.679.81	452.641.92	484.943.11	512.115.58	481.486,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.271.622.36	1.379.424.09	1.535.545.35	1.674.534,90	1.579.931,93
H	Transportasi dan Pergudangan	222.264.69	247.375.27	273.406.33	298.818.96	283.348,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	277.001.55	308.495.09	337.319.92	365.962.15	338.443,12
J	Informasi dan Komunikasi	556.924.43	607.744.98	648.784.08	703.269.27	760.949,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	589.209.86	640.867.60	688.195.92	717.424.35	719.777,55
L	Real Estate	196.689.16	211.459.19	233.172.65	252.182.70	262.054,10
M,N	Jasa Perusahaan	38.903.43	43.617.33	48.734.71	53.151.54	50.772,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	339.763.04	360.188.62	397.528.03	438.481.15	450.571,16
P	Jasa Pendidikan	374.821.78	399.640.29	428.107.08	461.589.81	450.571,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.880.98	110.234.77	118.797.83	129.137.41	143.488,40
R,S,T,U	Jasa lainnya	261.904.66	277.244.08	300.521.57	318.502.19	285.831,29
Produk Domestik Regional Bruto		**5.331.286.72**	**5.782.364.14**	**6.302.331.25**	**6.792.246.65**	**6.791.619.37**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Struktur ekonomi Kota Blitar menurut lapangan usaha Tahun 2020 masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,55%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,73%, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 11,34%. Sedangkan sektor penyumbang PDRB paling kecil pada tahun 2020 yaitu Pertambangan dan Penggalian yang hanya menyumbang sebesar 0,01% dari total PDRB Kota Blitar. Sementara itu, untuk mengetahui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 disajikan melalui tabel distribusi berikut.

Tabel 2. 8. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,24	3,08	2,95	2,84	2,92
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	9,42	9,56	9,65	9,71	9,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14
F	Konstruksi	7,78	7,83	7,69	7,54	7,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,85	23,86	24,36	24,66	23,55
H	Transportasi dan Pergudangan	4,17	4,28	4,34	4,40	4,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	5,34	5,35	5,39	5,05
J	Informasi dan Komunikasi	10,45	10,51	10,29	10,35	11,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,05	11,08	10,92	10,56	10,73
L	Real Estate	3,69	3,66	3,70	3,71	3,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,73	0,75	0,77	0,78	0,76
O	Administrasi Pemerintahan,	6,37	6,23	6,31	6,46	6,72

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	7,03	6,91	6,79	6,80	7,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,91	1,88	1,90	2,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,91	4,79	4,77	4,69	4,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Tren distribusi persentase PDRB ADHB Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020 fluktuatif cenderung meningkat. Beberapa sektor yang mengalami tren turun yaitu: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Jasa Lainnya. Kedua sektor lapangan usaha yang memiliki distribusi PDRB ADHB paling rendah yaitu Pertambangan dan Penggalian dan Pengadaan Listrik dan Gas. Kedua sektor ini juga mengalami stagnasi pertumbuhan distribusi PDRB AHDB selama 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.2. Laju Inflasi

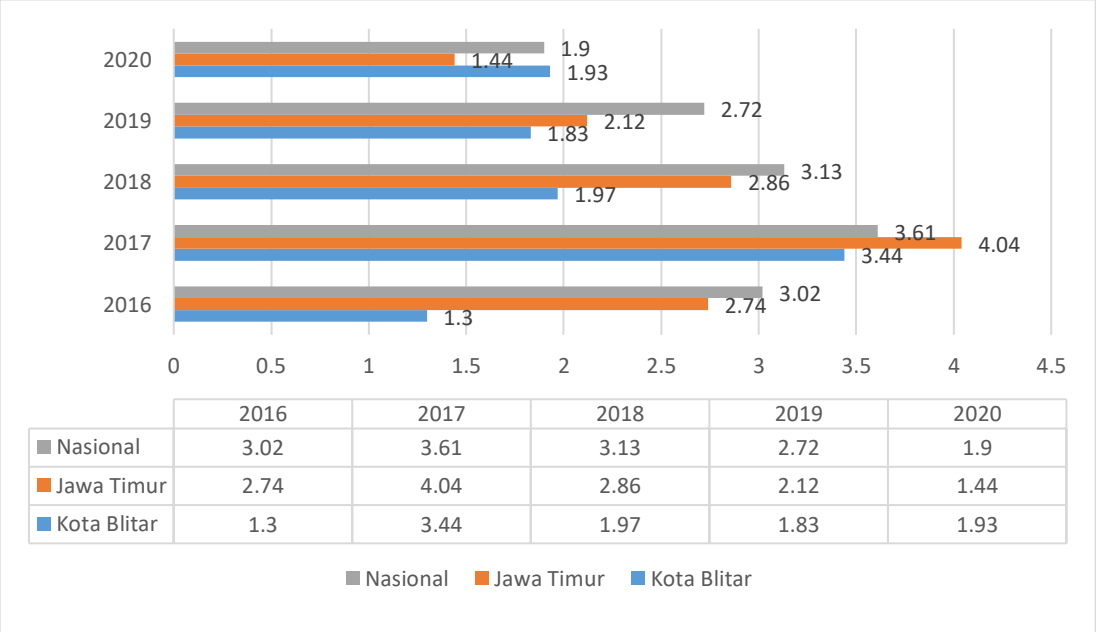
Perekonomian Kota Blitar tentunya tidak lepas dari perkembangan inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu,, deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Kota Blitar bukan termasuk kota yang dihitung inflasinya secara khusus sehingga menggunakan angka inflasi dari kabupaten/kota penghitung inflasi terdekat yaitu Kota Kediri.

Laju inflasi pada tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan data fluktuatif. Pada tahun 2016 laju inflasi tercatat sebesar 1,3%, kemudian naik kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,44. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan hingga 1,83%. Tingkat

inflasi tahun kalender 2020 sebesar 1,93% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,93%.

Selanjutnya apabila inflasi Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka posisi Kota Blitar cenderung lebih rendah, kecuali pada tahun 2020 yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sejak Tahun 2018 inflasi Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.Lebih jelasnya laju inflasi di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Grafik 2. 6. Laju Inflasi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	3.02	3.61	3.13	2.72	1.9
Jawa Timur	2.74	4.04	2.86	2.12	1.44
Kota Blitar	1.3	3.44	1.97	1.83	1.93

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.3. PDRB Per Kapita

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Blitar ADHB sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,33 juta rupiah. Secara nominal PDRB Kota Blitar

terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 51,59 juta rupiah. Akan tetapi pada tahun 2020 PDRB ADHB Kota Blitar menurun menjadi 47,875 juta rupiah.

Sementaraitu, Nilai PDRB per kapita Kota Blitar atas dasar harga konstan 2010 sejak Tahun 2016 hingga 2019 juga mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,32 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 35,777 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,84%, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,12%. Sama halnya dengan PDRB per kapita ADHB, PDRB per kapita ADHK juga mengalami penurunan yaitu menjadi 34,068 juta rupiah di tahun 2020. Selanjutnya perkembangan PRDB ADHB dan PDBR ADHK Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 9. PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Per Kapita ADHB, (ribu rupiah)	38.329,51	41.447,00	44.828,00	51.594.19	47.875,00
PDRB Per Kapita ADHK, (ribu rupiah)	29.322,50	30.823,00	32.393,00	35.777,82	34.068,00
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010 (%)	4,91	4,85	5,12	5,84	-2.28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Menurunnya angka PDRB per kapita di tahun 2020 ini masih disebabkan oleh menurunnya aktivitas perekonomian yang terjadi akibat pandemi Covid19 sehingga berimplikasi pada pertumbuhan PDRB per kapita yang berkontraksi sebesar 2,28%.

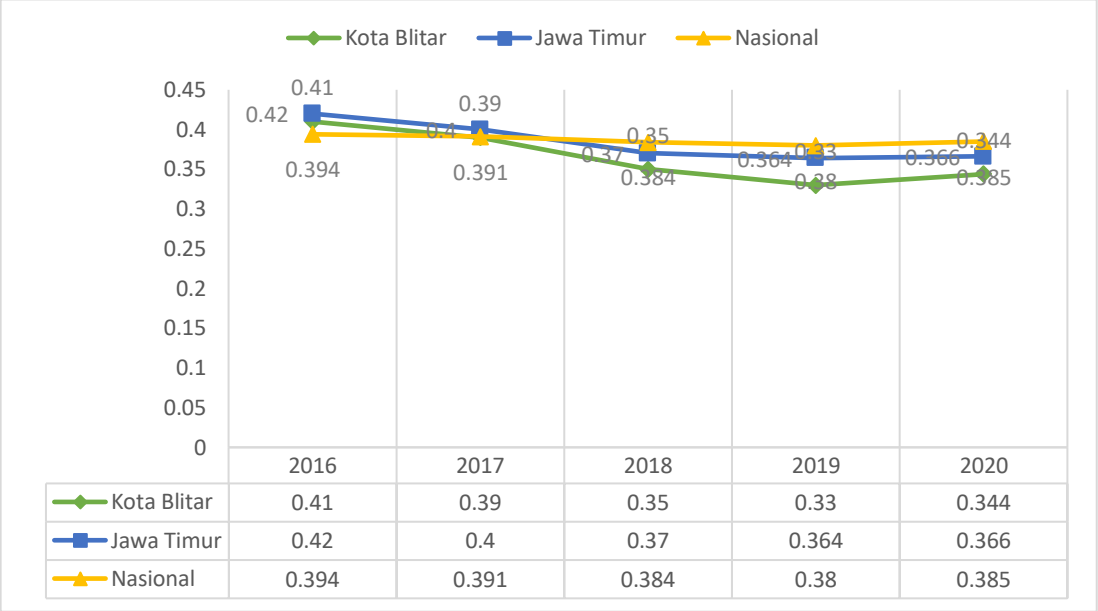
2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregrat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini makin mendekati 0 dapat diartikan makin rendahnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapat masyarakat makin berkurang atau semakin meningkatnya kemerataan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data, selama tahun 2016-2020 Indeks Gini Kota Blitar cenderung fluktuatif. Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2016 sebesar 0,41. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 0,39 kemudian 0,35 hingga menjadi 0,34 di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapat masyarakat yang makin berkurang atau semakin meningkatnya kemerataan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2020, Indeks Gini Kota Blitar mengalami kenaikan sebesar 0,014 poin atau sebesar 4,2% dari tahun 2019 yaitu pada angka 0,344. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di Kota Blitar selama masa pandemi COVID-19. Berikut grafik capaian indeks gini kurun waktu 2016-2020 di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Grafik 2. 7. Indeks Gini Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Blitar	0.41	0.39	0.35	0.33	0.344
Jawa Timur	0.42	0.4	0.37	0.364	0.366
Nasional	0.394	0.391	0.384	0.38	0.385

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Tren Indeks Gini Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung turun, kecuali tahun 2020. Indeks Gini Kota Blitar lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada 2016-2020. Meskipun demikian, Indeks Gini Kota Blitar tahun 2019-2020 naik sebesar 0,014, lebih tinggi peningkatannya dibandingkan dengan kenaikannya Indeks Gini Provinsi Jawa Timur (0.002) dan Nasional (0.005). Hal ini menunjukkan cukup tingginya peningkatan ketimpangan pendapatan di Kota Blitar selama masa pandemi COVID-19.

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

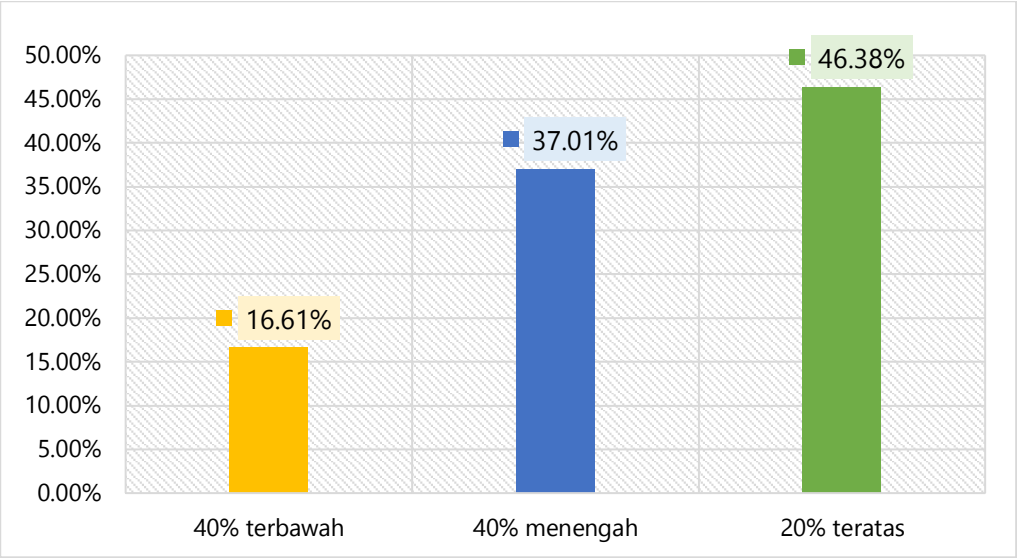
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia terdapat indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Nilai dari

indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Menurut Bank Dunia kategori ketimpangan dikelompokkan dalam tiga kriteria yaitu tinggi, sedang/menengah, dan rendah. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah/terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah/terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah/terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Sedangkan berdasarkan hasil Susenas 2017 distribusi pengeluaran perkapita penduduk Kota Blitar dapat dilihat seperti pada grafik di bawah. Pada tahun 2017 penduduk Kota Blitar dengan 40% pengeluaran per kapita terendah sebesar 16,61% atau dapat dikatakan ketimpangan pendapatan di Kota Blitar tahun 2017 masuk dalam kategori ketimpangan sedang/menengah.

Grafik 2. 8. Pemerataan Pendapatan Kota Blitar Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2020

2.2.6. Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, kecuali di tahun 2020 yang mengalami kenaikan sebagai dampak pandemi. Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar keadaan Maret 2020 mencapai 11.100 jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau naik sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 sebanyak 10.100 jiwa atau sebesar 7,13persen.

Garis Kemiskinan penduduk Kota Blitar selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun2016 garis kemiskinan Kota Blitar mencapai Rp. 356.147,- perkapita/bulan, kemudian meningkat menjadi Rp. 456.868,- perkapita/bulan di Tahun 2020. Ini artinya seseorang dengan pengeluaran kurang dari Rp. 456.868 per bulan atau setara Rp.15.229- per hari dikategorikan miskin.

Tabel 2. 10. Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	9.970	11.220	10.470	10.100	11.100
2.	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	356.147	383.021	425.832	456.778	465.868
3.	Angka kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin) (%)	7,18	8,03	7,44	7,13	7,78
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	1,04	0,93	1,05	1,14	0,98
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,2	0,24	0,31	0,23	0,22

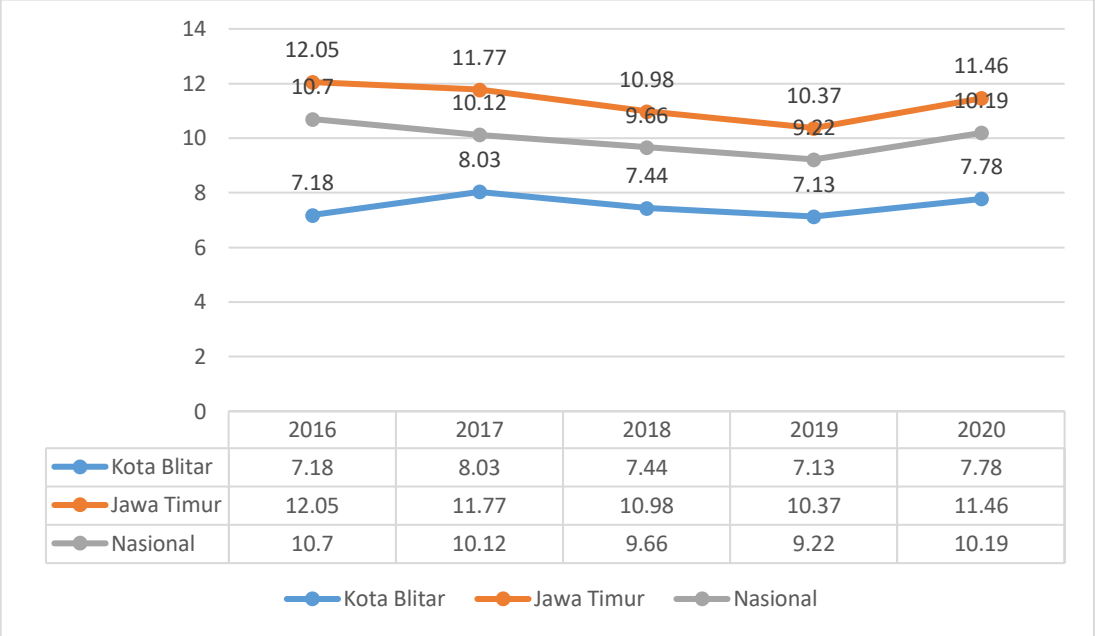
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di atas, tren kemiskinan Kota Blitar pada Tahun 2016 – 2020 mengalami naik turun. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi sebesar 1,14% di tahun 2019, dan terendah sebesar 0,93% di tahun 2017, kenaikan 0,25% di tahun 2019 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Meskipun demikian, pada tahun 2020 kedalaman kemiskinan menurun ke angka 0,98%. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali sedikit mendekati garis kemiskinan dibandingkan dengan tahun 2019.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai indikasi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,31% di tahun 2018, dan terendah sebesar 0,2% di tahun 2016. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Blitar sampai tahun 2020mencapai 0,22%, yang berarti menurun dibandingkan tahun sebelumnya 0,23%. Ini berarti,

semakin rendah nilai indeks keparahan kemiskinan maka semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2. 9. Angka Kemiskinan Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Blitar	7.18	8.03	7.44	7.13	7.78
Jawa Timur	12.05	11.77	10.98	10.37	11.46
Nasional	10.7	10.12	9.66	9.22	10.19

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari 2018 ke 2019 sebesar 0,31% poin, berada di bawah rata-rata angka kemiskinan Jawa Timur. Sama halnya dengan perbandingan dengan Provinsi Jawa Timur, angka kemiskinan Kota Blitar selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada di bawah angka kemiskinan nasional. Pada Tahun 2020 posisi angka kemiskinan di Kota Blitar berada di 7,78. Terjadinya kenaikan angka kemiskinan salah satunya disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh penurunan aktivitas perekonomian sehingga berimbas pula pada menurunnya konsumsi atau daya beli masyarakat.

Sementara itu dibanding kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kediri, Jika dilihat perubahan angka kemiskinan kabupaten/kota se eks Karesedinan Kediri dari tahun 2019 ke 2020, tampak bahwa kenaikan paling tinggi terdapat di Kabupaten Kediri

sebesar 0,98 persen poin. Sedangkan kenaikan kemiskinan paling kecil sebesar 0,38 persen poin terdapat di Kabupaten Nganjuk. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan kemiskinan Kota Nganjuk lebih lambat dibanding kabupaten/kota se eks karesidenan Kediri. Berbeda halnya dengan kemiskinan di Kota Blitar dan Kota Kediri pada tahun 2019 dan tahun 2020. Kemiskinan Kota Blitar lebih rendah dibanding kemiskinan Kota Kediri pada tahun 2019. Kondisi ini berbanding terbalik di tahun 2020 dimana kemiskinan Kota Blitar lebih tinggi dibanding kemiskinan Kota Kediri.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Dalam proses penghitungan IPM digunakan beberapa komponen, yaitu: indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah IPM Kota Blitar menempati peringkat lima di Jawa Timur.

Jika dilihat lebih jauh yang menjadikan IPM Kota Blitar selalu tertinggi karena indeks kesehatan Kota Blitar selalu tertinggi. Indeks kesehatan ini dihitung dari AHH. Sejauh ini AHH Kota Blitar adalah menduduki peringkat keenam selama tiga tahun terakhir di Jawa Timur. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar sudah sangat bagus. Tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas diikuti dengan kemudahan akses bagi masyarakatnya menjadikan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar semakin membaik.

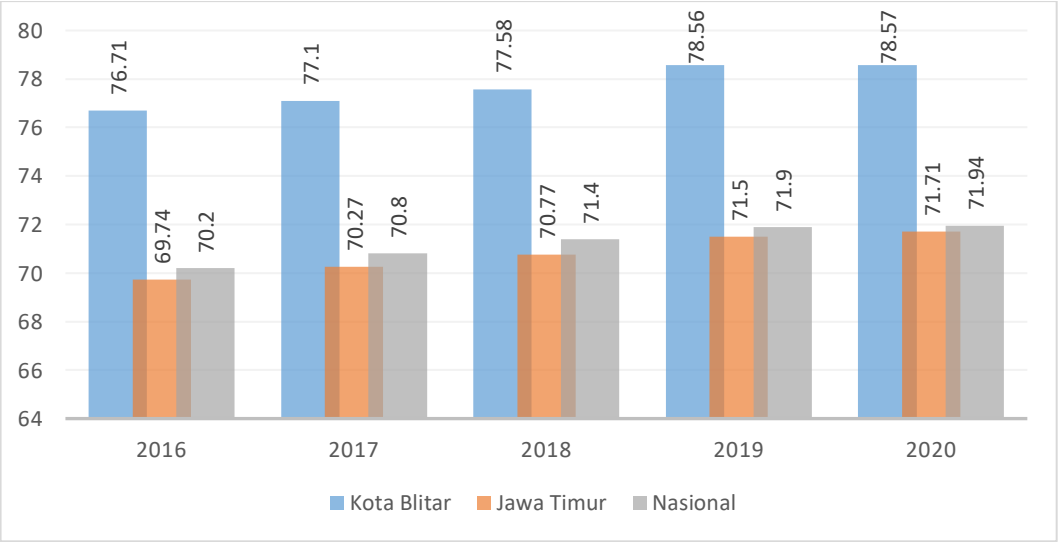
Tabel 2. 11. Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	76,71	77,10	77,58	78,56	78,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori menengah ke atas dan menunjukkan tren meningkat. Selama kurun waktu itu pula IPM Kota Blitar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dimana IPM Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 78,57, sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 71,71 dan Nasional pada tahun yang sama mencapai 71,94. Perubahan tren IPM selama tahun 2016 – 2020 Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 10. IPM Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Untuk menentukan kualitas pendidikan dan kesehatan di suatu daerah maka diukur indeks pendidikan dan kesehatan. Indeks Pendidikan Kota Blitar mengalami tren meningkat selama periode 2016 sampai 2019 yaitu dari 0,72 pada Tahun 2016 menjadi 0,75 pada Tahun 2019 kemudian turun menjadi 0,73 pada tahun 2020.

Sementara itu, Indeks kesehatan di Kota Blitar pada tahun 2016 sebesar 0,82, dan mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2020 atau tidak mengalami perubahan angka capaian. Lebih rinci perkembangan indeks kesehatan dan indeks pendidikan Kota Blitardapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah.

Tabel 2. 12. Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan (indeks)	0,72	0,72	0,72	0,75	0,73
2	Indeks Kesehatan (indeks)	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

2.2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Data IKLH selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan. Selengkapnya data IKLH Kota Blitar disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (indeks)	59,65	60,88	63,51	63,12	66,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2021

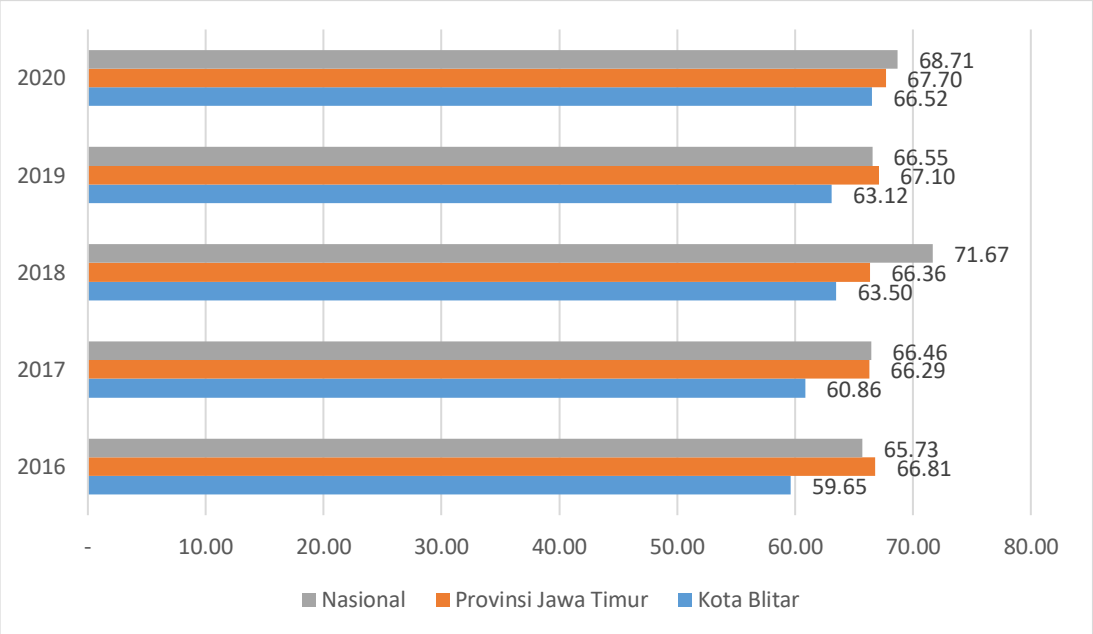
Dari tabel di atas disebutkan bahwa pada IKLH Kota Blitar cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019sebesar 0,39 poin dibanding tahun sebelumnya (63,12). Nilai IKLH dipengaruhi oleh Indeks kualitas lahan, Indeks kualitas air

dan Indeks kualitas udara. Penurunan IKLH pada Tahun 2019 dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Udara yaitu dari 84,81 menjadi 82,77. Menurunnya Indeks Kualitas Udara ini diakibatkan oleh beberapa hal salah satunya adalah karena bertambahnya emisi transportasi seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.

Sementara itu angka IKLH pada tahun 2020 mencapai 66,52 atau naik sebesar 3,4 poin dari tahun 2019. Kenaikan yang cukup signifikan ini dapat terjadi karena berkurangnya aktivitas transportasi selama tahun 2020 karena pembatasan perjalanan selama Covid19.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, IKLH Kota Blitar cenderung rendah. Data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan posisi IKLH berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, meskipun capaiannya meningkat dari tahun ke tahun. Lebih lanjut data IKLH Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 11. IKLH Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah Kota Blitar berada di atas angka rata-rata lama sekolah Jawa Timur, pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 14. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Blitar Tahun 2016-2020

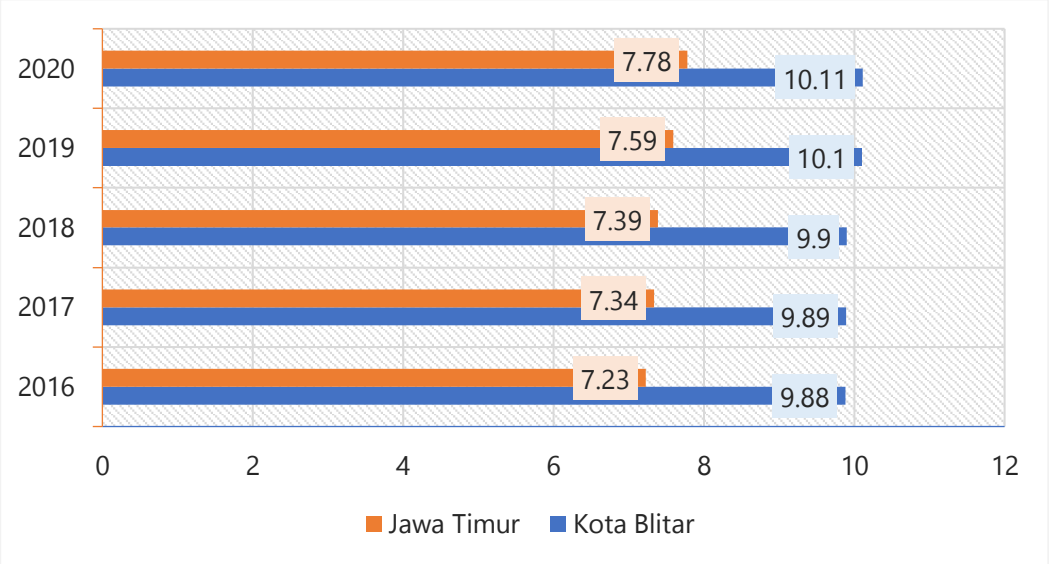
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,88	9,89	9,90	10,10	10,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui Rata-rata lama sekolah Kota Blitar tahun 2020 mencapai 10,11 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Blitar yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 10,11 tahun atau setara dengan kelas X tingkat SLTA. Capaian ini sudah sesuai target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya walaupun target pelaksanaan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun yang sedang digalakkan pemerintah masih belum dapat dicapai.

Namun demikian, apabila dilihat trennya angka rata-rata lama sekolah Kota Blitar cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 9,88 tahun pada 2016 menjadi 10,11 tahun pada Tahun 2020. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah didukung dengan adanya upaya-upaya pemerintah Kota Blitar antara lain program sekolah gratis, angkutan sekolah gratis, penjaringan siswa yang putus sekolah melalui program paket A, B dan C; peningkatan kegiatan Pusat Layanan Autis yang memberikan assesmen bagi anak berkebutuhan khusus dan partisipasi masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Grafik 2. 12. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016–2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

2.2.10. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka harapan lama sekolah Kota Blitar Tahun 2016 mencapai angka 14, terus meningkat sampai Tahun 2020 pada angka 14,32. Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan program Pemerintah Kota Blitar Sekolah Gratis baik dalam hal program bantuan perlengkapan sekolah, angkutan sekolah, dan program-program pendukung lainnya.

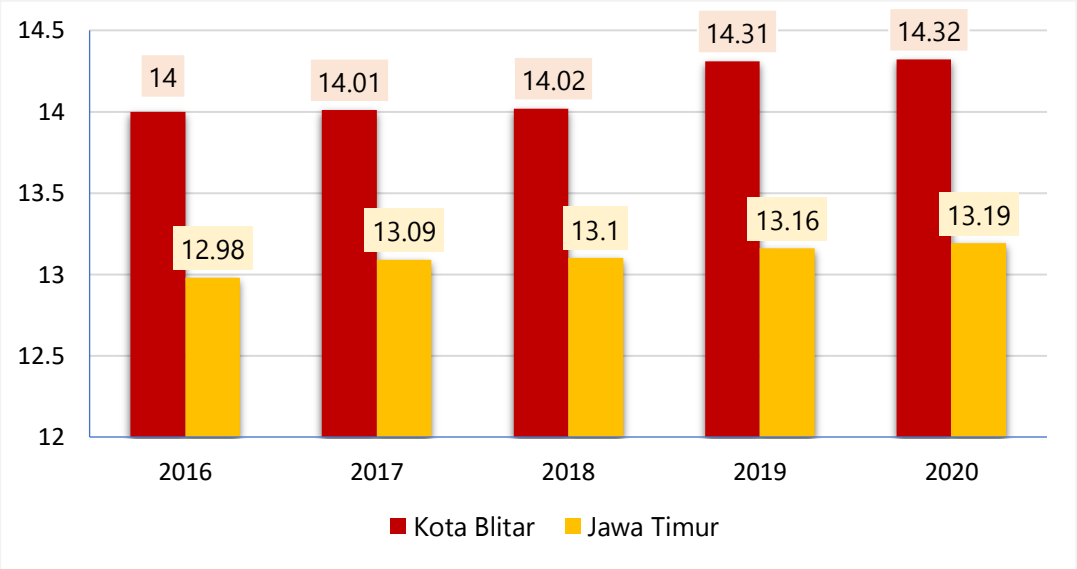
Tabel 2. 15. Angka Harapan Lama SekolahKota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14	14,01	14,02	14,31	14,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, maka angka Kota Blitar masih berada di atas Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya data Angka Harapan Lama Sekolah Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur tersaji pada tabel dan grafik di bawah ini.

Grafik 2. 13. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016–2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.11. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui berbagai fasilitas kesehatan dan kesadaran masyarakat akan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) merupakan faktor yang

berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang. Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat akan mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2. 16. Angka Harapan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2020

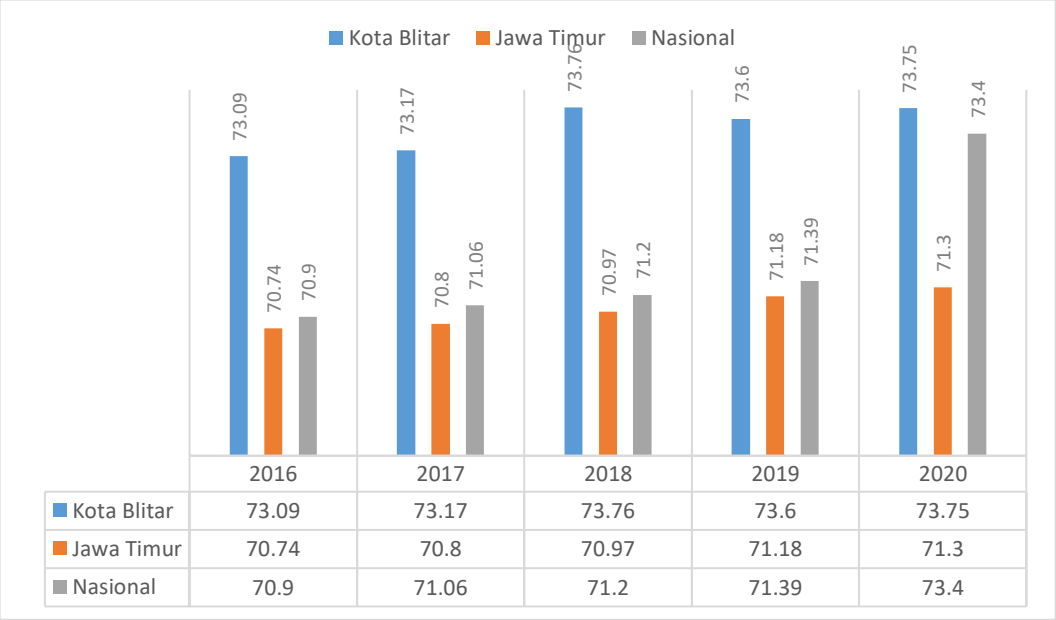
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,09	73,17	73,36	73,60	73,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

Angka harapan hidup di Kota Blitar dari 2016-2020 mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan angka harapan hidup sebesar 73,09 tahun pada tahun 2016 meningkat pada Tahun 2020 menjadi 73,75artinya rata-rata perkiraan umur yang diperkirakan ditempuh masyarakat Kota Blitar sejak lahir adalah 73–74 tahun. Angka harapan hidup di Kota Blitar relatif lebih tinggi dari AHH Jawa Timur dan Nasional. Meningkatnya

AHH mengindikasikan meningkatnya pembangunan kesehatan di Kota Blitar.

Grafik 2. 14.Angka Harapan Hidup Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2016–2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Blitar	73.09	73.17	73.76	73.6	73.75
Jawa Timur	70.74	70.8	70.97	71.18	71.3
Nasional	70.9	71.06	71.2	71.39	73.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Kenaikan angka AHH Kota Blitar didukung dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain program pelayanan pelayanan imunisasi, pelayanan Kesehatan ibu dan anak, pelayanan penanganan penyakit tidak menular, pelayanan penanggulangan penyakit menular, peningkatan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) dan lain-lain.

2.2.12. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Beberapa hal yang dapat menunjukan masalah Gizi masyarakat di Kota Blitar antara lain adalah Persentase balita gizi buruk, yakni persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi yang sangat kurus, disertai atau tidak edema pada punggung kaki, berat badan menurut panjang badan kurang dari -3 standar deviasi dan

atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Blitar pada tahun 2016 sebesar 0,07% dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 0,07%. Selanjutnya meskipun mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 0,60%, namun mengalami penurunan kembali hingga menjadi 0,07% di tahun 2019. Pada tahun 2020 prevalensi gizi buruk mengalami kenaikan menjadi 0,08%. Upaya yang terus dilakukan untuk menurunkan angka gizi buruk antara lain melalui program Pos Pembinaan Terpadu (posbindu) yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan diantaranya pelayanan ibu nifas/ibu menyusui, pelayanan bayi dan anak balita, peningkatan pelayanan gizi dan pencegahan dan penanggulangan diare. Di dalam pelayanan gizi terdapat Pemantauan Status Gizi (PSG), pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK), pemberian PMT penyuluhan. Perkembangan prevalensi balita gizi buruk di Kota Blitar tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17. Balita Gizi Buruk di Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,07	0,60	0,11	0,07	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

APS kelompok usia 7-12 tahun Kota Blitar tahun 2018 sebesar 100 yang berarti bahwa 100 persen penduduk Kota Blitar usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun Kota Blitar tahun 2019 sebesar 97,47 lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun, yang artinya bahwa penduduk Kota Blitar usia 13-15 tahun 97,47 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kota Blitar tahun 2019 sebesar 90,03%. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 9,97% penduduk Kota Blitar usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SMA. APS tahun 2020 menunjukkan penurunan pada semua kelompok usia. Hal ini diantaranya dipacu oleh motivasi siswa untuk belajar yang kurang dan belum optimalnya

pendampingan sekaligus pengawasan orang tua/wali untuk mendorong anaknya aktif sekolah.

Jika ditinjau dari data lima tahun terakhir, APS kelompok usia 7-12 Tahun masih stabil di angka 100%, sedangkan untuk APS kelompok usia 13-15 dan APS kelompok usia 16-18 data bersifat fluktuatif.

Tabel 2. 18. Angka Partisipasi Sekolah Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	7-12 Tahun (persen)	100	100	100	100	99,79
2	13-15 Tahun (persen)	96,87	97,52	97,05	97.47	97,22
3	16-18 Tahun (persen)	89,46	82,11	89,20	90.03	89,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Berdasarkan data, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD di Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 APK untuk jenjang SD sebesar 104,36. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 102,79 dan 98,50. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 117,02 dan data terakhir tahun 2020 APK SD sebesar 113,31.

Samahalnya dengan APK SD, untuk jenjang SMP juga pada tahun yang sama mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat di tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 sebesar 87,57%, dan mengalami peningkatan sehingga nilainya menjadi 153,41 di tahun 2019. Data tahun 2020 APK jenjang SMP sebesar 149,28, terjadi sedikit penurunan dari tahun 2019.

Hal tersebut juga terjadi untuk jenjang SMA, APK pada tahun 2016 sebesar 124,22 mengalami naik turun sampai dengan tahun

2020. Data terakhir APK Kota Blitar jenjang SMA tahun 2020 adalah sebesar 105,91%.

Melihat keseluruhan data APK pada tahun 2020 di segala kelompok usia menunjukkan penurunan tetapi tetap di atas 100%. Hal ini dapat didorong dengan pendampingan aktif pada pembelajaran dan motivasi siswa. Berikut disajikan data APK Kota Blitar Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 19. Angka Partisipasi Kasar Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	7-12 Tahun (persen)	104,36	102,79	98,50	117,02	113,31
2	13-15 Tahun (persen)	87,57	89,53	98,81	153,41	149,28
3	16-18 Tahun (persen)	124,22	106,08	106,86	110,14	105,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

c. APM SD/MI/Paket A

Untuk APM jenjang SD/MI/Paket A adalah perbandingan jumlah siswa yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A dengan jumlah seluruh penduduk yang berada pada jenjang umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 APM SD/MI sebesar 96,28 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020yaitu menjadi 98,97%.

Tabel 2. 20. APM SD/MI/Paket A Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**APM SD/MI/Paket A (%)**	**96,28**	**93,64**	**97,39**	**98,88**	**98,97**
1.1	Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (siswa)	13.768	13.256	13.717	15.336	15.345
1.2	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun (siswa)	14.300	14.155	13.396	15.509	15.505

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021

Untuk jumlah siswa usia 7–12 pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A yang terdaftar bersekolah di Kota Blitar pada Tahun 2019 sebanyak 15.336 siswa. Angka ini meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 13.717 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7–12 tahun 2019 sebanyak 15.509, maka diperoleh angka APM SD/MI/Paket A sebesar 98,88%. Pada tahun 2020 ada kenaikan angka APM SD/MI/Paket A menjadi 98,97%. Di antara pendorong naiknya APM adalah program pendidikan gratis dan akses menuju sekolah yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah Kota Blitar berupa sepeda dan angkutan sekolah. Sementara faktor yang menjadi penghambat adalah adanya sebagian kecil penduduk usia 7-12 yang siswa atau orang tuanya kurang termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan.

d. APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B

Untuk APM jenjang SMP/MTs/SMPLB/ Paket B adalah perbandingan jumlah siswa yang berusia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs/SMPLB/ Paket B dengan jumlah seluruh penduduk yang berada pada jenjang umur tersebut. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 nilai APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B sebesar 90,31%, tahun 2019 mencapai 97,28%. Pada tahun 2020 nilai APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B turun menjadi 95,55%.

Tabel 2. 21. APM SMP/MTsN/SMPLB/Paket B Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)**	**92,33**	**94,59**	**96,67**	**97,28**	**95,55**
1.1	Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B (siswa)	6.719	6.697	6.565	7.360	7.264

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.2	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun (siswa)	7.277	7.080	6.791	7.566	7.602

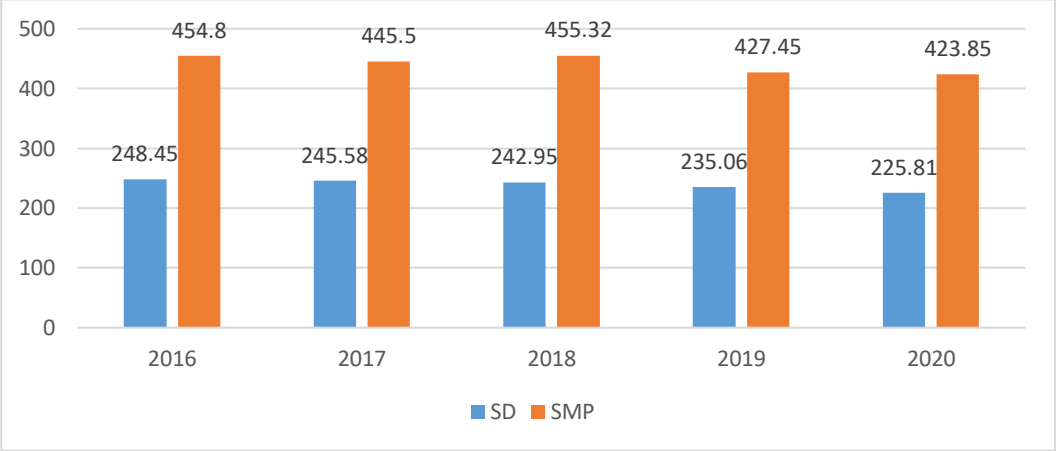
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021

Jumlah siswa usia 13–15 pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B yang terdaftar bersekolah di Kota Blitar pada Tahun 2019 sebanyak 7.360 siswa. Ini berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.565 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sebanyak 7.566 jiwa, didapatkan angka APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 97,28%. Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, Pemerintah Kota Blitar juga memberikan fasilitas pendidikan gratis dan angkutan sekolah sehingga menjadi faktor pendorong, sementara faktor kurangnya motivasi sebagian anak dan orang tua juga menjadi faktor penghambat.

e. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio murid/sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan di Kota Blitar semakin menurun. Semakin rendah nilai rasio, maka semakin rendah tingkat kepadatan murid di sekolah. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya. Peningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.

Grafik 2. 15. Grafik Rasio Murid Terhadap Ketersediaan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Blitar 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021

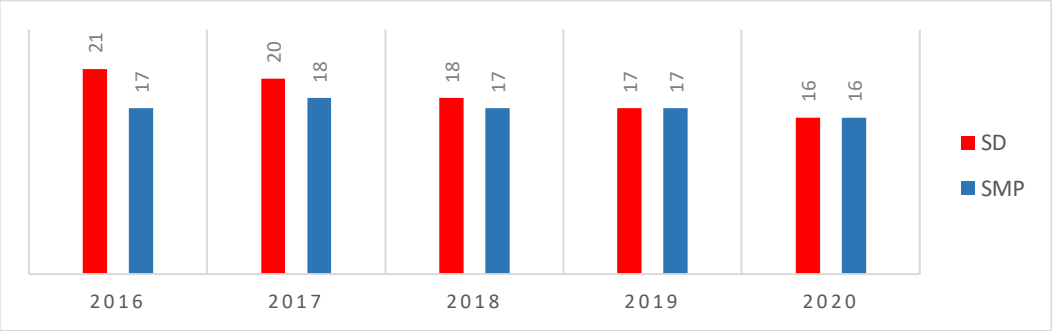
f. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas. Rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Kota Blitar selama 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut tampak jelas pada gambar bahwa secara besaran angka rasio murid/guru pada tahun 2019 turun 1 poin dibanding tahun 2018 terutama rasio murid/guru pada jenjang SD sedangkan jenjang SMP tetap. Rasio murid/guru diartikan sebagai

banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin besar rasio murid/guru maka semakin banyak murid yang dibimbing oleh guru. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Pemerintah Kota Blitar telah melakukan penataan guru dan penerimaan siswa secara terintegrasi sehingga diharapkan terjadi keseimbangan antara guru dan siswa.

Grafik 2. 16. Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021

g. Angka Kelulusan dan Putus Sekolah

Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu 100%. Begitu pula angka kelulusan untuk jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 angkanya sebesar 100%. Faktor pendukung capaian ini diantaranya kerjasama pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam memberikan perhatian kepada bidang pendidikan.

Tabel 2. 22. Angka Kelulusan Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100
Angka Putus Sekolah SD/Mi	0	0	0	0	0
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2021

h. Angka Melanjutkan SD ke SMP

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, angka melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) mengalami tren yang terus meningkat, pada tahun 2016 sebesar 99,87%, terus meningkat signifikan sampai akhir Tahun 2018 menjadi sebesar 135,80%. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019, namun angka melanjutkan SD ke SMP mengalami kenaikan Kembali menjadi 128,99% pada tahun 2020.

Tabel 2. 23. Angka melanjutkan SD ke SMPKota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Angka melanjutkan SD ke SMP (%)**	**99,87**	**104,17**	**135,80**	**110,14**	**128,99**
1.1	Jumlah siswa baru Tk I pada jenjang SMP/MTs (siswa)	2.264	3.000	4.017	2.966	3.853
1.2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya (siswa)	2.267	2.880	2.958	2.693	2.987

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021

i. Angka Melanjutkan SMP ke SMA/K

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, angka melanjutkan pendidikan jenjang SMP mengalami tren yang terus meningkat. Di tahun 2016 sebesar 96,05%, terus meningkat signifikan sampai akhir Tahun 2019 menjadi sebesar 162,59%. Pada tahun 2020 angka melanjutkan SMP ke SMA/K mengalami penurunan menjadi 124,89%.

Tabel 2. 24. Angka melanjutkan SMP ke SMA/Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Angka melanjutkan SMP ke SMA/K (%)**	**96,05**	**116,40**	**162,41**	**162,59**	**124,89**
1.1	Jumlah siswa baru Tk I pada jenjang SMA/SMK/MA (siswa)	2.089	3.940	5.647	6.567	6.482
1.2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya (siswa)	2.175	3.385	3.477	4.039	5.190

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021

j. Angka Rata-Rata UN/USBN SD

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, Angka rata-rata UN/USBN SD menunjukkan peningkatan yaitu dari 7,26 pada tahun 2016 menjadi 7,41 pada tahun 2019. Angka rata - rata UN/USBN pada tahun 2020 mencapai 8,28. Angka ini diperoleh dari rata – rata nilai rapor SD, yang disebabkan tidak terlaksananya ujian nasional selama masa pandemi Covid19.

Tabel 2. 25. Angka Rata-Rata UN/USBN SDKota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Angka rata-rata UN/USBN SD (nilai)**	**7,26**	**7,93**	**7,2**	**7,41**	**8,28**
1.1	Jumlah nilai ujian nasional SD (nilai)	21,78	23,8	28,8	22,23	-
1.2	jumlah mata pelajaran UNAS SD (matpel)	3	3	3	3	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021
**Angka diperoleh dari rata - rata nilai rapor SD*

k. Angka Rata-Rata UN/USBN SMP

Perkembangan jumlah nilai ujian nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan data yang fluktuatif. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Angka rata-rata UN/USBN SMP sebesar 6,2 di tahun 2019, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,4. Sedangkan tahun 2020 ujian nasional tidak dilaksanakan karena pandemi sehingga angka rata – rata UN/USBN SMP diperoleh dari rata – rata nilai rapor SMP.

Tabel 2. 26. Angka Rata-Rata UN/USBN SMP Kota Blitar Tahun 2016-2020

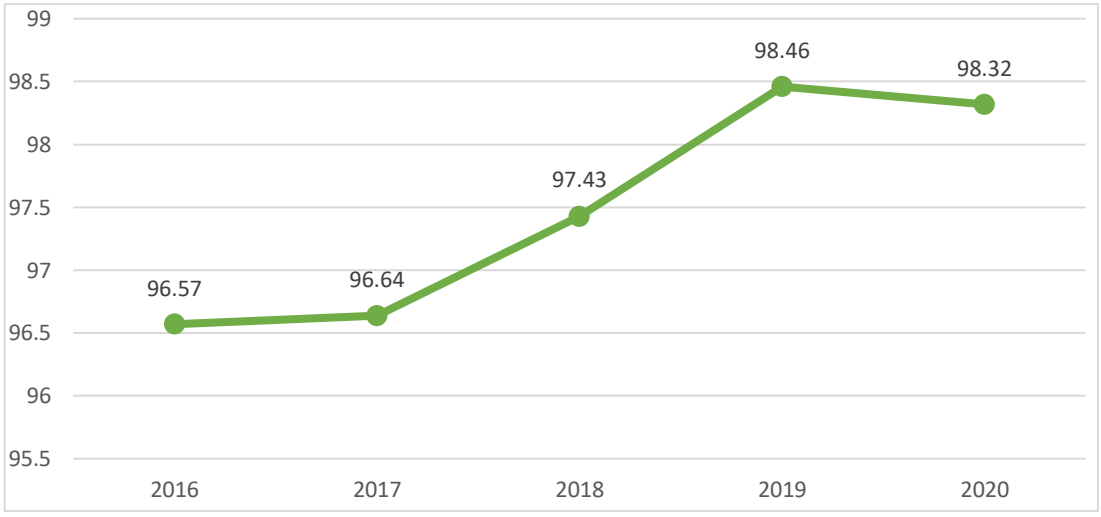
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Angka rata-rata UN/USBN SMP (nilai)**	**6,177**	**6,82**	**6,4**	**6,2**	**8,21**
1.1	Jumlah nilai ujian nasional SMP (nilai)	24,68	27,28	19,2	24,8	-
1.2	jumlah mata pelajaran UNAS SMP (matpel)	4	4	4	4	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2021
**Angka diperoleh dari rata - rata nilai rapor SMP*

l. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV di Kota Blitar pada tahun 2016 sebesar 96,57% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 98,46%. Pada tahun 2020, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV sedikit menurun menjadi 98,32%. Hal ini diantaranya karena guru-guru yang akan memasuki masa purna tugas dan belum berkualifikasi S-1/D-IV. Hal tersebut sesuai dengan gambar berikut ini.

Grafik 2. 17. Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kota Blitar Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2021

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal manusia yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu bangsa. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi.

a. Puskesmas Per Satuan Penduduk

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja puskesmas maksimal adalah satu kecamatan dan untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu (Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidan desa/komunitas (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Jumlah Puskesmas di Kota Blitar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu 3 Puskesmas.

Tabel 2. 27. Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2018-2020

Kecamatan	Puskesmas		
	2018	2019	2020
Sukorejo	1	1	1
Kepanjenkidul	1	1	1
Sananwetan	1	1	1
Kota Blitar	3	3	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2021

b. Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah Rumah Sakit di Kota Blitar pada tahun 2016 berjumlah 4 unit, dan mengalami penambahan menjadi 5unit pada tahun 2019. Selain rumah sakit, di Kota Blitar juga tersedia rumah bersalin sebanyak 1 unit. Dengan fasilitas ini warga Kota Blitar tidak kesulitan dalam mengakses layanan kesehatana

Tabel 2. 28. Fasilitas Kesehatan menurut Jenisnya Tahun 2016-2020

Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit Umum					
a. Rumah Sakit	4	5	5	5	5
b. Tempat Tidur	555	614	606	597	599
Rumah Bersalin					
c. Rumah Sakit Khusus Bersalin	1	1	1	1	1
d. Tempat Tidur	50	44	43	27	44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2021

Dalam hal ketersediaan tenaga medis, Kota Blitar mempunyai jumlah yang cukup memadai yaitu tenaga dokter sejumlah 250 orang, (yang terdiri dari dokter umum 125 orang, dokter gigi 39 orang, dan dokter spesialis 86 orang), tenaga perawat sejumlah 683 orang, bidan sejumlah 156 orang, ahli gizi sejumlah 29 orang, dan paramedis lainnya sejumlah 376 orang.

Keberadaan tenaga kesehatan yang bermutu serta terdistribusi dengan adil adalah untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan. Keberadaan dokter spesialis untuk saat ini cukup penting terutama dalam menangani kasus-kasus kesehatan yang perlu tindakan lebih lanjut.

Tabel 2. 29. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Blitar Tahun 2016-2020

Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter	182	126	109	238	250
a. Umum	101	57	52	125	125
b. Gigi	30	16	18	41	39
c. Spesialis	51	53	39	72	86
Perawat Umum dan Gigi	565	639	647	682	683
Bidan	108	133	142	142	156
Ahli Gizi	24	29	31	29	29
Tenaga Kesehatan Lainnya	190	210	221	302	376
Kota Blitar	**1.069**	**1.137**	**1.150**	**1.393**	**1.494**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan kehamilan, bersalin, dan nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dan lambatnya penurunan AKI ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun segi kualitasnya.

Selama tahun 2020, berdasarkan data laporan pemantauan wilayah setempat ibu dan anak di Kota Blitar, AKI sebesar 189,13 per 100.000 kelahiran hidup atau terjadi kasus sebanyak 4 kematian ibu. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan AKI tahun 2019 sebesar 99,4 (2 kematian ibu) per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 30. Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Angka Kematian Ibu (1/100.000 Kelahiran Hidup)**	**236,18**	**0**	**255,23**	**99,40**	**189,13**
1.1	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (jiwa)	5	0	5	2	4
1.2	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	2.117	2.016	1.959	2.012	2.115

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2021

Faktor pendukung dalam rangka menurunkan angka kematian ibu antara lain adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya, peningkatan pelayanan Kesehatan, keterjangkauan pembiayaan dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta dukungan keluarga terutama suami dalam pemeliharaan Kesehatan ibu dan bayinya.

d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.

Angka kematian bayi Kota Blitar tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kecenderungan meningkat, namun kemudian turun kembali pada tahun 2019 dan 2020. Selama tahun 2020, di Kota

Blitar dilaporkan terjadi 2.115 kelahiran hidup dan tercatat kasus kematian bayi sebesar 25 kasus. Maka AKB Kota Blitar tahun 2020 sebesar 11,82 per-1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 31. Angka Kematian Bayi (AKB)Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Angka Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (AKB)**	**9,92**	**10,91**	**13,78**	**11,93**	**11,82**
1.1	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal (jiwa)	21	22	27	24	25
1.2	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	2117	2016	1.959	2.012	2.115

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2021

Kematian bayi didominasi pada fase neonatal yaitu masa sejak bayi lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran. Jumlah kematian bayi neonatal yang disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah sebanyak 10 kasus, asfiksia 4 kasus, sepsis 3 kasus, kelainan bawaan 3 kasus, dan penyebab lain 2 kasus. Sedangkan kematian post neonatal (29 hari-11 bulan) yang disebabkan pneumonia sebanyak 2 kasus dan lain-lain 1 kasus.

Berdasarkan data, faktor penyebab kematian bayi di Kota Blitar antara lain adalah berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia, sepsis, kelainan bawaan dan lainnya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kesehatan ibu saat hamil yang mempengaruhi kondisi perkembangan janin dalam kandungan seperti kurang memperhatikan asupan gizi, mengonsumsi yang seharusnya tidak dikonsumsi ibu hamil dan lainnya.

e. Angka Kesakitan (Morbiditas)

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan penduduk Kota Blitar yang mempunyai keluhan kesehatan (referensi survey dalam sebulan yang lalu) mencapai 23,31%. Penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 38,34% dan penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 35,75%. Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tersebut terdapat 43,44% penduduk yang keluhan kesehatannya menyebabkan terganggunya aktivitas keseharian. Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas keseharian, terdapat sekitar 25,37% dengan lama rawat inap kurang dari 4 hari dan terdapat 32,38% dengan lama rawat inap 4-6 hari, 38,88% mempunyai lama rawat inap lebih dari seminggu hingga satu bulan sedangkan 3,38% sisanya menjalani rawat inap lebih dari sebulan.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), mengindikasikan keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Mardi Waluyo

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RSUD Mardi Waluyo cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2018. IKM mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 77,97% dan meningkat Kembali pada tahun 2020 menjadi 80,85% atau masuk dalam kriteria baik.

Tabel 2. 32. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Mardi Waluyo (indeks)	77,14 Baik	78,68 Baik	78,82 Baik	77,97 Baik	80,85 Baik

Sumber: RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, 2021

Sesuai tabel data di atas, bahwa terjadi penurunan IKM terhadap pelayanan RSUD Mardi Waluyo, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya profesionalisme beberapa SDM dalam melaksanakan pelayanan terutama dalam hal senyum salam dan sapa (3S), masih lamanya waktu tunggu layanan poli, selain itu perubahan regulasi BPJS yang sering mengalami perubahan juga mempengaruhi kesiapan RSUD Mardi Waluyo dalam memberikan layanan Kesehatan.

g. Cakupan Universal Health Coverage (UHC)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkes 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan mengamanatkan bahwa dalam rangka muwujudkan sistem jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Indonesia membuat layanan jaminan kesehatan masyarakat dengan target kepesertaan minimal 95% atau kemudian disebut *Universal Health Coverage* (UHC). Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengalokasikan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah dengan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di ruang rawat kelas 3.

Capaian UHC Kota Blitar sampai dengan Tahun 2020 adalah 95,27%, artinya telah mencapai kepesertaan minimal. Namun demikian, Beberapa kendala pencapaian UHC di Kota Blitar antara lain adanya pengurangan jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) program JKN Nasional secara bertahap, data kependudukan yang tidak valid yang menyebabkan kesulitan dalam proses pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan bagi pemberi kerja, kurangnya kesadaran masyarakat yang bukan pekerja (BP) untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Lebih lanjut data kepesertaan UHC Kota Blitar tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 33. Cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Cakupan *Universal Health Coverage* / UHC (%)**	**61,43**	**63,74**	**65,28**	**81,64**	**95,27**
1.1	Jumlah Peserta UHC	93.440	98.612	101.875	128.551	150.865
1.2	Jumlah Penduduk	152.097	154.714	156.050	157.465	158.349

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2021

h. Persentase Capaian Indikator SPM RSUD

Persentase indikator SPM cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 realisasinya sebesar 76,60%, namun pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan hingga menjadi 80,55%. Pada tahun 2020 persentase capaian SPM RSUD mengalami penurunan menjadi 79,63%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan kasus kematian di rumah sakit selama pandemi Covid-19.

Tabel 2. 34. Capaian Indikator SPM Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase indikator SPM yang mencapai target (%)	76,60	79,04	79,04	80,55	79,63

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2021

i. Bed Occupancy Rate (BOR)

Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas mutu pelayanan RS dengan memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur. Bila nilai BOR mendekati 100% artinya sudah ideal. Dari data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa BOR telah tercapai sesuai standar BOR nasional, meskipun demikian angka BOR tahun 2020 mencapai 56,60% atau di bawah standar nasional.

Tabel 2. 35. *Bed Occupancy Rate* (BOR) Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bed Occupancy Rate (BOR) Standar Nasional 60-85%	77,14	68,40	71,80	73,81	56,60

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2021

j. Average Length of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) dihitung dari persentase jumlah hari perawatan pasien keluar RS dibandingkan dengan jumlah pasien keluar dari RS (keadaan hidup/mati). ALOS dikatakan telah ideal/terpenuhi jika standar nasional ALOS telah memenuhi standar nasional yaitu 6 – 9 hari. Data lima tahun terakhir menunjukkan nilai ALOS belum mencapai standar nasional walaupun nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan hingga menjadi 4,52 hari pada tahun 2020.

Tabel 2. 36. *Average Length of Stay* (ALOS) Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Average Length of Stay(ALOS) Standar Nasional 6-9 hari	4,38	4,69	5,06	4,66	4,52

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2021

k. Turn Over Internal (TOI)

Turn Over Internal (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati yaitu dari setelah terisi sampai ke saat terisi berikutnya. TOI ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya atau dinilai standar menurut nasional jika nilainya pada kisaran 1-3 hari. Tahun 2020 realisasi nilai TOI 3,45 hari.

Tabel 2. 37. *Turn Over Internal* (TOI) Kota Blitar Tahun 2016- 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Turn Over Internal (TOI) Standar Nasional 1-3 hari	1,36	2,14	1,92	1,63	3,45

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2021

l. Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) atau frekuensi pemakaian tempat tidur yang ada pada rumah sakit pada satuan tertentu dan biasanya dihitung tiap satu periode, merupakan gambaran seberapa banyak frekuensi pemakaian tempat tidur yang ada pada rumah sakit. Pada tahun 2019 BTO mencapai realisasi 58,61 kali. Hal ini belum memenuhi sesuai dengan standar nasional yang idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40–50 kali.

Tabel 2. 38. *Bed Turn Over* (BTO) Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bed Turn Over (BTO) Standar Nasional 40-50 kali	63,85	54,03	53,50	58,61	45,91

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2021

m. Net Death Rate (NDR)

*Net Death Rate (*NDR) adalah angka kematian lebih dari 48 jam setelah di rawat untuk tiap - tiap 1.000 penderita yang keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Standar ideal yang ditetapkan Kementrian Kesehatan yaitu untuk NDR<25 permil. Tahun 2020 capaian NDR sebesar 58,3 permil. Kenaikan angka NDR ini antara lain penyebabnya adalah kurang optimalnya prognosis dan kemampuan SDM dalam pelayanan sesuai standar dan kompetensi kurang memadai. Sebagian besar kasus adalah dari layanan syaraf, bedah syaraf, dalam dan jantung. Data NDR selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 39. *Net Death Rate* (NDR) Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Net Death rate (IDR) Standart Nasional <25 permil	43	47,15	56,16	51,99	58,3

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2021

n. Gross Death Rate (GDR)

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR seyogyanya tidak lebih 45 permil. GDR Kota Blitar tahun 2020 yaitu sebesar 103,06 permil. Nilai GDR Kota Blitar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena sebagai rumah sakit umum daerah merupakan rumah sakit rujukan tingkat lanjut sedangkan kebanyakan pasien yang dirujuk sudah dalam kondisi buruk dan gawat darurat.

Tabel 2. 40. Nilai *Gross Death Rate* (GDR)Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Gross Death Rate (GDR) Standar Nasional <45permil	81	87,31	93,46	93,11	103,06

Sumber : RSUD Mardi Waluyo, 2021

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan guna terwujudnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas melalui pembangunan sarana prasarana dan pemeliharaan secara rutin dan berkala infrastruktur kota. Infrastruktur kota meliputi jalan dan utilitasnya, saluran drainase, jaringan irigasi, Gedung pemerintah, sarana dan prasarana air bersih, dan air limbah.

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Blitar harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RDTR. Indikator terkait dengan infrastruktur kota sebagai berikut:

a. Persentase Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dalam Kondisi Baik

Persentase infrastruktur dalam kondisi baik pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan sampai pada angka 89,96%. Tahun 2019 menurun menjadi 89,86% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 90,46% yaitu naik 0,60 poin dari tahun 2019. Meskipun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, infrastruktur bidang pekerjaan umum masih perlu peningkatan salah satunya dengan pemenuhan regulasi yang berlaku yaitu dengan menyusun regulasi kelas jalan yang saat ini belum dimiliki oleh Kota Blitar.

Tabel 2. 41. Persentase Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam kondisi baik (%)	85,7	89,12	89,96	89,86	90,46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

b. Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 73,55% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 74,551%, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan hingga menjadi sebesar 74,517%. Di tahun 2020, kembali naik menjadi 75,15 Peningkatan ini antara lain disebabkan karena beberapa hal, antara lain telah adanya penigkatan jalan dengan trotoar, dengan bahu jalan, dan gorong – gorong.

Tabel 2. 42. Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan (%)**	**73,55**	**74,069**	**74,551**	**74,517**	**75,15**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	99,83	97,040	97,880	97,240	98,146
1.2	Persentase jalan dengan bahu jalan dalam kondisi baik (%)	48,47	48,488	48,488	48,488	49,676
1.3	Persentase jalan dengan trotoar dalam kondisi baik (%)	26,98	28,993	28,993	29,074	29,378
1.4	Persentase jalan dengan pelengkap jalan (Jembatan) dalam kondisi baik (%)	98,62	99,310	99,315	99,320	99,320
1.5	Persentase jalan dengan pelengkap jalan (gorong-gorong) dalam kondisi baik (%)	92,64	96,512	98,077	98,462	99,231

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

c. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,62% meningkat terus sampai tahun 2018 menjadi 96,02%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94,53%. Penurunan ini disebabkan adanya pembaharuan database jaringan irigasi yang dilakukan pada Tahun 2019 menyebabkan perubahan data jaringan irigasi di wilayah Kota Blitar. Pada Tahun 2020, jaringan irigasi dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan karena mendapatkan penanganan dan peningkatan kualitas dari Dinas PUPR Kota Blitar. Secara panjang total tidak meningkat, tetapi jaringan irigasi yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 2. 43. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)**	**91,62**	**94,40**	**96,03**	**94,53**	**94,80**
1.1	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (m')	145,45	149,87	155,52	160,39	160,84
1.2	Panjang total jaringan irigasi (m')	158,77	158,77	161,96	169,67	169,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

d. Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Sesuai Standar

Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 93,17% meningkat di tahun 2019 menjadi 94,41%. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 1,24%. Di tahun 2020, seiring dengan adanya pandemi covid-19, anggaran fisik untuk pembangunan gedung pemerintah mengalami refocusing dan realokasi anggaran sehingga tidak ada bangunan gedung pemerintah yang baru. Di tahun 2020, jumlah total bangunan gedung pemerintah dan jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar tetap.

Sampai dengan saat ini Kota Blitar belum memiliki payung hukum di tingkat daerah terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Gedung Negara. SLF merupakn sertifikat yang diterbitkan oleh pihak pemerintah untuk bangunan gedung yang sudah selesai dibangun. SLF akan diberikan jika bangunan tersebut sudah dibangun sesuai dengan IMB dan juga persyaratan kelaikan teknis sesuai dengan fungsinya.

Tabel 2. 44. Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Sesuai Standar Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar (%)**	**NA**	**93,17**	**93,79**	**94,41**	**94,41**
1.1	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar (unit)	NA	150	151	152	152
1.2	Jumlah total bangunan gedung pemerintah (unit)	NA	161	161	161	161

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

e. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih

Akses air bersih, terutama untuk keperluan air minum sehari-hari sangat dibutuhkan masyarakat. PersentaseRumah Tangga yang memiliki akses air bersih pada tahun 2020 mencapai 89,37%atau mengalami kenaikan sebesar 6,35% dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 yang hanya mencapai 80,94%. Pada tahun 2018

dilakukan pembaruan dan validasi data jumlah rumah tangga, sehingga menimbulkan selisih data yang cukup banyak.

Tabel 2. 45. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air BersihKota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih (%)**	**80,94**	**86,53**	**87,23**	**87,29**	**89,37**
1.1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih (rumah tangga)	36.490	39.011	28.528	29.556	40.406
1.2	Jumlah rumah tangga (rumah tangga)	45.083	45.083	32.704	33.859	51.926

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

f. Cakupan Pelayanan Air Minum

Berdasarkan data yang tersedia diketahui bahwa Persentase Jaringan air minum yang terbangun pada tahun 2016 sampai dengantahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 Persentase Jaringan Air Minum yang terbangun di Kota Blitar sebesar 50% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 89,29%. Meskipun data capaian Persentase Jaringan air minum tergolong tinggi, namun masih ditemui kendala dalam pemberian pelayanan air bersih, karena belum ada pemetaan yang jelas antara sasaran layanan yang menjadi program pembangunan Dinas PUPR dan PDAM.

Tabel 2. 46. Persentase Jaringan Air Minum yang Terbangun di Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase jaringan air minum yang terbangun (%)**	**50**	**66,67**	**83,33**	**89,29**	**89,29**
1.1	Jumlah jaringan air minum yang terbangun	13	21	23	25	25
1.2	Jumlah kebutuhan jaringan air minum	28	28	28	28	28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

g. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Limbah

Persentaserumah tangga yang memiliki akses air limbah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,86 %. Target 100% di tahun 2020 hampir tercapai. Sedikit kendala terjadi dikarenakan kesiapan lahan untuk lokasi sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum berhasil sepenuhnya. Sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 5.03% dari tahun 2019 yang merupakan hasil kerja sinergi dari lintas pemangku kepentingan. Berikut capaian lima tahun terakhir untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah.

Tabel 2. 47. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Limbah Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah (%)**	**98,22**	**99,02**	**92,98**	**93,83**	**98,86**
1.1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah(rumah tangga)	44.279	44.640	30.408	31.769	51.334
1.2	Jumlah rumah tangga (rumah tangga)	45.083	45.083	32.704	33.859	51.926

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

h. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Berkaitan dengan sanitasi, jumlah rumah yang tidak memiliki jamban 2,51%. Ini berarti sebanyak 97,49% rumah tangga di Kota Blitar pada tahun 2019 telah memiliki sanitasi yang baik. Hal ini tidak lepas dari bantuan pemerintah untuk membangunkan fasilitas tempat buang air besar bagi rumah tangga miskin. Namun pada Tahun 2019 mengalamipenurunan fasilitas tempat buang air besar dari tahun 2018, hal ini disebabkan terjadi penambahan jumlah rumah tangga namun fasilitas tempat buang air besar masih sharing jamban dengan rumah tangga yang lain dalam 1 rumah.

Pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan

peningkatan yaitu 94,09% pada tahun 2016 meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2020 sebesar 96,67%. Peningkatan tersebut ditunjang oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya akses sanitasi layak dan sinergitas program kegiatan lintas sektor salah satunya dengan tercapainya ODF *(Open Defecation Free)* di tiga kecamatan wilayah Kota Blitar.

Tabel 2. 48. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%)	94,09	94,28	94,40	94,82	96,67

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

i. Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik

Persentasesaluran drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 91,93% meningkat terus sampai tahun 2020 menjadi 97,49%. Peningkatan ini didukung dengan adanya pemeliharaan rutin setiap tahun terhadap jaringan drainase di Kota Blitar. Namun masih banyak jaringan drainase di Kota Blitar yang juga masih berfungsi sebagai jaringan pengairan.

Tabel 2. 49. Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)**	**91,93**	**94,83**	**95,47**	**95,98**	**97,49**
1.1	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik (m)	105.492	108.825	215.4502	216.6002	220,0182
1.2	Panjang total saluran drainase (m)	114.756	114.756	225.6808	225.6808	225,6808

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

j. Cakupan Pelayanan Persampahan dan Kapasitas TPA

Jumlah sampah terolah di TPA Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 75,69% dan mengalami kenaikan serta penurunan ditahun berikutnya sehingga nilainya mencapai 76,16% di 2020. Hal ini menjadi hal yang perlu diantisipasi karena Kota Blitar mengalami kendala dalam keterbatasan lahan dalam pembuatan TPA, yang nantinya perlu dipikirkan karena persiapan kapasitas TPA yang ada penuh. Lahan TPA Kota Blitar saat ini seluas kurang lebih 5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kapasitas TPA ideal 411.600 m3.

Tabel 2. 50. Jumlah Sampah Terolah di TPA Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase Sampah Tertangani**	**90,48**	**91,38**	**91,88**	**91,74**	**96,07**
1.1	Volume produksi sampah (ton/hari)	69,56	70,00	70,49	70,94	75,47
1.2	Volume sampah yang ditangani (ton/hari)	62,94	63,97	64,77	65,08	71,40
1.3	Persentase Sampah Terolah di TPA	75,69	85,44	73,46	78,62	76,16
1.4	Volume sampah masuk TPA (ton/hari)	52,65	59,81	51,78	55,77	56,64
1.5	Kapasitas TPA ideal (meter kubik)	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

k. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 90,07% meningkat terus sampai tahun 2019 menjadi 99,22%. Persentase kenaikan terjadi baik pada Persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung maupun Persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan budidaya.Pada tahun 2020 kesesuaian ruang menurun menjadi

95,25%, yaitu berkurangnya kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.Pada Tahun 2020 dilaksanakan evaluasi pola ruang di 2 BWP dan terdapat penambahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Ada beberapa hal yang menyebabkan deviasi antara perencanaan dan pemanfaatan ruang antara lain :

1) Ekonomi,
    a) Keterbatasan ekonomi dan kebutuhan akan tempat tinggal membuat mereka memanfaatkan seluruh lahannya bagi kepentingan konstruksi rumah;
    b) Nilai ekonomi pembangunan perumahan di Kota Blitar sangat tinggi sehingga masyarakat (pengusaha/developer) akan berusaha menjadikan lahan-lahan kosong untuk menjadi perumahan;
    c) Tingkat kesejahteraan petani atau penjualan produksi pertanian tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka sehingga mereka cenderung menjual tanah pertanian mereka untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi;
    d) Kemudahan fasilitas ekonomi di Kota Blitar lebih baik daripada daerah-daerah sekitarnya sehingga menyebabkan banyak pendatang (pedagang) yang memanfaatkan lahan di Kota Blitar bagi kepentingan bisnis mereka;
2) Sosial Budaya
    a) Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat atas pentingnya pengaturan pola ruang;
    b) Cara berpikir masyarakat yang cenderung pragmatis individualis, sehingga masyarakat condong kepada kebutuhan sesaat dan tidak memikirkan dampak masa depannya terhadap perubahan pola ruang

Lebih lanjut, capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 51. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)**	**90,07**	**93,09**	**94,02**	**99,22**	**95,25**
1.1	Persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung (%)	94,38	94,38	94,69	99,22	94,17
1.2	Persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan budidaya (%)	85,75	91,8	93,35	99,22	96,32

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Secara teknis guna untuk mendukung kesesuaian pemanfaatan ruang, Kota Blitar memiliki Sistem Informasi Tata Ruang atau SIMTARU. Sistem ini menyajikan data dan informasi terkini untuk kebutuhan penataan ruang. Hal ini bertujuan agar ke depannya masyarakat akan dapat secara transparan melihat sekaligus terlibat dalam proses pembangunan di Kota Blitar. SIMTARU memuat informasi terkait tata ruang meliputi kebijakan zonasi, RDTR, peta, dan peraturan yang berlaku antara lain Perda dan peraturan dan persyaratan IMB. Meskipun demikian, pemanfaatan SIMTARU sebagai salah satu *tools* pengendali pemanfaatan ruang di masyarakat masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kurang teraksesnya informasi pada sistem ini sebagai referensi dalam pendirian bangunan oleh sebagian besar masyarakat.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diamanatkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Untuk menjalankan amanat tersebut maka urusan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada

penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau dalam mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, melalui penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas sarana prasarana dan utilitas di kawasan permukiman dan perumahan.

a. Cakupan Rumah Layak Huni dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Cakupan rumah layak huni di Kota Blitar pada tahun 2016 sebesar 96,2% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 98,31%. Sedangkan berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di Kota Blitar pada tahun 2016 sebesar 0,83% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 79,42%.

Jika melihat data rasio rumah layak huni, selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan. Rasio rumah layak huni dihitung dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan total penduduk. Semakin besar angka rasio rumah layak huni dapat diartikan semakin tercukupinya rumah yang layak bagi penduduk di suatu wilayah. Data terakhir tahun 2020, rasio rumah layak huni berada pada 0,250 yaitu terdapat sejumlah 39.779 rumah layak huni dari total jumlah penduduk 158.920 jiwa. Rasio 0,250 menunjukkan bahwa terdapat 1 rumah layak huni bagi 4 orang penduduk di Kota Blitar.

Peningkatan penanganan RTLH di Kota Blitar didukung dengan adanya penanganan RTLH dari berbagai sumber penganggaran antara lain dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN serta swadaya masyarakat. Data terkait RLH dan RTLH Kota Blitar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 52. Cakupan Rumah Layak Huni dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Rumah Layak Huni (%)**	**94,9**	**96,2**	**97,1**	**97,7**	**98,31**
1.1	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	30.207	30.623	31.758	33.069	39.779
1.2	Jumlah rumah (unit)	31.832	31.823	32.704	33.859	40.463
2	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani (%)**	**0,83**	**0,92**	**21,17**	**64,5**	**79,42**
2.1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	10	11	243	520	953
2.2	Jumlah data dasar Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang harus ditangani	1.625	1.200	1200	1200	1200
3	**Rasio Rumah Layak Huni (rasio)**	**0,199**	**0,198**	**0,202**	**0,209**	**0,250**
3.1	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	30.207	30.623	31.758	33.069	39.779
3.2	Jumlah penduduk (jiwa)	152.097	154.714	157.148	157.909	158.920

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Tahun 2021

b. Persentase Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik

Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 99,70%. Hal tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 99,25%. Sementara itu untuk persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak pada tahun 2020 mencapai 63,30% atau ada 119 jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari total 188.

Peningkatan persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik ini karena adanya program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang digunakan untuk penataan kawasan permukiman pendukung wisata, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan di kawasan kumuh, pembangunan dan pemeliharaan di kawasan permukiman untuk mencegah kumuh, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Adanya perubahan yang signifikan pada luas kawasan permukiman pada Tahun 2019 yaitu karena adanya pembaruan *(update)* data sehingga luas kawasan

prioritas yang harus ditangani bertambah. Adanya luasan yang belum tertangani antara lain kendalanya adalah penanganan untuk intervensi di daerah strain sungai yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

Tabel 2. 53. Persentase Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik (%)**	**NA**	**99,02**	**99,77**	**99,25**	**99,70**
1.1	Luas kawasan permukiman dalam kondisi baik (ha)	NA	1.223,92	1.233,15	2.695,01	2.707,37
1.2	Luas kawasan permukiman (ha)	NA	1.236	1.236	2.715,45	2.715,45
2	**Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak (%)**	**57,98**	**59,04**	**60,64**	**62,23**	**63,30**
2.1	Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak (ha)	109	111	114	117	119
2.2	Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman (ha)	188	188	188	188	188

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, 2021

c. Persentase *Backlog* Perumahan

Backlog Perumahan adalah salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. Persentase *backlog* perumahan di Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data 2017 sampai 2019. Hal ini sangat wajar seiring terjadinya pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 persentase penurunan *backlog* perumahan sebesar 1,07% meningkat terus dan mencapai 14,79% pada Tahun 2019. Pendukung terjadinya kenaikan capaian persentase penurunan *backlog* perumahan ini adalah peningkatan pelayanan *advice planning* bagi pembangunan perumahan, rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak huni, pembangunan baru rumah swadaya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah, ketersediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), sosialisasi kepada pengembangan perumahan agar terdorong membangun perumahan di Kota Blitar serta sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kredit perumahan rakyat dengan bunga ringan dari berbagai program.

Tabel 2. 54. Persentase *Backlog* Perumahan Kota Blitar Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	**Persentase penurunan backlog perumahan (%)**	**1,07**	**6,69**	**14,79**	**43,99**
1.1	Jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK	46.005	46.005	46.005	51.558
1.2	Jumlah rumah (2016 = 31.750)	31.823	32.704	33.859	31.750

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, 2021

d. Persentase Kawasan Permukiman Rawan Kumuh

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan persentase kawasan permukiman rawan kumuh mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Data pada tahun 2016 menunjukkan 1,1% dan selama perkembangannya menjadi 0,44% di tahun 2020. Pada tahun 2019 dilakukan perubahan keputusan Wali Kota terkait dengan luas kawasan permukiman yang harus ditangani sebagai perwujudan dari penyediaan permukiman yang layak bagi masyarakat Kota Blitar.

Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan luas Kawasan permukiman kumuh karena terjadinya pertambahan penduduk ke kota dengan kondisi ekonomi dan lokasi hunian terbatas. Hal ini mengakibatkan hunian baru pada lahan yang tidak sesuai peruntukan atau tata ruang (strain sungai, strain rel kereta) serta kondisi bangunan yang tidak layak huni sehingga menimbulkan perumahan dan permukiman kumuh. Penurunan kualitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman juga memberikan kontribusi pada bertambahnya Kawasan kumuh sehingga pada saat pendataan atau penyusunan kajian dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan jumlah

Kawasan kumuh di Kota Blitar semakin bertambah. Pendataan tersebut berdasarkan PermenPUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh yang meliputi 7 (tujuh) aspek indikator pengukuran kekumuhan yaitu bangunan Gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Tabel 2. 55. Persentase Kawasan Permukiman Rawan Kumuh Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase kawasan permukiman rawan kumuh (%)**	**1,1**	**0,977**	**0,23**	**0,75**	**0,44**
1.1	Luas kawasan permukiman rawan kumuh (ha)	12,58	12,08	2,85	20,44	11,87
1.2	Luas kawasan permukiman (ha)	1.236,00	1.236,00	1.236,00	2.715,45	2.715,45

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, 2021

e. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Rakyat

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sebesar 69,17% meningkat tahun 2020 menjadi 78,48%. Kebutuhan perumahan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Blitar, dari pemerintah pusat, dan dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta lembaga amal.

Tabel 2. 56. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat (%)**	**NA**	**69,17**	**71,09**	**73,60**	**78,48**
1.1	Jumlah rumah (unit)	NA	31.823	32.704	33.859	40.463
1.2	Jumlah kebutuhan rumah (unit)	NA	46.005	46.005	46.005	51.558

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, 2021

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Demi mewujudkan situasi masyarakat yang kondusif dan menjamin hak warga untuk dapat menjalankan aktivitasnya, perlu diciptakan suasana nyaman dan aman. Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diarahkan pada terwujudnya ketentraman masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah dan penguatan peran perlindungan masyarakat daerah.

a. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda

Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah pelanggaran Perda terus mengalami penurunan. Sementara penanganan terhadap pelanggaran perda terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan lintas sector dalam rangka menjaga ketertiban di Kota Blitar. Pada tahun 2020 sejumlah 414 kasus pelanggaran perda ditangani dari total 448 kasus yang ada, atau sebesar 92,41%. Selengkapnya data tentang pelanggaran perda tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)**	**21,21**	**17,99**	**8,4**	**4,79**	**1,97**
1.1	Jumlah pelanggaran perda	639	524	480	457	448
1.2	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani	380	311	411	390	414

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda Tahun 2020 tercapai 1,79%. Jumlah pelanggaran perda selama tahun 2020 sebanyak 448 pelanggaran, sedangkan pelanggaran yang tertangani mencapai 414. Faktor yang menghambat terhadap capaian persentase penurunan jumlah pelanggaran perda adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap Perda dan Perwali, kurangnya

sosialisasi dan penyuluhan mengenai pelanggaran Peraturan Daerah, dan sanksi yang tertuang di dalam pasal perda belum dapat ditegakkan secara paripurna.

b. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 22,38% meningkat menjadi 40,35% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 0,22%.

Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 hanya tercapai 4,21%. Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2020 sebanyak 1.776 gangguan sedangkan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2019 sebanyak 1.854 gangguan. Pada prakteknya, kondisi masyarakat yang begitu dinamis menjadi Pemerintah Daerah bukan satu – satunya penentu penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Perlu dukungan pemangku kepentingan utamanya dalam meningkatkan kesadaran warga dalam menaati Perda dan Perwali. Tahun 2016 jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum mengalami kenaikan karena adanya penambahan ruang lingkup penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga hal ini berpengaruh terhadap persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2. 58. Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)**	**-33,01**	**22,38**	**40,35**	**0,22**	**4,21**
1.1	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum (kasus)	4.013	3.115	1.858	1.854	1.776
1.2	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (kasus)	2.208	1.943	1.691	1.703	1.654

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2021

c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kota Blitar mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017 rasio sebesar 0,23 dan pada Tahun 2020 rasio 0,85. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya.

Pada Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja mulai melaksanakan kegiatan pelatihan bagi anggota linmas dengan peserta 1 orang perwakilan dari masing-masing RT se Kota Blitar. Kegiatan pembinaan dan pelatihan ini akan dilaksnakan secara intensif kepada anggota linmas dan akan dioptimalkan untuk dapat memenuhi sesuai dengan SPM yaitu tercapai minimal 1 RT didukung dengan 1 linmas.

Tabel 2. 59. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Rasio petugas perlindungan masyarakat di kab/kota (rasio)**	**0,97**	**0,23**	**0,46**	**0,69**	**0,85**
1.1	Jumlah satuan linmas dalam satu kab/kota	622	150	300	450	550
1.2	Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kab/kota	639	649	649	649	649

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2021

d. Persentase Respon Penanggulangan Kebakaran yang Sesuai SOP, SPP, dan SPM

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM dari tahun ke tahun tetap pada angka 100%.

Tabel 2. 60. Persentase Respon Penanggulangan Kebakaran yang Sesuai SOP, SPP, dan SPMKota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**85**
1.1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (kejadian)	7	15	15	24	17
1.2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (kejadian)	7	15	15	24	20
2.	Data kerugian terkait bencana kebakaran	20.120.000.000	627.400.000	329.760.000	764.000.000	2.190.509.983

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2021

Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM tercapai 100%. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2019 sebanyak 24 kejadian. Dari 24 kejadian kebakaran tersebut yang masuk tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) sebesar 7,25 menit. Hal ini didukung antara lain karena luas wilayah Kota Blitar yang cukup terjangkau, akses jalan yang relatif bagus, sarana prasarana penanganan kebakaran yang memadai, selain itu juga karena adanya intesitas sosialisasi kepada masyarakat tentang pengaduan penanganan kebakaran. Namun dari segi kerugian terkait bencana kebakaran masih tergolong tinggi, karena kesigapan masyarakat kurang untuk segera melaporkan kepada UPT Pemadam kebakaran melalui *call center* 113 atau 112. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 85%, atau ada 3 kejadian yang penanganannya melebihi standar waktu yang ditetapkan (*respon time*).

Penanganan kejadian kebakaran dipengaruhi oleh keterjangkauan lokasi kejadian dan persiapan peralatan. Saat ini belum tersedia armada pemadam kebakaran yang dapat menjangkau kejadian kebakaran di gang sempit. Selain itu,perlengkapan pendukung lainnya seperti alat pelindung diri, alat komunikasi masih terbatas. Dari sisi SDM, faktorkurangnya jumlah personil pemadam kebakaran dan pelatihan bagi personil pemadam yang ada menyebabkan kurang optimalnya penanggulangan kebakaran di Kota Blitar. Sampai dengan tahun 2020 tercatat 4 (orang) personil telah memiliki sertifikat pemadam dari total 18 (delapan belas) personil pemadam kebakaran. Berikut disajikan data SDM dan Sarpras Pendukung penanganan kebakaran di Kota Blitar.

Tabel 2. 61. Data SDM dan Sarpras Pendukung Penanganan Kebakaran Kota Blitar Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	**SDM**	**20 orang**	
	Struktural	2 orang	
	Pelaksana	18 orang	4 orang diantaranya bersertifikat
2	**Sarpras pendukung**		
	Armada	5 unit truk	1 unit layak, 2 unit kurang optimal, 2 unit tidak layak
	Peralatan APD		
	- Jaket Tahan API (Fire jacket dan troser)	4 buah	2 baik, 2 rusak berat
	- Jaket Tahan Panas (Fire Jacket)	20 buah	7 baik, 4 rusak sedang, 9 rusak berat
	- Helm petugas Penyelamatan (Rescue helmet)	0	-
	- Helm petugas pemadam Kebakaran (fire safety helmet)	20 buah	16 baik, 4 rusak
	- Kacamata pemadam Kebakaran (fire google)	0	-
	- Masker Pemadam Kebakaran (fire masker)	14 buah	14 baik
	- Tudung Kepala (firehood)	0	-
	- Sarung Tangan pemadam Kebakaran (fire gloves)	16 buah	16 baik
	- Kampak personil (fire axe)	1 buah	1 baik
	- Sepatu Pemadam Kebakaran (fire boot)	18 buah	18 baik
	- Self Contained	5 buah	4 baik, 1 rusak sedang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Breathing Apparatus (SCBA)		
	- Handy Talky (HT)	20 buah	10 baik, 2 rusak sedang, 8 rusak berat
	- Senter Personil	11 buah	6 rusak sedang, 5 rusak berat

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 2021

e. Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kota Blitar

Indikator yang dapat menunjukkan capaian kinerja terkait penanggulangan bencana di Kota Blitar adalah:

1. Persentase kelurahan tangguh bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 17 kelurahan tangguh bencana. Hal ini didukung adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya mitigasi dan adaptasi bencana, karena adanya perkiraan bencana yang tidak dapat diproyeksikan seperti musim kekeringan yang agak panjang pada Tahun 2018 yang lalu di Kota Blitar yang menyebabkan beberapa kelurahan terlapor kekurangan air bersih dan hal ini belum pernah terjadi di Kota Blitar sebelumnya.
2. Persentase dokumen kebencanaan yang disusun, sampai tahun 2020 masih 1 dokumen yang terealisasi. Dengan adanya berbagai ancaman kebencanaan di Indonesia termasuk di Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar perlu memenuhi dokumen terkait mitigasi dan adaptasi kebencanaan sebagai pedoman dalam penanganan kebencanaan baik mitigasi, rehab rekon maupun pasca bencana.Muaranya ketika terjadi bencana kapanpun, sistem penanggulangan bencana dapat langsung berfungsi dengan baik.

Tabel 2. 62. Capaian kinerja Penanggulangan Bencana Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase kelurahan tangguh bencana (%)**	**14,29**	**23,81**	**38,10**	**47,62**	**80,9**
1.1	Jumlah kelurahan tangguh bencana	3	5	8	10	17
1.2	Jumlah kelurahan	21	21	21	21	21

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.3	Jumlah organisasi relawan kebencanaan Kota Blitar	NA	NA	25	25	25
2	**Persentase dokumen kebencanaan yang disusun (%)**	0	0	0	12,5	25
2.1	Jumlah dokumen kebencanaan yang disusun	0	0	0	1	1
2.2	Jumlah dokumen kebencanaan yang harus disusun	8	8	8	8	8

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD Kota Blitar, 2021

Dokumen yang sudah disusun adalah Kajian Resiko Bencana. Sesuai standar penanggulangan bencana, dokumen Penanggulangan Bencana yang minimal disusun oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Kajian Resiko Bencana;
2. Rencana Penanggulangan Bencana (PRB);
3. Rencana Aksi PRB Daerah;
4. Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB);
5. Rencana Kontinjensi per Ancaman;
6. SOP Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
7. Pre-Disaster Recovery Planning (PDRP);
8. Rencana Rehab Rekon Pasca Bencana + R3P.

2.3.1.6. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial diarahkan pada peningkatan pemeratan kesejahteraan sosial masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan sosial. Capaian kinerja urusan sosial selama lima tahun adalah sebagai berikut:

a. Persentase Penurunan PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengukuran persentase penurunan PMKS dilakukan guna mengetahui sejauh mana efektivitas penanganan PMKS dilakukan. Upaya penurunan PMKS dilakukan melalui berbagai program baik Pemerintah Kota Blitar, Provinsi maupun pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dinas Sosial rutin melakukan pendataan maupun verifikasi data PMKS yang ditetapkan setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan perhitungan capaian kinerja. Jumlah PMKS Tahun 2019 sebanyak 11.372 dan tahun 2020 sebanyak 12.176 sehingga terjadi penurunan PMKS sebesar 804 orang. Penurunan ini lebih besar dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Faktor penghambat dalam dalam menurunkan jumlah PMKS adalah karena belum optimalnya validasi data PMKS di Kota Blitar. Kegiatan verifikasi dan validasi perlu dilaksanakan secara rutin sekaligus mempertajam program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2. 63. Persentase Penurunan PMKS Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase penurunan PMKS (%)**	**0.40**	**-1,29**	**5,89**	**3,25**	**-7,07**
2	Jumlah PMKS	12.331	12.490	11.754	11.372	12.176

Sumber: Dinas Sosial, 2021

b. Persentase PMKS Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial PMKS dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Berdasarkan Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial yang menjadi tanggungjawab Bupati/Wali Kota adalah Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti Sosial, yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar; Anak Telantar; Lanjut Usia Telantar; dan Gelandangan dan Pengemis.

Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 12.176 dan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 11.263 jiwa atau 92,50%. Naik dari tahun sebelumnya. Masih adanya sebaran PMKS terlantar utamanya Lansia, mendorong pemerintah untuk berinovasi melalui program "*Home Care Lansia*" dimana pelayanan PMKS utamanya Lansia terlantar dilakukan dari rumah ke rumah dengan mengoptimalkan peran dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) utamanya PSM dan TKSK serta bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait. Di samping itu perlu digalakkan daya dukung seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat serta lembaga dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 64. Persentase PMKS yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial (%)**	**82,29**	**91,35**	**90,03**	**90,23**	**92,50**
1.1	Jumlah PMKS yang sudah dilayani	10.147	11.410	10.582	10.261	11.263
1.2	Jumlah PMKS	12.331	12.490	11.754	11.372	12.176

Sumber: Dinas Sosial, 2021

c. Persentase PSKS yang Dibina dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan baik individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan

kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, terdapat 12 PSKS yaitu:

1. Pekerja Sosial Profesional,
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),
3. Taruna Tanggap bencana (TAGANA),
4. Karang Taruna,
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial,
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),
7. Penyuluh Sosial,
8. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS),
9. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM),
10. Keluarga Pionir,
11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) dan
12. Dunia Usaha.

Seiring dengan program-program kesejahteraan sosial yang terus berkembang muncul nomenklatur-nomenklatur PSKS baru diantaranya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Tahun 2020 berubah nama Satuan Bakti Pekerja Sosial atau disebut Sakti Peksos). Sampai dengan tahun 2020, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat meliputi TKSK, PSM, Sakti Peksos, Pendamping PKH dan Koordinator Daerah.
2. Organisasi sosial meliputi Karang Taruna, Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan WKSBM.

Untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial, pembinaan dan upaya peningkatan kapasitas PSKS terus dilakukan baik melalui Bimbingan Teknis, motivasi maupun penguatan jejaring kerja sama pelaku usaha

kesejahteraan sosial masyarakat. Jumlah PSKS dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mencapai 100%.

Tabel 2. 65. Persentase PSKS yang Dibina dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.1	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	125	125	132	132	133
1.2	Jumlah PSKS	125	125	132	132	133

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari isu ketenagakerjaan. Hal ini terkait bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi atau modal penggerak roda pembangunan. Di samping itu, ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. Masalah ketenagakerjaan merupakan persoalan yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Blitar bervariasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 Tingkat Partisipasi angkatan kerja sebesar 72% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 72,21. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan kembali hingga mencapai angka 69,53 di tahun 2020. Hal tersebut terindikasikan bahwa usia non produktif semakin bertambah, sementara jumlah penduduk yang bekerja semakin berkurang seiring dampak pandemi Covid19 yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja perusahaan dan menurunnya aktivitas perdagangan. Untuk selengkapnya, data TPAK di Kota Blitar selama tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 66. Angkatan Kerja, Penduduk Usia Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Penduduk Usia Kerja (orang)**	107,170	108,033	109,160	110,249	112.822
2	**Angkatan Kerja (orang)**	77,164	77,674	78,820	79,443	78.445
3	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	72	71.9	72.21	72.06	69,53

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2021

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka pengangguran diukur dari tingkat pengangguran terbuka, yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Blitar selama periode tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Bahkan pada Tahun 2020 naik menjadi 6,68%. Dari jumlah penduduk usia kerja di Kota Blitar Tahun 2020 sebesar 112.822 orang, 78.445 merupakan angkatan kerja dan 34.377 orang bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran sebanyak 5.244 orang, dengan 1.296 orang pengangguran karena dampak COVID 19 dan 72,64% dari masyarakat yang bekerja adalah pada sektor jasa (perdagangan hingga jasa lainnya).

Tabel 2. 67. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	5,61	5,5	5,34	5,28	7,1
2	Jawa Timur	4,21	4	3,99	3,92	5,84
3	Kota Blitar	3,39	3,76	4,06	4,64	6,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa TPT Kota Blitar mengalami kenaikan pada tahun 2020, dari hasil FGD hal ini dipengaruhi antara lain adalah karena terbatasnya jumlah lapangan kerja yang diminati, serta angkatan kerja yang cenderung pemilih dalam tersedianya lapangan kerja serta kurangnya pelatihan ketrampilan/kewirausahaan bagi pencari kerja.

c. Pencari Kerja Terdaftar yang Sudah Ditempatkan

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan di Kota Blitar pada tahun 2016 nilainya 74,87%, lalu pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan 71,2%, kembali meningkat pada tahun 2018 yaitu 82,01%. Angka ini terus naik turun yaitu pada tahun 2019 mengalami

penurunan hingga 80,94% dan terakhir pada tahun 2020 naik kembali menjadi 82,98%. Jika melihat data, bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 117 pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dari total 141 pencari kerja. Meskipun persentase penempatan pencari kerja mengalami kenaikan, namun perkembangan jumlah pencari kerja selama tahun 2018 – 2020 ini menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal-hal yang dapat menjadi penghambat dalam penempatan pencari kerja antara lain adalah tingkat Pendidikan yang belum memenuhi sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan lapangan kerja. Hal ini mengakibatkan banyak pencari kerja yang memilih bekerja pada sektor non formal. Perkembangan pencari kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 68. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Di Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)**	**74,87**	**71,20**	**82,01**	**80,94**	**82,98**
1.1	Jumlah Pencari Kerja	195	552	628	383	141
1.2	Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan	146	393	515	310	117

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Blitar, 2021

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Memberdayakan perempuan berarti memberdayakan dan membangkitkan harapan bagi seluruh anggota keluarganya.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Membandingkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu cara

untuk mengetahui apakah terjadi kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG, di sisi lain ketimpangan gender terjadi bila nilai IPG lebih rendah dari IPM. Beberapa indikator yang menyebabkan fluktuasi nilai IPG ini antara lain karena pengaruh semua komponen IPG yakni angka harapan hidup, angka melek aksara, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 2. 69. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar	NA	97,91	97,60	97,80	97,46
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur	90,72	90,76	90,77	90,91	91,07
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021
**NA tidak tersedia data*

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender Kota Blitar mengalami penurunan. Tahun 2017 pada angka 97,91 menurun sampai tahun 2020 menjadi 97,46. Meskipun mengalami penurunan, namun IPG Kota Blitar merupakan yang tertinggi di Jawa Timur dan berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Diantara penyebabnya adalah menurunnya IPM perempuan sehingga harapan lama sekolah dan pendapat perempuan perlu didorong agar lebih meningkat.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama peran aktifnya dalam kehidupan ekonomi dan politik serta kontribusinya dalam aspek ekonomi maupun sosial. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional,

teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.

Tabel 2. 70. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Blitar	66,68	67,51	67,91	67,70	67,66
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Timur	69,06	69,37	69,71	73,04	73,03
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Blitar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2016 capaian IDG pada angka 66,68, kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan tahun 2019 dan 2020 IDG Kota Blitar menunjukkan penurunan hingga mencapai 67,66. Meskipun demikian, kenaikan dan penurunan ini tidak signifikan yaitu sebesar 0,06% sampai dengan 1,24%. Adapun naik turunnya IDG di Kota Blitar dipengaruhi oleh keterwakilan perempuan di parlemen sehingga untuk meningkatkan IDG perlu upaya meningkatkan peran perempuan pada lembaga pengambil keputusan baik politik maupun sektor bisnis.

c. Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu perempuan dalam era modern, perempuan diharapkan mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai akses seperti terhadap pendidikan, pekerjaan dan aktualisasi kegiatan sehari-hari yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan eksternal dapat dicapai bila perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama dalam akses terhadap barang dan sumber daya, dalam berkontribusi, berpartisipasi, dan memanfaatkan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki agar dapat mengembangkan kemampuannya.

Indikator persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan dipengaruhi oleh partisipasi perempuan pada organisasi perempuan maupun lembaga kemasyarakatan. Permasalahan yang seringkali dialami adalah rendahnya tingkat kehadiran perempuan dalam kegiatan organisasi/lembaga perempuan karena tugas rumah tangga. Data persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kota Blitar Tahun pada periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 71. Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan (%)**	NA	**35,77**	**33,02**	**45,90**	**42,17**
1.1	Jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan	NA	13.774	15.317	21.242	21.390
1.2	Jumlah perempuan usia 17 – 60 tahun	NA	38.651	46.384	46.276	50.718

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2021

d. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak selayaknya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan perempuan dan anak khususnya perlindungan terhadap mereka dari tindak kekerasan yang biasanya terjadi di dalam keluarga, diperlukan perhatian khusus dan tindakan yang cepat dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar korban-korban dari tindak kekerasan ini khususnya perempuan dan anak-anak tidak mengalami trauma dan dapat melanjutkan kehidupan mereka seperti sebelumnya. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan menunjukkan penurunan yaitu dari tahun 2016 sebanyak 72 kasus sampai dengan tahun 2020 sebesar 29 kasus dilaporkan.

Tabel 2. 72. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	72	60	59	57	29
1.2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan	72	60	59	57	29

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2021

Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lima tahun berturut–turut dapat diselesaikan secara tuntas dengan realisasi 100%. Upaya untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan harus dilakukan di antaranya dengan menyediakan tenaga profesional yang memadai sehingga pendampingan masalah perempuan dan anak dapat dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2.3.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif.

a. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam bahan makanan atau kelompok bahan makanan yang didasarkan pada sumbangan sosial, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa.

Tabel 2. 73. Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**	**80,4**	**81,28**	**83,13**	**85,00**	**86,20**
1.1	Produksi Daging (Ton)	3.748,70	3.901,78	3.968,24	3.979,50	3.843,88
1.2	Produksi Susu (ribu liter)	500,60	613,14	621,72	625,70	704,43
1.3	Produksi Telur (ton)	2.662,50	3.283,13	3.306,96	3.475,25	3.833,44
1.4	Produktivitas padi (kwt/ha)	80,42	80,53	80,65	81,60	81,99
1.5	Produktivitas jagung (kwt/ha)	67,40	67,53	67,69	67,80	68,09

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

Berdasarkan data di atas, produksi daging dalam kurun waktu 2016–2020 mengalami peningkatan dari 3.748,70 ton pada tahun 2016 menjadi 3.843,88 ton di tahun 2020. Produksi susu mengalami peningkatan dari 500,60 ribu liter di tahun 2016 menjadi 704,43 ribu liter di tahun 2020. Sedangkan produksi telur di tahun 2016 sebanyak 2.662,50 ton menjadi 3.833,44ton di tahun 2020.

Dari hasil pertanian, produktivitas padi di tahun 2016 sebanyak 80,42 kwintal/hektar meningkat menjadi 81,99 kwintal/hektar di tahun 2020. Sementara produktivitas jagung di tahun 2016 sebesar 67,40 kwintal/hektar menjadi 68,09 kwintal/hekar di tahun 2020, yang berarti sangat kecil kenaikannya.

b. Skor PPH Konsumsi

Kota Blitar memiliki ketersediaan energi dan protein pangan yang siap dikonsumsi masyarakat, akan tetapi belum diimbangi dengan pola konsumsi masyarakat yang sesuai harapan. Diharapkan pola konsumsi masyarakat bisa terus ditingkatkan, tidak hanya mengkonsumsi pangan dalam jumlah banyak, tetapi lebih memperhatikan asupan gizi yang menyumbang energi dan protein, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Blitar.

Tabel 2. 74. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Skor PPH Konsumsi**	**81,30**	**82,57**	**83,17**	**84,30**	**85,25**
1.1	Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	1,789	1,867	1,869	1,911,2	2,225
1.2	Persentase Konsumsi Energi (%)	81,30	84,86	84,96	88,9	101,13
1.3	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	100	100	100	100	100
1.4	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)	16,40	17,47	17,18	17,57	17,92

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

Konsumsi ikan sebagai sumber protein yang relatif lebih murah dibanding sumber protein yang lain juga harus ditingkatkan. Untuk itu, telah dilakukan upaya mendorong kesadaran masyarakat antara lain melalui introduksi pengolahan makanan berbahan non beras, lomba pangan olahan, lomba cipta menu non beras, lomba memasak menu berbahan ikan serta berbagai penyuluhan/sosialisasi tentang Gerakan Pangan 3BSA (Beragam, Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman).

Tersedianya bahan pangan pokok yang mencukupi dari segi distribusi, produksi dan ketersediaannya mampu mencukupi kebutuhan energi masyarakat Kota Blitar. Dengan mengoptimalkan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari guna pemenuhan gizi keluarga.

2.3.2.4. Pertanahan

Urusan pertanahan difokuskan pada penertiban aset daerah terutama aset tanah di Pemerintah Kota Blitar. Berdasarkan data persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Blitar Tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Data 2019 menunjukkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan stagnan pada tahun 2020 yaitu sebesar 95,01%.

Tabel 2. 75. Persentase Tanah Aset Bersertifikat Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase tanah aset yang bersertifikat (%)**	**NA**	**91,07**	**94,42**	**95,01**	**95,01**
1.1	Luas Tanah aset (ha)	NA	244,2735	244,2735	244,2735	244,2735
1.2	Luas tanah aset yang sertifikat (ha)	NA	222,459	230,6435	232,083	232,083

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Data tabel di bawah, data aset tanah di Kota Blitar yang sudah bersertifikat sampai dengan Tahun 2019 adalah 95,01%. Ada beberapa kendala dalam melaksanakan sertifikasi tanah antara lain adalah informasi dan ketersediaan kelengkapan tentang status tanah yang dianggap milik Pemerintah Kota Blitar yang belum lengkap.

Tabel 2. 76. Data Aset Tanah Kota Blitar Tahun 2019

No.	Uraian	Luas (Ha)	Luas Tanah Bersertifikat(Ha)	Luas Tanah Belum Bersertifikat
1	HAK PAKAI	221,3	221,3	
	KEPANJENKIDUL	72,79	72,79	
	SANANWETAN	87,46	87,46	
	SUKOREJO	61,05	61,05	
2	HAK - HAK LAIN	10,78	10,78	
	HAK GIRIK	12,19		12,19
	JUMLAH	**244,27**	**232,08**	**12,19**
3	Persentase tanah yang bersertifikat/belum bersertifikat (%)		**95,01**	**4,99**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan daya dukung SDA, kemudahan akses terhadap layanan sanitasi, air limbah dan sampah melalui upaya penanganan emisi gas rumah kaca, pemantauan kualitas lingkungan hidup (air, udara), pengendalian pencemaran serta pengendalian kerusakan lingkungan. Capaian kinerja pada urusan lingkungan hidup selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 77. Capaian Urusan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Indeks Kualitas Lahan**	**41,13**	**51,03**	**54,14**	**54,23**	**54,23**
2	**Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)**	**208.262**	**265.681**	**262.044**	**367,923**	**380.317**
3	**Persentase mata air yang berfungsi (%)**	**96**	**96**	**98**	**98**	**98**
3.1	Jumlah sumber mata air yang berfungsi	48	48	50	50	50
3.2	Jumlah sumber mata air	51	51	51	51	51
4	**Predikat pengelolaan lingkungan**	**Adipura Buana**	**Adipura**	**Adipura**	**Adipura**	**NA**
5	**Indeks kualitas air**	**45**	**50**	**54,67**	**55,33**	**56,32**
6	**Indeks kualitas udara**	**99,00**	**84,80**	**84,81**	**82,77**	**82,63**
7	**Persentase rumah tangga terlayani IPAL komunal (%)**	**5,48**	**5,77**	**6,15**	**6,10**	**6,59**
7.1	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL komunal (KK)	2.587	2.797	3.063	3.098	3.348
7.2	Jumlah rumah tangga (KK)	47.166	48.410	49.751	50.764	50.764
8	**Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (%)**	**90,48**	**91,38**	**91.88**	**91,74**	**96,07**
8.1	Volume sampah yang ditangani (ton/hr)	62,94	63,97	64,77	65,08	71,40
8.2	Volume produksi sampah (ton/hr)	69,56	70,00	70,49	70,94	75,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

**NA Tahun 2020 tidak diselenggarakan penilaian Adipura*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kondisi lingkungan hidup di Kota Blitar sebagai berikut.

1. Indeks kualitas lahan dengan realisasi sebesar 54,23. Capaian indeks kualitas lahan dua tahun terakhir menunjukan angka yang

tetap dengan faktor penunjang antara lain dipengaruhi oleh program pemerintah yang semakin fokus pada pembangunan taman kota.

2. Indikator nilai emisi gas rumah kaca terealisasi pada Tahun 2020 sebesar 380.317mengalami kenaikan dari 367.923 pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya peningkatan pemakaian energi seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di Kota Blitar.

3. Realisasi capaian persentase mata air yang berfungsi sebesar 98%. Hal tersebut dapat tercapai salah satunya merupakan hasil dukungan dari kegiatan konservasi mata air yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.

4. Predikat pengelolaan lingkungan di Kota Blitar mencapai Adipura, dan terkait target Adipura Buana bahwa sesuai dengan kententuan dari KLHK konsep penghargaan Adipura Buana untuk tahun 2019 dihapuskan. Pencapaian ini antara lain dengan adanya dukungan masyarakat Kota Blitar yang semakin meningkat pemahamannya terhadap tata Kelola kebersihan lingkungan.

5. Indeks kualitas air Kota Blitar tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 indeks kualitas air mencapai 56,32. Hal ini merupakan hasil dukungan dari program pembinaan IPAL Komunal, limbah Industri Rumah Tangga dan Program Kali Bersih atau disebut dengan Prokasih. Namun yang masih perlu diwaspadai adalah terkait pembuangan limbah industri yang tanpa melalui proses pengelolaan.

6. Indeks kualitas udara Tahun 2020 mencapai angka 82,63. Angka ini sedikit menurun capaiannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (82,77). Melihat data tahun 2016 – 2020, indeks

kualitas udara Kota Blitar mengalami tren naik turun. Dua tahun terakhir (2019 dan 2020) menunjukkan data yang terus menurun. Adapun penurunan yang terjadiantara lain disebabkan oleh semakin meningkatkan polutan dari CO2 yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Ada perubahan metode perhitungan menjadi metode *passive sampler* pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2018 – 2020. Meskipun mengalami penurunan, namun nilai hasil pengujian laboratorium kualitas udara di Kota Blitar masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019.

7. Persentase rumah tangga terlayani IPAL Komunal Tahun selama tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Data terakhir pada tahun 2020 terealisasi sebesar 6,59, naik dari data tahun sebelumnya (6,10). Hal ini didukung antara lain dengan peningkatan sosialisasi tentang manfaat penggunaan IPAL komunal, penguatan kelembagaan agar masyarakat konsisten dalam pemeliharaan IPAL dan lainnya.

8. Persentase capaian layanan persampahan perkotaan mengalami peningkatan sebesar cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 91,74% pada tahun 2019 menjadi 96,07% pada tahun 2020. Hal yang perlu diperhatikan adalah Kota Blitar dengan wilayahnya yang terbatas mengalami kendala dalam penyediaan lahan guna pembangunan TPA batu yang seiring waktu TPA yang ada akan mengalami kapasitas penuh sehingga tidak dapat digunakan lagi. Pengoptimalan pengurangan sampah dari sumbernya, perlu digalakkan guna mengurangi timbulan sampah dikirim di TPA .

Sementara itu terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Blitar, sampai dengan Tahun 2020 luasan RTH adalah sebesar 1.126,98 ha atau setara dengan 11,27 km2 atau 34,59% dari total luas wilayah

Kota Blitar dengan rincian RTH Publik sebesar 517,98 Ha dan RTH Privat sebesar 609,52 Ha.

Tabel 2. 78. Jenis dan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Blitar Tahun 2020

No	Jenis Aset RTH	Luas (ha) Tahun 2020
	RTH Publik	
A	**Jalur Hijau Jalan**	
1	Koridor Jalan	6,5976
2	Taman Perempatan Bok Ireng	0,0008
3	Taman timur jembatan sangut	0,0065
4	Taman selatan es mini	0,0039
5	Taman perempatan plosokerep	0,0133
6	Taman pulau, timur stadion	0,0013
7	Taman tugu wahana	0,0023
8	Taman patung Bung Karno	0,0114
9	Taman Perempatan Depan PSBR Mardi Utomo	0,0039
10	Taman Bundaran Jl. Tanjung	0,0078
11	Taman patung koi sangut	0,0163
12	Taman timur SPBU kebon rojo	0,0389
13	Taman pintu masuk Jl. S. Supriyadi	0,0022
14	Taman selatan LP	0,0179
15	Taman barat pos polisi pleret	0,0083
16	Pulau Jalan Merdeka	0,0092
17	Pulau Jalan Ir.Soekarno	0,0355
	Total	**6,7771**
B	**Taman dan Hutan Kota**	
1	Taman Aloon – aloon	2,02
2	Taman Green Park / Taman Jaten	0,47
3	Taman Sentul	0,67
4	Hutan kota kebon rojo	1,21
5	Agrowisata blimbing	4,73
6	Hutan kota Tanjung sari	0,53
7	Hutan kota kel. Gedog	1,11
8	Hutan Kota SMAN 1 blitar	0,35
9	Taman Pakunden	0,12
10	Taman Rembang	0,06
11	Taman Bendo	0,07
12	Taman Kehati Tanjungsari	0,99
13	Outbond Gedog	1,56
14	taman di bawah jembatan merah putih	0,07
15	Taman pecut	0,32
	Total	**14,28**
C	**Makam dan Lapangan**	

No	Jenis Aset RTH	Luas (ha) Tahun 2020
1	Sebaran Lapangan Kota Blitar	20,0885
2	Stadion Supryadi	1,5358
3	Sebaran Makam Kota Blitar	22,0737
4	Kompleks Makam Bung Karno	0,1279
5	TMP Supriyadi	0,2614
	Total	**44,0873**
D	**Taman Lingkungan**	
1	Taman Istana Gebang	0,6994
2	Taman IPLT	0,0335
3	PIPPP	0,0716
4	Taman pojok stadion 3 unit	0,0138
5	Kawasan Monumen PETA	0,0354
6	Halaman Parkir PIP	0,0169
7	Halaman Perpustakaan Bung Karno	0,2209
8	Kawasan Waterpark Sumber Udel	0,2204
9	Terminal	0,3352
10	Terminal Cargo	0,048
11	RTH Batalyon Infanteri 511	33,4552
12	Taman Pramuka Kwarcab	0,3708
13	Kebun Bibit Dinas Pertanian	0,765
14	Taman Sekolah	4,7358
	Total	**41,0219**
E	**Fungsi Tertentu**	
1	Taman lintasan KA di Jalan tanjung	0,0131
2	Taman bis beton timur lintasan KA Jl. Tanjung	0,0033
3	Kaw. Konservasi di TPA	0,3827
4	Konservasi sumur PDAM	0,032
5	Sempadan Sungai	145,1621
6	Sempadan Mata Air	127,9363
7	Sempadan Kereta Api	8,2869
8	Sempadan SUTT	32,5437
	Total	**314,3601**
F	**Lahan Pertanian**	
1	Tanah Bengkok	97,5456
	Total	**97,5456**
	Total RTH PUBLIK	**518,07**
	RTH privat	**609,52**
	Total keseluruhan	**1.127,59**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Selain analisis capaian indikator kinerja pembangunan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, pada dokumen

RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 juga dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional. Adapun analisis KLHS Kota Blitar diuraikan sebagai berikut:

a. Kondisi Lingkungan Hidup dalam KLHS

a.1. Enam Muatan KLHS Dan Jasa Ekosistem Penting

Kondisi lingkungan hidup Kota Blitar dapat dilihat dari kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penentuan daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kaitannya dengan KLHS, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Jasa ekosistem merupakan alat analisis kajian lingkungan hidup strategis dalam menyusun dokumen daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). Jasa ekosistem yang digunakan dalam dokumen ini berjumlah 8, sesuai dengan karakteristik Kota Blitar dan mewakili enam muatan KLHS sesuai dengan PP 46 tahun 2016.

Tabel 2. 79. Jasa Ekosistem Berdasarkan Enam Muatan KLHS

No	Enam Muatan KLHS	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kota Blitar
1	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan	Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir
		Jasa Pengaturan Kualitas udara
2	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup	Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana
3	Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem	Jasa Penyedia bahan pangan
		Jasa Penyedia Air Bersih
		Jasa Budaya Untuk Tempat Tinggal
4	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik
		Jasa Pendukung Produksi Primer
5	Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	Jasa Pengaturan Iklim
6	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	Jasa Pendukung Biodiversitas

Sumber : Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD Blitar, 2020

Tabel 2. 80. Distribusi Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Blitar

No	Enam Muatan KLHS	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kota Blitar	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
			Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan	Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	73.20	2.16	757.72	22.32	7.90	0.23	1,352.21	39.83	1,203.84	35.46
		Jasa Pengaturan Kualitas udara	346.40	10.20	400.35	11.79	236.04	6.95	1,041.95	30.69	1,370.14	40.36
2	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup	Jasa Pencegahan dan Perlindungan Bencana	72.67	2.14	688.50	20.28	77.66	2.29	1,355.69	39.93	1,200.36	35.36
3	Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem	Jasa Penyedia bahan pangan	793.55	23.37	69.76	2.05	1,357.67	39.99	1,157.14	34.08	16.76	0.49
		Jasa Penyedia Air Bersih	122.52	3.61	73.04	2.15	2,514.48	74.07	669.11	19.71	15.73	0.46
		Jasa Budaya Untuk Tempat Tinggal	255.87	7.54	390.77	11.51	1,285.25	37.86	950.56	28.00	512.43	15.09
4	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jasa Penyedia Sumber Daya Genetik	14.44	0.43	816.48	24.05	41.07	1.21	2,202.84	64.89	320.05	9.43
		Jasa Pendukung Produksi Primer	836.68	24.65	11.10	0.33	236.04	6.95	921.10	27.13	1,389.95	40.94
5	Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	Jasa Pengaturan Iklim	14.44	0.43	829.85	24.44	16.55	0.49	1,196.92	35.26	1,337.12	39.39
6	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	Jasa Pendukung Biodiversitas	836.39	24.64	1.04	0.03	262.94	7.75	904.56	26.64	1,389.95	40.94

Sumber : DDDTLH Kota Blitar

Jasa ekosistem penting dapat digunakan untuk mengetahui potensi daya dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Nilai ekosistem penting dapat diketahui melalui rata-rata koefisien daya dukung atau daya tampung. Tingkat kepentingan daya dukung pada jasa ekosistem diperoleh melalui rata-rata seluruh jasa ekosistem yang dikategorikan sebagai daya dukung. Jasa ekosistem yang dikategorikan sebagai daya dukung adalah seluruh jasa penyediaan, jasa budaya, dan jasa pendukung.

Tingkat kepentingan daya dukung pada jasa ekosistem disajikan dalam bentuk klasifikasi prioritas I hingga prioritas V. Kategori penting I atau Prioritas I dapat diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi daya dukung wilayah yang sangat besar untuk seluruh kelompok jasa ekosistem yaitu jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan. Wilayah pada kategori Prioritas I memiiki prioritas pertama dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan. Kategori penting II dapat diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi daya dukung wilayah terbesar kedua setelah Prioritas I. Sebaliknya Prioritas V memiliki kemampuan daya dukung wilayah yang rendah untuk seluruh kelompok jasa ekosistem yaitu jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan.

Tabel 2. 81. Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penting Kota Blitar

Kecamatan	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Untuk Ekosistem Penting Kota Blitar					
	Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III	Prioritas IV	Prioritas V	Total
Kepanjenkidul	773.71	6.18	11.11	170.51	93.42	1,050.00
Sukorejo	747.05	2.26	2.64	142.14	103.49	993.00
Sananwetan	1023.52	7.68	10.05	209.99	91.15	1,215.00
Kota Blitar	**2544.28**	**16.11**	**23.79**	**522.64**	**288.06**	**3,258.00**

Sumber : DDDTLH Kota Blitar

a.2. Status Daya Dukung Pangan dan Air Kota Blitar

Hasil perhitungan nilai daya dukung lingkungan hidup bahan pangan Kota Blitar adalah 38.6. Nilai ini menandakan Kota Blitar berada jauh di atas ambang batas sehingga dapat dikatakan surplus bahan pangan (beras). Jumlah penduduk Kota Blitar pada Tahun 2019 adalah 157.910 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kota Blitar mencapai lebih dari 25 juta kg/tahun, dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) yang luas, Kota Blitar memiliki ketersediaan pangan beras mencapai lebih dari 90.000 ton/tahun. Kecamatan yang memiliki status surplus terbesar adalah Kecamatan Kepanjenkidul (74,8).

Tabel 2. 82. Perbandingan Luas Lahan dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kota Blitar

Kecamatan	Luas (Ha)	Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Th)	Ketersdiaan Bahan Pangan (Kg/Th)	Status
Kepanjenkidul	1,050.00	7,711,173	576,611,669	74.8
Sukorejo	993.00	8,377,663	372,345,387	44.4
Sananwetan	1,215.00	9,638,372	44,633,183	4.6
Kota Blitar	3,258.00	25,727,208	993,590,239	38.6

Sumber : DDDTLH Kota Blitar

Daya dukung air diperhitungkan berdasarkan aspek ketersediaan air dan kebutuhan air. Daya dukung air tersebut dinilai surplus ketika ketersediaan air mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sementara itu, kondisi daya dukung air defisit menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Perhitungan daya dukung air tersebut penting dilakukan untuk rencana tata ruang maupun evaluasi dalam pemanfaatan ruang untuk menjamin penyediaan air secara berkelanjutan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketersediaan air mencapai 179.718.960 m3/tahun. Ketersediaan ditambah dengan potensi debit 26 mata air yang ada di Kota Blitar yang mencapai 235,95 liter/detik. Debit tersebut jika dikonversi dalam setahun maka memiliki potensi air mencapai 7.440.919,2 m3/tahun. Sehingga total potensi ketersediaan, baik permukaan dan mata air di Kota Blitar mencapai 187.159.879,82 m3/tahun. Kebutuhan air Kota Blitar dibagi dalam empat aspek yaitu

domestik, non domestik, pertanian dan peternakan. Pemanfaatan untuk domestik paling mendominasi, dikarenakan jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun 2018 mencapai 157.910 jiwa. Total kebutuhan air dari semua sektor adalah 8.104.507,9m3/tahun.

Tabel 2. 83. Kebutuhan Air Total di Kota Blitar

Kecamatan	Kebutuhan Air Kota Blitar Tahun 2019 (m^3/tahun)				
	Domestik	Non Domestik	Pertanian	Peternakan	Total
Kepanjen Kidul	1.657.100,0	497.130,0	143.856,0	58.652,9	2.356.738,9
Sukorejo	1.966.620,0	589.986,0	138.672,0	66.263,9	2.761.541,9
Sananwetan	2.139.995,0	641.998,5	177.552,0	26.681,5	2.986.227,0
Kota Blitar	5.763.715,0	1.729.114,5	460.080,0	151.598,4	8.104.507,9

Sumber : D3TLH Kota Blitar, 2020

Nilai Daya Dukung Air di Kota Blitar Tahun 2020 berdasarkan perhitungan termasuk untuk pemenuhan Kota Blitar adalah 23,09 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kelompok daya dukung air bersyarat atau sedang. Jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan maka ketersediaan air Kota Blitar surplus sebesar 179.055.372m3/tahun.

b. Pencapaian TPB Kota Blitar

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan TPB/SDGs yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan indikator SDGs secara global tersebut, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU. Berdasarkan kewenangan terhadap indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator, pemerintah provinsi 235 indikator, pemerintah kabupaten 220 indikator, dan pemerintah kota memiliki wewenang 222 indikator.

Kondisi pencapaian TPB menyajikan penilaian dan analisis capaian indikator TPB di Kota Blitar dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC);
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TTT);
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA); dan
6. Indikator TPB tidak sesuai dengan kewenangan daerah (TKD).

Pengkategorian di atas bertujuan untuk memetakan isu strategis pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional.

Tabel 2. 84. Pencapaian TPB Berdasarkan Pengelompokan Kota Blitar terhadap Target Nasional

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	Dilaksanakan Belum Target (SB)	Tidak Ada Target tetapi Tercapai (TTC)	Tidak Ada Target Belum Tercapai (TTT)	Tidak ada data (NA)	Tidak sesuai kewenangan daerah (TKD)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	5	3	9	0	8	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	2	1	4	1	3	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	13	1	9	4	7	0
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	5	2	3	0	3	0
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	6	1	1	2	4	0
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	1	3	3	0	9	2
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	0	0	0	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	1	2	3	3	10	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	4	3	0	0	1	4	4
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	11	2	0	1	0	3	0
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	2	1	6	0	8	3
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	0	0	1	0	4	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0	1	0	1	0

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	Dilaksanakan Belum Target (SB)	Tidak Ada Target tetapi Tercapai (TTC)	Tidak Ada Target Belum Tercapai (TTT)	Tidak ada data (NA)	Tidak sesuai kewenangan daerah (TKD)
14	Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4	0	0	3	0	1	0
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	0	0	4	4	13	0
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16	1	1	4	2	7	0
JUMLAH		222	42	15	53	17	87	11
Persentase			19%	7%	24%	7%	39%	5%

Sumber: Analisis Tim Penyusun KLHS, 2020

Dari 222 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kota Blitar, Indikator TPB yang telah dilaksanakan sebanyak 42 indikator (19%) sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017. Terdapat 15 indikator (7%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan walaupun menjadi target daerah. Sebanyak 67 indikator terdapat data dari Perangkat Daerah namun hanya digunakan untuk pertimbangan ketercapaian karena tidak ada target daerah dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, yaitu 53 indikator (24%) telah dianggap tercapai dan 17 indikator (7%) dianggap belum tercapai. Sebanyak 11 indikator (5%) tidak sesuai kewenangan Kota Blitar dan 84 indikator (38%) tidak ditemukan data dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

c. Pencapaian Indikator TPB Pada Lembaga Pemerintah

Hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Blitar dengan total sebesar 220 indikator yang dikelompokkan ke dalam 6 kategori pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), indikator yang belum menjadi target RPJMD tetapi telah mencapai target TPB (TTC), indikator yang belum menjadi target RPJMD dan belum mencapai target TPB (TTT), dan indikator yang belum terdapat data terkait (NA). Sedangkan untuk indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik Kota Blitar yaitu sebanyak 11 indikator tidak dimasukkan dalam analisis Capaian TPB.

d. Pencapaian Indikator TPB Pada Pilar Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1,Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar pembangunan sosial adalah sebanyak 96 indikator. Ada 13 Perangkat Daerah (PD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 95 indikator di pilar sosial, terdapat 25 indikator atau 26% yang mencapai target nasional dalam

RPJMD Kota Blitar ditambah 27 indikator atau 28% yang tidak ada target daerah tetapi sudah mencapai target nasional. Sebanyak 8 indikator atau 8% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 7 indikator atau 28% indikator yang tidak terdapat target daerah dan belum mencapai target nasional dan 28 indikator atau 28% yang tidak memiliki data.

e. Pencapaian Indikator TPB Pada Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8,Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar pembangunan ekonomi adalah sebanyak 57 indikator.

Terdapat 10 Perangkat Daerah (PD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. PD yang memiliki tanggung jawab terbanyak adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) sebanyak 9 indikator, Bappeda dan BPS masing-masing sebanyak 7 indikator. Dari total 47 indikator TPB di Kota Blitar yang merupakan bagian dari pilar ekonomi, terdapat 6 indikator yang mencapai target nasional dan 8 indikator atau 17% tidak ada target daerah tetapi sudah mencapai target nasional. Sebanyak 3 indikator atau 5,3% telah ada dalam indikator tetapi belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 26 indikator atau 55% indikator belum memiliki data. Sebagian besar indikator yang belum memiliki data berada di bawah wewenang DPMTKPTSP dengan 6 indikator.

f. Pencapaian Indikator TPB Pada Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Total untuk pilar pembangunan lingkungan adalah sebanyak 44 indikator. Terdapat 7 Perangkat Daerah (PD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan. Dari total 44 indikator TPB di Kota Blitar yang termasuk pilar lingkungan, terdapat 3 indikator yang mencapai target nasional dan 14 indikator atau 31% yang tidak memiliki

target daerah tetapi mencapai target nasional. Sebanyak 4 indikator atau 14% belum mencapai target nasional. Selain itu, terdapat 23 indikator yang tidak memiliki data. DPUPR, DLH, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD merupakan perangkat daerah yang memiliki target indikator TPB paling banyak untuk pilar lingkungan yaitu secara berurutan masing-masing terdiri dari 14,14 dan 9 indikator.

g. Pencapaian Indikator TPB Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16. Total untuk pilar pembangunan hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator.

Terdapat 9 Perangkat Daerah (PD) yang memiliki wewenang dalam pilar hukum dan tata kelola. Dari total 21 indikator TPB di Kota Blitar yang termasuk pilar hukum dan tata kelola, tidak ada indikator yang mencapai target nasional namun ada 4 indikator atau 19% tidak ada target daerah tetapi sudah mencapai target nasional. Sebanyak 4 indikator atau 19% yang belum mencapai target nasional. Sementara itu ada 13 indikator atau 62% yang tidak memiliki data.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada sumber pembiayaan pemerintah namun dapat diperluas dari sumber-sumber pembiayaan lain dari lembaga non-pemerintah. Sumber pembiayaan pencapaian TPB Kota Blitar pada lembaga pemerintah dialokasikan melalui anggaran program kegiatan.

Jumlah anggaran akan dibandingkan dengan jumlah indikator yang menjadi kewenangan tiap perangkat daerah. Dinas Kesehatan mempunyai persentase anggaran paling besar yaitu 45% dan sebanding dengan jumlah kewenangan yang paling banyak dibandingkan perangkat daerah lainnya yaitu 44 indikator. Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan 14 indikator dengan dana mencapai 42 milyar atau 13% dari total. Terdapat beberapa perangkat daerah yang mempunyai beban indikator di atas 10 tetapi anggarannya di bawah 5% seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD, Dinas PUPR dan Bappeda.

Kontribusi dari masing-masing lembaga non-pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian indikator TPB di Kota Blitar. Pencapaian TPB juga dapat memanfaatkan dana CSR, bahkan di Kota Blitar terdapat Forum CSR. Forum tersebut terdiri dari pihak swasta/BUMN dan Beberapa perusahaan.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk terus meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatatan sipil kepada masyarakat dengan indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 85. Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan adminduk dan pencatatan sipil (indeks)**	**77**	**79,5**	**78,41**	**82,96**	**83,02**
		Baik	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**
2	**Persentase rata rata penduduk yg memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (%)**	**91,75**	**93,68**	**96,05**	**96,70**	**97,02**
3	**Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (%)**	**86,87**	**90,94**	**94,07**	**94,76**	**94,80**
3.1	Persentase capaian kepemilikan KTP	97	95,76	98,3	98,81	99,27
3.2	Persentase capaian penerbitan KK	100	100	100	100	100
3.3	Persentase capaian penerbitan surat pindah	100	99	100	100	100
3.4	Persentase capaian kepemilikan KIA	50,48	69	77,96	80,22	91,15
4	**Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil**	**96,63**	**96,41**	**98,04**	**98,64**	**99,25**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Persentase capaian kepemilikan akta kelahiran (usia 0 -18 th)	86,51	86,65	92,14	94,54	98,42
4.2	Persentase capaian penerbitan akta perceraian	100	100	100	100	100
4.3	Persentase capaian penerbitan akta kematian	100	99	100	100	100
5	**Persentase data kependudukan yang valid/akurat (%)**	**98,91**	**98,93**	**99,63**	**99,71**	**99,98**
5.1	Jumlah data penduduk yang valid	152.097	154.714	157.148	157.014	158.349
5.2	Jumlah seluruh data pendudukan	153.774	156.391	157.725	157.465	158.376

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2021

Secara ringkas capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 4 (empat) poin yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan adminduk dan pencatatan sipil yang mencapai 83,02% dengan kategori Baik pada Tahun 2020, meningkat dari Tahun 2019 sebesar 82,96%. Hal ini juga ditunjang dengan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta terobosan inovasi–inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam pemberian layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat seperti layanan mobiling, PECEL BLITAR (Pelayanan Cepat Langsung Ibu Melahirkan Dapat Akta Lahir), pelayanan *Three in one* serta penyediaan data kependudukan melalui SIMPEDAK (Sistem Informasi Penyajian Data Kependudukan).
2. Rata–rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan Tahun 2020 adalah 94,80% meningkat dari Tahun 2019 yaitu 94,76%. Adanya peningkatan sosialisasi terkait pelayanan administrasi kependudukan baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media elektronik, media cetak dan media sosial sangat menunjang peningkatan kinerja ini.
3. Rata–rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil Tahun 2020 adalah 99,25% meningkat dari Tahun 2019 yaitu 98,64%.

4. Persentase data kependudukan yang valid/akurat pada tahun 2020, adalah 99,98%. Salah satu upaya peningkatan keakuratan /validasi data kependudukan adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke alamat rumah.

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Adapun terkait kinerja pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 86. Capaian indikator pemberdayaan masyarakat di Kota Blitar Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan (%)**	**80,05**	**89,96**	**91,96**	**93,01**	**99,22**
1.1	Jumlah kader/pengurus dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	857	857	858	858	902
1.2	Jumlah kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	686	771	789	798	895

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

Dari data tabel di atas bahwa Persentase kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan selama tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data terakhir tahun 2020 menunjukkan capaian 99,22%, dengan rincian ada sebanyak 895 kader/pengurus yang aktif dari total 902 kader/pengurus. Meskipun demikian optimalisasi pemberdayaan masyarakat masih kurang karena urusan ini ditangani oleh setingkat kasubbag di Sekretariat Daerah.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat

mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator jumlah peserta KB baru, cakupan peserta KB, dan cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T, yaitu: terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Tabel 2. 87. Capaian indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Peserta KB (%)	86,49	86,49	88,22	96,8	80,04
2	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif (%)	74,77	74,78	73,13	72,04	74,31
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	NA	0,63	0,7	0,64	0,65
4	Total Fertility Rate (TFR)	NA	2,05	2,16	2,03	2,14
5	Capaian mCPR (Modern Contraseptive Prevalence Rate) (%)	74,77	74,78	73,13	72,04	74,31
6	Capaian Unmet Need (%)	10,56	11,58	13,14	8,09	9,09
7	Capaian ASFR (%)	16,98	32,2	11,21	30,69	20,02

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2021

Dari data tabel di atas bahwa cakupan peserta KB terus meningkat, yaitu dari 86,49% pada Tahun 2016 meningkat sampai dengan Tahun 2019 sebesar 96,8%. Namun pada tahun 2020 cakupan peserta KB mengalami penurunan hingga menjadi 80,04%. Hal tersebut dapat ditunjang antara lain dengan penguatan pembinaan KB aktif dan KB baru dimana sasaran KB lebih diutamakan bagi PUS yang sedang hamil dan setelah melahirkan langsung mendapat pelayanan KB, optimalisasi

pelayanan KB terutama untuk KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Blitar, sosialisasi dan pembinaan kepada remaja dan keluarga yang memiliki remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan dimana usia ideal menikah perempuan 21 tahun dan laki - laki 25 tahun.

2.3.2.9.Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan difokuskan pada peningkatan sarpras perhubungan. Indikator yang menggambarkan urusan perhubungan antara lain adalah persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 terealisasi 89,12% sampai 2020 terealisasi 99,35%, persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan dengan realisasi dari tahun 2016 sebesar 70,50% sampai dengan 2020 sebesar 84,16%, kemudian *load factor* penumpang angkutan sekolah gratis dengan realisasi tahun 2016 sebesar 139,16% sampai tahun 2019 sebesar 74,34%, dimana secara standard *load factor* adalah 75%. Hal ini didukung dengan adanya penambahan armada bus sekolah dan angkutan sekolah gratis. Pemanfaatan pelataran parkir angkutan barang dengan realisasi pada Tahun 2016 sebesar 23,63% sampai Tahun 2020 sebesar 35,90%. Penghargaan Wahana Tata Nugraha realisasi dari Tahun 2016 sampai 2019 adalah WTN, namun sempat tidak dilaksanakan selama 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Pusat yaitu Tahun 2017 dan 2018 dan kembali tidak dilaksanakan pada tahun 2020. Berikut secara detail capaian indikator kinerja urusan perhubungan disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 88. Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%)**	**NA**	**89,12**	**94,81**	**95,61**	**99,35**
1.1	Jumlah prasarana dan fasilitas	NA	NA	126.508	127.897	134,843

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	perhubungan dalam kondisi baik (Unit)					
1.2	Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan (Unit)	NA	NA	133.429	133.766	135,725
2	**Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan (%)**	**70,50**	**74,89**	**78,59**	**80,53**	**84,16**
2.1	Jumlah ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yangberkeselamatan (m')	190.399	202.255	212.255	217.486	227,299
2.2	Jumlah ruas jalan (m')	270.070	270.070	270.070	270.070	270.070
3	**Load Factor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis (%)**	**139,16**	**80,56**	**80,23**	**74,34**	**20,29**
3.1	Jumlah Penumpang angkutan sekolah gratis (Siswa)	60.117	59.163	76.883	79.935	21,813
3.2	Kapasitas Kendaraan Sekolah Gratis (Siswa)	43.200	73.440	95.832	107.520	107,520
4	**Pemanfaatan Pelataran Parkir Angkutan Barang (%)**	**23,63**	**24,04**	**29,39**	**29,39**	**35,90**
4.1	Luas Pelataran Parkir Angkutan Barang yang dimanfaatkan (m^2)	3.052	3.106	3.797	3.797	4,639
4.2	Luas Total Pelataran Parkir Angkutan Barang (m^2)	12.921	12.921	12.921	12.921	12,921
5	**Peraihan Wahana Tata Nugraha (Predikat)**	**WTN**	**NA**	**NA**	**WTN**	**NA**
6	Jumlah karcis berhologram tepi jalan umum yang termanfaatkan (Lembar)	NA	87.879	753.554	761.920	559,259
7	Jumlah petugas parkir (orang)	NA	250	250	250	250
8	**Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji KIR (%)**	NA	NA	**87**	**92**	**94**
8.1	Jumlah Kendaraan Uji KIR (Unit)	NA	NA	6.643	6.130	4.700
8.2	Jumlah Kendaraan Lulus Uji KIR (Unit)	NA	NA	5.764	5.648	4.434

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021
**NA tidak diselenggarakan oleh pemerintah pusat*

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung layanan e-government serta undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daerah, pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi, serta pembinaan dan pengembangan e-government.

Tabel 2. 89. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Persentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK yang terintegrasi (%)**	**NA**	**42,55**	**46,80**	**51,06**	**76,69**
1.1	Jumlah layanane-governance yang tersedia	NA	20	22	24	36
1.2	Jumlah layanane-governance yang dibutuhkan	NA	47	47	47	47
2.	**Persentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada PD (%)**	**NA**	**45,95**	**51,35**	**59,45**	**83,78**
2.1	Jumlah aplikasi yang tersedia	NA	17	19	22	31
2.2	Jumlah aplikasi yang dibutuhkan	NA	37	37	37	37
3	**Persentase pemenuhan variabel domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE (%)**	**NA**	**NA**	**65,71**	**88,57**	**88,89**
3.1	Jumlah standar pemenuhan variabel domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE	NA	NA	35	35	36
3.2	Jumlah variabel domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE yang terpenuhi	NA	NA	23	31	32
4.	**Persentase keterbukaan informasi dan komunikasi publik (%)**	**NA**	**99,84**	**98,92**	**99,67**	**100**
5	**Persentase informasi yang dipublikasikan (%)**	NA	**99,89**	**99,44**	**99,86**	**99,68**
5.1	Jumlah informasi yang dipublikasikan	NA	1.818	1.244	1.462	1.575

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.2	Jumlah informasi yang diterima	NA	1.820	1.251	1.464	1.580
6	**Persentase pengaduan ditindaklanjuti (%)**	**NA**	**98,88**	**93,98**	**89,66**	**100**
6.1	Jumlah pengaduan ditindaklanjuti	NA	88	125	52	290
6.2	Jumlah pengaduan yang diterima	NA	89	133	58	290

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pemenuhan layanan *e-governance* sudah semakin meningkat walaupun masih rendah dibandingkan kebutuhan layanan e-governance. Pemenuhan aplikasi e-governance masih rendah dibandingkan kebutuhan penyediaan aplikasi e-governance tersebut. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka telah dilakukan pemeringkatan Indeks SPBE dimana hasil yang diperoleh pada Tahun 2020 adalah 2,88 dengan kategori Baik. Sampai dengan tahun 2020, Kota Blitar telah mememenuhi 32 dari total 36 komponen standar pemenuhan SPBE. Adapun komponen yang telah terpenuhi meliputi :

1) Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
2) Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
3) Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
4) Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
5) Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
6) Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
7) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
8) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran
9) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
10) Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
11) Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
12) Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik

13) Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
14) Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System
15) Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah
16) Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
17) Anggaran dan Belanja TIK
18) Pengoperasian Pusat Data
19) Integrasi Sistem Aplikasi
20) Layanan Naskah Dinas
21) Layanan Manajemen Kepegawaian
22) Layanan Manajemen Perencanaan
23) Layanan Manajemen Penganggaran
24) Layanan Manajemen Keuangan
25) Layanan Manajemen Keuangan
26) Layanan Manajemen Kinerja
27) Layanan Pengadaan
28) Layanan Pengaduan Publik
29) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
30) Layanan Whistle-Blowing System
31) Layanan Publik Instansi Pemerintah
32) Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah (baru)

Persentase keterbukaan informasi dan komunikasi publik terealisasi sebesar 100%. Sedangkan persentase pengaduan ditindaklanjuti mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu tercapai 100% dengan total pengaduan yang diterima sejumlah 290 pengaduan. Perlunya peningkatan pengkoordinasian tindaklanjut pengaduan serta kebutuhan waktu yang lebih sangat diperlukan dalam mempersiapkan tindaklanjut pengaduan.

2.3.2.11. Koperasi dan Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang bisa dimiliki perseorangan maupun badan usaha, dengan kekayaan paling banyak 50

juta dan omzet usaha mikro paling banyak 300 juta setahun dengan fasilitas minim dan terbatasnya jumlah karyawan. Usaha mikro di Kota Blitar banyak di sektor usaha pengolahan makanan, usaha perdagangan, dan jasa lainnya. PDRB usaha Mikro tiap tahun meningkat secara nominal.

Tabel 2. 90. Persentase Peningkatan PDRB Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase peningkatan PDRB usaha mikro (%)**	**16,05**	**14,18**	**15,91**	**15,96**	**-8,21**
1.1	PDRB usaha mikro (juta rupiah)	206,06	235,3	295,31	309,79	284,36

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

PDRB Usaha mikro terus meningkatkan kontribusinya bagi Kota Blitar, di tahun 2016 senilai 206,06 juta Rupiah, kemudian meningkat menjadi 309,79 juta Rupiah di tahun 2019. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan jumlah usaha mikro yang ada di Kota Blitar sampai dengan tahun 2019 yaitu total 425 usaha, yang semula berjumlah 157 pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah usaha mikro yang dibina mengalami kenaikan menjadi 475 usaha, akan tetapi untuk persentase peningkatan PDRB usaha mikro mengalami penurunan sebesar 8,21% dari tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 284,36 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB usaha mikro ini tidak dapat dihindari karena selama tahun 2020 terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat melemahnya aktivitas ekonomi dan berkurangnya pendapatan selama pandemi Covid19.

Tabel berikut memberikan informasi bahwa Persentase pertumbuhan usaha mikro yang dibina cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, semula meningkat 61,86% pada tahun 2016, kemudian sempat turun 15,29% pada Tahun 2017 kemudian meningkat kembali pada Tahun 2018 sebesar 91,73% dan tahun 2020 meningkat sebesar 11,76%. Faktor kurang optimalnya pertumbuhan usaha mikro di Kota Blitar adalah adanya kemungkinan

peralihan kriteria dari usaha mikro menjadi usaha kecil, selain itu karena peralihan dari wirausaha ke pekerjaan formal.

Tabel 2. 91. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Yang Dibina Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase pertumbuhan usaha mikro yang dibina (%)**	**61,86**	**-15,29**	**91,73**	**66,67**	**11,76**
1.1	Jumlah usaha mikro yang dibina	157	133	255	425	475

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23 Tahun 2015, Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Berdasarkan data, diketahui bahwa jumlah koperasi yang terdaftar di Kota Blitar sampai tahun 2020 adalah 278 koperasi dan 243 di antaranya tergolong aktif dalam hal kelembagaan maupun pelayanan. Dari sejumlah 243 koperasi aktif ini 99 di antaranya dikatakan sehat yaitu koperasi tidak hanya melakukan pelayanan namun juga aktif melaksanakan RAT. Jumlah koperasi aktif selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu berjumlah 261 koperasi menjadi 243 di tahun 2020. Begitu juga yang aktif melaksanakan RAT, jika di tahun 2016 sejumlah 119 koperasi, pada tahun 2020 menurun menjadi 99 koperasi. Pembinaan kepada koperasi menjadi salah satu upaya untuk memberi dorongan, memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen serta usaha koperasi sehingga koperasi dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatnya kesejahteraan kepada anggotanya.

Tabel 2. 92. Persentase Koperasi Aktif Yang Sehat Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase koperasi aktif yang sehat (%)**	**47,03**	**47,03**	**39,85**	**41,96**	**35,61**
1.1	Jumlah koperasi aktif yang sehat	119	119	104	107	99
1.2	Jumlah koperasi aktif	253	253	261	255	243

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri pada tahun 2020 mencapai 86% dengan Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri pada tahun 2020 sebanyak 241 unit dan total koperasi sebanyak 278 koperasi. Yang dimaksud koperasi dengan permodalan mandiri adalah koperasi yang memiliki modal 60% milik sendiri. Modal dengan milik sendiri dapat berupa simpanan anggota, simpanan sukarela dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 93. Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri Kota Blitar Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	**Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri (%)**	**NA**	**20,88**	**20,59**	**86,70**
1.1	Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri	NA	71	70	241
1.2	Jumlah koperasi	NA	340	340	278

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal

Capaian pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar yang terus meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah adanya dukungan kinerja penanaman modal yang berkembang cukup baik. Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2019 investasi di Kota Blitar yang semula 160,77 Milyar pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dengan rata-rata kenaikan sebesar 19.14%. Hal ini salah satunya didorong oleh pelayanan perizinan yang cukup baik, terbukti dari SKM lima tahun terakhir kategori Baik dengan menerapkan standar pelayanan CERIA (Cermat, Efisien, Ramah, Ikhlas dan Adil). Namun, penurunan nilai investasi terjadi pada tahun 2020. Perkembangan investasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 94. Nilai Investasi dan SKM Pelayanan Perizinan Kota Blitar Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Nilai Investasi (milyar rupiah)**	**160,77**	**164,04**	**336,27**	**265,86**	**167,10**
1.1	Nilai Investasi PMA (milyar rupiah)	0	0	12,00	0	0

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.2	Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)	160,77	164,04	324,27	265,86	167,10
1.3	Jumlah Unit Usaha PMA (unit)	0	0	1	0	0
1.4	Jumlah Unit Usaha PMDN (unit)	355	261	318	518	205
1.5	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	643	1362	1742	3586	1.837
2	**SKM Pelayanan Perizinan (indeks)**	**87,25 Baik**	**83,75 Baik**	**83,15 Baik**	**85,89 Baik**	**83,33 Baik**

Sumber : DPM, Naker dan PTSP Kota Blitar, 2021

Jumlah investor di Kota Blitar bertambah seiring dengan iklim investasi dan infrastruktur yang memadai, regulasi yang mendukung serta dukungan kemudahan berinvestasi. Kota Blitar sudah menerapkan layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) yang lebih mudah disebut dengan nama generic system *Online Single Submission* (OSS) yaitu sistem perijinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Masyarakat yang selama ini mengurus perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bisa juga mengakses Sistem OSS secara daring kapan saja dan di mana pun berada.

OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegerasi secara elektronik, diharapkan pengurusan perizinan menjadi cepat, murah dan memberi kepastian. Kemudahan tersebut membuat Kota Blitar mulai dikenal oleh investor-investor luar kota Blitar (baik PMA maupun PMDN). Perusahaan Asing (PMA) pertama di Blitar adalah PT. Gesnow Pendo Food yaitu pada tahun 2017, namun realisasi investasinya baru terlaporkan pada tahun 2018 dan menjadi PMA satu-satunya di Kota Blitar. Untuk tahun-tahun berikutnya tidak terdapat PMA lain karena bersifat akuisisi.

Namun terjadi penurunan angka investasi dari Rp336,27 Milyar Rupiah pada Tahun 2018 menjadi Rp265,86 Milyar di tahun 2019 dan menurun lagi menjadi Rp167,10 Milyar Rupiah pada Tahun 2020. Hal

ini dipengaruhi diantaranya karena terbatasnya diversifikasi investasi, belum adanya regulasi tentang kebijakan investasi dan belum adanya peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor. Selain itu, penurunan investasi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh lesunya kegiatan perdagangan barang maupun jasa pada sehingga berpengaruh terhadap iklim investasi di Kota Blitar.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan bagian dari *agent of change* yang disiapkan untuk menjadi penerus generasi sehingga diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala perubahan, perkembangan maupun tantangan yang terjadi di masa mendatang. Penyelenggaraan urusan kepemudaan memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membangun kepekaan terhadap perkembangan jaman dan lingkungan.

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan kepada peningkatan kemampuan berfikir kritis dan inovatif serta mampu berdaya saing di era perkembangan zaman. Berikut data capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain adalah pada Tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah organisasi kepemudaan yaitu bertambah sebanyak 3 organisasi dari tahun 2018 menjadi sebanyak 27 organisasi.

Sedangkan dari total 27 organisasi kepemudaan yang ada, 19 di antaranya tergolong aktif. Pada indikator persentase peningkatan prestasi olahraga, tahun 2019 mencapai realisasi 69%, meningkat dari tahun 2018 (63%). Permasalahan yang masih terjadi adalah belum terpenuhinya sarana prasarana olahraga sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga yang juga mengalami peningkatan di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar.

Dalam hal pembinaan olahraga disabilitas, memang masih perlu ada peningkatan dengan terus memberikan fasilitasi dan pembinaan

terhadap cabang olah raga yang diminati dan dapat diikuti oleh para disabiltas di Kota Blitar.

Tabel 2. 95. Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif Dan Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase organisasi kepemudaan aktif (%)**	**50**	**50**	**58**	**70**	**78**
1.1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	12	12	14	19	22
1.2	Jumlah organisasi kepemudaan yang ada	24	24	24	27	28
2	**Persentase peningkatan prestasi olahraga (%)**	**52**	**72**	**63**	**69**	**93**
2.1	Jumlah atlit yang berprestasi	81	249	313	266	41
2.2	Jumlah atlit delegasi	155	347	493	383	44
3	**Jumlah cabang olahraga disabilitas yang diikuti dalam lomba**	**NA**	**NA**	**NA**	**4**	**2**
3.1	Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dibina	NA	NA	NA	6	6
3.2	Jumlah atlit disabilitas yang berprestasi	NA	NA	NA	6	2
3.3	Jumlah atlit disabilitas delegasi	NA	NA	NA	6	4
3.4	Jumlah atlit disabilitas yang dibina	NA	NA	NA	24	24

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2021

2.3.2.14. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik diarahkan pada peningkatan layanan data statistik melalui *e-governance* dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat di Kota Blitar. Kinerja urusan ini ditentukan capaian indikator Persentase data statistik yang terlayani melalui *e-governance*. Data statistik yang dikelola adalah statistik sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 2. 96. Persentase Data Statistik Yang Terlayani Melalui *E-Governance* Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase data statistik yang terlayani melalui *e-governance* (%)**	**NA**	**72,22**	**83,3**	**100**	**90**
1.1	Jumlah data statistik terpublikasi	NA	26	30	36	5.493
1.2	Jumlah data statistik yang dimiliki	NA	36	36	36	6.093
2	**Persentase ketersediaan data sektoral (%)**	**79**	**79**	**80**	**83**	**80,9**
2.1	Data sektoral yang harus dipenuhi	6.093	6.093	6.093	6.093	6.063
2.2	Data sektoral yang terpenuhi	4.871	4.867	4.931	5.085	4.905

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase data statistik yang terlayani melalui *e-governance* meningkat dari tahun 2018 semula 83,3% menjadi 100% pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan Perangkat Daerah penyedia data sudah menyampaikan dan dipublikasikan ke aplikasi A-data.blitarkota.go.id, namun dalam penyediaan data yang disampaikan belum semua elemen data tersedia walaupun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat pada persentase ketersediaan data sektoral pada tahun 2018 mencapai 80% sedangkan pada Tahun 2019 mencapai 83%.

Namun demikian terjadi penurunan capaian baik dari bahwa persentase data statistik yang terlayani melalui *e-governance* dan persentase ketersediaan data sektoral pada tahun 2020 dengan capaian masing masing menjadi 90% dan 80,9%.

2.3.2.15. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian diarahkan pada meningkatnya keamanan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat di Kota Blitar. Kinerja urusan ini ditentukan capaian indikator Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi. Keamanan Informasi atau *Information Security* adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi, baik komputer maupun non-komputer dari

penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi/ tidak berwenang.

Tujuan Keamanan Informasi adalah kerahasiaan suatu lembaga untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi–instansi pemerintah tersebut wajib melakukan penilaian mandiri terhadap sistem elektronik yang dimilikinya berdasarkan pedoman Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).

Indeks KAMI adalah alat bantu evaluasi untuk menganalisi dan mengevalusi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001, yaitu: 1) Tata Kelola Keamanan Informasi; 2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi; 3) Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi; 4) Pengelolaan Aset Informasi; 5) Teknologi dan Keamanan Informasi. Berikut capaian kinerja urusan persandian sebagai berikut.

Tabel 2. 97. Persentase Informasi Pemerintah Yang Terfasilitasi Keamanan Informasi Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi (%)**	**NA**	**100**	**100**	**100**	**102**
1.1	Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan	NA	1.024	1.050	1.100	1124
1.2	Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan	NA	1.024	1.050	1.100	1124
2	**Tingkat kelengkapan penerapan standar keamanan informasi pada instansi**	**NA**	**NA**	**NA**	Tidak Layak (133)	Tidak Layak (133)
2.1	Kategori sistem elektronik	NA	NA	NA	Rendah (14)	Rendah (26)

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2021

Capaian kinerja Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi adalah 100% dengan indikator pendukung informasi yang diterima dan informasi yang diamankan. Sedangkan terkait dengan tingkat kelengkapan penerapan standar keamanan informasi pada instansi yang didapatkan dari asesmen mandiri menggunakan Indeks KAMI menunjukkan bahwa rata-rata Perangkat Daerah di Kota Blitar berada pada tingkat "tidak layak" dengan nilai skor sebesar 133. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem elektronik oleh instansi di Pemerintah Kota Blitar belum didukung dengan level keamanan informasi yang memadai. Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar masih rendah. Penyebab rendahnya tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi disebabkan karena instansi tersebut belum menerapkan sebagian besar syarat keamanan informasi yang mengacu pada standar ISO 27001.

Berdasarkan hasil asesmen dan acuan kontrol ISO, faktor terbesar yang mempengaruhi kekuranglayakan tingkat pengamanan informasi pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar adalah minimnya kebijakan, norma, standar, prosedur, ataupun pedoman pelaksanaan teknis yang mengatur terkait keamanan informasi. Upaya optimalisasi kemudian dilakukan dengan perumusan kebijakan teknis, lebih spesifiknya *Standard Operating Procedure* (SOP), di beberapa aspek keamanan informasi pada instansi.

2.3.2.16. Kebudayaan

Kota Blitar telah mendeklarasikan sebagai kota wisata kebangsaaan, oleh karena itu kebudayaan sangat erat hubungannya dengan penguatan karakter bangsa. Keberhasilan kinerja untuk urusan ini dihitung melalui persentase warisan budaya yang dilestarikan. Dibandingkan tahun 2016 yang hanya 65%, warisan budaya berupa bangunan Gedung dan kesenian tradisional yang telah dilestarikan meningkat menjadi 99,57% pada tahun 2018 dan 2019.Sementara itu pada tahun 2020 nilai persentase warisan budaya yang dilestarikan

hanya mencapai 61%, menurun sebesar 63,23% jika dibandingkan dua tahun sebelumnya. Berikut disajikan tabel persentase warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 98. Persentase Warisan Budaya yang DilestarikanKota Blitar Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)**	**65,0**	**75,22**	**99,57**	**99,57**	**61**
1.1	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan	39	173	229	229	131
1.2	Jumlah warisan budaya Kota Blitar	60	230	230	230	215

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Warisan budaya yang ada di Kota Blitar telah dilestarikan baik warisan budaya hasil cipta, rasa, karsa dan karya baik yang ragawi (berbentuk) seperti stasiun kereta api Blitar, Kantor Pos Blitar, Kantor Telkom, Kantor Wali Kota, Gedung DPRD Kota Blitar, Rumah Dinas Kepala Yonif, Kantor BNI 46, Hotel Tugu, Masjid Jami, Klenteng Poo An Kyong, Gereja Santo Yusuf, Monumen Potlot, Gedung SMA 1, Gedung SMP 1 , Makam Proklamator RI Bung Karno, Rumah Kartawibawa, Istana Gebang, TMP Raden Wijaya, Makam Aryo Blitar, Pesanggrahan Joyodigdan, Aloon-Aloon Kota Blitar.

Sedangkan Warisan Budaya tak Ragawi seperti ritual ziarah makam Aryo Blitar, Bersih Desa, Ritual Ziarah Makam Bung Karno, Grebeg Pancasila, Festival Blitar Djadoel, Haul Bung Karno, Kesenian Jaranan, Kesenian Macapat, Kerjinan bubut kayu, Es pleret, Pecel Punten, hingga pelestarian Es drop Blitar.

Selain hal di atas, masih ada warisan budaya berupa penemuan diduga warisan cagar budaya yang masih perlu dilakukan penggalian baik secara kesejarahan maupun secara fisik seperti yang baru-baru ini ditemukannya situs candi Gedog di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Tentu penemuan ini dimungkinkan akan

diikuti lagi dengan temuan-temuan benda/bangunan yang diduga sebagai cagar budaya.

2.3.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan menurut UU Perpustakaan merupakan institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Capaian kinerja urusan perpustakaan yaitu :

1. Indeks Minat Baca

   Indeks minat baca ini mulai dilakukan penghitungan pada Tahun 2017 tercapai 49 dan terus mengalami peningkatan, angka terakhir tahun 2020 sebesar 53. Metode penghitungan Indeks Minat Baca masyarakat Kota Blitar sejak tahun 2019 dilakukan dengan cara pembobotan persepsi skala dari masing-masing kriteria minat baca. Pada tahun 2020 pengukuran Indeks Minat Baca dilakukan pada Tribulan IV disaat terjadi pandemi Covid-19, sehingga proses penghitungan dilakukan secara daring menggunakan *google form* untuk menyasar seluruh lapisan masyarakat. Kriteria Indeks Minat Baca masyarakat Kota Blitar ditentukan oleh 6 (enam) indikator yaitu Kegemaran membaca, Motivasi membaca, Frekuensi membaca, Durasi membaca, Jumlah halaman yang terbaca, Kunjungan ke perpustakaan.

   Indeks Minat Baca dari tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan Perangkat Daerah se-Kota Blitar dalam rangka menumbuhkembangkan minat bacaantara lain melalui lomba-lomba peningkatan minat baca, workshop kepenulisan, lomba menulis tentang Kota Blitar (local konten), pengadaan *e-book,* rapat koordinasi dengan Kepala Sekolah SD/SMP terkait pengelolaan perpustakaan sekolah, promosi perpustakaan (Bulk Loan, Pojok Baca di perangkat daerah layanan

publik), Kafe Literasi (Kangen Fokus Ngobrol-ne Literasi di kalangan pemangku kepentingan/stakeholder di Kota Blitar) yang sebagian dilaksanakan secara daring, sebagian dilaksanakan dengan tatap muka dengan protokol kesehatan.

Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan inovasi layanan melalui media sosial yaitu LAYADA (Layanan Anak Dalam Jaringan) agar minat baca anak-anak yang telah terbangun tetap meningkat meskipun mengakses perpustakaan dari rumah.Berbagai inovasi kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan bahan-bahan pustaka yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai upaya untuk mendorong peningkatan minat baca masyarakat Kota Blitar.

2. Nilai SKM pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan

   Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar terus mengalami peningkatan dengan kategori Baik. Dimulai pada Tahun 2016 dengan capaian 76,19 dan sampai dengan tahun 2020 dengan capaian 80,02.

Diantara faktor penentu peningkatan capaian kinerja tersebut selain adanya kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan perangkat daerah terkait adalah adanya kesesuaian antara jenis layanan yang diberikan dengan kebutuhan layanan yang diharapkan oleh pemustaka.

Selain itu peningkatan layanan perpustakaan juga ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah koleksi buku yang tersedia bagi pengguna layanan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 sebanyak 19.942 koleksi buku tersedia di perpustakaan daerah bagi pemustaka. Lebih lanjut, capaian urusan perpustakaan tahun 2016 – 2020 disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 2. 99. Indeks Minat Baca Kota Blitar Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Indeks Minat Baca (indeks)**	**NA**	**49**	**49**	**51**	**53**
2	**Nilai SKM pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan (indeks)**	**76,19**	**78,59**	**78,94**	**79,89**	**80,02**
3	**Jumlah perpustakaan**	**126**	**126**	**127**	**125**	**125**
4	**Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah (buah)**	**14.059**	**15.355**	**16.656**	**17.639**	**19.942**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2021

NA Data belum dilaksanakan perhitungan

2.3.2.18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Sistem kearsipan yang baik memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran sistem organisasi, salah satunya memudahkan memperoleh informasi yang tepat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.

Tabel 2. 100. Persentase Arsip Daerah yang Dilakukan Penyelamatan dan Pelestarian Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian (%)**	**28,29**	**42,16**	**55,49**	**68,85**	**82,18**
1.1	Jumlah arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan dan pelestarian	42.327	20.912	20.000	20.042	20.000
1.2	Jumlah arsip daerah	42.327	63.239	83.239	103.281	123.281
2	**Nilai SKM pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan kearsipan daerah (indeks)**	**NA**	**78,01 (Baik)**	**79,26 (Baik)**	**79,48 (Baik)**	**79,91 (Baik)**
3	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian mengalami peningkatan semula 28,29% pada tahun 2016 menjadi 82,18% pada tahun 2020. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah banyak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada Pemerintah Kota Blitar melalui kegiatan-kegiatan rutin berkelanjutan maupun kegiatan inovasi.

Hal tersebut juga terjadi pada Nilai SKM pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan kearsipan daerah yang semula 78,01% di tahun 2017 meningkat menjadi 79,91% di tahun 2020. Faktor pendorong keberhasilan ini disebabkan adanya kesesuaian jenis layanan yang diberikan dan kemudahan prosedur layanan.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Kota Blitar secara geografis tidak memiliki kekayaan laut, sehingga potensi perikanan darat yang ada perlu dikelola dengan optimal. Dengan sumber daya alam berupa areal pertanian dan perikanan dengan jumlahnya tidak terlalu luas dan semakin tahun semakin menyempit sebagai akibat perubahan fungsi lahan sebagai kawasan permukiman, perlu upaya lebih untuk tetap mempertahankan jumlah produksi hasil perikanan.

Peningkatan produksi ikan di Kota Blitar didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pembinaan UPR (Unit Pembenihan Rakyat) Perikanan serta sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein tinggi. Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Blitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 101. Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Blitar Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun					Rata – rata partum-buhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Produksi ikan konsumsi (ton)	183,79	189,24	190,63	212,13	229,030	5.12
2	Produksi ikan hias (ekor)	4,342,110	4,648,393	4.399.273	4.402.015	4.563.416	2.09
3	Produksi benih ikan di BBI (ekor)	172,880	192,078	361,802	354,566	372.441	24.85
4	Produksi benih ikan di UPR (ekor)	8,311,690	8,509,927	8.680.125	6.538.194	8.449.027	2.24

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, 2021

Indikator kelautan dan perikanan Kota Blitar mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat pada Tahun 2016-2020. Produksi ikan konsumsi (ton) meningkat paling tajam sebesar 11.28% pada tahun 2018-2019, sedangkan peningkatan paling rendah sebesar 0.85% terjadi pada tahun 2017-2018. Produksi ikan hias (ekor) meningkat drastis sebesar 7.05% pada tahun 2016-2017, namun merosot tajam sebesar -5.36% pada tahun 2017-2018. Produksi benih ikan di BBI (ekor) melonjak tajam sebesar 88.36% pada tahun 2017-2018, sedangkan pada tahun setelahnya merosot cukup tajam sebesar -2.00%. Sementara itu, produksi benih ikan di UPR (ekor) tumbuh sangat drastis sebesar 29.23% pada tahun 2019-2020.

Lonjakan produksi benih ikan di BBI sebesar 88.36% berbanding terbalik dengan pertumbuhan produksi benih ikan di UPR sebesar 2.00% di tahun 2017-2018. Sementara itu, produksi benih ikan di UPR tumbuh sebesar 24.68% pada tahun 2018-2019 kontras dengan produksi benih ikan di BBI yang turun sebesar -2.00% pada tahun yang sama. Penurunan produksi benih ikan di BBI disebabkan adanya kemarau panjang, sehingga ketersediaan air sangat kurang dan menyebabkan gagal panen. Selain itu, gagal panen juga disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) minimnya pelaksanaan pelayanan terpadu

kesehatan ikan dan lingkungan (keskanling) untuk mencegah adanya penyakit dan kematian benih ikan secara massal, 2) minimnya intensitas pendampingan dan pembinaan penyuluh dan pengawas perikanan, pelatihan perikanan tepat sasaran, 3) minimnya penyuluhan dan pendampingan kepada pembudidaya perikanan oleh penyuluh dan pengawas perikanan.

2.3.3.2. Pariwisata

Dengan memanfaatkan popularitas dan kebesaran nama Proklamator Bung Karno yang disemayamkan di Kota Blitar dan kreativitas pemangku kepentingan bidang pariwisata, Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun capaian indikator kinerja urusan pariwisata disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 102. Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2016–2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase peningkatan PDRB sektor hotel dan restoran (%)**	**15,27**	**11,36**	**9,34**	**9,71**	**-9,29**
1.1	Nilai PDRB sektor hotel dan restoran (Juta Rp)	277.001.55	308.495.09	337.319.92	365.962.15	338,44
2	**Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif unggulan (%)**	**2,93**	**7,94**	**16,34**	**13, 83**	**26,71**
2.1	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	1.196	1.291	1.502	1.703	1.774
3	**Persentase peningkatan jumlah wisatawan (%)**	**3.40**	**12,18**	**12,35**	**12,95**	**-85,71**
3.1	Jumlah wisatawan	2.913.503	3.145.933	3.150.592	3.167.489	452.552
3.2	Wisatawan Mancanegara	1.723	961	1.178	1.441	174
3.3	Wisatawan Domestik	2.911.780	3.144.972	3.149.414	3.166.048	452.378

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

PDRB secara umum selain dapat menjadi cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dijadikan tolok ukur kinerja ekonomi daerah. Untuk Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir secara nominal terjadi kenaikan PDRB sektor hotel dan restoran. Hal ini dipicu oleh adanya kegiatan-kegiatan pariwisata yang

digelar Pemerintah Kota Blitar, maraknya destinasi-destinasi wisata baru yaitu kampung wisata kreatif di Kota Blitar, diantaranya kampung bathok, kampung cyber, kampung nirwana boclent, kampung 3D Bongares, dan sebagainya.

Peningkatan PDRB sektor hotel dan restoran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi kreatif di Kota Blitar. Sekalipun tiga sektor ekonomi kreatif unggulan di Kota Blitar adalah kuliner, karya dan seni pertunjukan, namun hampir 16 subsektor ekonomi kreatif di Kota Blitar ada pelaku usahanya. Total pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Blitar meningkat cukup baik selama lima tahun terakhir, dari 1.162 pada tahun 2016 menjadi 1.774 pada tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan per tahun 10,3%.

Sektor pariwisata masih menjadi unggulan di Kota Blitar, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Blitar selama tahun 2016 – 2020 mengalami kenaikan dari 2.913.503 orang pada tahun 2016 menjadi 3.167.489 orang pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah wisatawan berkurang secara signifikan yaitu hanya berjumlah 452.552 orang. Penurunan wisatawan ini disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan penutupan tempat wisata dan pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi Covid19 sehingga berimbas pada menurunnya aktivitas wisata di berbagai daerah, termasuk di Kota Blitar.

Pada kondisi normal, peningkatan wisatawan yang cukup bagus dengan rata-rata peningkatan 5,31% per tahun masih perlu ditingkatkan. Kota Blitar memiliki banyak potensi wisata yang belum digali secara maksimal. Kampung wisata kreatif yang ada saat ini sudah cukup berperan dalam menambah jumlah wisatawan di Kota Blitar, baik kunjungan untuk studi tiru maupun wisata edukasi di Kota Blitar. Diharapkan ke depan kampung -kampung wisata kreatif ini dapat lebih berkembang lagi, semakin banyak dan beragam, termasuk yang saat ini berproses, dapat semakin ‘menjual’ dengan melibatkan lebih banyak lagi wisatawan dari kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat luas.

Pelaku ekonomi kreatif di tahun 2016 berjumlah 1.162 meningkat menjadi 1.703 pada tahun 2019, dengan kenaikan rata-rata 5,31% per tahun. Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif selain didukung adanya kegiatan-kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Blitar seperti Blitar Creative Festival dan even-even ekonomi kreatif lainnya, juga munculnya trend mendirikan usaha berbasis online.

Tabel 2. 103. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kota Blitar Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Makan/Restoran	101	114	195	172	209

Sumber: BPS Kota Blitar, 2020
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

2.3.3.3. Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian di Kota Blitar tiap tahunnya 10 hektar untuk digunakan untuk pembangunan perumahan dan prasarana umum lainnya. Maka hal tersebut perlu diimbangi dengan penerapan teknologi yang baik untuk terus mengoptimalkan lahan yang ada sehingga produktivitasnya tetap baik, seperti, penggunaan bibit unggul, irigasi yang baik, penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara tepat dan cepat sehingga bisa mempertahankan hasil produksi tetap baik.

Tabel 2. 104. Capaian Urusan Pertanian Kota Blitar Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Daging (Ton)	3.748,70	3.901,78	3.968,24	3.979,50	3.843,88
2	Produksi Susu (ribu liter)	500,60	613,14	621,72	625,70	704,43
3	Produksi Telur (ton)	2,662.50	3,283.13	3.306,96	3.475,25	3.833,44
4	Produktivitas padi (kwt/ha)	80.42	80,53	80,65	81,60	81,99
5	Produktivitas jagung (kwt/ha)	67,40	67,53	67,69	67,80	68,09

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021.

Dalam hal produktivitas padi dan jagung peningkatannya tidak terlalu tinggi karena cuaca ekstrim yang terjadi di sepanjang tahun 2019 sehingga jadwal tanam dan panen mengalami kemunduran. Pemberantasan hama penyakit pada tanaman juga perlu dioptimalkan sehingga tidak mengurangi kuantitas dan kualitas produksi. Meskipun demikian, secara kuantitas mengalami peningkatan tahun ke tahun sampai dengan tahun 2020.

Demikian pula bidang peternakan, produksi daging, susu, telur mengalami kenaikan yang cukup bagus. Untuk produksi daging 3.748,70 ton pada tahun 2016 menjadi 3.843,88 pada tahun 2020. Produksi susu dari 500,60 pada tahun 2016 menjadi 704,43 pada tahun 2020. Adapun produksi telur 2,662.50 pada tahun 2016 menjadi 3.833,44 pada tahun 2020. Terbatasnya produksi hasil peternakan dikarenakan diantaranya keterbatasan lahan.Untuk itu perlu upaya memaksimalkan hasil ternak yang ada diantaranya dengan pengawasan dan layanan Kesehatan hewan yang dilakukan secara berkala, tepat dan cepat baik dalam pelayanan obat.

Adapun permasalahan pengelolaan limbah yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah peternakan yang ramah lingkungan juga menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dipikirkan solusi ke depan. Dalam rangka menyediakan kualitas hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, perlu penyediaan sarana dan prasarana peternakan yang memenuhi dan berstandar nasional (RPH dan RPHU) dengan menambah beberapa fasilitas yang masih dibutuhkan. Secara umum RPHU Kota Blitar sudah memenuhi standar (bersertifikat NKV), untuk itu dengan penambahan fasilitas baik di RPHU maupun RPH akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah pelanggan listrik di Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah nya mencapai 43.029 pelanggan, dan terus

mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 47.639 pelanggan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 105. Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan Listrik	43.029	44.339	45.274	46.288	47.639
Jumlah SPBE	1	1	1	1	1
Jumlah SPBU	8	8	8	8	8
Jumlah Energi terbarukan (biogas, solarcell)	3	3	3	4	4

Sumber: BPS Kota Blitar dan DLH, 2021

2.3.3.5. Perdagangan

Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB sektor perdagangan mengalami kenaikan cukup bagus, dengan rata-rata kenaikan 13% per tahun, dari Rp. 1.271.622,36,- tahun 2016 menjadi Rp. 1.675.162.180,- tahun 2019. Kenaikan PDRB sektor perdagangan ini diantaranya didukung oleh kenaikan jumlah usaha perdagangan dari 11.450 pada tahun 2016 menjadi 12.954 pada tahun 2018, atau rata-rata kenaikan 4,2% per tahun. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan usaha perdagangan adalah pembinaan Pedagang Kaki lima (PKL) dan asongan, Gebyar Pasar, pembinaan pelaku usaha perdagangan, fasilitasi pembinaan ekspor impor, relokasi pedagang pasar legi, dan pembangunan pasar sebagai upaya peningkatan fasilitas perdagangan.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berbelanja di pasar-pasar tradisional Kota Blitar adalah dengan melakukan tera terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), mengingat pasar masih merupakan primadona perekonomian di Kota Blitar. Walaupun belum semua alat UTTP ditera karena Kota Blitar belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri (bekerja sama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta), namun pelaksanaan tera telah berhasil menera 117 UTTP tahun 2019

lebih besar dari tahun 2018 sebanyak 122. Di tahun 2020, dampak pandemi covid-19 memberikan dampak negatif terhadap PDRB sektor perdagangan dan jumlah usaha perdagangan sehingga menjadikan terkontraksi.

Tabel 2. 106. Perkembangan Urusan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase peningkatan PDRB sektor perdagangan**	**13**	**10,05**	**11,15**	**11,16**	**-5,7**
1.1	PDRB sektor perdagangan (Juta Rp)	1.271.622,36	1.379.424.09	1.535.545.35	1.675.162.18	1.579.930
2	**Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan**	**4,8**	**5,0**	**2,8**	**-7,7**	**NA**
2.1	Jumlah usaha perdagangan	12.000	12.600	12.954	11.960	NA
3	**Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan**	**-**	**-**	**-**	**7,5**	**-36,3**
3.1	Volume Usaha Perdagangan	-	-	916.982.914.000	985.762.612.000	627.909.636.000
4	**Persentase jumlah alat UTTP bertanda tera sah**	**35,34**	**0,95**	**0,79**	**1,96**	**1,19**
4.1	Jumlah alat UTTP bertanda tera sah	5.460	117	122	171	111
4.2	Jumlah alat UTTP yang ada	15.452	12.266	15.433	8.740	9.317
5	Jumlah Pasar Tardisional	9	9	9	9	10
6	Jumlah Pasar Modern	16	16	16	36	36
7	Jumlah PKL/pedagang	1.370	1.750	1.817	1.837	1.795

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, 2021

2.3.3.6. Perindustrian

PDRB sektor industri di Kota Blitar berkembang cukup baik, dari Rp. 457.171.180,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 659.375.390,- tahun 2019. Hal ini didukung oleh diantaranya banyaknya binis rintisan *(start up)* industri non formal yang mulai berkembang di Kota Blitar. Hal ini berdampak pula pada peningkatan nilai produksi industri di Kota Blitar dengan rata-rata kenaikan 21,8% per tahun selama kurun waktu lima

tahun terakhir dan yang tidak kalah penting hal ini berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri di Kota Blitar.

Sementara itu, persentase peningkatan PDRB sektor industri memiliki angka yang fluktuatif, mulai dari Tahun 2016 yaitu sebesar 12,4% kemudian menurun pada tahun 2016 sebesar 9,9% dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 10,02%. Peningkatan yang cenderung melambat ini dipengaruhi kurangnya semangat kewirausahaan dan keterbatasan potensi pelaku usaha industri untk meningkatkan kapasitas usahanya. Berikut data terkait urusan perindustrian di Kota Blitar. Sementara di tahun 2020, seiring dengan adanya pandemi covid-19 peningkatan PDRB sektor industri terkontraksi tajam. Hal yang sama terjadi pada nilai produksi industri yang juga mengalami penurunan signifikan.

Tabel 2. 107. Perkembangan Sektor Industri Kota Blitar Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase peningkatan PDRB sektor industri**	**9,9**	**10**	**10,01**	**10,02**	**-0,81**
1.1	PDRB sektor industri (Rp. Dalam juta)	502.362.53	552.608.39	607.975.83	659.375.39	654.040
2	**Persentase peningkatan nilai produksi industri**	**96,32**	**5,87**	**2,33**	**4,4**	**-4,7**
2.1	Nilai produksi industri (Rp. Dalam ribuan)	682.738.565	722.782.143	739.675.720	772.131.678	739.771.197
2.2	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	4.745	4.780	4.811	4.844	4.793
2.2.1	IKM formal	132	137	143	154	166
2.2.2	IKM non formal	4.469	4.643	4.668	4.690	4.627
2.2.3	Persentase IKM formal/berijin IUI	2,78	2,87	2,97	3,18	3,46
2.2.4	Tenaga kerja	12.227	12.435	13.763	14.021	13.774
2.2.5	Investasi	57.492.269	74.146.933	89.815.949	93.996.208	73.977.1197

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, 2021

2.3.4. Unsur Pendukung

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan yang baik menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintahan yang baik. Urusan administrasi pemerintahan di Kota Blitar diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan standard kepuasan layanan sekretariat. Capaian urusan Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Kota Blitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memperoleh predikat BB. Pengkoordinasian penilaian SAKIP Kota Blitar oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar. Capaian nilai SAKIP ini didukung adanya tim yang solid dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SAKIP.
2. Perolehan nilai LPPD Kota Blitar selama empat tahun berturut–turut adalah sangat tinggi kecuali pada Tahun 2018 menerima predikat Tinggi, sedangkan nilai LPPD tahun 2019 dan 2020 belum dirilis. Sinkronisasi dalam pengumpulan data menjadi salah satu penentu agar laporan LPPD dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.
3. Persentase tempat ibadah aktif pada tahun 2017 – 2020 terealisasi 100%. Sampai dengan tahun 2020, jumlah tempat ibadah di Kota Blitar sebanyak 505 lokasi dan keseluruhan tempat ibadah dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah masyarakat secara aktif.
4. Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk tahun 2020 mencapai adalah 1 : 72. Artinya dari sejumlah 72 penduduk warga Kota Blitar terdapat 1 di antaranya yang menjadi pengajar agama. Jika dibandingkan dengan data tahun 2019 (1 : 81), capaian tahun 2020 menunjukkan peningkatan jumlah pengajar agama di Kota Blitar.
5. Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi tercapai 7,92% pada tahun 2020, meningkat dari data tahun 2019 yang hanya

mencapai 3,758%. Data ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemenuhan fasilitas dan sarpras tempat ibadah yang nyaman.

6. Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasipada tahun 2019 dan 2020 tercapai 86%. Capaian ini menunjukkan bahwa persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi pada tahun 2020 masih stagnan atau sama dengan tahun sebelumnya.
7. Pada indikator persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat selama 3 tahun berturut–turut menunjukkan capaian 100%.
8. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum mencapai 100% pada 4 tahun terakhir.
9. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terealisasi 100%.
10. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan pada tahun 2020mencapai 100, sama capaiannya dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan merupakan factor pendukung dalam pencapaian kinerja ini.
11. Persentase pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui *e-procurement* tahun 2020 turun capaiannya setelah sempat naik di tahun 2019 (92,86%) yaitu sebesar 58,24%. Penurunan ini disebabkan karena banyak dari rencana pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan akibat refocussing anggaran di tahun 2020 yang dialihkan untuk pembiayaan Covid19.
12. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan surat menyurat dan arsip, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan dan keprotokolan, masing–masing menunjukkan predikat baik selama 5 (lima) tahun terakhir, sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini merupakan hasil dari pendampingan dalam melakukan evaluasi SKM pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 2. 108. Capaian Indikator Urusan Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP Kota Blitar	60,27 B	70,86 BB	71,87 BB	71,91 BB	72.06 BB
	Nilai SAKIP Setda minimal B	CC 59,48	BB 76,66	BB 78,82	A 81,02	A 83,99
2	Nilai LPPD Kota Blitar	3,5 Sangat Tinggi	2,8 Tinggi	3,35 Sangat Tinggi	NA	NA
3	Persentase tempat ibadah aktif (%)	62	100	100	100	100
4	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	1:86	1:87	1:74	1:81	1:72
5	Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	5	3	16	3,758	7,92
6	Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	85	91	93	86	86
7	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	99,90	100	100	100	100
8	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang pemerintahan umum	100	100	100	100	100
9	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100
10	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang administrasi pembangunan	100	100	93	100	100
11	Persentase pelaksanaan pengadaan barang / jasa melalui e-procurement	96,69	89	86	92,86	58,24
12	SKM layanan surat menyurat dan arsip	baik	85,33 baik	87,44 Baik	88,11 baik	93,809 Sangat baik
13	SKM layanan administrasi keuangan	baik	80,82 baik	79,28 Baik	83,85 baik	92,01 Sangat baik
14	SKM layanan kerumahtanggaan	baik	81,35 baik	82,16 Baik	83,68 baik	93,925

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
						Sangat baik
15	SKM layanan sarana dan prasarana	baik	83,48 baik	85,71 Baik	85,16 baik	94,485 Sangat baik
16	SKM layanan kehumasan dan keprotokolan	baik	82,99 baik	86,17 Baik	86,47 baik	86,925 baik

*Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021 *NA Hasil belum rilis*

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan kepada DPRD Kota Blitar selama tiga tahun berturut–turut telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut ini.

1. Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
   Indeks kepuasan DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar mencapai kategori nilai " BAIK " selama lima tahun berturut – turut, terakhir tahun 2020 dengan nilai 80,57. Pada Tahun 2018 sempat terjadi penurunan nilai IKM dari tahun 2017.Akan tetapi upaya peningkatan layanan terus ditingkatkan sekaligus dalam hal penyamaan pemahaman tentang ruang lingkup SOP pelayanan Sekretariat Daerah kepada DPRD.
2. Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah dilihat dari data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar telah tercapai 100% selama lima tahun terakhir.
3. Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti tahun 2016 – 2020 mencapai 100%.

Tabel 2. 109. Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	67,77 Baik	77,72 Baik	77,15 Baik	77,69 Baik	80,57 Baik
2	Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021

2.3.5. Unsur Penunjang

2.3.5.1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan agar setiap langkah dan proses dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembangunan daerah, perencanaan menjadi unsur yang srategis untuk mendukung keberhasilan suatu program pembangunan karena dengan perencanaan yang tepat akan memberikan hasil yang relevan dan akuntabel. Capaian kinerja urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas perencanaan baik.
   Capaian Persentase perangkat daerah dengan kualitas perencanaan BAIK tahun 2020 adalah sebesar 98,28% dengan substansi penilaian antara lain Kesesuaian Sasaran dan program dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kesesuaian program dalam RKA Perangkat Daerah dengan RKPD.
2. Persentase dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti
   Capaian Persentase dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti adalah dihitung dari jumlah dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan yang terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu Ekonomi,

Infrastruktur, Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat tahun 2017 – 2020 adalah 100%. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Capaian kinerja perencanaan per tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 110. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kota Blitar tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas perencanaan baik (%)**	**91,67**	**97,35**	**95,69**	**97,41**	**98,28**
1.1	Jumlah Perangkat Daerah yang perencanaannya Baik	26	27	24	26	27
1.2	Jumlah Perangkat Daerah	29	29	29	29	29
2	**Persentase dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti (%)**	**92,31**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.1	Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan	12	7	12	11	4
2.2	Jumlah dokumen perencanaan sektoral	13	7	12	11	4

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2021

2.3.5.2. Keuangan

Adapun capaian kinerja keuangan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah selama lima tahun terakhir, jumlah Perangkat Daerah mengalami tren penurunan, walaupun hal ini tidak mencerminkan penurunan kinerja karena jumlah Perangkat Daerah sesuai PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah disesuaikan dan jumlahnya semakin sedikit karena Kelurahan sesuai nomenklatur baru, bukan lagi Perangkat Daerah. Dalam hal terkait keuangan, masih menggunakan SKPD mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 yang mana dalam pasal menerangkan tentang tugas Pengguna Anggaran (PA).

1. Capaian persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama lima tahun terakhir ada trend kenaikan, dari 15,73% pada tahun 2016 menjadi 19,82% pada tahun 2020. Hal ini selain dipicu

oleh peningkatan kesadaran masyarakat Kota Blitar membayar pajak dan retribusi, juga adanya koordinasi, rekonsiliasi dan konsistensi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta SDM dan kompetensi pengelola pajak/retribusi daerah yang terus ditingkatkan sehingga mendukung proses pemungutan pajak dan retribusi di Kota Blitar. Namun capaian ini dirasakan belum optimal karena banyaknya potensi-potensi pajak yang belum terpetakan dalam data pajak.

2. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang laporan keuangannya tepat waktu tahun 2018 – 2020 adalah sebanyak 67 SKPD sehingga mencapai 100%. Aplikasi dan sistem online yang ada terbukti lebih mempermudah dalam menyajikan Laporan Keuangan dan Konsolidasi yang tepat waktu dan akuntabel. Di samping itu juga mempermudah rekonsiliasi antar entitas akuntansi dengan entitas pelaporan.
3. Persentase SKPD yang tertib pengelolaan aset daerah pada tahun 2018 – 2020 mencapai 100%. Berkaitan dengan penyampaian neraca barang daerah, faktor penentu keberhasilan yaitu adanya ketentuan data barang yang berasal dari realisasi belanja modal dientry di aplikasi SIMBADA bersamaan dengan waktu realisasi anggarannya setelah persyaratan disetujui oleh tim aset daerah sehingga menjamin neracanya lebih tertib. Selain itu juga adanya komitmen para Pengurus barang untuk melaksanakan jadwal tepat waktu sesuai ketentuan.
4. Persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2020 turun menjadi 21,51%, hal ini tentunya dipengaruhi penurunan oleh pandemi Covid yang terjadi selama tahun 2020.
5. Jumlah perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 90% mengalami penurunan dari 46 SKPD pada tahun 2019 atau 68,66% menjadi 45 SKPD pada tahun 2020 atau 68,18%.

Tabel 2. 111. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Blitar Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1.	**Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)**	**15,73**	**15,54**	**18,23**	**17,66**	**19,82**
1.1	Jumlah PAD	133.546.753.050,97	123.002.774.937,00	163.025.005.752,93	166.140.178.781,39	174.590.638.056,30
1.2	Jumlah Pendapatan Daerah	848.814.322.324,55	791.724.603.085,00	894.409.175.023,96	940.722.867.100,39	880.876.904.723,30
2.	**Persentase SKPD yang menyusun dokumen keuangan tepat waktu (%)**	**75,29**	**75,34**	**100,00**	**100,00**	**100**
2,1	Jumlah SKPD yang menyusun dokumen keuangan tepat waktu	64	55	67	67	67
2,2	Jumlah SKPD yang menyusun dokumen keuangan	85	73	67	67	67
3	**Persentase SKPD yang tertib pengelolaan aset daerah (%)**	**93**	**94**	**100**	**100**	**100**
3,1	Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan aset daerah	79	69	67	67	67
3,2	Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah	85	73	67	67	67
3,3	Jumlah rincian total barang milik daerah (BMD) Simbada	-	-	-	454.587	
3,4	Jumlah data aset pada neraca keuangan	2.228.582.896.965,28	2.262.927.054.409,84	2.441.419.752.949,69	2.044.733.042.031,17	
4	**Persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD (%)**	**19,47**	**31,70**	**24,87**	**26,87**	**21,51**
4,1	Pendapatan pajak daerah	26.001.646.559,99	38.995.899.840,70	40.550.229.750,28	44.650.054.610,03	37.576.085.299,90
5	**Persentase SKPD yang realisasi belanja di atas 90% (%)**	**74,12**	**68,49**	**68,66**	**68,66**	**66,18**
5.1	Jumlah SKPD yang realisasi belanja di atas 90%	63	50	46	46	45
5.2	Jumlah SKPD	85	73	67	67	67

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2021

2.3.5.3. Kepegawaian

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan karena dapat digunakan untuk mengukur ketersediaan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program pembangunan. Berikut adalah capaian kinerja urusan Kepegawaian:

1. Indeks Profesionalitas ASN Kota Blitar Tahun 2020 mencapai realisasi 78,54 atau dalam kategori sedang. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,31 poin. Angka Indeks prosionalitas ASN diukur melalui empat dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Permasalahan yang masih dialami adalah kurang tersedianya data – data kepegawaian yang lengkap dan *up to date* yang sangat berpengaruh dalam proses perhitungan indeks profesionalitas.
2. Indikator Persentase Penempatan dan Promosi Aparatur Sesuai dengan Kompetensinya, tahun 2020 mencapai 90,58%, dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Jika melihat data capaian lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan data yang fluktuatif, salah satu penyebabnya adalah tidak menentunya proses rekruitmen, mutasi dan promosi sehingga menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
3. Nilai Indeks Kepuasan Layanan ASN pada tahun 2016–2020 secara berturut–turut berpredikat baik kualitas layanan kepada ASN perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan penyederhanaan alur layanan agar lebih efektif dan efisien dengan tetap mengacu ketentuan yang berlaku.
4. Pada indikator Persentase Aparatur Sipil yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Sesuai Standar tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 35,87%, meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Jika melihat data tahun 2020, dari sejumlah 2.958 ASN, 1.002 di antara telah menyusun SKP sesuai dengan standar. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan dengan memberikan

pemahaman ASN tentang SKP yang standar melalui kegiatan yang relevan.

Tabel 2. 112. Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Indeks Profesionalitas ASN (indeks)**	**NA**	**87,64**	**79,89**	**78,23**	**78,54**
2	**Persentase Penempatan dan Promosi Aparatur Sesuai dengan Kompetensinya (%)**	**71,62**	**70,37**	**83,77**	**94,32**	**90,58**
2.1	Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan Sesuai Kompetensi (orang)	2.721	2.117	2.484	2.790	2.530
2.2	Jumlah Seluruh Pegawai (orang)	3.799	3.008	2.965	2.958	2.793
3	**Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (indeks)**	**75,71**	**78,93**	**78,93**	**79,15**	**82,49**
		Baik	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**
4	**Persentase Aparatur Sipil yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Standard (%)**	**NA**	**16,75**	**20,47**	**24,51**	**35,87**
4.1	Jumlah ASN yang Menyusun SKP sesuai Standard (orang)	NA	504	607	725	1.002
4.2	Jumlah Seluruh Pegawai (orang)	NA	3008	2965	2.958	2.793

Sumber : BKD Kota Blitar, 2021

2.3.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan karena dapat digunakan untuk mengukur ketersediaan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program pembangunan. Capaian kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan diukur melalui indikator persentase aparatur yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis/Fungsional. Sepanjang tahun 2020 hanya ada sejumlah 282 dari total 2.793 ASN yang mengikuti diklat struktural maupun teknis/fungsional atau dengan persentase sebesar 8,30%. Hal ini terjadi karena terhambatnya pelaksanaan diklat tatap muka pada masa Covid19. Sedangkan diklat yang dilaksanakan secara daring atau online pada tahun 2020 jumlahnya sangat sedikit.

Tabel 2. 113. Capaian Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Blitar Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis / Fungsional (%)**	**13,5**	**28,19**	**34,77**	**36,10**	**8,30**
1.1	Jumlah ASN mengikuti Diklat & Kompetensi	513	848	1.031	1.068	232
1.2	Jumlah Seluruh Pegawai	3.799	3.008	2.965	2.958	2.793

Sumber : BKD Kota Blitar, 2021

2.3.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, badan yang mengampu urusan litbang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan pemerintahan melalui penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Setidaknya kelitbangan memiliki fungsi antara lain menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, melaksanakan kelitbangan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kelitbangan, melakukan pembinaan kepada perangkat daerah, memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan, memastikan tersusunnya kebijakan dan regulasi berbasis hasil kelitbangan, dan melaksanakan administrasi kelitbangan.

Penelitian dan pengembangan merupakan pendukung perencanaan dalam memberikan rujukan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Indikator Persentase Hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan pada sampai dengan tahun 2019 menghasilkan kinerja 100%. Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang dihasilkan selama lima tahun terakhir sebanyak 34 dokumen dan dimanfaatkan seluruhnya, sehingga

persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan sebesar 100%. Sedangkan data dokumen penelitian dan pengembangan serta pencapaian indikator Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam Pelaksanaan Pembangunan dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 114. Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.1	Jumlah hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan (dokumen)	2	3	14	13	7
1.2	Jumlah hasil litbang (dokumen)	2	3	14	13	7

Sumber : Bappeda, 2021

2.3.5.6. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang ditentukan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya prosedur dan mekanisme pengawasan internal yang dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mencapai tujuan yang dicita-citakan. Capaian kinerja unsur Inspektorat Daerah dijabarkan sebagai berikut:

1. Opini BPK atas dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencapai 100% atau memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut–turut pada sepuluh tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar sudah memenuhi standard akuntansi pemerintahan.

2. Capaian nilai SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Blitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah BB dengan nilai 72,06. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
3. Pada tahun 2020, laporan keuangan PD yang telah direview sejumlah 28 dari total 29 perangkat daerah di Kota Blitar, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari data tahun – tahun sebelumnya.
4. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan pada tahun 2016–2020 secara berturut–turut mencapai 100%. Artinya semua pengaduan/kasus dapat diselesaikan secara keseluruhan sesuai dengan target yang ditentukan. Data tahun 2016–2020 menunjukkan adanya penurunan jumlah pengaduan/kasus masyarakat, data terakhir sebanyak 2 kasus pada tahun 2020.
5. Jumlah rekomendasi hasil audit BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.023 dari total 1.276 rekomendasi yang ada. Sehingga persentase rekomendasi hasil audit BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2020 mencapai angka 80,17%. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2019, persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti menunjukkan data penurunan.
6. Perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi tahun 2020 sebanyak 8 dari total 10 perangkat daerah yang dievaluasi, menunjukkan persentase sebesar 80% sekaligus menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan penambahan 2 perangkat daerah. SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan evaluasi masih perlu ditingkatkan karena belum semua unsur pengendalian

terdokumentasi dengan baik dan belum dilakukannya evaluasi berkelanjutan atas penerapan pengendalian. Kerjasama perangkat daerah sangat diperlukan agar evaluasi dapat berjalan dengan lebih optimal.

7. Di tahun 2020 seluruh perangkat daerah di Kota Blitar yaitu sebanyak 29 Perangkat Daerah mendapat nilai memuaskan untuk penilaian SAKIP. Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A) pada tahun 2019 - 2020 mencapai 100 persen dan meningkat signifikan dari tahun 2018 dengan capaian sebanyak 17 PD dengan nilai memuaskan. Nilai akuntabilitas kinerja ditentukan oleh kemampuan instansi dalam merencanakan target kinerja, menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja, menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan, mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, dan melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, perlu adanya konsistensi antar dokumen agar akuntabilitas kinerja dapat tercapai.

Tabel 2. 115. Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**OpiniBPK atas LKPD (predikat)**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
2	**Nilai SAKIP Kota Blitar (nilai)**	**60,27 B**	**70,86 BB**	**71,87 BB**	**71,91 BB**	**72,06 BB**
3	**Persentase laporan keuangan PD yang telah direview (%)**	**NA**	**27,59**	**37,93**	**48,28**	**96,55**
3.1	Jumlah laporan keuangan PD yang telah direview (dokumen)	NA	8	11	14	28
3.2	Jumlah Perangkat Daerah	NA	29	29	29	29
4	**Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4.1	Jumlah kasus yang terselesaikan (kasus)	27	19	16	12	2

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.2	Jumlah kasus masuk (kasus)	27	19	16	12	2
5	**Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti (%)**	**77.40**	**67,57**	**80,81**	**83,69**	**80,17**
5.1	Jumlah rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti (rekomendasi)	113	425	598	985	1023
5.2	Jumlah rekomendasirekomendasi hasil audit (rekomendasi)	146	629	740	1177	1276
6	**Persentase PD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi (%)**	**NA**	**28,57**	**42,86**	**60**	**80**
6.1	Jumlah PD yang menerapkan SPIP level terdefinisi	NA	2	3	6	8
6.2	Jumlah PD yang dievaluasi	NA	7	7	10	10
7	**Persentase PD dengannilai SAKIP minimal memuaskan predikat A (%)**	**4**	**48,28**	**58,62**	**100**	**100**
7.1	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	1	14	17	29	29
7.2	Jumlah PD	28	29	29	29	29
8	**Jumlah PD yang telah diterapkan WBK/WBBM**	**NA**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Jumlah Auditor (orang)**	**8**	**8**	**8**	**12**	**12**
9.1	Jumlah Auditor yang dibutuhkan (orang)	27	27	27	27	27
9.2	Jumlah kekurangan auditor (orang)	19	19	19	15	15

Sumber: Inspektorat, 2021

2.3.6. Unsur Kewilayahan

2.3.6.1. Kecamatan

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Capaian indikator kecamatan, sebagai berikut:

1. Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan meningkat

selama 3 (tiga) tahun terakhir pada tiga kecamatan di Kota Blitar. Hal ini semakin banyaknya inovasi dalam hal pelayanan guna memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan profesional. Tiga kecamatan di Kota Blitar menunjang kemudahan dalam koordinasi untuk saling sinergi guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ ketertiban/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen. Kerjasama dengan 3 (tiga) pilar yaitu TNI dan kepolisian sangat mendukung dalam pencapaian ini.
3. SKM di 3 (tiga) kecamatan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah Baik. Namun tetap perlu dilakukan peningkatan layanan secara terintegrasi.

Tabel 2. 116. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan KecamatanKota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kecamatan Sukorejo					
1	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan (%)	NA	88	90	93	100
2	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ketertiban/ kesejahteraansosial/pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti (%)	NA	100	100	100	100
3	SKM	80 Baik	82,05 Baik	86,5 Baik	90,22 Baik	89,06 Baik
	Kecamatan Kepanjenkidul					
1	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	NA	72	91	92	100
2	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ketertiban/ kesejahteraansosial/pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti	NA	100	100	100	100
3	SKM	75,4 Baik	82,2 Baik	81,49 Baik	82,11 Baik	82,15 Baik
	Kecamatan Sananwetan					

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	NA	72	91	92	93
2	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ketertiban/ kesejahteraansosial/pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti	NA	100	100	100	100
3	SKM	74,6 Baik	69,23 Baik	81,68 Baik	81,11 Baik	81,37 Baik
	RATA – RATA					
1	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan		77,33	90,66	92,33	97,67
2	Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ketertiban/ Kesejahteraansosial/pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti		100	100	100	100
3	SKM	76,67	77,82	83,23	84,48	84,19

Sumber : Kecamatan Se-Kota Blitar, 2021

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan kebangsaan dan politik di Kota Blitar diarahkan pada peningkatan penanganan potensi kasus/konflik di masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan stabilisasi iklim politik dalam kehidupan berorganisasi. Capaian kinerja terkait urusan kesatuan bangsa dan politik ada 6 (enam) poin antara lain:

1. Persentase penanganan potensi kasus SARA selama lima tahun terakhir mencapai 100%. Artinya setiap hal yang sudah terindikasi akan menyebabkan potensi kasus SARA sudah dapat dilakukan antisipasi dan penanganan dini sehingga tidak sampai menimbulkan kasus SARA.

2. Indeks Demokrasi pada Tahun 2020 adalah angka 86,31, mengalami kenaikan dari tahun 2019 (82,98). Pemberian pembinaan dan Pendidikan politik yang intensif kepada masyarakat sangat mendukung dalam pencapaian indikator ini.
3. Persentase konflik sosial yang tertangani pada tahun 2019 – 2020mencapai 100%. Selama tahun 2020 ada 21 jumlah konflik sosial yang terjadi dan semua sudah tertangani sehingga tercapai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%. Solidnya keberadaan kelembagaan-kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah seperti FKDM, FKUB dan lainnya merupakan sarana pendukung dalam pendeteksian dan pencegahan konflik sosial.
4. Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar dengan target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 76,7%. Jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang ada sampai dengan tahun 2020 sejumlah 202 dan sudah terdaftar sejumlah 155. Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik ini menjadi kewenangan Kemenhumkam. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian perlunya Kerjasama terkait akses data dan informasi dengan Kemenhumkam.

Lebih lanjut data terkait kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 117. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Persentase penanganan potensi kasus SARA (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.1	Jumlah Potensi Kasus SARA yang ditangani	0	0	0	0	1
1.2	Jumlah potensi Kasus SARA	0	0	0	0	1
2	**Indeks Demokrasi**	**NA**	**78,64**	**80,34**	**82,98**	**86,31**
3	**Persentase konflik sosial yang tertangani (%)**	**100**	**100**	**87,5**	**100**	**100**
3.1	Jumlah konflik sosial yang tertangani	2	2	7	17	21
3.2	Jumlah konflik sosial	2	2	8	17	21

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.	**Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar**	**71,43**	**72,19**	**73,20**	**73,98**	**76,7**
4.1	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar	130	135	142	145	155
4.2	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	182	187	194	196	202
5	**Persentase kejadian SARA yang tertangani (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.1	Jumlah kejadian SARA yang tertangani	0	0	0	0	0
5.2	Jumlah kejadian SARA	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Kota Blitar, 2021
**NA data tidak dihitung*

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Pengeluaran Perkapita disesuaikan Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 12.499 dan pada tahun 2019 angkanya naik menjadi 13,851. Sementara itu pada tahun 2020 pengeluaran perkapita megalami sedikit penurunan menjadi 13,733 dalam ribu rupiah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 118. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Blitar Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (dalam ribu rupiah)	12,499	12,910	13,391	13,851	13,733

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2021

2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari sisi permintaan akhir pertumbuhanekonomi Kota Blitar kecuali pada tahun 2020, pada setiap tahunnya didominasipertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga(PK-RT) yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT pada tahun 2020 merupakan salah satu komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan positif.Berikut disajikan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Kota Blitar Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 119. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Rumah tangga	3.636.358,97	3.929.048,63	4.293.824,04	4.610.130,00	4.542.971,52
2	Konsumsi LNPRT	61.306,98	65.058,29	71.610,59	76.078,23	78.045,74
3	Konsumsi Pemerintah	1.257504,56	1.394.019,43	1.551.786,47	1.672.282,82	1.657.622,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.100.380,58	1.201.540,51	1.316.386,38	1.412.283,61	1.349.553,10
5	Perubahan Inventori	2.214,81	2.254,64	2.493,51	2.554,84	1.552,41
6	Ekspor	2.320.020,00	2.697.710,00	3.197.580,00	3.261.360,00	3.242.590,00
7	Impor	3.046.500,00	3.507.270,00	2.131.980,00	4.243.070,00	4.164.190,00
	PDRB	**5,331,286.72**	**5,782,364.14**	**6,301,693.00**	**6,791,619.37**	**6,708,144.94**

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2021

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang direvaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).Peningkatan nilai PDRB ADH Konstan 2010 Kota Blitar pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 120. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Blitar Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Rumah tangga	2.811.628,13	2.946.601,92	3.093.969,54	3.239.192,45	3.165.353,71
2	Konsumsi LNPRT	39.605,88	40.532,24	43.215,05	44.885,21	45.390,64
3	Konsumsi Pemerintah	757.479,47	785.082,32	824.054,11	860.532,87	833,157,21
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	807.132,21	855.586,61	907.978,52	950.082,55	899.313,89
5	Perubahan Inventori	2.676,00	2.713,85	2.734,00	2.757,33	1.664,19
6	Ekspor	1.903.667,52	2.144.321,36	2.349.813,75	2.427.411,21	2.394.490,00
7	Impor	2.242.930,37	2.459.823,49	2.655.295,39	2.691.927,53	2.616.810,00
	PDRB	**4.079.258,84**	**4.315.014,82**	**4.566.469,58**	**4.832.891,82**	**4.722.554,24**

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2021

2.4.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi perkapita sebulan penduduk Kota Blitar sudah bergeser ke arah untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan, yaitu mencapai Rp. 634.033,00 atau 53,52 persen, sedangkan 46,48 persen sisanya atau Rp 729.974,00 digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Hal ini menggambarkan bahwa semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan dibandingkan pengeluran bukan makanan. Dari pengeluaran konsumsi bukan makanan sebesar 53,52 persen, ternyata sebagian besar digunakan untuk pengeluaran konsumsi bukan makanan jenis perumahan mencapai 41,20 persen, pengeluaran barang dan jasa mencapai 25,60 persen, dan pengeluaran barang tahan lama mencapai 16,91 persen.

Tabel 2. 121. Persentase Pengeluaran Perkapita Makanan dan Bukan Makanan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Makanan (Rupiah)	463.551	530.602	634.033	575.053	597.780
2	Bukan Makanan (Rupiah)	667.439	629.525	729.974	693 .586	771.865

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Pengeluaran Perkapita Makanan (%)	40,99	45,74	46,48	45,33	43,64
4	Persentase Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan (%)	59,01	54,26	53,52	54,67	56,36

Sumber : BPS Kota Blitar Tahun 2021

2.4.4. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 nilainya sebesar 62,71 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 78,37, namun pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 67,17. Faktor penghambat dalam pencapaian indeks reformasi birokrasi adalah budaya organisasi yang belum sepenuhnya di pahami dan dilaksanakan oleh satuan terkecil organisasi, implemetansi e-governance yang masih belum terintegrasi ke semua Perangkat Daerah. Berikut data capaian indeks reformasi birokrasi di Kota Blitar disajikan dalam tabel.

Tabel 2. 122. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	**62,71**	**68,68**	**70,5**	**78,37**	**67,17**

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2021

2.4.5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tingkat Kota Blitar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 nilainya mencapai 75,45, kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan cukup baik hingga menjadi sebesar 82,39. Nilai SKM ini diperoleh dari nilai rata-rata SKM 29 (dua puluh Sembilan) Perangkat Daerah baik layanan kepada

masyarakat maupun layanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Blitar.

Tabel 2. 123. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,45 Baik	77,3 Baik	80,35 Baik	80,62 Baik	82,39 Baik

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2.4.6. Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan *(Dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penduduk dianggap produktif jika berada pada rentang usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk yang belum maupun tidak produktif lagi jika berada pada rentang usia muda yaitu 0-14 tahun dan lanjut usia yaitu 65 tahun ke atas.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

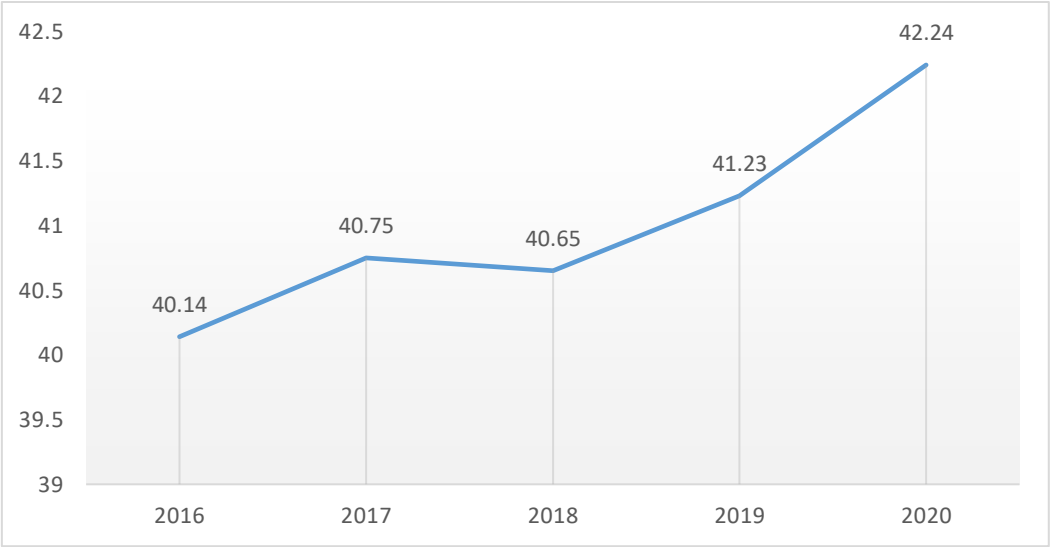
Tabel 2. 124. Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	32.079	32.879	33.047	33.343	35.311
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	11.489	11.911	12.370	12.719	11.701

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	43.568	44,790	45,417	46,062	47,012
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	108.529	109.924	111.731	111.883	111.701
5.	Rasio ketergantungan (%) (3) / (4) * 100	40,14	40,75	40,65	41,23	42,24

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2021

Grafik 2. 18. Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, 2021

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa rasio ketergantungan di Kota Blitar selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 rasio ketergantungan mencapai 40,14 persen dan pada Tahun 2019 menjadi 41 persen. Ini menunjukkan bahwa artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kota Blitar menanggung 41 orang yang non produktif. Sementara di tahun 2020 naik lagi. Hal ini tetap menjadikan Kota Blitar pada periode ini mengalami bonus demografi dan positif untuk dimanfaatkan pada pencapaian target pembangunan daerah.

Penyajian data dan informasi gambaran kondisi Kota Blitar selama beberapa tahun terakhir yang diuraikan di atas dapat dilihat dalam bentuk rekapitulasi pada tabel di bawah.

Tabel 2. 125. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKota Blitar Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	5,76	5,78	5,83	5,84	-2,28
2	Laju inflasi	Persen	1,3	3,44	1,97	1,83	1,93
3	PDRB per kapita	Juta	38.329,51	41.447,00	44.828,00	51.594,19	4.722,55
4	Indeks Gini	Indeks	0,41	0,39	0,35	0,33	0,344
5	Persentase penduduk miskin	Persen	7,18	8,03	7,44	7,13	7,78
6	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	9,97	11,22	10,47	10,1	11,1
7	Garis Kemiskinan	Rp	356.147	383.021	425.832	456.778	465.868
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,04	0,93	1,05	1,14	0,98
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,2	0,24	0,31	0,23	0,22
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,71	77,1	77,58	78,56	78,57
11	Indeks Pendidikan	Indeks	0,72	0,72	0,72	0,75	0,73
12	Indeks Kesehatan	Indeks	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,65	60,88	63,51	63,12	66,52
14	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,88	9.89	9.90	10,1	10,11
15	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14	14,01	14,02	14,31	14,32
16	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,09	73,17	73,36	73,6	73,75
17	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0,07	0,6	0,11	0,07	0,08
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
2.3.1	**Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**						

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I.	**Layanan Urusan Wajib**						
1	**Pendidikan**						
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
-	APS SD	Persen	100	100	100	100	99,79
-	APS SMP	Persen	96,87	97,52	97,05	97.47	97,22
-	APS SMA	Persen	89,46	82,11	89,2	90.03	89,79
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen					
-	APK SD	Persen	104,36	102,79	98,5	117,02	113,31
-	APK SMP	Persen	87,57	89,53	98,81	153,41	149,28
-	APK SMA	Persen	124,22	106,08	106,86	110,14	105,91
1.4	Angka partisipasi Murni (APM)						
-	APM SD/MI/Paket A	Persen	96,28	93.64	97,39	98.88	98,97
-	APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	Persen	92,33	94,59	96,67	97,28	95,55
1.5	Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A	Jiwa	13.768	13.256	13.717	15.336	15.505
1.6	Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Jiwa	6.719	6.697	6.565	7.360	7.602
1.7	Rasio Murid Terhadap Ketersediaan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan						
-	SD	Rasio	248	245	242	235	225
-	SMP	Rasio	454	445	455	427	423
1.8	Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan						
-	SD	Rasio	21	20	18	17	16
-	SMP	Rasio	17	18	17	17	16

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.10	Angka Kelulusan						
-	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	Persen	100	100	124,49	100	100
-	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	Persen	100	100	151,04	100	100
1.11	Angka melanjutkan SD ke SMP	Persen	99,87	104,17	135,8	110,14	128,99
1.12	Angka melanjutkan SMP ke SMA/K	Persen	96,05	116,4	162,41	162,59	124,89
1.13	Angka rata-rata UN/USBN SD	Nilai	7,26	7,93	7,2	7,41	8,28
1.14	Angka rata-rata UN/USBN SMP	Nilai	6,177	6,82	6,4	6,2	8,21
1.15	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	Persen	96,57	96,64	97,43	98,46	98,32
2	**Kesehatan**						
2.1	Jumlah Puskesmas	Unit	NA	NA	3	3	3
2.2	Jumlah Rumah Sakit	Unit	4	5	5	5	5
2.3	Jumlah Tenaga Kesehatan	Nakes	1.058	1.091	1.150	1.393	1.494
2.4	Angka Kematian Ibu	Persen	236,18	0	255,23	99,4	189,13
2.5	Angka Kematian Bayi	Persen	9,92	10,91	13,78	11,93	11,82
2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Mardi Waluyo	Indeks	77,14	78,68	78,82	77,97	80,85
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.7	Cakupan Universal Health and Risk /UHC	Persen	61,43	63,74	65,28	81,64	95,27
2.8	Persentase indikator SPM yang mencapai target	Persen	76,6	79,04	79,04	80,55	79,63
2.9	*Bed Occupancy Rate* (BOR) Standar Nasional 60-85%	Persen	77,14	68,4	71,8	73,81	56,60

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.10	*Average Length of Stay* (ALOS) Standar Nasional 6-9 hari	Hari	4,38	4,69	5,06	4,66	4,52
2.11	*Turn Over Internal* (TOI) Standar Nasional 1-3 hari	Hari	1,36	2,14	1,92	1,63	3,45
2.12	*Bed Turn Over* (BTO) Standar Nasional 40-50 kali	Kali	63,85	54,03	53,5	58,61	45,91
2.13	*Net Death rate* (IDR) Standart Nasional <25%	Permil	43	47,15	56,16	51,99	58,3
2.14	*Gross Death Rate* (GDR) Standar Nasional <45%	Permil	81	87,31	93,46	93,11	103,06
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Persentase infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam kondisi baik	Persen	85,7	89,12	89,96	89,86	90,46
3.2	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Berkeselamatan	Persen	73,55	74,069	74,551	74,517	75,15
A	persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	99,83	97,04	97,88	97,24	98,146
B	persentase jalan dengan bahu jalan dalam kondisi baik	Persen	48,47	48,488	48,488	48,488	49,676
C	persentase jalan dengan trotoar dalam kondisi baik	Persen	26,98	28,993	28,993	29,074	29,378
D	persentase jalan dengan pelengkap jalan (Jembatan) dalam kondisi baik	Persen	98,62	99,31	99,315	99,32	99,320
E	persentase jalan dengan pelengkap jalan (gorong-gorong) dalam kondisi baik	Persen	92,64	96,512	98,077	98,462	99,231

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3.3	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	91,62	94,4	96,03	94,53	94,80
A	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	meter	145,4545	149,87	155,5246	160,3928	160,8478
B	panjang total jaringan irigasi	meter	158,7666	158,7666	161,9557	169,6731	169,6731
3.4	Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar	Persen	NA	93,17	93,79	94,41	94,41
A	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart	Unit	NA	150	151	152	152
B	jumlah total bangunan gedung pemerintah	Unit	NA	161	161	161	161
3.5	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Persen	80,94	86,53	87,23	87,29	89,37
A	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Unit	36.490	39.011	28.528	29.556	40.406
B	Jumlah rumah tangga	Unit	45.083	45.083	32.704	33.859	51.926
3.6	Persentase Jaringan air minum yang terbangun	Persen	50	66,67	83,33	89,29	89,29
3.7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	Persen	98,22	99,02	92,98	93,83	98,86
A	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah	Unit	44.279	44.640	30.408	31.769	51.334
3.8	Persentase Rumah Tangga yang tempat pembuangan akhir tinja berupa saptitank	Persen	96,71	97,33	98,2	96,71	96,67
3.9	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	91,93	94,83	95,62	95,66	97,49

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Meter	105.492	108.825	109.725	110,875	220,0182
B	panjang total saluran drainase	Meter	114.756	114.756	114.756	115.906	225,6808
3.10	Persentase Sampah Tertangani	Persen	90,48	91,38	91,88	91,74	96,07
A	Volume produksi sampah	ton/hari	69,56	70	70,49	70,94	75,47
B	Volume sampah yang ditangani	ton/hari	62,94	63,97	64,77	65,08	71,40
C	Volume sampah masuk TPA	ton/hari	52,65	59,81	51,78	55,77	56,64
D	Persentase Sampah Terolah di TPA	Persen	52,65	59,8	59	79,04	76,16
3.11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	90,07	93,09	94,02	99,22	95,25
A	Persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung	Persen	94,38	94,38	94,69	99,22	94,17
B	Persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan budidaya	Persen	85,75	91,8	93,35	99,22	96,32
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
4.1	Rumah Layak Huni	Persen	94,9	96,2	97,1	97,7	98,31
A	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	30.207	30.623	31.758	33.069	39.779
B	Jumlah rumah	Unit	31.750	31.823	32.704	33.859	40.463
4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani	Persen	0,83	0,92	21,17	64,5	79,42
A	Jumlah data dasar Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Unit	1.625	1.200	1200	1200	1.200
B	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)	Unit	10	11	243	520	953

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
C	Jumlah data dasar Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang harus ditangani	Unit	1.625	1.200	1200	1200	1200
4.3	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Persen	NA	85,1	89,92	90,26	99,70
A	Luas kawasan permukiman dalam kondisi baik	Ha	NA	1.051,84	1.111,37	2450,83	2.707,37
B	Luas kawasan permukiman	Ha	NA	1.236	1.236	2715,45	2.715,45
4.4	Persentase penurunan backlog perumahan	Persen	NA	1,07	6,69	14,79	43,99
A	Jumlah rumah yang seharusnya sesuai KK	Unit	NA	46.005	46.005	46.005	51.558
B	Jumlah rumah	Unit	31.750	31.823	32.704	33.859	31.750
4.5	Persentase kawasan permukiman rawan kumuh	Persen	1,1	0,977	0,23	0,75	0,44
A	Luas kawasan permukiman rawan kumuh	Ha	12,58	12,08	2,85	20,44	11,87
B	Luas kawasan permukiman	Ha	1.236,00	1.236,00	1.236,00	2.715,45	2715,45
4.6	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat	Persen	NA	69,17	71,09	73,6	78,48
A	Jumlah rumah	Unit	NA	31.823	32.704	33.859	40.463
B	Jumlah kebutuhan rumah	Unit	NA	46.005	46.005	46.005	51.558
5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Persen	21,21	17,99	8,4	4,79	1,97

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A	Jumlah pelanggaran perda	pelanggaran	639	524	480	457	448
B	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani	pelanggaran	380	311	411	390	414
5.2	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	NA	22.38	40,35	0,22	4,21
A	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum (kasus)	kasus	4.013	3.115	1.858	1.854	1.776
B	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (kasus)	kasus	2.208	1.943	1.691	1.703	1.654
5.3	Rasio petugas perlindungan masyarakat di kab/kota	Persen	0	0,23	0,46	0,69	0,85
A	Jumlah satuan linmas dalam satu kab/kota	Orang	150	150	300	450	550
B	Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kab/kota	Orang	639	649	649	649	649
5.4	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	Persen	100	100	100	100	85
A	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (kejadian)	kasus	7	15	15	24	17
B	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (kejadian)	kasus	7	15	15	24	20
C	Data kerugian terkait bencana kebakaran	rupiah	20.120.000.000	627.400.000	329.760.000	764.000.000	2.190.509.983

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.5	Persentase kelurahan tangguh bencana	Persen	14,29	23,81	38,10	47,62	80,9
A	Jumlah kelurahan tangguh bencana	kelurahan	3	5	8	10	17
B	Jumlah kelurahan	kelurahan	21	21	21	21	21
C	Jumlah relawan kebencanaan Kota Blitar	organisasi	na	na	25	25	25
5.6	Persentase dokumen kebencanaan yang disusun (%)	Persen	0	0	0	12,5	25
A	Jumlah dokumen kebencanaan yang disusun	dokumen	0	0	0	1	2
B	Jumlah dokumen kebencanaan yang harus disusun	dokumen	8	8	8	8	8
6	**Sosial**						
6.1	Persentase penurunan PMKS	Persen	-0.40	1,29	5,89	3,25	-7,07
6.2	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Persen	82,29	91,35	90,03	90,23	92,50
A	Jumlah PMKS	Orang	12.331	12.490	11.754	11.372	12.176
B	Jumlah PMKS yang sudah dilayani	Orang	10.147	11.410	10.582	10.261	11.263
6.3	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100
A	Jumlah PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PSKS	125	125	132	132	133
B	Jumlah PSKS	PSKS	125	125	132	132	133

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.3.2	**Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**						
1	**Tenaga Kerja**						
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72	71,9	72,21	72,06	69,53
1.2	Penduduk Usia Kerja	Jiwa	107.172	108.030	109.153	110.249	112.822
1.3	Angkatan Kerja	Jiwa	77.164	77.674	78.820	79.443	78.445
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	NA	3,76	4,06	4,64	6,68
1.5	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Persen	72,08	77	121	80,94	82,98
A	Jumlah Pencari Kerja	Orang	195	552	628	383	141
B	Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan	Orang	146	393	515	310	117
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,39	97,91	97,60	97,46	97,46
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,68	67,51	67,91	67,70	67,66
2.3	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persen	NA	35,77	33,02	45,9	42,17
2.4	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100
3	**Pangan**						
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	80.4	81.28	83,13	85	86,20
3.2	Skor PPH Konsumsi	Persen	81,3	82,57	83,17	84.30	85,25

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4	**Pertanahan**						
4.1	Persentase tanah asset yang bersertifikat	Persen	NA	91,07	94,42	95,01	95,01
4.2	Luas Tanah aset (ha)	(ha)	NA	244,2735	244,2735	244,2735	244,2735
4.3	Luas tanah aset yang sertifikat (ha)	(ha)	NA	222,459	230,6435	232,083	232,083
5	**Lingkungan Hidup**						
5.1	Indeks kualitas lahan	Indeks	41,13	51,03	54,14	54,23	54,23
5.2	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)		208.262	265.681	262.044	367,923	380.317
5.3	Persentase mata air yang berfungsi	Persen	96	96	98	98	98
5.4	Predikat pengelolaan lingkungan	Predikat	Adipura Buana	Adipura	Adipura	Adipura	NA
5.5	Indeks kualitas air	Indeks	52,5	50	54,67	55,33	56,32
5.6	Indeks kualitas udara	Indeks	99	90,41	84,82	82,77	82,63
5.7	Persentase rumah tangga terlayani IPAL komunal	Persen	5,48	5,77	6,15	6,1	6,59
5.8	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan	Persen	90,48	91,38	91.88	91,74	96,07
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			77	79,5	78,41	82,96	83,02
6.2	Persentase rata rata penduduk yg memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	91,75	93,68	96,05	96,70	97,02

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
6.3	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Persen	86,87	90,94	94,07	94,76	94,80
A	Persentase capaian kepemilikan KTP	Persen	97	95,76	98,3	98,81	99,27
B	Persentase capaian penerbitan KK	Persen	100	100	100	100	100
C	Persentase capaian penerbitan surat pindah	Persen	100	99	100	100	100
D	Persentase capaian kepemilikan KIA	Persen	50,48	69	77,96	80,22	91,15
6.4	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatn sipil	Persen	96,63	96,41	98,04	98,64	99,25
A	Persentase capaian kepemilikan akta kelahiran (usia 0 - 18 th)	Persen	86,51	86,65	92,14	94,54	98,42
B	Persentase capaian penerbitan akta perceraian	Persen	100	100	100	100	100
C	Persentase capaian penerbitan akta kematian	Persen	100	99	100	100	100
6.5	Persentase data kependudukan yang valid/akurat	Persen	98	98,92	99,62	99,71	99,98
A	Jumlah data penduduk yang valid	Data	152.097	154.714	157.148	157.014	158.349
B	Jumlah seluruh data pendudukan	Data	153.774	156.391	157.725	157.465	158.376
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7.1	Persentase kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	Persen	80	90	92	93	93,01
A	Jumlah kader/pengurus dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kader	857	857	858	858	858
B	jumlah kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kader	686	771	789	789	798
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
8.1	Cakupan Peserta KB	Persen	86,49	86,49	88,22	96,8	80,04
8.2	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Persen	74,77	74,78	73,13	72,04	74,31
8.3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	NA	0,63	0,7	0,64	0,65
8.4	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	NA	2,05	2,16	2,03	2,14
9	**Perhubungan**						
9.1	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Persen	NA	89,12	94,81	95,61	99,35
9.2	Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	Persen	70.50	74.89	78.59	80.53	84,16
9.3	Load Factor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis	Persen	139.16	80.56	80.23	74.34	20,29
9.4	Pemanfaatan Pelataran Parkir Angkutan Barang	Persen	23.63	24.04	29.39	29.39	35,90
9.5	Peraihan Wahana Tata Nugraha	Predikat	WTN	NA	NA	WTN	NA

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9.6	Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji KIR	Persen	NA	NA	87	92	94
10	**Komunikasi dan Informatika**						
10.1	Persentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi	Persen	NA	42,55	46,8	51,06	76,69
10.2	Persentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada PD	Persen	NA	45,95	51,35	59,45	83,78
10.3	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Persen	NA	99,84	98,92	99,67	100
10.4	Persentase informasi yang dipublikasikan	Persen	NA	99,89	99,44	99,86	99,68
10.5	Persentase pengaduan ditindaklanjuti	Persen	NA	98,88	93,98	89,66	89,66
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						
11.1	Persentase peningkatan PDRB usaha mikro	Persen	16,05	14,18	15,91	15,96	-8,21
11.2	PDRB usaha mikro (juta rupiah)	(juta rupiah)	206,06	235,3	295,31	309,79	284,36
11.3	Persentase koperasi aktif yang sehat	Persen	47,03	47,03	39,85	41,96	35,61
11.4	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang dibina	Persen	61,86	-15,29	91,73	66,67	11,76
11.5	Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	Persen	NA	NA	20,88	20,59	86,70
12	**Penanaman Modal**						

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
12.1	Nilai Investasi (milyar rupiah)	milyar rupiah	160,77	164,04	336,27	265,86	167,10
A	Nilai Investasi PMA (milyar rupiah)	milyar rupiah	0	0	12	0	0
B	Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)	milyar rupiah	160,77	164,04	324,27	265,86	167,10
C	Jumlah Unit Usaha PMA	PMA	0	0	1	0	0
D	Jumlah Unit Usaha PMDN	PMDN	355	261	318	518	205
E	Jumlah Tenaga Kerja	tenaga kerja	643	1362	1742	3586	1.837
12.2	SKM Pelayanan Perizinan	Baik/Sangat Baik	76,93	83,75	83,15	85,89	83,33
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**						
13.1	Persentase organisasi kepemudaan aktif	Persen	50	50	58	70	78
A	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	12	12	14	19	22
B	Jumlah organisasi kepemudaan yang ada	organisasi	24	24	24	27	28
13.2	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	52	72	63	69	93
A	Jumlah atlit yang berprestasi	Atlit	81	249	313	266	41
B	Jumlah atlit delegasi	Atlit	155	347	493	383	44
13.3	Jumlah cabang olahraga disabilitas yang diikuti dalam lomba	Cabor	NA	NA	NA	4	2
14	**Statistik**						
14.1	Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance	Persen	NA	72,22	83,3	89	90
A	Jumlah data statistik terpublikasi	Data	NA	26	30	36	5.493

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
B	Jumlah data statistik yang dimiliki	Data	NA	36	36	36	6.093
14.2	Persentase ketersediaan data sektoral	Persen	79	79	80	83	80,9
A	data sektoral yang harus dipenuhi	Data	6.093	6.093	6.093	6.093	6.063
B	data sektoral yang terpenuhi	Data	4.871	4.867	4.931	5.085	4.905
15	**Persandian**						
15.1	Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	Persen	NA	100	100	100	102
15.2	Tingkat kelengkapan penerapan standar keamanan informasi pada instansi	Indeks	NA	NA	NA	Tidak Layak (133)	Tidak Layak (133)
15.3	Kategori system electronic	Kategori	NA	NA	NA	Rendah (14)	Rendah (26)
16	**Kebudayaan**						
16.1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	65,00	75,22	99,57	99,57	61
17	**Perpustakaan**						
17.1	Indeks Minat Baca	Indeks	NA	49	49	51	53
A	Jumlah perpustakaan	perpustakaan	126	126	127	125	125
B	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Buku	14.059	15.355	16.656	17.639	19.942
17.2	Nilai SKM pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan	Indeks	76,19	78,59	78,94	79,89	80,02
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
18	**Kearsipan**						

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
18.1	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Persen	28,29	42,16	55,49	68,85	82,18
18.2	Nilai SKM pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan kearsipan daerah	Indeks	NA	78,01	79,26	79,48	79,91
				Baik	Baik	Baik	Baik
18.3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100	100	100	100	100
II	**Layanan Urusan Pilihan**						
1	**Kelautan dan Perikanan**						
1.1	Produksi ikan konsumsi	Ton	183.79	189.24	190.63	212.13	229,030
1.2	Produksi ikan hias	Ekor	4,342,110	4,648,393	4.399.273	4.402.015	4.563.416
1.3	Produksi benih ikan di BBI	Ekor	172,88	192,078	361,802	354,566	372.441
1.4	Produksi benih ikan di UPR	Ekor	8,311,690	8,509,927	8.680.125	6.538.194	8.449.027
2	**Pariwisata**						
2.1	Persentase peningkatan PDRB sektor hotel dan restaurant	Persen	15,27	11,36	9,34	9,71	-99,91
2.2	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif unggulan	Persen	3	8	16,34	13,83	26,71
2.3	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	3.40	12,18	12,35	12,95	-85,71
2.4	Jumlah wisatawan	Orang	2.913.503	3.145.933	3.150.592	3.167.489	452.552
2.5	Jumlah Rumah Makan/Restoran	Unit	101	114	195	172	209
3	**Pertanian**						
3.1	Produksi Daging	Ton	3,748.70	3,901.78	3.968,24	3.979,50	3.843,88
3.2	Produksi Susu	Ribu Liter	500.60	613.14	621.72	625,7	704,43

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3.3	Produksi Telur	Ton	2,662.50	3,283.13	3.306,96	3.475,25	3.833,44
3.4	Produktivitas padi	Kwt/ha	80,42	80,53	80,65	81,6	81,99
3.5	Produktivitas jagung	Kwt/ha	67,4	67,53	67,69	67,8	68,09
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
4.1	Jumlah Pelanggan Listrik	Unit	43.029	44.339	45.274	46.288	47.639
4.2	Jumlah SPBE	Unit	1	1	1	1	1
4.3	Jumlah SPBU	Unit	8	8	8	8	8
4.4	Jumlah Energi terbarukan (biogas, solarcell)	Unit	3	3	3	4	4
5	**Perdagangan**						
5.1	Persentase peningkatan PDRB sektor perdagangan	Persen	13	10,05	11,15	11,16	-5,7
A	PDRB sektor perdagangan	(Juta Rp)	1.271.622,36	1.379.424.09	1.535.545.35	1.675.162.18	1.579.930
5.2	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	Persen	4.8	5	2,8	-7,7	-36,3
A	Jumlah usaha perdagangan	Usaha	12.000	12.600	12.954	11.960	NA
B	Volume Usaha Perdagangan	Volume			916.982.914.000	985.762.612.000	627.909.636.000
5.3	Persentase jumlah alat UTTP bertanda tera sah	Persen	35,34	0.95	0,79	1,96	1,19
A	Jumlah alat UTTP bertanda tera sah	Unit	5.460	117	122	171	111
B	Jumlah alat UTTP yang ada	Unit	15.452	12.266	15.433	8.740	9.317
C	Jumlah Pasar Tardisional	Pasar	9	9	9	9	10

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
D	Jumlah Pasar Modern	Pasar	16	16	16	36	36
E	Jumlah PKL./pedagang	PKL	1.370	1.750	1.817	1.837	1.795
6	**Perindustrian**						
6.1	Persentase peningkatan PDRB sektor industri	Persen	9,9	10	10,01	10,02	-0,81
A	PDRB sektor industri	(Rp. Dalam juta)	502.362.53	552.608.39	607.975.83	659.375.39	654.040
6.2	Persentase peningkatan nilai produksi industry	Persen	96.32	5.87	2,33	4,4	-4,7
A	Nilai produksi industri	(Rp. Dalam ribuan)	682.738.565	722.782.143	739.675.720	772.131.678	739.771.197
B	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	IKM	4.745	4.780	4.811	4.844	4.793
C	IKM formal	IKM	132	137	143	154	166
D	IKM non formal	IKM	4.469	4.643	4.668	4.690	4.627
E	Persentase IKM formal/berijin IUI	Persen	2,78	2,87	2,97	3,18	3,46
F	Tenaga kerja	Tenaga kerja	12.227	12.435	13.763	14.021	13.774
G	Investasi	(Rp.)	57.492.269	74.146.933	89.815.949	93.996.208	73.977.1197
III	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**						
1	**Sekretariat Daerah**						
1.1	Nilai SAKIP Kota Blitar	Predikat	60,27	70,86	71,87	71,91	72,06
			B	BB	BB	BB	BB
1.2	Nilai LPPD Kota Blitar	Predikat	3,5	2,8	3,35	NA	NA
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		
1.3	Persentase tempat ibadah aktif	Persen	62	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.4	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Rasio	1:86	1:87	1:74	1:81	1:72
1.5	Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	Persen	5	3	16	3,758	7,92
1.6	Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	Persen	85	91	93	86	86
1.7	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat	Persen	99,9	100	100	100	100
1.8	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100
1.9	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100
1.10	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	93	100	100
1.11	Persentase pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa melalui e-procurement	Persen	96,69	89	86	92,86	58,24
1.12	SKM layanan surat menyurat dan arsip	Predikat	baik	85,33	87,44	88,11	93,809
				baik	baik	baik	Sangat baik
1.13	SKM layanan administrasi keuangan	Predikat	baik	80,82	79,28	83,85	92,01
				baik	baik	baik	Sangat baik
1.14	SKM layanan kerumah tanggaan	Predikat	baik	81,35	82,16	83,68	93,925

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				baik	baik	baik	Sangat baik
1.15	SKM layanan sarana dan prasarana	Predikat	baik	83,48	85,71	85,16	94,485
				baik	baik	baik	Sangat baik
1.16	SKM layanan kehumasan dan keprotokolan	Predikat	baik	82,99	86,17	86,47	86,925
				baik	baik	baik	baik
2	**Sekretariat DPRD**						
2.1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Indeks	67,77	77,72	77,15	77,69	80,57
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.2	Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	Persen	100	100	100	100	100
2.3	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
IV	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**						
1	**Perencanaan**						
1.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas perencanaan Baik	Persen	91,67	97,35	95,69	97,41	98,28
1.2	Persentase dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti	Persen	92,31	100	100	100	100
2	**Keuangan**						
2.1	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	15.73	15.77	18.58	17.99	19,82
2.2	Persentase SKPD yang menyusun dokumen keuangan tepat waktu	Persen	75,29	75,34	100	100	100
2.3	Persentase SKPD tertib pengelolaan Aset daerah	Persen	93	94	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.4	Persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD	Persen	19,71	20,02	24,87	26,87	21,51
2.5	Persentase SKPD yang realisasi belanja di atas 90 Persen	Persen	74,12	68,49	68,66	68,66	66,18
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**						
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	NA	87,64	79,89	78,23	78,54
3.2	Persentase Rekrutmen, Mutasi dan Promosi Sesuai dengan Kompetensi	Persen	71,62	70,37	83,77	78,73	78,54
3.3	Nilai Indeks Kepuasan Layanan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.4	Persentase Aparatur Sipil yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Standart	Persen	NA	16,75	20,47	24,51	35,87
3.5	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural dan Teknis / Fungsional	Persen	13,5	28,19	34,77	36,1	8,30
4	**Penelitian dan Pengembangan**	Persen					
4.1	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100
5	**Inspektorat Daerah**						
5.1	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.2	Nilai SAKIP Kota Blitar	Nilai	60,27	70,86	71,87	71,91	72,06
			B	BB	BB	BB	BB
5.3	Persentase laporan keuangan PD yang telah direview	Persen	NA	27,59	37,93	48,28	96,55

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.4	Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
5.5	Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti	Persen	77.40	67,57	80,81	83,69	80,17
5.6	Persentase PD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	NA	28,57	42,86	60	80
5.7	Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Persen	4	48,28	58,62	100	100
5.8	Jumlah PD yang telah diterapkan WBK/WBBM	Persen	NA	0	0	0	0
5.9	Jumlah Auditor	auditor	8	8	8	12	12
7	**Kewilayahan**						
7.1	SKM Kecamatan Sukorejo	Indeks	80	82,05	86,5	90,22	89,06
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7.2	SKM Kecamatan Kepanjenkidul	Indeks	75,4	82,2	81,49	82,11	82,15
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7.3	SKM Kecamatan Sananwetan	Indeks	74,6	69,23	81,68	81,11	81,37
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
8	**Kesatuan Bangsa dan Politik**						
8.1	Persentase penanganan potensi kasus SARA	Persen	100	100	100	100	100
A	Jumlah Potensi Kasus SARA yang ditangani	kasus	0	0	0	0	1
B	Jumlah potensi Kasus SARA	kasus	0	0	0	0	1
8.2	Indeks Demokrasi	Indeks	NA	78,64	80,34	82,98	86,31

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
8.3	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	100	100	87,5	100	100
A	Jumlah konflik sosial yang tertangani	kasus	2	2	7	17	21
B	Jumlah konflik sosial	kasus	2	2	8	17	21
8.4	Persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar	Persen	71,43	72,19	73,20	73,98	76,7
A	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang terdaftar	organisasi	130	135	142	145	155
B	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	organisasi	182	187	194	196	202
8.5	Persentase kejadian SARA yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
A	Jumlah kejadian SARA yang tertangani	kejadian	0	0	0	0	0
B	Jumlah kejadian SARA	kejadian	0	0	0	0	0
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	(Rp. 000)	12,499	12,91	13,391	13,851	13,733
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Blitar Menurut Jenis Pengeluaran	(Juta Rp)	4.079.258,84	4.315.014,82	4.566.469,58	4.833.360,99	NA
3	Pengeluaran Per Kapita Makanan	Persen	40,99	45,74	46,48	45,33	43,64
4	Pengeluaran Per Kapita Bukan Makanan	Persen	59,01	54,26	53,52	54,67	56,36

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	62,71	68,68	70,5	78,37	67,17
6	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	75,45	77,3	80,35	80,62	82,39
7	Rasio Ketergantungan	Persen	40,14	40,75	40,65	41	42,24

Sumber: Bappeda, 2021, diolah

2.4.7. Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari setiap misi RPJMD, sehingga memiliki peran yang sangat penting untuk menggambarkan pencapaian 6 misi pembangunan periode 2016-2021.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, telah banyak indikator kinerja tujuan maupun sasaran yang telah melampaui target akhir periode RPJMD Tahun 2021. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah, sekitar 65,75% indikator tujuan dan sasaran telah mencapai dan bahkan melampaui target akhir RPJMD berdasarkan capaian sampai dengan Tahun 2020. Namun terdapat beberapa indikator yang masih membutuhkan perhatian khusus sebab masih belum tercapai tingkat capaiannya sampai dengan Tahun 2020. Indikator tujuan yang memiliki tingkat capaian terendah dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 adalah Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB) dengan capaian masing – masing kurang dari 80%.

Selain itu terdapat indikator yang tidak dipublikasikan secara rutin oleh BPS pada tingkat kabupaten/kota, hanya tingkat nasional dan provinsi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar. Untuk itu Kota Blitar melakukan pengukuran mandiri melalui tenaga ahli yang berkompeten guna dapat mengukur capaian indikator kinerja pada misi 5 : Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.

Tabel 2. 126. Capaian Indikator Tujuan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2020

NO	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Persentase Capaian 2020 (%)	Tahun 2021	Persentase capaian terhadap 2021 (%)
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	-	-	80	81,02	80	80,6	80	84,38	80	84,38	105,48	80	105,48
2	Indeks Pendidikan	Indeks	0,7	0,72	73	72	74	74	0,75	0,75	0,76	0,73	96,03	0,78	93,59
3	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,68	5,76	5,87	5,78	5,87	5,8	5,9	5,84	5,95	-2,28	-38,32	6	-38,00
4	Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)	Rupiah	34.944,23	37.719,22	40494,22	41445,46	43269,21	44.828,94	46.044,20	47.875,00	48.819,19	46.976,46	96,23	51.594,19	91,05
5	Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)	Rupiah	27.967,84	29.269,50	30.571,17	30.821,53	31.872,83	32.393	33.174,15	34.068,00	34.476,15	33.071,57	95,93	35.777,82	92,44
6	Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	Rupiah	240.316, 20	264.865, 88	289.415, 61	289.415, 61	313965,3 3	394.611, 65	338.515, 06	365.962, 00	363.064, 78	338.440	93,22	387.614,51	87,31
7	Angka Kemiskinan	Persen	7,29	7,18	6,72	8,03	6,61	7,44	6,49	7,13	6,39	7,78	78,25	6,28	80,72
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	indeks	3,8	4,81	3,6	3,76	3,6	4,06	3,5	4,64	3,5	6,68	52,4	3,5	52,4
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,94	59,65	61,93	60,86	62,2	63,51	62,54	63,12	63,14	66,52	105,35	63,48	104,79
10	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik.	Persen	-	79,4	96,96	84,7	88,96	90,03	91,01	92,375	93,01	90,48	97,28	95	95,24
11	Indeks Kesehatan	Angka	0,81	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,86	104,88	0,82	104,88

NO	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Persentase Capaian 2020 (%)	Tahun 2021	Persentase capaian terhadap 2021 (%)
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Persentase rumah layak huni	Persen	95	95,64	96,28	96,23	96,92	97,1	97,56	97,7	98,2	98,31	100,11	98,85	99,45
13	Persentase kasus kriminalitas yang tertangani	Persen	55,19	55,2	55,22	47,66	55,23	69,36	55,24	80,54	55,26	87,07	157,56	55,27	157,54
14	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	61,26	62,71	64	68,68	65:50:00	70,5	67,5	78,7	68,5	67,17	98,06	70	95,96
15	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Sangat Baik	96,93
			75,83	75,45		77,3		80,35		80,62	79,76	82,39	100	(85 – 100)	

Sumber: Bappeda Kota Blitar Tahun 2021

Tabel 2. 127. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Persentase capaian 2020 (%)	Target Tahun 2021	Persentase Capaian 2020 terhadap 2021 (%)
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16
1	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tempat ibadah aktif	Persen	55	62	70	100	78	100	83	100	92	100	108,7	100	100
3	Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Rasio	1 : 86	1 : 86	1:85	1:87	0,1	1:84	1 : 83	1 : 81	1 : 82	1 : 72	113,89	1 : 80	111,11
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,87	9,88	10,05	9,89	10,14	9,96	10,23	10,1	10,32	10,41	98	10,32	97,12
5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	95,89	96,28	96,47	96,34	96,66	97,39	96,85	98,88	97,04	98,97	101,99	97,23	101,79
6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	Persen	90,31	92,33	93,52	94.59	94,71	96,67	95,92	97,28	97,14	95,55	98,36	98,37	99,99
7	Indeks Minat Baca	Indeks	-	-	40	49	42	49	44	51	46	53	152,22	48	110,42
8	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	-	50	50	50	58	58	58	70	66	78	118,18	66	118,18
9	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persen	-	50	50	72	58	68	58	69	66	93	140,91	66	140,91
10	Persentase Peningkatan PDRB sektor Usaha Mikro	Persen	177.564 (juta rupiah)	-	15,84	16,24	15,84	15,91	15,84	16,35	15.84 (370.343 juta)	16,35	103,21	15,84	103,21
11	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	11,66	11,44	11	10,5	11,2	11,16	11,3	9,09	11,40	-6,71	-58,86	11,5	-58,35
12	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	12,39	11,36	11,5	10	11,55	9,62	11,6	8,45	11,65	-2,91	-24,98	11,4	-24,87
13	Nilai investasi (Miliar Rupiah)	Miliar Rupiah	177,67	160,77	160,77	161,04	163,2	268,44	164,8	310,63	166,4	167,1	100,42	166,40	100,26

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Persentase capaian 2020 (%)	Target Tahun 2021	Persentase Capaian 2020 terhadap 2021 (%)
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16
14	Skor PPH Ketersediaan	Skor	79,91	80,4	81	81,28	82	83,13	83	84,65	84	86,2	102,62	85	101,41
15	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi	Skor	-	81,7	82	82,57	83	83,17	84	84,3	85	85,25	100,29	86	99,13
16	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restauran	Persen	240316 juta rupiah	14,88	20	23	30	40,62	14,05	9,71	50	-9,29	-18,58	14,05	-15,48
17	Persentase peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan	Persen	1162 pelaku	3	4	10	4	16,34	4	13,38	4	26,71	667,8	4	667,75
18	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	2,97 atau 2.804.24	3,40	5,20	7,97	6,60	5,81	7,70	12,95	8,6	-85,71	-997	9,20	-931,63
19	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	65	65	75	100	75	100	75	100	75	61	81,33	75	81,33
20	Indeks Gini	Indeks	0,36	0,33	0,36	0,39	0,36	0,38	0,36	0,32	0,36	0,344	105,88	0,36	94,44
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,46	72	72,55	71,9	73,1	72,21	73,65	72,06	74,2	69,53	97,84	74,76	93
22	Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	98,23	-	98,23	98,39	98,23	97,6	98,23	97,6	98,23	97,6	99,36	98,24	99,35
23	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	67,57	67,57	67,57	66,68	67,57	67,57	67,57	67,91	67,57	69,27	100,5	67,57	102,5
24	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	41,13	41,13	41,5	51,03	41,5	54,14	41,6	54,23	41,6	54,23	130,36	41,7	130,05
25	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (CO2eq)	Nilai	-	208.262	208.031	265.681	207.801	262.044	207.571	367.923	207.111	380.317	54,46	206.651	54,34
26	Persentase mata air yang berfungsi	Persen	96	96	96	96	96	98	96	98	96	98	102,08	96	102,08
27	Predikat Pengelolaan Lingkungan	Predikat	Adipura	Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura	Adipura Buana	Adipura	Adipura Buana	Adipura	Adipura Kencana	NA	-	Adipura Kirana	-

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Persentase capaian 2020 (%)	Target Tahun 2021	Persentase Capaian 2020 terhadap 2021 (%)
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16
28	Indeks Pencemaran Air/Indeks Kualitas Air	Indeks	50	52,5	53	50	54	54,67	55	55,33	56	56,32	100,57	57	98,81
29	Indeks Pencemaran Udara/Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,31	99	98	84,8	98	84,81	98	82,77	99	82,63	82,63	99	83,46
30	Persentase infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik	Persen	78,22	79,43	79,6	89,12	79,8	89,96	80	89,86	80,20	90,12	112,33	80,4	112,9
31	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Persen	75	77,75	80,5	89,12	83,75	94,81	87	95,61	89,75	90,12	109,9	93	106,83
32	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,29	73,59	73,82	73,17	74,05	73,09	74,28	73,6	74,51	73,75	98,78	74,65	98,59
33	Angka Kematian Ibu (1/100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	48,8	236,18	188,94	0	188,94	255,23	141,71	99,4	141,71	189,13	61,54	94,5	41,04
34	Angka Kematian Bayi (1/100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	8,3	9,92	8,88	10,91	8,68	13,76	8,48	11,93	8,28	11,82	71,94	8,08	70,20
35	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Mardi Waluyo	Indeks	75,7	77,14	77,14	78,68	77,14	78,82	77,5	77,97	77,5	80,85	100,61	78	103,65
36	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	6,3	1,22	1,22	1,22	1,22	0,7	1,22	0,64	1,22	0,65	182,09	1,22	182,09
37	Persentase rumah tangga yang terlayani IPAL komunal	Persen	4,7	4,9	5,5	5,7	5,6	6,6	5,6	6,5	5,7	6,59	115,61	5,80	113,62
38	Persentase capaian layanan persampahan perkotaan	Persen	90	93,49	93,8	93,73	94	91,88	94,4	97,46	94,6	96,07	101,6	95	101,13
39	Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	Persen	-	-	84	99,02	85	99,77	86	99,25	87	99,7	114,6	88	113,3
40	Persentase penurunan backlog perumahan	Persen	-	-	2	1,07	4	6,69	6	14,79	8	43,99	549,9	10	439,9

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Persentase capaian 2020 (%)	Target Tahun 2021	Persentase Capaian 2020 terhadap 2021 (%)
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16
41	Persentase penurunan jumlah pelanggaran PERDA	Persen	22,39	21,21	18	17,99	8,97	8,4	3,98	4,79	1,53	1,97	77,7	0,67	34,01
42	Indeks Demokrasi	Indeks	-	73,6	73,6	78,64	73,6	80,34	73,6	82,98	73,6	86,31	117,27	73,6	117,27
43	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100Persen	100	71	100	100	100	100	100	100	100
44	Nilai SAKIP Kota Blitar	Nilai	C	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	A	100
			44,2	60,27		70,86		71,87		71,91		72.06			
45	Nilai LPPD Kota Blitar	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	NA	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	100
			3,2	3,5		2,8		3,35							
46	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
47	Persentase PD yang tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	Persen	10	25	50	93,10	75	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Persentase PD dengan kualitas perencanaan BAIK	Persen	60	80	80	97,35	100	95,69	100	97,41	100	98,28	98,28	100	98,28
49	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	75	70	87,64	73	79,89	70	78,23	78	78,54	111,76	80	98
50	Persentase penerapan Layanan Pemerintahan dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi	Persen	22	24	27	44,44	31	46,80	40	51,06	58	83,78	121,57	73	114,77
51	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,74	15,79	15,79	21,27	15,9	18,58	15,95	17,99	16	19,82	112,79	16	123,88
52	Persentase PD yang menyusunan dokumen keuangan daerah tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Persentase capaian 2020 (%)	Target Tahun 2021	Persentase Capaian 2020 terhadap 2021 (%)
			2015	2016	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16
53	Persentase PD tertib pengelolaan aset daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	Baik	Baik	baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
			-	67,77		77,72		77,15		77,69		80,57			
55	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Persen	-	28,29	41,55	42,16	58,88	100	68,22	68,85	81,55	82,18	100,77	100	82,18
56	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik 78,41	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
				77		79,57				82,96		83,02			
57	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik 83,75	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
				87,25				83,15		85,89		83,33			
58	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	Baik	100
			76,95	76,67		77,83		83,22		84,48		84,19			

Sumber : Bappeda Kota Blitar Tahun 2021

Dari hasil tabel evaluasi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, diperoleh bahwa capaian tahun 2019 terhadap target 2021 dari indikator tujuan ada 2 (dua) indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu Angka kemiskinan dengan capaian 87% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu sebesar 67%. Sedangkan untuk indikator sasaran ada 5 (lima) indikator yang perlu menjadi perhatian yaitu (1) Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan capaian terhadap target 2021 sebesar 79%,(2) Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 74%,(3) Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran sebesar 69%, (4) Indeks Pencemaran Udara/Indeks Kualitas Udara sebesar 84%, dan (5) Angka Kematian Bayi (1/100.000 Kelahiran Hidup) sebesar 52%.

2.4.8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM.

Pemerintah Kota Blitar berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Penerapan SPM di Kota Blitar pada Tahun 2019 – 2020 diuraikan lebih rinci pada bagian berikut ini.

2.4.8.1. SPM Bidang Pendidikan

Profil capaian SPM Bidang Pendidikan berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 - 2020 disajikan pada tabel di bawah. Tingkat capaian seluruh indikator SPM bidang pendidikan mencapai target bahkan ada yang melampaui target, kecuali indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD yaitu 99,56% pada tahun 2019 dan 83,7% pada tahun 2020.

Tabel 2. 128. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Blitar Tahun 2019 - 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	100	99,56	96,21
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	98,88	101,4
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	83,70

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2.4.8.2. SPM Bidang Kesehatan

Profil capaian SPM Bidang Kesehatan berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 – 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 129. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2019 – 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	85,81	89,94
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	89,88	94,73
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	92,26	95,17
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	72,95	53,17
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	99,24	35,63
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	88,35	26,78
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	85,95	75,53
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	88,01	9,31
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	92,02	43,45
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan	100	95,83	109,59

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
		pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	77,78	59,17
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	105,87	125,63

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2.4.8.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Profil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 - 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 130. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Blitar Tahun 2019 - 2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target(%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	87,29	89,37
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	93,83	98,86

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2.4.8.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Profil capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 – 2020 disajikan pada tabel di bawah. Capaian penerapan SPM Perumahan Rakyat adalah 100%.

Sedangkan untuk indikator jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni capaiannya tidak diketahui karena pada Tahun 2019 tidak ada program pemerintah yang berdampak pada relokasi rumah warga. Meskipun demikian telah disediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk mengantisipasi jika ada program pemerintah yang berdampak pada relokasi rumah warga.

Tabel 2. 131. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2019 – 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target(%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	NA	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2.4.8.5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Profil capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 – 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 132. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Blitar Tahun 2019 – 2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	40	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	66,6	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan danEvakuasi korban kebakaran	100	100	85

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2.4.8.6. SPM Bidang Sosial

Profil capaian SPM Bidang Sosial berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 – 2020 disajikan pada tabel di bawah. Seluruh indikator SPM bidang sosial memiliki tingkat capaian 100%.

Tabel 2. 133. Capaian SPM Bidang Sosial Kota Blitar Tahun 2019 – 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
		sosial di luar panti			
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasarlanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2.5. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Kasus pertama*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia sejak 2 Maret 2020 telah mengalami persebaran ke seluruh provinsi di Indonesia. Dengan telah ditetapkannya bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, maka Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan masyarakat serta dunia usaha telah melaksanakan berbagai upaya untuk

pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Pola hidup bersih dan sehat sejak awal sudah disampaikan Pemerintah, dengan budaya 5 M, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berbagai pemeriksanaan suhu tubuh dan *rapid test* secara massal, serta pemeriksaan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) telah dilakukan seluruh pemerintah daerah dan swasta. Selain itu telah diterapkan kebijakan antara lain *sosial distancing*, *work from home* (WFH), pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan transportasi dalam rangka percepatan penanganan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan PPKM Darurat.

Namun kebijakan yang membatasi aktivitas dan ruang gerak masyarakat telah berdampak buruk bagi kondisi sosial dan ekonomi. Masalah mulai bermunculan antara lain tutupnya berbagai usaha/pabrik/perusahaan baik sementara maupun permanen, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan berdampak banyaknya kasus PHK. Selain itu, masyarakat tidak dapat beraktivitas sehingga tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kondisi ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan serta permasalahan sosial lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2020 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya kendati masih terkontraksi. Perbaikan kinerja dari sisi permintaan terutama didorong oleh konsumsi swasta dan net ekspor antar daerah. Sementara itu, dari sisi penawaran, peningkatan terutama bersumber dari kenaikan kinerja Lapangan Usaha utama yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Akomodasi dan Makan Minum mengalami dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara keseluruhan tahun 2020, PDRB Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh mencapai 5,52% (yoy). Perlambatan terjadi pada hampir seluruh

komponen permintaan akibat pandemi COVID -19 dan berdampak pada penurunan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor antar daerah. Pandemi COVID-19 turut menekan sektor investasi bangunan dan konstruksi akibat realokasi dan *refocusing* anggaran pemerintah serta penjadwalan ulang proyek pemerintah dan swasta akibat kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi. Kendati demikian berbagai bantuan dari Pemerintah untuk sektor industri dan rumah tangga sasaran (pra sejahtera dan terdampak COVID-19) ditengarai mampu menahan perlambatan konsumsi yang lebih dalam.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai Agustus 2020, jumlah angkatan kerja Jatim meningkat seiring naiknya pengangguran terbuka yang dominan lulusan SMK. Jumlah angkatan kerja di Jatim sampai Agustus kemarin mencapai 22,26 juta jiwa. Naik 396,37 ribu orang (1,81 persen) dari Agustus tahun lalu. Yang menganggur sebanyak 1,30 juta orang. sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur juga meningkat meski tidak sampai satu persen. TPAK pada Agustus 2020 tercatat 70,33 persen, meningkat 0,72 persen poin dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan TPAK itu, memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Kenaikan TPAK ini karena adanya kenaikan penduduk bekerja yang terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim juga meningkat sebesar 2,88 persen poin. Sampai Agustus kemarin TPT Jatim jadi 5,84 persen dari sebelumnya 3,82 persen, tahun lalu. Pengangguran terbuka terbanyak ada di perkotaan. Jumlahnya mencapai 7,37 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran terbuka lulusan SMK masih dominan dengan kontribusi sebesar 11,89 persen. Sedangkan SMA 9,34 persen. Dibandingkan Agustus 2019 ada kenaikan TPT di semua tingkat pendidikan. Kenaikan TPT tertinggi

pada lulusan SMK mencapai 3,50 persen poin, Diploma naik 2,91 persen poin, dan SMA naik sebesar 2,46 persen poin.

Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat 4.585,97 ribu jiwa (11,46 persen). Angka ini bertambah sebesar 166,9 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 4.419,10 ribu jiwa (11,09 persen).Persentase penduduk miskin pada September 2020, meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2020. Salah satu meningkatnya penduduk miskin di Jatim dikarenakan adanya pademi.

Gambaran kondisi setelah masuknya pandemi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur yang diuraikan di atas menyebabkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan seluruh komponen bangsa menghadapi situasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Kota Blitar telah dilakukan berbagai langkah konkrit dan kebijakan-kebijakan untuk percepatan penanganan pandemi. Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar, yaitu :

a. Surat Edaran Nomor: 800/1241/410.201.1/2020 tentang Sistem Kerja Shift Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
b. Surat Edaran Nomor: 800/1301/410.201.1/2020 tentang Protokol Kedatangan Bagi Aparatur Sipil Negara Dari Perjalanan Dinas Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
c. Surat Edaran Nomor: 800/1202/410.201.1/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
d. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020

e. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Karantina Dalam Penanggulangan Bencana Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020
f. Peraturan Wali Kota Blitar 31 Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif, Honorarium, jasa Kerja dan Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Surveilans, Tenaga Non Medis, Relawan dan Tenaga Pendukung Lainnya dalam Penanganan Covid-19
g. Peraturan Wali Kota Blitar 32 Nomor Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19
h. Peraturan Wali Kota Blitar 34 Nomor Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klaim Penggantian Biaya atas Pelayanan Kesehatan dalam Penanganan Bencana Covid-19 yang bersumber dari APBD
i. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi COVID-19.
j. Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 440/1142/410.204.3/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *Corona Virus Disease* (COVID-19).
k. Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 138 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 di Kota Blitar.
l. Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 139 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.
m. Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 146 Tahun 2020 tentang Belanja Tidak Terduga untuk menanggulangi keadaan darurat bencana covid-19 di Kota Blitar.



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode selanjutnya. Hasil analisis digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan di Kota Blitar. Bab ini menggunakan data dan informasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah Kota Blitar pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum kinerja keuangan masa lalu Kota Blitar dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.Dengan kata lain, kinerja keuangan masa lalu menunjukkan kemampuan Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam

kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD periode sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Blitar tahun 2016 – 2020. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan APBD periode yang akan datang.

3.1.2.1. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah adalah bagian dari penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai Program dan kegiatan daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Analisis pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah dimasa yang akan datang. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PENDAPATAN DAERAH	**847.187.760.012,26**	**850.942.358.240,98**	**894.409.176.023,96**	**940.722.867.100,39**	**880.876.905.111,23**	**1,09**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**131.920.190.720,68**	**194.764.731.102,98**	**163.026.005.752,93**	**166.140.178.781,39**	**174.590.638.444,23**	**9,58**
	Hasil Pajak Daerah	26.001.646.559,99	38.995.899.849,70	40.501.229.760,26	44.650.054.610,03	37.530.670.035,90	12,03
	Hasil Retribusi Daerah	9.658.868.726,00	7.776.649.664,00	9.940.599.576,00	10.138.463.905,50	6.681.655.444,00	-5,94
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.023.333.373,00	1.053.268.431,76	1.104.657.721,40	1.169.069.219,24	1.041.098.840,30	0,67
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.236.342.061,69	146.938.913.158,52	111.479.518.695,27	110.182.591.046,62	129.337.214.124,03	11,59
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**695.983.145.750,00**	**656.177.627.138,00**	**714.475.849.626,00**	**757.519.568.319,00**	**688.978.396.667,00**	**0,04**
	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**622.676.097.741,00**	**562.579.364.596,00**	**626.534.717.922,00**	**617.074.500.118,00**	**560.074.563.472,00**	**-2,26**
	Bagi Hasil Pajak	37.660.901.579,00	33.778.174.632,00	33.311.778.801,00	38.722.150.634,00	36.012.047.175,00	-0,61
	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	18.880.139.043,00	16.587.434.797,00	67.464.332.495,00	55.197.441.211,00	45.222.695.790,00	64,58
	Dana Alokasi Umum	428.743.959.000,00	421.212.306.000,00	421.212.306.000,00	437.776.459.000,00	400.918.516.000,00	-1,56
	Dana Alokasi Khusus	137.391.098.119,00	91.001.449.167,00	104.546.300.626,00	85.378.449.273,00	77.921.304.507,00	-11,49
	PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA	**5.000.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**13.000.000.000,00**	**51.430.800.000,00**	**56.837.217.000,00**	**107,37**
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	13.000.000.000,00	51.430.800.000,00	56.837.217.000,00	107,37

No.	Uraian	Realisasi					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	**68.307.048.009,00**	**86.096.262.542,00**	**74.941.131.704,00**	**89.014.268.201,00**	**72.066.616.195,00**	**3,21**
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	60.846.898.009,00	74.576.332.542,00	73.188.601.704,00	87.140.709.201,00	70.229.057.195,00	5,09
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.460.150.000,00	11.521.930.000,00	1.752.530.000,00	1.873.559.000,00	1.837.559.000,00	-6,34
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**19.284.423.541,58**	**-**	**16.907.320.645,00**	**17.063.120.000,00**	**17.307.870.000,00**	**-**
	Pendapatan Hibah	19.284.423.541,58	-	16.907.320.645,00	17.063.120.000,00	17.307.870.000,00	-

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Realisasi pendapatan daerah Kota Blitar cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Pendapatan daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami rata – rata pertumbuhan positif yaitu sebesar 1,09%, meskipun pada periode tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 6,63%. Dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yang mencapai di atas angka 5%, pertumbuhan pendapatan daerah Kota Blitar tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,58%, yang secara persentase pertumbuhan masing–masing komponen PAD berbeda–beda. Pada periode tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar meningkat signifikan dikarenakan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017 naik 54,29% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016 sebesar Rp. 95.236.342.061,69. Kenaikan ini disebabkan Dana BOS yang masuk ke dalam komponen APBD dengan realisasi senilai Rp. 17.516.715.993,24, peningkatan penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang Pekerjaan Umum, peningkatan pendapatan Fasilitas sosial dan fasilitas umum (Rusunawa), peningkatan Pendapatan BLUD, peningkatan hasil pengelolaan dana bergulir, dan BPJS Kesehatan Non Kapitasi yang awalnya pada tahun lalu di Retribusi Pelayanan Kesehatan, tahun ini dipindahkan ke Lain-lain PAD yang Sah.

Dana Perimbangan Kota Blitar mengalami penurunan selama dua tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan periode 2016-2020 sebesar -2,26%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar 64,58%, sedangkan ketiga komponen yang lain mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan dari DAU maupun DAK pada tahun 2020. Komponen pendapatan transfer lainnya selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif yaitu

107,37% yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Sedangkan pada pendapatan transfer pemerintah provinsi menunjukkan rata – rata pertumbuhan sebesar 3,21%.

Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, terdapat sumber pendapatan daerah yang lain yaitu Lain-lain Pendapatan yang Sah. Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp.17.307.870.000,00. Meskipun demikian, terdapat rata-rata pertumbuhan yang bernilai negatif yaitu bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah lainnya sebesar -6,34%.

3.1.2.2. Belanja Daerah

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini menjadi acuan dalam menentukan kebijakan belanja daerah di masa mendatang. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	BELANJA	**857.795.223.707,67**	**784.297.309.172,26**	**811.042.753.123,83**	**974.726.288.816,17**	**868.055.395.687,07**	**1,02**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**367.403.220.005,43**	**274.050.479.354,59**	**315.257.227.775,50**	**354.175.352.617,40**	**368.108.798.763,92**	**1,48**
2.1.1	Belanja Pegawai	325.739.067.305,43	252.978.690.562,59	267.539.845.763,50	303.499.716.850,40	286.441.797.358,69	-2,19
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-		-
2.1.3	Dana Subsidi	1.311.840.000,00	-	-	-		-
2.1.4	Belanja Hibah	15.471.036.250,00	18.275.705.500,00	24.368.685.958,00	26.739.219.800,00	38.493.073.000,00	26,29
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.723.011.500,00	2.264.934.920,00	22.691.789.730,00	23.408.640.162,00	14.015.883.398,00	193,61
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	12.243.680,00	7.087.680,00	0,00	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	499.969.500,00	499.984.500,00	499.984.500,00	515.432.825,00	546.889.575,00	2,30
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	658.295.450,00	31.163.872,00	144.678.144,00	5.255.300,00	28.611.155.432,23	-
2.2	**Belanja Langsung**	**490.392.003.702,24**	**510.246.829.817,67**	**495.785.525.348,33**	**620.550.936.198,77**	**499.946.596.923,15**	**1,74**
2.2.1	Belanja Pegawai	7.599.007.433,00	30.036.244.375,41	6.495.582.931,00	6.409.463.450,00	7.483.350.516,00	58,08
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.421.115.873,69	305.220.889.063,90	329.255.542.203,67	366.755.582.835,05	377.654.652.692,70	7,87
2.2.3	Belanja Modal	203.371.880.395,55	174.989.696.378,36	160.034.400.213,66	247.385.889.913,72	114.808.593.714,45	-5,38

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Realisasi belanja daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020 memiliki kecenderungan meningkat, dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 1,02%. Namun demikian, pertumbuhan belanja dari tahun 2016 menurun sebesar 8,57% yaitu dari Rp. 857.795.223.706 menjadi Rp. 784.297.309.172 pada tahun 2017. Menurunnya pertumbuhan belanja juga terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan sebesar 10,94% yaitu dari Rp. 974.726.288.816 menjadi Rp. 868.055.395.687.

Belanja tidak langsung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48% pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Realisasi belanja tidak langsung pada komponen belanja bantuan sosial mengalami rata – rata pertumbuhan yang meningkat sangat drastis sebesar 193,61%. Sedangkan rata – rata pertumbuhan belanja tidak langsung untuk komponen belanja pegawai menunjukkan data negatif yaitu menurun sebesar 2,19%. Adapun komponen belanja yang menunjukkan penurunan adalah pada belanja pegawai pada tahun 2020 dengan persentase penurunan sebesar 5,62%.

Belanja langsung menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,74% selama periode tahun 2016-2020. Dari pertumbuhan tersebut terdapat komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan yaitu belanja pegawai dengan rata–rata pertumbuhan 58,08%, belanja barang dan jasa bertumbuh 11,58%, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 5,38%.

3.1.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis pembiayaan daerah digunakan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan

pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini menjadi acuan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa mendatang. Tabel berikut menunjukkan rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020.

Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata - Rata Pertum-buhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PEMBIAYAAN	**73.089.836.489,54**	**62.549.149.326,70**	**127.738.072.378,33**	**208.667.078.000,99**	**174.562.974.050,75**	**34,20**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**96.124.260.031,12**	**64.549.149.326,70**	**130.738.072.378,33**	**211.167.078.000,99**	**174.684.769.000,75**	**28,48**
3.1.1	Sisa lebih PrerhitunganAnggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	95.456.361.951,89	63.715.979.878,44	129.223.082.686,32	211.104.495.278,46	174.663.656.285,21	28,92
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	667.898.079,23	833.169.447,26	1.514.989.692,01	62.582.722,53	21.112.715,54	-13,89
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**23.034.423.541,58**	**2.000.000.000**	**3.000.000.000**	**2.500.000.000**	**121.794.950,00**	**-38,28**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	23.034.423.541,58	2.000.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	121.794.950,00	-38,28
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-		**-**
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-		**-**

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Realisasi pembiayaan daerah Kota Blitar cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34,20% pada tahun 2016-2020. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan terjadi kenaikan drastis pada komponen SiLPA tahun 2018 dan 2019.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah memiliki kenaikan dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 28,17% selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 28,92%. Peran SiLPA sangat besar dalam pembentukan penerimaan pembiayaan sebab komponen lainnya yaitu Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman memiliki rata-rata pertumbuhan yang minus.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, pada kurun waktu 2016 sampai 2020 cenderung mengalami fluktuasi dan memiliki rata-rata pertumbuhan negative sebesar -13,89%. Besarnya rata-rata pertumbuhan ini disebabkan pada tahun 2016 terdapat penyertaan modal sebesar Rp. 23.034.423.541,58. Adapun rincian dari penyertaan modal tersebut, yaitu investasi pada PDAM Kota Blitar sebesar Rp. 20.284.423.541,58 di BPR Artha Praja sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan Rp. 750.000.000,00 untuk modal bergilir pada koperasi. Selanjutnya, Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 turun sebesar 16,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 diinvestasikan pada PDAM Kota Blitar, sedangkan pada tahun 2020 terdapat penyertaan modal yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 121.794.950,00.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMD, bahwa penyertaan modal diberikan kepada masing-masing BUMD sampai dengan Tahun 2024 sebesar 15 Milyar rupiah. Sampai dengan tahun 2020

penyertaan modal yang sudah diberikan adalah sebesar Rp 6 Milyar untuk BPR Artha Praja dan sebesar Rp 6,5 Milyar untuk PDAM. Jadi total kekurangan penyertaan modal yang belum diberikan sebesar Rp 17,5 Milyar.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menyajikan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu laporan keuangan yang memberikan gambaran posisi keuangan Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi kepada para pemangku kebijakan daerah, tentang posisi atau keadaan aset kewajiban serta dana ekuitas. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemda melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Tabel berikut menunjukkan neraca daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020.

Tabel 3. 4. Neraca Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	60.750.269.277,68	105.168.681.738,89	191.485.363.908,07	164.626.861.717,21	160.334.899.018,80	34,64
Kas di Bendahara Pengeluaran	93.017.250,00	8.108.769,00	104.682.000,00	20.080,00	0,00	224,93
Kas BOSNAS	1.490.693.130,70	1.919.021.273,59	2.082.743.069,59	3.832.970.903,24	0,00	5,32
Kas di Non BOSNAS	68.337.266,73	-				
Kas di Bendahara Penerimaan	184.534.529,16	92.816.085,95	134.359.900,63	89.061.073,66	11.143.434,52	-31,54
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	593.317.390,45	21.299.699.428,25	17.177.448.413,71	5.448.648.445,76	18.992.901.442,13	912,72
Kas di Kapitasi JKN	1.138.786.126,00	834.582.065,00	365.186.629,00	768.900.139,00	524.713.390,89	-1,04
Kas Di bendahara lainnya				4.819.572,00	7.640.690.048,09	-
Piutang Pajak	5.881.633.349,00	7.064.009.620,00	7.887.300.285,50	8.566.328.579,00	8.882.141.610,00	11,01
Piutang Retribusi	7.153.196.121,00	7.134.523.049,00	6.864.141.715,00	7.035.399.765,00	7.156.884.515,00	0,04
Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	-	-	-	24.904.844.346,00	5.599.795.008,00	-
Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	14.882.003.130,00	13.203.867.540,00	5.024.336.392,00	3.080.083.848,00	5.563.388.916,00	-7,82
Bagian Lancar pinjaman kepada perusahaan daerah	121.473.000,00	121.923.000,00	82.087.000,00	82.087.000,00	0,00	-33,08
Bagian Lancar pinjaman kepada pemerintah pusat	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	687.960.000,00	239.418.750,00	-
Piutang Bunga	102.913.380,00	116.273.970,00	129.362.340,00	142.272.930,00	155.183.520,00	10,82
Piutang Lainnya	18.297.171.337,01	25.305.657.391,91	33.713.730.684,72	45.795.702.333,87	25.020.531.100,81	15,50
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-11.809.623.923,03	-13.418.012.312,11	-14.105.294.107,81	-15.240.363.242,32	-13.386.667.143,58	3,66
Belanja Dibayar Dimuka	14.033.333,34	9.354.166,67	17.950.000,00	10.454.166,67	10.218.791,67	-3,63
Asuransi Dibayar Dimuka	1.975.833,33	-	-	-	-	-
Persediaan	15.782.826.587,39	15.951.128.374,21	14.774.078.093,89	14.331.563.191,14	28.687.452.628,15	22,72
Jumlah Aset Lancar	**114.746.557.118,78**	**184.811.634.160,36**	**265.737.476.324,30**	**264.164.649.848,23**	**255.432.695.030,48**	**25,24**
INVESTASI JANGKA PANJANG						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Investasi Non Permanen						
Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	574.609.000,00	778.619.000,00	778.619.000,00	860.706.000,00	-
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-		-	-	-
Investasi Dana Bergulir	8.136.922.169,57	7.349.843.100,08	5.828.990.155,72	5.770.710.967,67	5.750.891.355,58	-7,93
Penyisihan Piutang (Investasi Non Permanen) Tak Tertagih	-4.107.190.030,94	-4.462.585.551,02	-4.385.460.792,18	-4.517.718.707,27	-4.581.968.921,81	2,84
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	**4.029.732.138,63**	**3.461.866.549,06**	**2.222.148.363,54**	**2.031.611.260,40**	**2.029.628.433,77**	**-14,64**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	19.287.666.334,84	20.849.514.553,02	22.452.712.700,58	24.746.200.545,04	23.287.941.319,25	5,03
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-		-
Jumlah Investasi Permanen	**19.287.666.334,84**	**20.849.514.553,02**	**22.452.712.700,58**	**24.746.200.545,04**	**23.287.941.319,25**	**5,03**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**23.317.398.473,47**	**24.311.381.102,08**	**24.674.861.064,12**	**26.777.811.805,44**	**25.317.569.753,02**	**2,21**
ASET TETAP						
Tanah	1.248.958.285.194,00	1.173.293.989.246,00	1.163.090.256.750,00	1.241.309.792.331,00	1.240.290.291.651,00	-0,07
Peralatan dan Mesin	315.055.120.439,73	328.744.157.506,69	377.728.273.694,95	462.624.820.786,92	514.417.454.932,37	13,23
Gedung dan Bangunan	647.350.721.508,36	649.499.167.474,13	684.963.253.453,08	812.529.119.338,04	835.252.428.366,08	6,80
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	563.742.691.345,34	632.906.748.635,97	690.220.967.239,42	748.545.212.935,91	774.978.776.574,88	8,33
Aset Tetap Lainnya	32.125.220.347,00	31.585.849.785,80	35.026.214.600,80	36.806.720.619,34	38.986.105.779,34	5,05
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.657.890.477,33	14.189.132.700,00	14.028.032.900,00	8.817.496.055	11.944.514.174,00	-5,61
Akumulasi Penyusutan	-736.944.987.498,96	-783.201.587.881,19	-850.000.395.485,58	-967.361.425.412,76	-1.114.609.303.820,72	10,96
Jumlah Aset Tetap	**2.087.944.941.812,70**	**2.047.017.457.467,40**	**2.115.056.603.152,67**	**2.343.271.736.653,45**	**2.301.260.267.656,95**	**2,59**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	-	-	-	-

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
Tuntutan Perbendahaan	-	-	-	-	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	18.033.070,33	500.000,00	500.000,00	394.418.750,00	386.657.500,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	3.114.000.000,00	3.114.000.000,00	3.114.000.000,00	3.114.000.000,00	-
Aset Tak Berwujud	7.540.207.350,00	9.354.959.450,00	10.229.115.280,00	11.955.752.880,00	16.934.121.184,81	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-5.761.307.710,00	-6.658.452.170,00	-7.386.955.999,68	-6.814.709.566,00	-8.650.684.931,96	-
Aset Lain-lain	1.378.173.485,00	1.608.715.485,00	31.726.135.444,89	7.723.578.326,05	4.894.951.639,35	444,15
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	-601.106.635,00	-633.141.085,00	-1.731.982.316,61	-5.996.116.666,00	-3.771.465.628,37	97,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya				128.175.000,00	129.442.000,00	-
Jumlah Aset Lainnya	**2.573.999.560,33**	**6.786.581.680,00**	**35.950.812.408,60**	**10.505.098.724,05**	**13.037.021.763,83**	**136,68**
JUMLAH ASET	**2.228.582.896.965,28**	**2.262.927.054.409,84**	**2.441.419.752.949,69**	**2.644.733.042.031,17**	**2.595.047.554.204,28**	**3,97**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	158.532.953,00	28.294.880,31	6.246.741,91	300.000,00	0,00	-88,82
Utang Pemotongan Pajak Pusat	-	-		-	-	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.762.816.596,53	6.403.646.217,91	7.078.384.229,79	2.631.117.225,29	0,00	-39,40
Utang Beban				14.776.923.750,69	24.054.762.489,21	-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	15.693.464.367,00			-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-		-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-		-
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-		-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-		-
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.365.512.827,01	13.621.828.697,60	-	333.612.682,00	4.902.250.123,00	317,84
Pendapatan diterima dimuka	903.097.711,63	82.823.466,67	155.432.018,00	225.796.500,01	621.322.769,95	54,32

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya				128.175.000,00	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**21.189.960.088,17**	**20.136.593.262,49**	**22.933.527.356,70**	**18.095.925.157,99**	**29.578.335.382,16**	**12,82**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-		-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-		-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-		-
JUMLAH KEWAJIBAN	**21.189.960.088,17**	**20.136.593.262,49**	**22.933.527.356,70**	**18.095.925.157,99**	**29.578.335.382,16**	**12,82**
EKUITAS DANA	2.207.392.936.877,11	2.242.790.461.147,35	2.418.486.225.592,99	2.626.637.116.873,18	2.565.469.218.822,12	**3,93**
JUMLAH EKUITAS DANA	**2.207.392.936.877,11**	**2.242.790.461.14,35**	**2.418.486.225.592,99**	**2.626.637.116.873,18**	**2.565.469.218.822,12**	**223,69**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.228.582.896.965,28**	**2.262.927.054.409,84**	**2.441.419.752.949,69**	**2.644.733.042.031,17**	**2.595.047.554.204,28**	**3,97**

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Aset pada periode tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 25,24%. Pertumbuhan tersebut diantaranya disebabkan kenaikan posisi kas daerah sebesar 34,64%, yang terjadi karena kenaikan pada SiLPA tahun berjalan sebesar Rp. 174.663.656.285,21. Pada kas di bendahara pengeluaran pada tahun 2016 dan 2018 terjadi kenaikan secara drastis. Pada tahun 2018 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 104.682.000,00 atau naik 1190,97% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 8.108.769,00. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari pungutan pajak yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Negara dan pengembalian belanja yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2018.

Komponen Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi terjadi penurunan sebesar -7,82%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2018 Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sudah diselesaikan. Komponen piutang dana bagi hasil provinsi yang masih terdapat nilainya yaitu piutang bagi hasil pajak rokok.

Aset tetap mengalami rata – rata pertumbuhan sebesar 2,59 Tahun 2016-2020. Komponen yang meningkat cukup drastis yaitu peralatan dan mesin sebesar 13,23%, disusul dengan komponen aset jalan, irigasi dan jaringan dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 8,33%. Kondisi ini disesuaikan dengan penurunan pada komponen konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar 5,61% dan akumulasi penyusutan sebesar 10,96%. Penurunan KDP disebabkan karena KDP pada tahun sebelumnya sudah dapat diselesaikan dan sudah dimanfaatkan. Namun demikian, masih terdapat proses pembangunan yang berlangsung di tahun selanjutnya maupun reklas ke aset tak berwujud seperti masterplan, dokumen perencanaan, dan

jasa konsultansi. Sementara itu, penurunan akumulasi penyusutan adalah penyusutan nilai atas penurunan kapasitas manfaat selain tanah dan adanya penghapusan dan hibah ke provinsi.

Kewajiban pada periode Tahun 2016-2020 mengalami rata–rata pertumbuhan sebesar 12,82%. Angka pertumbuhan ini dipengaruhi oleh komponen kewajiban jangka pendek yaitu utang jangka pendek lainnya yang mengalami rata – rata pertumbuhan sebesar 317,84%.

Analisa rasio keuangan juga perlu dilakukan berdasarkan data neraca daerah Kota Blitar Tahun 2016-2020. Analisa rasio keuangan digunakan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau posisi keuangan Pemerintah Daerah dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisa rasio keuangan ini dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilakukan analisa rasio keuangan berdasarkan beberapa pengukuran sebagai berikut.

3.1.3.1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini antara lain: Rasio Lancar *(Current Ratio),* dan Rasio Cepat *(Quick Ratio).*

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio Lancar *(current ratio)* membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangkapendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya.

Berikut ini adalah rumus Rasio Lancar (Current Ratio):

Rasio Lancar = Aktiva Lancar / Hutang Lancar

Tabel 3. 5. Daftar Rasio Lancar Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 – 2020

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Rasio Lancar
2016	114.746.557.118,78	21.189.960.088,17	5,42
2017	184.811.634.160,36	20.136.593.262,49	9,18
2018	265.737.476.324,30	22.933.527.356,70	11,59
2019	264.164.649.848,23	18.095.925.157,99	14,60
2020	255.432.695.030,48	29.578.335.382,16	8,64

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwa rasio lancar yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar dari Tahun 2016 sampai 2020 dapat dikatakan baik, karena nilainya lebih dari 1 (satu). Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendek melalui aset lancarnya.

Rasio Lancar Pemerintah Kota Blitar menunjukkan kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hanya pada tahun 2016 yang lebih kecil dari pada tahun setelahnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada hutang lancar dan penurunan nilai aktiva lancar dari tahun sebelumnya. Namun nilai rasio lancar 5,42 pada tahun 2016 masih bisa dikatakan sebagai nilai rasio lancar yang baik, karena nilai rasio lancar 5,42 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar mampu melunasi kewajiban jangka pendek melalui aset lancarnya sebanyak 5 kali peminjaman selama satu tahun. Sedangkan nilai rasio lancar pada tahun 2019 merupakan nilai rasio yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini dikarenakan adanya penurunan hutang lancar yang sangat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai rasio 14,60 berarti Pemerintah Kota Blitar mempunyai kemampuan membayar hutang jangka pendeknya sebanyak 14 kali dalam satu tahun.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat *(Quick Ratio)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Rasio Cepat ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan finansial Pemerintah Daerah. Dengan *Quick Ratio* atau Rasio Cepat ini dapat diketahui berapa banyak hutang jangka pendek Pemerintah Daerah yang dapat dipenuhi dengan menjual semua aset likuid pemerintah daerah dalam waktu yang paling singkat.

Quick Ratio atau Rasio cepat dihitung dengan mengurangkan persediaan (*inventory*) dari aktiva lancar (*current assets*) dan sisanya dibagidengan kewajiban lancar (*Current Liabilities*). Dikurangkan Persediaan atau Inventory dari perhitungan Aktiva lancar karena persediaan pada dasarnya merupakan aset lancar yang sulit dikonversi dengan uang tunai dalam waktu singkat dan biasanya juga akan terjadi kerugian jika terjadi likuidasi.

Berikut ini adalah rumus Rasio Cepat (*Quick Ratio*):

Rasio Cepat = (Aktiva Lancar – Persediaan) / Kewajiban lancar

Tabel 3. 6. Daftar Rasio Cepat Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016–2020

Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Hutang Lancar	Rasio Cepat
2016	114.746.557.118,78	15.782.826.587,39	21.189.960.088,17	4,67
2017	184.811.634.160,36	15.951.128.374,21	20.136.593.262,49	8,39
2018	265.737.476.324,30	14.774.078.093,89	22.933.527.356,70	10,94
2019	264.164.649.848,23	14.331.563.191,14	18.095.925.157,99	13,81
2020	255.432.695.030,48	28.687.452.628,15	29.578.335.382,16	7,67

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Rasio cepat menunjukkan kemampuan menyediakan kas dan aktiva lainnya yang dapat dilikuidasikan dengan segera jika diperlukan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik, karena nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dapat dengan mudah

mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan nilai rasio cepat Neraca Keuangan Pemerintah Kota Blitar, perkembangan nilai rasio cepat terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya aktiva lancar Pemerintah Kota Blitar. Penurunan nilai rasio cepat dari tahun sebelumnya hanya terjadi pada tahun 2016, karena pada tahun 2016 terjadi peningkatan hutang lancar namun terjadi penurunan aktiva lancar paada tahun tersebut. Namun secara keseluruhan rasio cepat Pemerintah Kota Blitar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan baik, karena memiliki nilai rasio cepat di atas 1. Artinya jumlah aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar melebihi nilai hutang lancarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar mampu melunasi hutang jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.

3.1.3.2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

a. Rasio Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau mengukur persentase berapa besar dana yang berasal dari utang. Utang di sini adalah utang Pemerintah Daerah, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin rendah nilai rasio, maka tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik.

Berikut ini adalah rumus Rasio Hutang Terhadap Total Aset:

Rasio Hutang Terhadap Total Aset = Total Hutang / Total Aset

Tabel 3. 7. Daftar Rasio Hutang Terhadap Total Aset Tahun Anggaran 2016–2020

Tahun	Aset	Hutang	Rasio Hutang Terhadap Total Aset
2016	2.228.582.896.965,28	21.189.960.088,17	0,0095
2017	2.262.927.054.409,84	20.136.593.262,49	0,0089
2018	2.441.419.752.949,69	22.933.527.356,70	0,0094
2019	2.644.733.042.031,17	18.095.925.157,99	0,0068
2020	2.595.047.554.204,28	29.578.335.382,16	0,0114

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Hutang terhadap Total Aset mengindikasikan bahwa posisi keuangan Pemerintah Kota Blitar sangat sehat dimana keseluruhan aset Pemerintah Kota Blitar tidak terbebani hutang. Nilai rasio hutang terhadap total aset yang kurang dari 0,5 dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar aset Pemerintah Kota Blitar dibiayai melalui ekuitas.

Pada tahun 2019 nilai hutang menurun 0,0068 dari total asetnya. Hal ini terlihat dari adanya total hutang yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan asetnya mengalami kenaikan. Penurunan rasio hutang terhadap total aset ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar semakin solvabel, karena Pemerintah Kota Blitar memiliki aset yang semakin besar untuk menutupi utang-utang Pemerintah Kota Blitar, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Kenaikan rasio hutang terhadap total aset terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,0114.

b. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu Pemerintah Daerah. Rasio ini juga merupakan ukuran kemampuan Pemerintah Daerah untuk melunasi kewajibannya. Rasio Hutang terhadap Modal ini

merupakan rasio penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan Pemerintah Daerah. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal dibanding utangnya. Seharusnya Pemerintah Daerah memiliki utang yang tidak lebih besar dari modalnya. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik keadaan Pemerintah Daerah, karena semakin kecil utang yang dimiliki maka semakin aman.

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas dihitung dengan cara mengambil total hutang dan membaginya dengan Ekuitas atau Modal. Berikut di bawah ini adalah Rumus Rasio Hutang terhadap Modal.

Rasio Hutang Terhadap Modal = Total Hutang / Modal

Tabel 3. 8. Daftar Rasio Hutang Terhadap Modal Tahun Anggaran 2016–2020

Tahun	Hutang	Modal	Rasio Hutang Terhadap Modal
2016	21.189.960.088,17	2.207.392.936.877,11	0,0096
2017	20.136.593.262,49	2.242.790.461.147,35	0,0090
2018	22.933.527.356,70	2.418.486.225.592,99	0,0095
2019	18.095.925.157,99	2.626.637.116.873,18	0,0069
2020	29.578.335.382,16	2.565.469.218.822,12	0,0115

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Nilai Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kota Blitar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, angka yang jauh dari 1 (satu) menunjukkan bahwa nilai hutang masih berada jauh di bawah modal yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Pemerintah Kota Blitar memiliki kemampuan modal yang baik untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Tabel 3. 9. Analisis Rasio Keuangan Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	**Rasio Likuiditas**					
1	Rasio lancar (*current ratio*)	5,42	9,18	11,59	14,60	8,64
2	Rasio quick (*quick ratio*)	4,67	8,39	10,94	13,81	7,67
B	**Rasio Solvabilitas**					

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0095	0,00089	0,00094	0,0068	0,0114
2	Rasio hutang terhadap modal	0,0096	0,0090	0,0095	0,0069	0,0115

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah, 2021

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaran pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Informasi kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran selama periode yang direncanakan. Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai 2 hal : 1) proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dan 2) proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Tabel berikut menggambarkan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Blitar tahun 2016-2020.

Tabel 3. 10. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016			2017			2018		
		APBD	REALISASI	%	APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%
	BELANJA	**923.078.871.757,59**	**857.795.223.707,67**	**92,2**	**885.338.549.267,74**	**784.297.309.172,26**	**88,6**	**972.204.365.136,51**	**811.042.753.123,83**	**83,4**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**385.263.199.306,56**	**367.403.220.005,43**	**95,4**	**344.195.745.840,70**	**274.050.479.354,59**	**78,9**	**368.411.051.316,26**	**315.257.227.775,50**	**85,5**
1	Belanja Pegawai	340.463.257.888,56	325.739.067.305,43	95,68	320.279.015.880,70	252.978.690.562,59	79	312.917.643.516,26	267.539.845.763,50	85,5
2	Belanja Subsidi	1.421.160.000,00	1.311.840.000,00	92,31		-				
3	Belanja Hibah	17.097.245.758,00	15.471.036.250,00	90,24	17.292.730.000,00	18.275.705.500,00	105,7	26.391.359.685,00	24.368.685.958,00	92,3
4	Belanja Bantuan Sosial	25.031.536.000,00	23.723.011.500,00	94,77	4.124.000.000,00	2.264.934.920,00	54,9	26.582.398.155,00	22.691.789.730,00	85,3
5	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/ kabupaten/Kota dan pemerintah desa							19.650.000,00	12.243.680,00	62,3
6	Belanja Bantuan Keuangan	499.999.960,00	499.969.500,00	99,99	499.999.960,00	499.984.500,00	100	499.999.960,00	499.984.500,00	100
7	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	658.295.450,00	66,66	2.000.000.000,00	31.163.872,00	25	2.000.000.000,00	144.678.144,00	7,23
B	**Belanja Langsung**	**537.815.672.151,33**	**490.392.003.702,24**	**91,18**	**541.142.803.427,04**	**510.246.829.817,67**	**94,3**	**603.793.313.820,25**	**495.785.525.348,33**	**82,1**
1	Belanja Pegawai	31.464.657.773,50	7.599.007.433,00	24,15	32.196.019.752,00	30.036.244.375,41	93,3	8.445.071.420,00	6.495.582.931,00	81,9
2	Belanja Barang dan Jasa	273.317.207.643,50	279.421.115.873,69	102,2	310.528.256.420,80	305.220.889.063,90	98,3	375.992.469.444,97	329.255.542.203,67	88,1
3	Belanja Modal	233.033.806.734,33	203.371.880.395,55	87,27	198.418.527.254,24	174.989.696.378,36	88,2	219.355.772.955,28	160.034.400.213,66	73

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Lanjutan Tabel 3.10

No.	Uraian	2019			2020			Rata – Rata Realisasi (%)
		APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%	
	BELANJA	**1.174.529.026.016,46**	**974.726.288.816,17**	**82,99**	**994.082.778.213,99**	**868.055.395.687,07**	**87,32**	**86,90**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**413.003.603.649,00**	**354.175.352.617,40**	**85,76**	**444.460.875.161,00**	**368.108.798.763,92**	**82,82**	**85,68**
1	Belanja Pegawai	357.349.140.031,00	303.499.716.850,40	84,93	330.630.975.827,00	286.441.797.358,69	86,63	86,35
2	Belanja Subsidi	-						
3	Belanja Hibah	29.081.985.000,00	26.739.219.800,00	91,94	41.520.121.300,00	38.493.073.000,00	92,71	94,58
4	Belanja Bantuan Sosial	24.890.918.910,00	23.408.640.162,00	94,04	16.121.600.000,00	14.015.883.398,00	86,94	83,19
5	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/ kabupaten/Kota dan pemerintah desa	15.000.000,00	7.087.680,00	47,25	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Keuangan	515.434.825,00	515.432.825,00	100	546.889.575,00	546.889.575,00	100	100
7	Belanja Tidak Terduga	1.151.124.883,00	5.255.300,00	0,46	55.641.288.459,00	28.611.155.432,23	51,42	30,15
B	**Belanja Langsung**	**761.525.422.367,46**	**620.550.936.198,77**	**81,49**	**549.621.903.052,99**	**499.946.596.923,15**	**90,96**	**88,01**
1	Belanja Pegawai	7.377.238.239,00	6.409.463.450,00	86,88	8.683.789.647,00	7.483.350.516,00	86,62	74,57
2	Belanja Barang dan Jasa	412.660.246.503,71	366.755.582.835,05	88,88	413.695.207.192,54	377.654.652.692,70	91,29	93,75
3	Belanja Modal	341.487.937.624,75	247.385.889.913,72	72,44	127.242.906.213,45	114.808.593.714,45	90,23	82,23

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah merupakan perbandingan anggaran dengan realisasi, sehingga diperoleh tingkat realisasi belanja Kota Blitar. Berdasarkan Tabel 3.6, realisasi rata–rata pertumbuhan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Di Kota Blitar pada Tahun 2016 sampai 2020 sebesar 86,90%. Belanja Tidak Langsung terlihat mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan 85,68%. Sedangkan belanja langsung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 88,01%.

3.2.1.2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah gambaran tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Blitar dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Tahun 2016-2020 Kota Blitar dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 11. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**325.739.067.305,43**	**252.978.690.562,59**	**267.539.845.763,50**	**303.499.716.850,40**	**286.441.797.358,69**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	301.829.865.572,00	231.101.266.865,00	231.608.655.859,00	241.468.852.059,00	235.726.562.022,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	1.739.533.500,00	3.314.924.000,00	4.402.333.500,00	3.934.224.100,00	4.274.738.000,00
3	Belanja Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	1.464.414.812,92	1.362.508.658,59	1.849.081.185,50	1.908.717.867,40	1.510.033.560,69
4	Belanja Tambahan Penghasilan	20.705.253.420,51	17.199.991.039,00	29.679.775.219,00	56.187.922.824,00	44.930.463.776,00
B	**Belanja Langsung**	**78.739.649.925,00**	**51.850.789.844,50**	**51.161.493.984,95**	**56.438.939.816,00**	**43.393.526.404,00**
1	Belanja Honorarium	5.888.935.575,00	5.254.189.402,00	5.123.874.311,00	6.248.546.245,00	6.262.893.765,00
2	Belanja Uang Lembur	3.582.103.720,00	4.194.529.000,00	-	-	623.697.000,00
3	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	36.230.535.136,00	6.546.276.134,00	7.131.229.880,00	9.746.925.057,00	18.254.078.345,00
4	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.551.599.225,00	2.711.990.748,00	429.802.700,00	521.094.500,00	474.917.400,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	23.942.932.923,00	29.982.120.360,50	31.560.809.149,99	30.064.509.111,00	15.152.486.272,00
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	2.543.543.346,00	3.161.684.200,00	6.915.777.943,96	9.857.864.903,00	2.625.453.622,00
	TOTAL	**404.478.717.230,43**	**304.829.480.407,09**	**318.701.339.748,45**	**359.938.656.666,40**	**329.835.323.762,69**

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Tabel 3. 12. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2016	404.478.717.230,43	880.829.647.249,25	45,92
2	2017	304.829.480.407,09	786.297.309.172,26	38,77
3	2018	318.701.339.748,45	814.042.753.123,83	39,15
4	2019	359.938.656.666,40	977.226.671.816,17	36,83
5	2020	329.835.323.762,69	868.177.190.637,07	37,99

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah cenderung menurun dari waktu ke waktu. Penurunan ini untuk memperbesar porsi belanja untuk pembangunan dan masyarakat. Pada tahun 2016 persentase belanja kebutuhan aparatur sebesar 45,92%, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 38,77% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 36,83% dan mengalami kenaikan sedikit menjadi 37,99% pada tahun 2020.

3.2.1.3. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat

Belanja periodik yang wajib dan mengikat merupakan pengeluaran wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah sedangkan belanja periodik adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan Pemerintah Daerah. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Proporsi pengeluaran periodik, wajib dan mengikat Kota Blitar Tahun 2016-2020 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 13. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Kota Blitar Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	**Belanja Tidak Langsung**	**304.069.368.572,00**	**234.916.175.365,00**	**236.510.973.859,00**	**245.918.508.984,00**	**240.548.189.597,00**	**-5,07**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	301.829.865.572,00	231.101.266.865,00	231.608.655.859,00	241.468.852.059,00	235.726.562.022,00	-5,33
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	1.739.533.500,00	3.314.924.000,00	4.402.333.500,00	3.934.224.100,00	4.274.738.000,00	30,35
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	499.969.500,00	499.984.500,00	499.984.500,00	515.432.825,00	546.889.575,00	2,30
B	**Belanja Langsung**	**35.731.832.790,80**	**37.020.106.164,00**	**48.528.347.787,96**	**58.173.943.038,24**	**70.388.428.842,60**	**18,89**
1	Belanja Pegawai (Honorarium Pegawai)	5.888.935.575,00	5.254.189.402,00	5.123.874.311,00	6.248.546.245,00	6.262.893.765,00	2,23
2	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	11.386.745.713,00	10.893.134.647,00	13.125.006.493,00	11.501.319.676,00	14.478.104.491,00	7,42
3	Belanja Jasa Premi Asuransi	3.324.636.376,00	6.546.276.134,00	7.131.229.880,00	9.746.925.057,00	18.254.078.345,00	57,45
4	Belanja Pelatihan Pegawai	2.543.543.346,00	3.161.684.200,00	6.915.777.943,96	9.857.864.903,00	2.625.453.622,00	28,05
5	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Perkantoran	12.587.971.780,80	11.164.821.781,00	16.232.459.160,00	20.819.287.157,24	28.767.898.619,60	25,13
C	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**23.034.423.542**	**2.000.000.000**	**3.000.000.000**	**2.500.000.000**	**0**	**-39,50**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23.034.423.541,58	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	0	-39,50
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-		
	TOTAL A+B+C	**362.835.624.904,80**	**273.936.281.529,00**	**288.039.321.646,96**	**306.592.452.022,24**	**310.936.618.439,60**	**-2,87**

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Pada periode 2016-2020 rata–rata pertumbuhan pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat mengalami penurunan sebesar -2,87%. Penurunan terjadi pada belanja tidak langsung komponen belanja gaji pegawai dan tunjangan yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan -5,33%.

Komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan negatif selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar -39,50% diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, salah satunya dipengaruhi oleh tidak adanya penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2020,

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.2.2.1. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Analisis penutup defisit bertujuan untuk mencari nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dengan cara mencari nilai defisit riil anggaran terlebih dahulu dan melihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil.

Tabel 3. 14. Penutup Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Blitar Tahun 2017-2020

No	Uraian	Realisasi			
		2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	850.942.358.240,98	894.409.176.023,96	940.723.250.100,39	880.876.905.111,23

No	Uraian	Realisasi			
		2017	2018	2019	2020
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja Daerah	784.297.309.172,28	811.042.753.123,83	974.726.671.816,17	868.055.395.687,07
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000	121.794.950,00
A.	**Defisit Riil**	**64.645.049.069,70**	**80.366.422.899,13**	**-36.503.421.715,78**	**12.699.714.474,16**
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	63.715.979.878,44	129.223.082.686,32	211.104.495.278,46	174.663.656.285,21
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	833.169.447,26	1.514.989.692,01	62.582.722,53	21.112.715,54
B.	Total Realisasi Penerimaan	64.549.149.325,70	130.738.072.378,33	211.167.078.000,99	174.684.769.000,75
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**129.194.198.394,42**	**11.104.495.277,46**	**174.663.656.285,21**	**187.384.483.474,91**

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan penutup defisit riil anggaran, dapat dihitung komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran. Untuk menutup defisit riil anggaran diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

Tabel 3. 15. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Blitar Tahun 2017-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)			
		2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	98,56	160,79	578,31	1.375,34
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)			
		2017	2018	2019	2020
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,29	1,89	0,17	0,17
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3.2.2.2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk memberi gambaran tentang pembentukan komposisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan.

Tabel 3. 16. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Blitar Tahun 2017-2020

Uraian	2017		2018		2019		2020	
	Rp	% dari SilPA	Rp	% dari SilPA	Rp	% dari SilPA	Rp	% dari SilPA
Jumlah SilPA	**62.482.372.794,13**		**129.194.198.394,42**		**211.104.495.278,46**		**174.663.656.285,21**	
Pelampauan Penerimaan	23.321.836.078,68	37,33	6.983.561.652,00	5,41	32.064.647.621,00	15,19	0	0
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	39.160.536.715,45	62,67	122.210.636.742,42	94,59	179.039.847.657,46	84,81	174.663.656.285,21	100

Sumber: Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3.2.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan

pembangunan daerah.

Tabel 3. 17. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Blitar Tahun Berkenaan Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Saldo kas neraca daerah	129.194.198.394,42	211.104.495.277,46	174.663.656.285,21	187.384.483.474,91
	Dikurangi:				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**129.194.198.394,42**	**211.104.495.277,46**	**174.663.656.285,21**	**187.384.483.474,91**

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis keuangan daerah digunakan untuk menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, analisis ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan daerah.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung alokasi kapasitas total keuangan daerah untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah Kota Blitar.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 disajikan pada sub bab ini. Pendapatan Kota Blitar berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain–Lain Pendapatan Daerah. Pendapatan Kota Blitar yang cukup signifikan bersumber dari Pendapatan Transfer terutama Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan pendanaan kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud dapat dinikmati oleh masyarakat. Alokasi belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah menggunakan hasil analisis rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan maupun belanja daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Selain itu, bencana nasional penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak sekitar Maret Tahun 2020 menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Analisis kerangka pendanaan Pembangunan Jangka Menengah juga mempertimbangkan kondisi keuangan Kota Blitar Tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan beberapa kebijakan Pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh beberapa Kementerian/Lembaga untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasionaldan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
l. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan realokasi dan refocusing program dan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Ini dilakukan untuk melaksanaan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya pasca pandemi.

Adapun kebijakan penanganan wabah COVID-19 di Kota Blitar yang telah dilaksanakan meliputi:

a. Penanganan Kesehatan
   - Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan penularan (masker, handsanitizer, vitamin, bahan dan alat disinfektan, bahan dan alat cuci tangan, APD).
   - Penanganan kasus (sarpras ruang isolasi RSUD Mardi Waluyo, penyediaan APD medis, penyediaan bahan dan alat Kesehatan, dukungan program insentif nakes dan relawan)
   - Penyediaan dan operasional rumah karantina pemudik.
   - Pembayaran biaya rawat inap kasus positif COVID-19.
   - Fasilitasi crisis center penanggulangan COVID-19 dan operasional posko-posko.

b. Penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial
   - Pemberian bantuan sosial barang dan tunai untuk masyarakat terdampak resiko sosial, penerima rastra, korban PHK, Pelaku Usaha Mikro, Pedagang pasar.
   - Pemberian Bantuan dari Forum CSR dan BAZNAS

c. Penanganan Dampak Ekonomi Pasca Bencana
   - Penguatan permodalan bagi pelaku usaha informal dan stimulus ekonomi lainnya.
   - Program pembangunan padat karya kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dari DAU Tambahan.

Berikut ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam penanganan COVID-19 di Kota Blitar berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Penjabaran APBD Tahun 2020.

Tabel 3. 18. Alokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19 Kota Blitar Tahun 2020

Prioritas	Refocusing Program/Kegiatan	Realokasi Belanja (Bansos & BTT)	Jumlah	Keterangan
Penanganan Kesehatan	15.945.687.920	23.028.800.000	38.974.487.920	Dianggarkan pada program/kegiatan PD dan BTT
Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial	-	13.191.600.000	13.191.600.000	Dianggarkan di Bansos tidak terencana dan BTT
Penanganan Dampak Ekonomi Pasca Bencana	3.083.263.650	7.152.500.000	10.235.763.650	Dianggarkan melalui kegiatan program padat karya DAU tambahan & BTT
Anggaran Penanganan COVID-19	**19.401.851.570**	**43.372.900.000**	**62.401.851.570**	

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Sebagai upaya percepatan dalam menangani COVID-19, Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62,4 Milyar pada tahun 2020. Pemerintah Kota Blitar memiliki 3 program prioritas dalam mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19, yaitu: 1) penanganan kesehatan, 2) penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial, dan 3) penanganan dampak ekonomi pasca bencana yang dilakukan melalui refocusing program/kegiatan Perangkat daerah dan realokasi belanja (bantuan sosial dan Belanja Tidak Terduga). Dari ketiga program prioritas tersebut, penanganan kesehatan memiliki proporsi alokasi anggaran penanganan COVID-19 tertinggi sebesar 62,46%. Sementara itu, prioritas kedua yaitu penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial memiliki proporsi alokasi anggaran penanganan COVID-19 sebesar 21%,

sedangkan prioritas ketiga (penanganan dampak ekonomi Pasca Bencana) hanya memiliki proporsi terhadap jumlah anggaran penanganan COVID-19 sebesar 16,40%.

Berkaitan dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran tersebut, Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran terbesar untuk realokasi belanja melalui pemberian bantuan sosial dan Belanja Tidak Terduga (BTT) mencapai 69,51% dari keseluruhan anggaran penanganan COVID-19. Sementara itu, refocusing anggaran penanganan COVID-19 melalui program/kegiatan Perangkat Daerah hanya sebesar 31,09%.

Proyeksi APBD Kota Blitar tahun 2021-2026 mempertimbangkan 4 aspek. Pertama, tren rata-rata pertumbuhan, proporsi, dan tingkat realisasi tiap komponen APBD 5 tahun sebelumnya. Kedua, regulasi pemerintah pusat tentang penanganan COVID-19 yaitu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Ketiga, potensi pertumbuhan ekonomi Kota Blitar. Keempat, perubahan regulasi pemerintah terutama yang berimplikasi terhadap APBD Kota Blitar. Berikut merupakan tabel proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 19. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
4	**PENDAPATAN**	**885.589.500.543,00**	**895.990.832.761,00**	**907.869.557.876,00**	**919.955.375.011,00**	**932.225.191.340,00**	**947.901.387.749,00**	**1,42**
04.01	**Pendapatan Asli Daerah**	**187.334.393.543,00**	**186.064.872.116,00**	**187.925.520.837,00**	**189.804.776.046,00**	**191.702.823.807,00**	**196.890.330.344,00**	**1,43**
04.01.01	Pajak daerah	41.059.873.632,00	38.327.607.006,00	38.710.883.076,00	39.097.991.907,00	39.488.971.826,00	39.883.861.544,00	1,00
04.01.02	Retribusi daerah	9.064.490.239,00	9.162.205.141,00	9.253.827.193,00	9.346.365.465,00	9.439.829.120,00	9.534.227.411,00	1,00
04.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.104.657.721,00	1.115.704.298,00	1.126.861.341,00	1.138.129.955,00	1.149.511.255,00	1.161.006.368,00	1,00
04.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	136.105.371.951,00	137.459.355.671,00	138.833.949.227,00	140.222.288.719,00	141.624.511.606,00	143.040.756.722,00	1,00
04.02	**Pendapatan Transfer**	**680.327.648.000,00**	**691.998.501.645,00**	**702.016.578.038,00**	**712.223.139.965,00**	**722.594.908.533,00**	**733.083.598.405,00**	**1,45**
04.02.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**605.301.488.000,00**	**613.259.128.645,00**	**621.354.659.688,00**	**629.590.612.631,00**	**637.942.506.991,00**	**646.411.974.930,00**	**1,32**
4.2.01.01	Dana perimbangan	568.991.610.000,00	576.949.250.645,00	585.044.781.688,00	593.280.734.631,00	601.632.628.991,00	610.102.096.930,00	**1,41**
4.2.01.02	Dana insentif daerah	36.309.878.000,00	36.309.878.000,00	36.309.878.000,00	36.309.878.000,00	36.309.878.000,00	36.309.878.000,00	**0,00**
4.2.01.03	Dana otonomi khusus	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.04	Dana keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana desa	-	-	-	-	-	-	-
04.02.02	**Transfer Antar-Daerah**	**75.026.160.000**	**78.739.373.000**	**80.661.918.350**	**82.632.527.334**	**84.652.401.543**	**86.722.772.606**	**2,44**
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	75.026.160.000	76.901.814.000	78.824.359.350	80.794.968.334	82.814.842.543	84.885.213.606	**2,50**
4.2.02.02	Bantuan keuangan	-	1.837.559.000	1.837.559.000	1.837.559.000	1.837.559.000	1.837.559.000	-

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
04.03	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**17.927.459.000,00**	**17.927.459.000,00**	**17.927.459.000,00**	**17.927.459.000,00**	**17.927.459.000,00**	**17.927.459.000,00**	**0,00**
04.03.01	Hibah	-	-	-	-	-	-	**0,00**
04.03.02	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	
04.03.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	**0,00**
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	17.927.459.000,00	**0,00**
5	**BELANJA**	**960.462.053.829**	**966.345.934.981**	**975.737.558.052**	**985.866.015.183**	**1.001.207.618.709**	**1.015.484.166.570**	**1,25**
05.01	**Belanja operasi**	**828.313.351.376**	**810.561.282.156**	**818.468.228.417**	**827.164.891.926**	**841.061.059.439**	**853.878.398.909**	**1,31**
05.01.01	Belanja pegawai	328.404.705.636	335.217.444.109	336.893.531.330	338.577.998.987	340.270.888.982	341.972.243.428	**0,50**
05.01.02	Belanja barang dan jasa	448.365.346.467	423.558.446.434	429.544.792.210	436.310.029.667	448.263.879.205	459.127.941.970	**2,04**
05.01.03	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-
05.01.04	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-
05.01.05	Belanja hibah	27.334.065.273	27.334.065.273	27.334.065.273	27.334.065.273	27.334.065.273	27.334.065.273	**0,00**
05.01.06	Belanja bantuan sosial	24.209.234.000	24.451.326.340	24.695.839.603	24.942.797.999	25.192.225.979	25.444.148.239	**1,00**
05.02	**Belanja modal**	**125.148.702.453**	**148.784.652.825**	**150.269.329.635**	**151.701.123.257**	**153.146.559.270**	**154.605.767.662**	**0,96**
05.02.01	Belanja Modal	125.148.702.453	148.784.652.825	150.269.329.635	151.701.123.257	153.146.559.270	154.605.767.662	**0,96**
05.03	**Belanja tidak terduga**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**0,00**

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
05.03.01	Belanja tidak terduga	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	**0,00**
05.04	**Belanja transfer**	-	-	-	-	-	-	**-**
05.04.01	Belanja bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
05.04.02	Belanja bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	**-**
6	**Pembiayaan Daerah**	**186.384.483.475**	**47.816.730.000**	**45.780.395.400**	**44.264.787.492**	**47.769.491.742**	**46.794.101.908**	**-0,42**
06.01	**Penerimaan pembiyaan Daerah**	**187.384.483.475**	**51.816.730.000**	**50.780.395.400**	**49.764.787.492**	**48.769.491.742**	**47.794.101.908**	**-2,00**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah Tahun Sebelumnya	187.384.483.475	51.816.730.000	50.780.395.400	49.764.787.492	48.769.491.742	47.794.101.908	**-2,00**
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**1.000.000.000**	**4.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.500.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**-11,70**
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	**-11,70**
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0	-
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	-

Kode Akun	Uraian Akun	Proyeksi						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
06.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	-

Sumber : APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD 2021, diolah dan hasil analisis, 2021

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,42%. Rata-rata pertumbuhan total Pendapatan Daerah Kota Blitar cukup tinggi disebabkan karena adanya peningkatan tiap tahun di hampir seluruh komponen Pendapatan kecuali pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama Tahun 2021-2026. Dari hasil proyeksi ketiga komponen Pendapatan Daerah, komponen yang mencapai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu Transfer Antar Daerah sebesar 2,44%, sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 1% tiap tahun. Sementara itu, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan hasil proyeksi tidak mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Berkaitan dengan kontribusi masing-masing komponen pembentuk PAD terhadap total PAD Kota Blitar, komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan dapat memberikan rata-rata kontribusi paling tinggi sebesar 73,47% selama Tahun 2021-2026. Sementara itu, komponen pajak daerah memberikan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 20,76% selama kurun waktu tersebut. Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD sebesar 4,9% dan 0,01% pada Tahun 2021-2026.

Proyeksi belanja daerah Kota Blitar meningkat tiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,69% pada Tahun 2021-2026. Dari keempat komponen pembentuk belanja daerah, komponen belanja modal dan belanja operasi diproyeksikan mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 0,82% dan 0,68% pada kurun waktu tersebut. Berkaitan dengan rata-rata kontribusi tiap komponen pembentuk belanja daerah Kota Blitar terhadap total belanja daerah, belanja operasi memberikan kontribusi tertinggi sebesar 84,33% selama

Tahun 2021-2026. Komponen belanja operasi yang berkontribusi paling tinggi terhadap total belanja operasi yaitu belanja barang dan jasa (52,73%) dan belanja pegawai (40,73%). Sementara itu, komponen belanja modal memberikan rata-rata kontribusi sebesar 14,96%, sedangkan komponen belanja tidak terduga hanya berkontribusi sebesar 0,71% terhadap total belanja daerah pada kurun waktu tersebut.

Pembiayaan Daerah Kota Blitar diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -2,74% pada Tahun 2021-2026. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah sebesar -2,00%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit APBD selama satu periode ke depan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah memiliki rata-rata pertumbuhan 53,33% selama Tahun 2021-2026. Anggaran yang diproyeksikan akan menjadi komponen pembentuk pada pengeluaran pembiayaan daerah yaitu penyertaan modal daerah.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembahasan sub bab ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya dalam 1 (satu) periode ke depan. Untuk mengetahui kepasitas riil kemampuan daerah Kota Blitar, perlu dilakukan analisis hasil proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat.

1) Proyeksi SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. SiLPA setidaknya digunakan untuk beberapa hal berikut. Pertama, menutup defisit anggaran jika realisasi penerimaan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Kedua,

mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. Ketiga, mendanai kewajiban lain yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, proyeksi SiLPA penting untuk dilakukan sebagai dasar untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah Kota Blitar.

Nilai SiLPA Kota Blitar tahun 2020 berdasarkan pada APBD tahun 2020 yang telah disesuaikan dengan perubahan APBD tahun 2020. Hal ini merupakan respon atas kebijakan nasional agar pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Proyeksi SiLPA Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 20. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2021-2026 (Rupiah)

Uraian	APBD						
	N (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	174.663.656.285,21	187.384.483.474,91	51.816.730.000,00	50.780.395.400,00	49.764.787.492,00	48.769.491.742,00	47.794.101.908,00

Sumber : APBD Tahun Anggaran 2020 dan perubahan APBD Tahun 2020 dan hasil proyeksi, 2021
**Nilai Proyeksi siLPA diperoleh dari realisasi siLPA tahun sebelumnya*

Hasil proyeksi SiLPA Kota Blitar mengalami tren fluktuatif selama Tahun 2021-2026. Rata-rata pertumbuhan SiLPA sebesar -2,00% selama Tahun 2021-2026. Kondisi ini berkaitan dengan SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit APBD yang diproyeksikan mengalami defisit selama 1 periode mendatang.

2) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Perhitungan proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat digunakan sebagai dasar menyusun kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan jangka menengah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan

jumlah mencukupi untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan misalnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja wajib adalah belanja untuk menjamin pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat misalnya pendidikan, kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya. Hal khusus lainnya yang dimaksud adalah pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Berkaitan dengan amanat tersebut, maka proyeksi belanja wajib dan mengikat perlu dialokasikan untuk beberapa hal berikut :

a. Fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah.
b. Kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji.
c. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang APBN.

d. Pengawasan paling sedikit sebesar 1,00% dari total belanja daerah.
e. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.
f. Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 21. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Blitar Tahun 2021-2026 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019

No	Uraian	APBD 2020	Proyeksi						Rata - Rata Pertumbuhan (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	**Belanja Mengikat**	**331.890.244.409**	**328.404.705.636**	**335.217.444.109**	**336.893.531.330**	**338.577.998.987**	**340.270.888.982**	**341.972.243.428**	**0,50**
1	Belanja Pegawai *	331.890.244.409	328.404.705.636	335.217.444.109	336.893.531.330	338.577.998.987	340.270.888.982	341.972.243.428	**0,50**
2	Belanja RSUD	92.948.649.455	125.561.737.000	103.256.937.724	104.260.460.586	105.342.716.359	106.982.012.333	108.507.503.940	**1,25**
B	**Belanja Wajib**	**630.365.138.860**	**616.622.557.757**	**477.541.381.125**	**482.125.787.670**	**487.095.705.399**	**494.819.090.980**	**501.974.684.559**	**1,26**
1	Pendidikan	246.235.243.876	204.732.150.887	209.786.639.127	211.825.491.849	214.024.305.860	217.354.855.848	220.454.190.036	**1,25**
2	Kesehatan	240.509.750.822	268.013.270.086	141.113.151.193	142.484.587.113	143.963.621.122	146.203.918.245	148.288.687.875	**1,25**
3	Infrastruktur**	80.544.937.292	76.496.165.386	69.733.091.172	70.397.527.149	71.146.407.036	72.521.362.622	73.762.620.384	**1,42**
4	Pendidikan dan pelatihan ASN	1.566.157.808	2.929.915.600	2.947.864.539	2.976.513.941	3.007.411.075	3.054.211.053	3.097.762.050	**1,25**
5	Pengawasan	6.876.054.799	9.149.490.772	9.695.685.904	9.789.915.335	9.891.537.679	10.045.465.340	10.188.706.925	**1,25**
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.632.994.263	55.301.565.026	44.264.949.190	44.651.752.284	45.062.422.627	45.639.277.873	46.182.717.289	**1,07**
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyertaan modal daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	APBD 2020	Proyeksi						Rata - Rata Pertumbuhan (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat	**962.255.383.269**	**945.027.263.393**	**812.758.825.234**	**819.019.319.000**	**825.673.704.386**	**835.089.979.962**	**843.946.927.987**	**0,95**

Sumber: APBD Tahun Anggaran 2020 – 2021dan hasil proyeksi, 2021

Keterangan:

**proyeksi alokasi sudah termasuk belanja langsung (pada komponen kesehatan) dan belanja tidak langsung (pada komponen belanja pegawai)*
***proyeksi alokasi untuk infrastruktur setelah dikurangkan dengan proyeksi infrastruktur pendidikan dan kesehatan pada nomor 1 dan 2. Total infrastuktur memenuhi ketentuan paling sedikit 25% dari dana transfer umum.*

Tren proyeksi total belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 fluktuatif cenderung meningkat. Selama periode tersebut tidak direncanakan adanya pengeluaran pembiayaan, sehingga pengeluaran wajib dan mengikat hanya terdiri dari komponen belanja daerah. Rata-rata pertumbuhan total belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat diproyeksikan sebesar 0,95% selama Tahun 2021-2026.

Kenaikan ini sejalan dengan dengan pendapatan daerah Kota Blitar yang diproyeksikan meningkat selama Tahun 2021-2026. Selain itu, rata-rata pertumbuhan belanja wajib Kota Blitar lebih tinggi (1,26%) dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja mengikat (0,50%) pada 1 periode mendatang. Berkaitan dengan salah satu komponen belanja wajib, belanja infrastruktur tidak memasukkan komponen belanja infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

3) Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah Kota Blitar untuk 1 (satu) periode mendatang. Kapasitas riil keuangan daerah menggambarkan anggaran yang dapat dibelanjakan selain dari alokasi pengeluaran wajib dan mengikat. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan mengurangkan penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Penggunaan komponen pengeluaran wajib dan mengikat dalam perhitungan kapasitas riil keuangan daerah mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, komponen belanja tidak langsung tidak digunakan dalam penentuan kapasitas riil keuangan daerah Kota Blitar. Proyeksi kapasitas rill keuangan daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 22. Proyeksi Kapasitas RiilKeuangan Daerah Kota BlitarTahun 2021-2026 (Rupiah)

Uraian	Data Awal 2020	Proyeksi						Rata-rata pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pendapatan	880.876.905.111,23	885.589.500.543,00	895.990.832.761,00	907.869.557.876,00	919.955.375.011,00	932.225.191.340,00	947.901.387.749,00	1,42
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	174.663.656.285,21	187.384.483.474,00	51.816.730.000,00	50.780.395.400,00	49.764.787.492,00	48.769.491.742,00	47.794.101.908,00	-2,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman								
Total penerimaan	**1.055.540.561.396,44**	**1.072.973.984.017,00**	**947.807.562.761,00**	**958.649.953.276,00**	**969.720.162.503,00**	**980.994.683.082,00**	**995.695.489.657,00**	**1,24**
Dikurangi:								
Pengeluaran Pembiayaan dan Belanja tidak langsung	331.890.244.409,00	328.404.705.636,00	335.217.444.109,00	336.893.531.330,00	338.577.998.987,00	340.270.888.982,00	341.972.243.428,00	0,50
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	**723.650.316.987,44**	**744.569.278.381,00**	**612.590.118.652,00**	**621.756.421.946,00**	**631.142.163.516,00**	**640.723.794.100,00**	**653.723.246.229,00**	**1,64**

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah diolah, 2021

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerahsebesar 1,64%. Anggaran dalam kapasitas riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah di luar pengeluaran wajib dan mengikat.

4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat menggambarkan pengelolaan keuangan yang baik yaitu penyusunan kebijakan alokasi anggaran. Kebijakan alokasi anggaran yang tepat dapat menjamin terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran. Alokasi anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas untuk beberapa hal berikut.

a. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat.
b. Penerapan pelayanan dasar (standar pelayanan minimal/SPM).
c. Pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Blitar terpilih.
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Blitar.
e. Mendukung agenda pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Timur.
f. Mendukung penanganan dan pemulihan pada saat dan setelah pandemi COVID-19.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan rencana penggunaan kapasitas riil kapasitas keuangan daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) prioritas penggunaan anggaran sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana pengunaan kapasitas keuangan daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 23. Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Rupiah)

Uraian	2020	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Keuangan Daerah	723.650.316.987,44	744.569.278.381,00	612.590.118.652,00	621.756.421.946,00	631.142.163.516,00	640.723.794.100,00	653.723.246.229,00
- Prioritas I	630.365.138.860,10	616.622.557.757,00	477.541.381.124,82	482.125.787.670,52	487.095.705.398,79	494.819.090.980,47	501.974.684.559,26
- Prioritas II dan III	93.285.178.127,34	127.946.720.624,00	135.048.737.527,18	139.630.634.275,48	144.046.458.117,21	145.904.703.119,53	151.748.561.669,74

Sumber : Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah diolah, 2021

Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dibagi menjadi 2 jenis prioritas yaitu prioritas I dan prioritas II dan III. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar. Sementara itu, prioritas II dan III dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Wali Kota Blitar dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran untuk prioritas II dan III tidak termasuk dalam pembiayaan anggaran pada komponen prioritas I yang berkaitan dengan belanja wajib (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) yang telah ditetapkan sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan penghitungan *(double counting)* dalam alokasi anggaran.

3.4. Alternatif Pendanaan Pembangunan Bersumber Non-APBD Kota

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk merealisasikan perencanaan pembangunan Kota Blitar. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD. Selain itu, upaya meningkatkan sumber pendanaan dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kontribusi sektor swasta, dan mengoptimalkan sumber pendanaan lain yang sah yang telah tercantum di dalam regulasi terkait. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Alternatif pendanaan pembangunan Non-APBD Kota Blitar diantaranya melalui skema Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) *atau Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dari perusahaan di Kota Blitar dan/atau Provinsi Jawa Timur. Selain itu, keterlibatan

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan Kota Blitar dapat dilakukan melalui APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur. Optimalisasi alternatif alternatif sumber pendanaan pembangunan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan Kota Blitar khususnya penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Blitar perlu terus diupayakan untuk diwujudkan.

3.5. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Secara konseptual Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh daerah. Sedangkan secara legal istilah BUMD diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), yang menerangkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Kewenangan daerah dalam pendirian BUMD, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Selanjutnya pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selain peraturan perundangan di atas, dasar hukum pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan BUMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Dari ketentuan di atas sebenarnya dapat dipahami bahwa pendirian BUMD diarahkan untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan adanya BUMD diharapkan mampu tampil profesional dengan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan daerahnya tanpa mengabaikan kewajiban untuk melayani masyarakat. Sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mendirikan BUMD melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan BUMD diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah

Berdasarkan karakteristik di atas, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yang komprehensif. Hal tersebut dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya serta dapat memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Selama periode 2016 – 2020, BUMD telah berkontribusi dalam pembangunan Pemerintah Kota Blitar. Kontribusi tersebut antara lain mendukung aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah dan penyediaan air bersih. Selain itu BUMD juga telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.5.1. Profil BUMD Pemerintah Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar memiliki modal pada 2 (dua) perusahaan, yaitu:

1) Perumda BPR Kota Blitar

a. Bergerak di bidang perbankan;
b. Didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Kota Blitar.
c. Permodalan ; dan

   Modal dasar : Rp. 17.000.000.000,00
   Modal disetor Pemkot Blitar : Rp. 8.000.000.000,00

d. Kepemilikan Modal 100% Pemerintah Kota Blitar
e. Jaringan kantor

   Per tanggal 31 Desember 2020 memiliki 1 kantor cabang konvensional, serta 1 kantor kas.

2) Perumda Tirta Patria Kota Blitar

a. Bergerak di bidang usaha penyediaan air bersih, Perusahaan yang mengemban misi sosial dan menyediakan pelayanan publik, sekaligus membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada publik.

b. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

c. Permodalan:

Modal dasar : Rp. 51.011.870.661,58

Modal disetor Pemkot Blitar : Rp. 6.500.000.000,00

d. Kepemilikan Modal 100% Pemerintah Kota Blitar

3.5.2. Kinerja BUMD Pemerintah Kota Blitar

1) Kinerja Keuangan

Secara umum, kinerja keuangan BUMD Pemerintah Kota Blitar selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

a. Total Aset

Tabel 3.24. Total Aset BUMD Tahun Buku 2016 – 2020

No	BUMD	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumda BPR Kota Blitar	17.667.180.000	20.325.537.000	21.401.601.000	20.808.656.000	22.124.635.297
2.	Perumda Tirta Patria Kota Blitar	9.792.027.278,70	9.618.889.781,20	9.977.885.333,16	10.951.665.247,54	11.503.645.106,72

Sumber : Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

b. Total Equitas

Tabel 3.25. Total Ekuitas BUMD Tahun Buku 2016 – 2020

No	BUMD	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumda BPR Kota Blitar	6.958.369.977	7.232.691.691	8.523.530.082	9.916.169.220	9.018.696.100
2.	Perumda Tirta Patria Kota Blitar	8.375.414.027,73	7.953.771.777,23	8.537.938.844,19	9.633.045.891,57	10.244.795.518,75

Sumber : Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

c. Total Pendapatan Usaha

Tabel 3.26. Total Pendapatan Usaha BUMD Tahun Buku 2016 – 2020

No	BUMD	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumda BPR Kota Blitar	2.862.937.000	2.789.033.000	2.814.310.000	2.504.253.232	2.260.018.753
2.	Perumda Tirta Patria Kota Blitar	2.886.616.800	2.832.030.250	3.126.404.900	3.324.317.117	13.371.990,06

Sumber : Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

d. Total Laba Bersih

Tabel 3.27. Total Laba Bersih BUMD Tahun Buku 2016 – 2020

No	BUMD	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumda BPR Kota Blitar	623.904	711.054	788.576	444.643	(586.223.081)
2.	Perumda Tirta Patria Kota Blitar	(1.130.714.305,61)	(1.001.585.472,50)	(1.143.719.747,04)	1.017.455.597,27	(226.331.846,74)

Sumber : Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

e. Setoran Deviden (PAD)

Tabel 3.28. Total Setoran Deviden BUMD Tahun Buku 2016 – 2020

No	BUMD	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumda BPR Kota Blitar	311.952,09	355.526,83	394.288,09	222.321,50	0
2.	Perumda Tirta Patria Kota Blitar	0	0	0	0	0

Sumber : Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

2) Kebijakan Penyertaan Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada

Badan Usaha Milik Daerah, maka selama tahun buku 2016 – 2020, penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar kepada BUMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29. Penyertaan Modal Kepada BUMD Tahun Buku 2016 – 2020

No	BUMD	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perumda BPR Kota Blitar	2.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	0	0
2.	Perumda Tirta Patria Kota Blitar	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	0

Sumber : Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

3) Rasio Keuangan BUMD Untuk Lima Tahun Ke Depan

Berikut adalah proyeksi penyertaan modal BUMD berdasarkan modal yang sudah disetor selama kurun waktu 2021 – 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.30. Proyeksi Modal BUMD berdasarkan modal yang sudah disetor selama kurun waktu 2021 – 2025

No.	BUMD	Modal Dasar	Modal Yang Sudah Disetor	Kekurangan Modal Dasar	Rencana Penyertaan Kekurangan Modal Dasar /Per Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8	9	10
1.	Perumda BPR Kota Blitar	17.000.000.000	8.000.000.000	9.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
2.	Perumda Tirta Patria Kota Blitar	51.011.870.661,58	6.500.000.000	8.500.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	-

Sumber : Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2021

3.5.3.Isu Strategis BUMD

1) Penguatan struktur BUMD;

BUMD Kota Blitar ada 2 (dua) yang satu berorientasi bisnis dan satunya berorientasi sosial dan pelayanan publik maka yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mewujudkan BUMD Kota Blitar

tersebut agar menjadi BUMD yang profesional, kuat, tangguh dan efisien.

2) Keterbatasan sumber permodalan;

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dalam hal pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya, maka diperlukan penguatan dari sisi permodalan. BUMD diharapkan tidak selalu bergantung pada penyertaan modal Daerah, melainkan juga mencari sumber pendanaan lain. Terkait dengan hal tersebut, belum semua BUMD mampu secara mandiri mencari sumber pendanaan lain.

3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Kebutuhan SDM yang berkualitas dalam rangka pengurusan BUMD masih belum dapat terpenuhi. Hal ini akan mempengaruhi kinerja BUMD, termasuk diantaranya adalah kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi jumlah setoran deviden mereka kepada Pemerintah Kota Blitar.

4) Optimalisasi Aset BUMD;

Selain penyertaan modal berupa uang, beberapa BUMD juga menerima penyertaan modal berupa aset tanah dan/atau bangunan (inbreng). Terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari penyertaan inbreng tersebut masih belum jelas status hukumnya, sehingga mengakibatkan BUMD kesulitan melakukan optimalisasi aset. Pada akhirnya, aset tersebut bukan menjadi sumber pendapatan, namun justru menjadi beban bagi BUMD.

5) Inovasi Bisnis

Kemampuan beradaptasi dengan teknologi terkini, regulasi-regulasi terbaru, kecenderungan peralihan pola produksi dan konsumsi serta perubahan-perubahan lain sangat diperlukan dalam menghadapi lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi bisnis sangat dibutuhkan oleh BUMD agar dapat bertahan dan berkembang diantara para pesaing lain.

3.5.4. Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD Kota Blitar

1) Strategi Umum

1. Melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;

   Perwujudan pengembangan BUMD dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi BUMD tersebut perlu dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Di lingkup internal, proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD yang bersangkutan, meliputi kondisi keuangan, SDM, dan manajemen.

   Selain itu, Pemerintah Kota Blitar juga berupaya melakukan optimalisasi kinerja BUMD dengan melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan secara rutin melakukan evaluasi laporan realisasi RKAP dimaksud, baik laporan keuangan triwulanan, semesteran, maupun tahunan. Di tingkat eksternal, proses restrukturisasi perlu didukung dengan kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi dimaksud.

2. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha;

   Ekspansi merupakan strategi memperbesar dan memperluas bisnis, yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekruitmen SDM. Dalam pengembangan BUMD 5 (lima) tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain itu, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Kota Blitar dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

   Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan untuk

memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di pasar. Diversifikasi tersebut sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi BUMD atau produk BUMD di pasar. Ekspansi dan diversifikasi tersebut perlu dilakukan dengan berlandaskan pada kompetensi yang kuat pada *core business*-nya. Oleh sebab itu perlu dipastikan agar ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan BUMD sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam *core business*.

3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG;

   Penerapan GCG dapat mendorong pengurus BUMD untuk mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu, penerapan GCG juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai sarana untuk mengukur kinerja BUMD juga ikut meningkat.

   Meningkatnya profitabilitas dan kepercayaan publik akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga nilai perusahaan. Terkait dengan hal tersebut di atas, langkah yang akan dilakukan dari sisi internal adalah melakukan penguatan sumber daya BUMD, melakukan evaluasi terhadap potensi dan tantangan kelembagaan BUMD, serta menyehatkan BUMD dari sisi keuangan, manajemen, dan sebagainya. Adapun dari sisi eksternal adalah melakukan *benchmark* kelembagaan BUMD, serta melakukan kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD.

4. Memperluas sumber permodalan BUMD;

   Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan hal ini antara lain dengan

melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD.

5. Meningkatkan pemberdayaan BUMD;

   Pemberdayaan BUMD dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Kualitas tersebut akan meningkat apabila didukung oleh SDM dan sistem yang berkualitas. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD, melakukan *benchmarking* BUMD, membangun kompetisi yang sehat antar BUMD dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang rasional, terukur dan handal, serta menyusun regulasi yang pro BUMD.

2) Rencana Pengembangan BUMD

1. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Pertama (2021);

   Pengembangan BUMD pada tahun 2021 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan SDM, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi, pengembangan struktur bisnis, serta pengembangan lain yang berkaitan dengan pengembangan BUMD.

   Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Konsolidasi dalam rangka pemetaan awal atas kualitas dan kapasitas SDM BUMD;
   b. Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka

pemerataan pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG;

c. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan menggunakan manajemen aset yang handal;
d. Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
e. Evaluasi dan identifikasi manajemen resiko yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

2. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kedua (2022);

Pengembangan BUMD pada tahun 2022 diarahkan untuk melakukan penguatan sinergi BUMD dengan Perangkat Daerah (PD). Strategi yang akan dilakukan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan dan pendidikan;
b. Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG;
c. Penyusunan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
d. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih *prudent* melalui evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko melalui sinergi dan kerjasama;

3. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Ketiga (2023);

Pengembangan BUMD pada tahun 2023 diarahkan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur, *assessment*, dan pemagangan dalam rangka ekspansi bisnis;
b. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan

pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG serta dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;

c. Pengembangan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;
d. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih *prudent* melalui evaluasi dan identifikasi dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;

4. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Keempat (2024);

Pengembangan BUMD pada tahun 2024 diarahkan untuk melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMD dapat tumbuh berkelanjutan. Pada tahun tersebut, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment dan pemagangan;
b. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG;
c. Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan;
d. Pemantapan sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih *prudent.*

5. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kelima (2025)

Pengembangan BUMD pada tahun 2024 diarahkan untuk menjadi BUMD yang berketahanan, baik dalam aspek keuangan, kepengurusan, SDM, maupun operasional. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Terciptanya SDM BUMD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan untuk mendukung BUMD yang berketahanan;
b. Implementasi pola pengelolaan aset yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perkembangan teknologi kekinian untuk mewujudkan aset BUMD yang lebih bermanfaat;
c. Implementasi pola investasi dan divestasi dalam rangka menciptakan keuangan BUMD yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berketahanan;
d. Implementasi sistem manajemen resiko yang lebih selektif dalam rangka mendukung ketahanan kinerja keuangan yang lebih *prudent*;

Secara lebih lebih spesifik apabila dalam perencanaan sebagai akibat dari tuntutan dinamika pembangunan memerlukan pembentukan BUMD Baru maka :

- Sangat dimungkinkan, mengingat tujuan pembentukan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan daerah (seperti : isu perdagangan, penanganan limbah, farmasi, keuangan Syariah dan lain sebagainya);
- Mengacu karakteristik dan potensi daerah;
- Mengacu ke mekanisme pembentukan BUMD sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Pembentukan BUMD baru merupakan salah satu bentuk ekspansi dan diversifikasi usaha khususnya dalam rangka perkuatan posisi BUMD atau produk BUMD di pasar.



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Untuk itu perlu dilakukan perumusan secara tepat berdasarkan kondisi riil dan isu terkini, serta mempertimbangkan potensi dan ancaman.

Pada bab ini akan memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang menjadi agenda untuk diselesaikan atau dicari solusinya. Selanjutnya, permasalahan pembangunan akan menjadi bagian penting dalam menghasilkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Kota Blitar periode 2021-2026.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan RPJMD. Permasalahan pembangunan Kota Blitar dirumuskan berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pembangunan daerah masa lalu. Pada bagian ini perumusan permasalahan pembangunan Kota Blitar dijabarkan secara deskriptif sesuai urusan yang terpilih maupun sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya atau secara tematik.

4.1.1. Perumusan Permasalahan Secara Holistik-Tematik

Permasalahan pembangunan yang akan menjadi masukan bagi penentuan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Blitar dirumuskan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.Permasalahan pembangunan yang dirumuskan secara holistik-tematik ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar

   Tingkat pengangguran Kota Blitar selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang tingkat penganggurannya cenderung menurun. TPT Kota Blitar Tahun 2019 sebesar 4,64% masih berada di atas Jawa timur yang sebesar 3,92%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran tahun 2019 di Kota Blitar bertambah 482 orang yakni dari 3.202 pengangguran tahun 2018 menjadi 3.684 pengangguran pada tahun 2019. Ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga meningkat sebesar 0,58 poin menjadi 4,64% pada Agustus 2019. Dari jumlah pengangguran tersebut paling banyak yang memiliki pendidikan SMA yakni sebesar 1,55%. Sementara berdasarkan data di tahun 2020, TPT juga mengalami kenaikan sebesar 2,14 persen. Dari semula 4,64% menjadi 6,68%.

   Bila ditelaah lebih lanjut, dengan adanya pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 telah menimbulkan berbagai masalah. Tidak hanya

masalah Kesehatan yang dapat menyebabkan kematian, namun juga merambat ke masalah sosial, ekonomi, keuangan dan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan pembatasan mobilitas manusia, pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi telah menyebab banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan/mata pencaharian baik karena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau usahanya tempat bekerja ditutup. Kondisi ini telah berdampak buruk pada bidang ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai salah satu indikator makro berdasarkan data Agustus 2020 yang dipublikasikan oleh BPS masih menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami sebab memotret kondisi Februari sebelum masuknya COVID-19 ke Indonesia pada awal Maret 2020 dapat dipastikan berdampak buruk juga terhadap tingkat pengangguran. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, menurunnya pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai minus dan terjadi deflasi di tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

2. Angka Kemiskinan masih relatif tinggi

   Kemiskinan di Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun dengan posisi jumlahpendudukmiskin pada Maret2019 mencapai 10.100 jiwa atau7,13% dari total penduduk. Walaupun tren kemiskinan di Kota Blitar menurun, namun penurunannya masih lambat yakni 0,31% pada Tahun 2019. Masalah kemiskinan di Kota Blitar tidak hanya terkait jumlah penduduk miskin, namun juga kedalaman kemiskinan. Tahun 2019 Indeks Kedalaman kemiskinan adalah 1,14%, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan.

   Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa ataunaik sebesar 0,65 persen dibandingkan dengan

kondisi 2019 sebesar 7,13 persen. Dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari semua 1,14 menjadi 0,98. Sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,23 di tahun 2019 menjadi 0,22 di tahun 2020. Penurunan pada kedua indeks ini, walaupun tidak terlalu signifikan, memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Blitar cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit atau cenderung homogen. Walaupun jumlah penduduk miskin tahun 2020 naik, namun kualitas hidup dari penduduk miskin semakin meningkat. Hal ini terbukti dari rata-rata pengeluaran per kapita/bulan penduduk 40 persen pengeluaran terbawah mengalami peningkatan.

Kemiskinan tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan, yang umumnya ditunjukkanoleh indikator indeks gini. Data Indeks Gini Kota Blitar pada tahun 2019 adalah sebesar 0,338lebih rendah dibandingkan indeks gini Provinsi Jawa Timur yaitu 0,364. Sementara pada tahun 2020, Indeks Gini Kota Blitar adalah sebesar 0,344. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Gini Kota Blitar selama beberapa tahun terakhir dapat dikendalikan, namun tetap perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.

Kemiskinan dan pengangguran yang terjadi menimbulkan permasalahan lainnya, antara lain masalah sosial. Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih mewarnai Kota Blitar, antara lain masih tingginya jumlah PMKS yang mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial ekonomi yang memerlukan dukungan serius dari pemerintah, kurangnya tingkat kemandirian fakir miskin karena kurangnya motivasi dan rasa percaya diri untuk merintis usaha serta kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha, rendahnya minat

masyarakat terutama pemuda menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), belum adanya tenaga fungsional pekerja sosial dan keterbatasan sarana prasarana pelayanan PMKS di Kota Blitar, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dimutakhirkan secara berkala sehingga belum dapat diketahui tingkat kemiskinan di Kota Blitar.

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini membawa dampak memburuknya perekonomian dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta bertambahnya jumlah PMKS.

3. Belum optimalnya peningkatan perekonomian masyarakat

   Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada dari pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, merupakan pencapaian yang menggembirakan. Namun bila ditelaah lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi tersebut belum secara optimal dirasakan oleh masyarakat. Sampai dengan Tahun 2020, masih ditemui beberapa permasalahan terkait perdagangan, perindustrian, pertanian, kelautan dan perikanan, pengembangan koperasi dan usaha mikro.

   Permasalahan yang masih ditemui, antara lain masih rendahnya jumlah koperasi aktif yang sehat untuk menunjang perekonomian kota, masih rendahnya jumlah koperasi dengan permodalan mandiri, dan masih sangat rendahnya pertumbuhan usaha mikro yang dibina.

   Peningkatan PDRB sektor perdagangan belum optimal. Hal ini ditunjukkan denganmasih sangat fluktuatifnya peningkatan nilai produksi industri. Selain itu, pada industri pariwisata juga ditemui masalah cenderung menurunnya PDRB sektor hotel dan restoran, menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar terutama saat terjadi Covid-19dan menurunnya pelaku ekonomi kreatif unggulan.

4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur

   Infrastruktur merupakan pendukung yang penting dalam pelaksanaan pembangunan sebab dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan daya saing kota. Namun sampai dengan Tahun 2020 masih ditemukan beberapa permasalahan terkait penyediaan dan pelayanan infrastruktur, antara lain penurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yakni dari 96,03% pada tahun 2018 turun menjadi 94,53% di tahun berikutnya, belum optimalnya jumlah sampah terolah di TPA yaitu mencapai 79,16% pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 76,16%, belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat yang sebesar 73,60%, cenderung meningkatnya persentase kawasan permukiman rawan kumuh yang pada tahun 2019 mencapai 0,75% dan di tahun 2020 capaiannya 0,44% serta masih rendahnya pemanfaatan pelataran parkir angkutan barang. Sumur terlindungi masih rawan pencemaran, kualitas drainase yang perlu ditingkatkan, layanan akses air bersih belum optimal, kualitas layanan limbah domestik belum optimal, belum optimalnya fasilitasi program rumah layak huni dan kawasan kumuh, dan belum optimalnya pemanfaatan jaringan *Fiber Optic* (FO).

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

   Permasalahan pembangunan di Kota Blitar selama beberapa tahun terakhir tidak hanya terkait dengan kinerja sektor riil, namun juga tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah Kota Blitar telah melakukan berbagai kebijakan dan langkah-langkah konkrit dalam rangka meningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, namun masih belum optimal. Masih ditemukan beberapa kinerja yang perlu ditingkatkan, antara lain perangkat daerah di lingkungan Pemda Kota Blitar yang telah

menerapkan SPIP pada level terdefinisi baru mencapai 60% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 72,41% di tahun 2020, masih rendahnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* yakni turun dari 86 persen ke 42 persen pada Tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 63% persen di tahun 2020. Capaian Indeks Profesionalitas pada Tahun 2019 sebesar 78,23% dan 78,54 % di tahun 2020 serta belum optimalnya pelaksanaan rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensi. Berdasarkan capaian Tahun 2019, indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan tersebut mencapai 80,62% kategori Baik dan IKM pada tahun 2020 mencapai 82,39% dalam kategori Baik. Perlu pula memantapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal.

4.1.2. Perumusan Permasalahan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang disajikan tiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Blitar. Rumusan permasalahan berdasarkan kondisi riil yang diwakili oleh data dan informasi capaian pembangunan.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kota Blitar memuat hal-hal internal maupun eksternal perangkat daerah. permasalahan atau kendala internal terkait manajemen internal perangkat daerah seperti sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, sistem manajemen dan sebagainya.

Tabel 4. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
I. Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat				
	1	**Pendidikan**		
Pemantapan kualitas layanan pendidikan	a.	Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan	Manajemen pendidikan belum optimal	Belum adanya data statistik yang akurat atas penduduk jumlah penduduk ber-KTP kota Blitar yang tinggal di Kota Blitar.
				Belum adanya data yang akurat jumlah warga usia 13-15/16-18 tahun yang bersekolah di luar Kota Blitar dan di Pendidikan kesetaraan.
			Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan tenaga pendidikan dan kependidikan
				Peran Pendidikan keluarga belum seperti yang *diharapkan*
				Kurang Optimalnya penguatan pendidikan karakter bagi usia sekolah 13 – 18 tahun baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
				Turunnya capaian APK dan APM di seluruh jenjang pendidikan dari tahun 2019
				Fasilitasi siswa yang belum optimal
	2	**Kesehatan**		
Pemantapan kualitas layanan kesehatan	a.	Pelayanan ibu hamil dan ibu melahirkan belum optimal sehingga masih ada Angka Kematian Ibu (AKI)	Banyaknya kasus kehamilan usia beresiko, yaitu kurang dari 20 tahun (remaja hamil), kehamilan di atas 35 Tahun, riwayat obstetric sebelumnya,	Kurang optimalnya sosialisasi, pendampingan, dan penanganan terhadap ibu hamil
			Tingginya tingkat stress	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
			ibu hamil karena kemiskinan/tingkat ekonomi dan faktor sosial	kesehatan yang ditugaskan untuk melaksanakan skrining Ibu hamil, penanganan persalinan, nifas dan Komplikasi yang dialami oleh ibu hamil, bersalin dan nifas, terutama pre eklamsia.
	b.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan balita	Kurangnya responsivitas layanan kesehatan	Imunisasi belum lengkap
				Pemantauan terhaap kesehatan dan gizi bayi dan balita masih belum optimal
				Pengetahuan orang tua terhadap pemenuhan kesehatan dan gizi balita kurang
	c.	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal.	Munculnya kasus baru yang berpotensi wabah dan bertambahnya penyakit degeneratif	Belum optimalnya sosialisasi tentang kesadaran dan mandiri untuk hidup sehat
	d.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurun	Alur pelayanan RSUD belum optimal	Belum optimalnya Layanan informasi dan respon time/ waktu tunggu layanan poli/ rawat jalan di RSUD
				Kurang optimalnya kerjasama Faskes tk 1 dan tingkat lanjutan terkait UHC.
	d.	Masih tingginya Net Death Rate (NDR) Standart Nasional <25 permil dan Gross Death Rate (GDR) Standar Nasional <45permil	RSUD merupakan rumah sakit rujukan sehingga mempengaruhi GDR melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.	Belum adanya layanan kegawadaruratan/ Emergency *Medical Service*

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Sistem pelayanan rujukan belum optimal, perlu disiapkan sistemnya.
	3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan	a.	Belum optimalnya pelayanan akses air bersih	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Belum ada peta sasaran layanan air bersih.
	b.	Belum optimalnya kualitas layanan limbah domestik	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik yang layak	Belum optimalnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah dan promosi pelayanan limbah domestik
				Keterbatasan lahan yang memenuhi kriteria lokasi pembangunan sarana prasarana sanitasi komunal
				Masih adanya IPAL Komunal yang perlu direvitalisasi
	c.	Kecenderungan penurunanan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.	Masih banyaknya jaringan pengairan yang juga berfungsi menjadi saluran drainase.	Masih banyaknya jaringan irigasi yang perlu direvitalisasi
	d.	Banyak gedung negara yang belum sesuai standar bangunan gedung yang layak fungsi	Belum ada payung hukum di tingkat daerah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gedung Negara	Belum ada kajian/standar pemeliharaan gedung negara
				Belum optimalnya monev bangunan gedung negara
	e.	Pelayanan sampah belum optimal	Keterbatasan lahan untuk TPA	Pemenuhan TPA baru

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
Penguatan sistem jaringan drainase, pemeliharaan jalan di Kota Blitar	f.	Pemeliharaan jalan dan utilitasnya dalam kondisi mantap dan berkesalamatan belum optimal	Belum optimalnya pemenuhan utilitas jalan (perlu data utilitas jalan)	Kualitas jalan belum optimal
	g.	Pengelolaan saluran drainase belum optimal	Pengaturan saluran drainase yang juga berfungsi sebagai jaringan irigasi belum optimal	Kualitas drainase belum optimal
Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang secara terintegrasi	h.	Kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Tata Ruang	Sosialisasi tentang Perda tata ruang kepada masyarakat belum optimal
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda tata ruang belum optimal
				Perencanaan Perda Tata Ruang belum optimal
II. Sosial				
	1	**Tenaga Kerja**		
Perluasan akses lapangan pekerjaan	a.	Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka	Terbatasnya kesempatankerja	Rendahnya penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja
				Rendahnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
				Validitas data pengangguran belum akurat
				Belum ada pendataan tentang permasalahan tenaga kerja
				Kurangnya kerjasama dunia usaha dan industri untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja ataupun hanya sebatas magang

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
	b.		Rendahnya upaya penyelesaian konflik industrial	Mediasi penyelesaian konflik industrial belum optimal
				Belum memiliki tenaga mediator (masih mendatangkan mediator dari Provinsi)
Peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja	b.	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pencari kerja	Kualifikasi dan Kompetensi pencari kerja yang kurang sesuai dengan pasar kerja	Jenis pelatihan kurang variatif dan kurang selaras dengan *jobfair*
				Kurang optimalnya pendampingan dan metode/substansi pelatihan pada pencari kerja/angkatan kerja
				Kurang optimalnya koordinasi/sinkronisasi/kerjasama dengan PD terkait
				Belum memiliki tenaga yang mengukur produktifitas tenaga kerja di perusahaan
				Tingkat pendidikan angkatan kerja yang rata-rata SMA ke bawah belum mampu memenuhi kualifikasi pasar kerja sehingga diperlukan intervensi khusus
	2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
Belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.	a.	Masih tingginya kesenjangan gender	Belum optimalnya implementasi kebijakan responsif gender	Belum tersedianya Perda tentang PUG
				Rendahnya kapasitas SDM perempuan
				Minimnya peluang partisipasi

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				perempuan di ranah publik
				Minimnya peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
	b.	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
	c.	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak	Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak	Belum optimalnya perlindungan anak
	3	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
Pengembangan digitalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a.	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan yang lebih mendekatkan pada masyarakat	Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan online
				Kurangnya perangkat ADM untuk memberikan layanan cetak mandiri bagi masyarakat Kota Blitar
	b.	Belum optimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya tata kelola arsip pencatatan sipil.	Belum adanya tenaga arsiparis dalam pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Kurang update data perkembangan penduduk	Belum optimalnya pengelolaan berkas/dokumen arsip pencatatan sipil.
				Belum adanya pemadanan data terintegrasi dengan lembaga terkait.
	4	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	a.	Belum optimalnya pengendalian penduduk	Menurunnya Tren Capaian Kesertaan KB Aktif/CPR	Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait kontrasepsi kepada pasangan muda
				Belum tersedianya akses informasi pelayanan KB yang mengikuti perkembangan teknologi terkini
				Belum optimalnya Strategi advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) program pengendalian penduduk dan KB
			Masih Tingginya angka *Unmet Need*	Masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern)
				Belum terintegrasinya Data Keluarga dengan Data - Data Kependudukan lainnya
			Tingginya angka usia pernikahan dini	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan pada remaja, calon pengantin dan masyarakat kurang optimal
				Belum Optimalnya Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga
			Belum optimalnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya Kepesertaan KB pada sasaran khusus utamanya KB Pria (MOP)
				Belum optimalnya partisipasi Pasangan Usia

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Subur (PUS) untuk mengikuti Program KB
	5	**Sosial**		
Pemerataan pendapatan masyarakat dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	a.	Masih tingginya ketimpangan sosial masyarakat	Belum optimalnya upaya rehabilitasi dan pemberdayaan PMKS	Belum optimalnya rehabilitasi, pemberdayaan, dan cakupan jaminan sosial bagi PMKS
				Validasi data PMKS masih belum optimal
				Belum memiliki SOP Penanganan PMKS secara terintegrasi lintas PD
				Belum adanya Rencana Aksi Penanggulangan PMKS (sesuai dengan kelompok PMKS)
				Belum adanya pilot project/duta berhasil PMKS sebagai pendorong motivasi PMKS
				Belum optimalnya pembinaan PMKS terkait pengelolaan ekonomi keluarga
			Belum optimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kurangnya sinergitas antar PD dan terbatasnya jumlah relawan (PSKS) terkait program pendampingan wirausaha mandiri
			Manajemen pengelolaan TMP belum optimal	Sistem keamanan dan kebersihan TMP perlu ditingkatkan
	6	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
Masih adanya potensi ancaman yang mempengaruhi terciptanya lingkungan yang kondusif dan demokratis	a.	Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	Belum optimalnya penegakan Perda	Belum optimalnya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
Peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana	b.	Penanganan bencana kebakaran belum optimal	Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran	Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi
				Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran
				Sarana pemadam kebakaran masih kurang
				Sosialisasi dan Pembinaan tanggap darurat bencana kebakaran belum optimal
	c.	Penanganan penanggulangan bencana alam dan non alam belum optimal	Pengurangan resiko bencana belum optimal	Masih minimnya dokumen penanggulangan bencana
				Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan terkait penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat
				Belum memiliki Perda kebencanaan
				Belum adanya sinkronisasi Resiko Bencana dengan RTRW
	7	**Kepemudaan dan Olahraga**		
Peningkatan kapasitas SDM pemuda dan prestasi olahraga	a.	Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Kurang Optimalnya Organisasi Kepemudaan yang aktif	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kurang Optimal
				Motivasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih kurang
	b.	Masih perlu ditingkatkannya prestasi olahraga	Peningkatan Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Disabilitas kurang optimal	Promosi dan pembinaan Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Disabilitas kurang optimal

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Minat masyarakat tentang Olahraga Rekreasi, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Disalibitas masih kurang
	8	**Perpustakaan**		
Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	a.	Belum optimalnya kegemaran membaca masyarakat	Belum optimalnya kegemaran membaca dan literasi	Belum ada perumusan dan implementasi regulasi daerah bidang perpustakaan
				Belum optimalnya fasilitas dan pelayanan perpustakaan
				Kurangnya pengembangan taman baca masyarakat
				Belum optimalnya layanan perpustakaan berbasis digital
				Kurangnya koleksi buku perpustakaan
	9	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	a.	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Belum Optimalnya pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan
III. Ekonomi dan Ketahanan Pangan				
	1	**Pertanian**		
Stabilisasi dan peningkatan produksi pertanian dan peternakan	a.	Belum terjaganya produktivitas pertanian	Produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
				Ketersediaan sarana pertanian belum optimal
				Kapasitas SDM petani perlu ditingkatkan
				Metode budidaya berorientasi agribisnis belum diterapkan

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Pemasaran produktanaman pangandan hortikultura secara digital masih sangat kurang
				Belum adanya sentra produk pertanian secara fisik atau online
				Pasar tani belum efektif untuk mendukung pemasaran produk pertanian segar
	b.	Belum optimalnya pengelolaan potensi peternakan	Sarana dan prasarana produksi peternakan belum optimal	Produksi hasil ternak perlu ditingkatkan
				Penanganan limbah ternak di tingkat peternak belum optimal
				Pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) perlu ditingkatkan
				Kurangnya penanganan penyakit hewan ternak
				Belum memiliki klinik/laboratorium Kesehatan hewan
				Masih kurangnya sarana penunjang Kesehatan hewan (mobil kesehatan hewan)
	2	**Pangan**		
Peningkatan pembinaan masyarakat konsumsi pangan beragam dan berkecukupan gizi	a.	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Pembangunan bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan	Produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan belum optimal
				Pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				berbahaya belum optimal
			Keanekaragaman konsumsi belum optimal	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi seimbang dan fokus pada pemenuhan kalori
				Diversifikasi beras belum dipraktekkan untuk konsumsi sehari-hari
	3	**Kelautan dan Perikanan**		
Optimalisasi produktivitas perikanan	a.	Belum optimalnya produktivitas perikanan	Produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya perlu ditingkatkan	Kapasitas SDM pembudidaya perikanan perlu ditingkatkan
				Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital perlu ditingkatkan
	4	**Koperasi dan Usaha Mikro**		
Peningkatan kemandirian koperasi	a.	Belum optimalnya nilai tambah Bruto Koperasi dan terhadap perekonomian daerah	Usaha koperasi perlu diaktivasi dan dikembangkan	Kurangnya akses permodalan
				Kelembagaan koperasi yang masih lemah
Peningkatan mutu produk usaha mikro	b.	Pembinaan Usaha mikro terutama pengemasan dan pemasaran kurang optimal	Bentuk pembinaan usaha mikro belum tepat sasaran	Data pemetaan UM belum lengkap dan akurat
				Belum tersedianya pasar yang dapat menjangkau secara luas dalam memasarkan produk UM
				Belum dilakukannya kemitraan dalam penyediaan bahan baku (MoU)

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Belum optimalnya pendampingan membangun kerjasama antar usaha mikro
				Belum optimalnya bantuan permodalan bagi UM yang sudah maju
	5	**Perdagangan**		
Pertumbuhan sektor perdagangan	a.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Volume perdaganganbesar dan eceran perlu ditingkatkan	Metode pemasaran barang berbasis digital belum optimal
				Peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas belum optimal
				Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri belum optimal
				Pengawasan perdagangan belum optimal
			Pengelolaan pasar rakyat/tradisional dan PKL belum optimal	Penataan dan penempatan pedagang dan relokasi PKL belum optimal
			Komoditi potensi ekspor di Kota Blitar masih minim	Kurangnya pendampingan produk potensi ekspor
			Sarana dan prasarana tera ulang belum lengkap	Masih kurangnya jumlah alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) bertanda tera sah
	6	**Perindustrian**		
Peningkatan mutudan daya saing IKM Kota Blitar		Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian	Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih belum optimal	Belum optialnya peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Nilai produksi IKM kurang bersaing dengan luar Kota Blitar	Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku IKM belum optimal (mutu, legalitas usaha, HaKI, pengemasan dan pemasaran/promosi).

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
			Perencanaan dan fasilitasi kegiatan industri masih belum optimal	Kurangnya pengelolaan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
			Pelaku IKM masih kesulitan dalam peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi	Belum terkelola Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah.
				Belum adanya pendampingan digital marketing
				Belum disusunnya Rencana RIPK
	7	**Penanaman Modal**		
Peningkatan nilai investasi daerah	a.	Investasi yang masuk ke daerah masih minim	Iklim investasi belum kondusif	Identifikasi potensi investasi belum optimal
				Promosi investasi perlu belum optimal
				Pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang belum maksimal
			Kurangnya informasi terkait potensi investasi Kota Blitar bagi calon investor	Strategi untuk menarik investasi masih kurang
				Belum adanya Pemetaan potensi investasi/ penanaman modal dan peluang investasi yang terintegrasi dengan tata ruang dan LP2B
				Belum punya jejaring dengan investor-ivestor besar (khususnya yang memiliki ikatan dengan Kota Blitar)
				Belum adanya kajian terkait perlunya dan bentuk Mall Pelayanan Publik di Kota Blitar

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
			Pelayanan perijinan belum satu atap belum optimal	Belum ada regulasi perizinan satu atap
	8	**Kebudayaan**		
Optimalisasi pengelolaan warisan budaya	a.	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian nilai budaya	Minimnya pelestarian nilai, tradisi dan warisan kekayaan budaya
			Belum optimalnya pelestarian cagar budaya	Belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
	9	**Pariwisata**		
Penguatan predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	a.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata	Rata-rata wisatawan lama tinggal di Kota Blitar masih di bawah 1 hari	Belum tersedianya pengelolaan data *homestay*/penginapan sebagai potensi pendukung PDRB
				Promosi dan pemaketan pariwisata belum dikelola secara optimal
			Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru	Belum adanya Perda tentang Pariwisata di Kota Blitar
				Belum terlembaganya pemandu wisata untuk menarik wisatawan pada beberapa kunjungan
				Belum adanya wisata malam yang menarik
	b.	Kurangnya Kapasitas pelaku pelaku ekonomi kreatif Kota Blitar	Kurang optimalnya pembinaan & updating data pelaku Ekonomi Kreatif	Masih lemahnya perijinan Ekonomi Kreatif
	10	**Energi dan Sumber Daya Mineral**		
Optimalisasi dan inovasi sumber energi terbarukan	a.	Belum optimalnya pengelolaan sumber energi terbarukan di Kota Blitar	Belum optimalnya pemanfaatan dan inovasi sumber energi alternatif/terbarukan di Kota Blitar	Kurangnya sarana prasarana pemanfaatan energi alternatif/ terbarukan

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Kurangnya pembinaan pemahaman masyarakat terhadap perilaku hemat energi
IV. Infrastruktur Daerah				
	1	**Perhubungan**		
Optimalisasi pelayanan angkutan umum	a.	Masih rendahnya pemanfaatan pelataran parkir angkutan barang	Kurangnya kesadaran pemilik gudang di Kota Blitar untuk melakukan bongkar muat kendaraan di pelataran parkir angkutan barang.	Sosialisasi dan Publikasi tentang bongkar muat kendaraan di pelataran parkir angkutan barang.
		Belum optimalnya pengelolaan angkutan orang	Menurunnya pengguna angkutan umum karena banyaknya angkutan online dan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi	Belum optimalnya pemanfaatan terminal type C
Optimalisasi sistem pengelolaan parker	b.	Belum optimalnya pengelolaan parkir yang tertib di Kota Blitar.	Kurangnya kapasitas petugas parkir	Belum optimalnya pembinaan petugas parker
				Belum tertibnya pengawasan parkir di Kota Blitar
				Kurangnya Kerjasama dengan APH terkait bantuan hukum penertiban parkir
			Kurangnya sarpras parkir yang memadai	Belum adanya parkir off street one gate system
Peningkatan keselamatan jalan menuju smart city	c.	Belum optimalnya pengelolaan keselamatan jalan	Kurangnya penyediaan perlengkapan keselamatan jalan	Kurangnya penyediaan perlengkapan jalan
			Belum optimalnya penanganan permasalahan lalu lintas	Belum ada database lalu lintas/transportasi Kota Blitar yang lengkap

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor	d.	Kemudahan layanan uji kendaraan belum optimal	Kurangnya kecepatan layanan uji kendaraan bermotor	Layanan uji kendaraan belum berbasis online dan sistem *drive true*
	2	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
Peningkatan pemenuhan permukiman dan rumah yang layak huni	a.	Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni masih cukup tinggi	Kurangnya pembinaan dan sosialisasi rumah layak huni
			Tingginya *backlog* rumah	Fasilitasi dan sosialisasi terkait program bantuan kredit rumah belum optimal
			Belum optimalnya penanganan rumah akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Terbatasnya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
	b.	Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh	Rendahnya akses Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di kawasan permukiman	Tingginya kepadatan bangunan
				Kondisi jalan lingkungan yang kurang baik
				Keterbatasan penyediaan air minum
				Kondisi drainase lingkungan yang kurang baik
				Keterbatasan pengelolaan air limbah
				Keterbatasan pengelolaan sampah
				Belum optimalnya proteksi kebakaran
			Banyaknya jumlah rumah yang ada di tanah ilegal (strain sungai, strain kereta api, tanah aset pemerintah)	Keterbatasan lahan permukiman

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Belum optimalnya pengawasan pembangunan rumah
	c.	Belum optimalnya pemeliharaan dan pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman	Rendahnya kualitas PSU Perumahan dan Permukiman	Rendahnya pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman
			Tumpang tindihnya kewenangan pembangunan dan pemeliharaan PSU Permukiman	Belum adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam pembangunan dan pemeliharaan PSU Permukiman
			Belum jelasnya status aset PSU Perumahan dan Permukiman	Belum diserahkannya aset PSU Perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah
				Terbatasnya data aset PSU Perumahan dan Permukiman
				Banyaknya aset PSU Permukiman yang statusnya belum jelas
	3	**Pertanahan**		
Optimalisasi rekam dan legalitas asset tanah Kota Blitar	a.	Penertiban aset daerah terutama tanah belum optimal	Masih ada aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat	Belum optimalnya perekaman data dan lokasi aset tanah pemerintah
	b.	Belum optimalnya pengadaan tanah untuk layanan umum	Harga tanah mengalami kenaikan secara signifikan	Penilaian harga tanah belum optimal
	4	**Lingkungan Hidup**		
Optimalisasi pengelolaan dan pengendalian pencemaran LH secara komprehensif	a.	Meningkatnya Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	Bertambahnya jumlah polutan yang mempengaruhi kualitas udara	Kurang optimalnya sarana prasarana pengendali dampak perubahan iklim
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas penduduk	Kurang optimalnya sosialisasi terkait penanganan dampak perubahan iklim

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
Peningkatan pembinaan masyarakat tentang budaya berwawasan lingkungan	b.	Belum tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kategori baik	Masih adanya pencemaran di beberapa titik badan air	Kurang optimalnya pengolahan limbah industri, peternakan, dan domestik.
				Belum optimalnya pendampingan produksi bersih dan manajemen pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan
				Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi badan air (sungai)
			Peningkatan gas emisi kendaraan	Kurang optimalnya pengendalian gas emisi kendaraan
			Luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik masih kurang dari yang ditetapkan undang-undang	Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH publik
	b.	Belum optimalnya gerakan 3R Pengelolaan Sampah dan 0 sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah.	Kurangnya inovasi sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah 3R dan 0 sampah
	c.	Peningkatan jumlah volume sampah yang dihasilkan	Keterbatasan kapasitas TPA di Kota Blitar	Keterbatasan lahan di Kota Blitar untuk pengadaan TPA baru
				Belum ada kerjasama pengelolaan persampahan dengan Pihak lain
	5	**Komunikasi dan Informatika**		
Penguatan dan optimlisasi infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi	a.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	Integrasi aplikasi yang telah dilakukan Kota Blitar tidak berjalan setelah terbitnya kebijakan penggunaan Aplikasi Pemerintahan (SIPD) yang	Pemahaman PD terkait aplikasi generik dan aplikasi khusus

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
			dikembangkan pusat	
				Belum tersedianya fitur pertukaran data maupun database replikasi untuk aplikasi pemerintahan maupun pelayanan publik milik pusat
				Masih adanya PD yang mengembangkan aplikasi sejenis yang telah dibuat oleh PD/instansi lain
				Belum terwujudnya satu data melalui pengelolaan satu database terpadu untuk seluruh aplikasi
	b.	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya peran PPID dan PPID pembantu	PPID Pembantu belum memahami tentang DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik) yang bersifat terbuka dan Informasi yang dikecualikan
				Kurangnya koordinasi dan pemahaman terkait pentingnya Informasi dan Komunikasi Publik.
V. Tata Kelola Pemerintahan				
	1	**Sekretariat Daerah**		
Kurang Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	a.	Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum adanya pemanfaatan Peta Proses Bisnis dalam upaya penyempurnaan kelembagaan dalam mencapai target kinerja	Masih kurangnya pemahaman penyusunan peta proses bisnis dalam upaya penyempurnaan kelembagaan dan manfaat proses bisnis dalam pencapaian target kinerja
	b.	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan	Masih kurangnya sinkronisasi data pendukung LPPD Kota Blitar

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
			pemerintahan daerah	
	c.	Kebijakan berkenaan dengan fasilitasi lembaga keagamaan menyesuaikan dengan kemampuan Daerah	Belum optimal penyusunan data Lembaga Keagamaan di Kota Blitar	Belum optimalnya pembinaan kepada Lembaga keagamaan
	d.	Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	Masih lemahnya perencanaan pengadaan barang/jasa	Kurang optimalnya pembinaan kepada para pelaku pengadaan barang/jasa
	2	**Sekretariat DPRD**		
Peningkatan sinkronisasi layanan kepada DPRD	a.	Indeks kepuasan terhadap pelayanan sekretariat DPRD belum optimal	Fasilitasi agenda pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum berjalan secara optimal	Belum adanya rencana kerja DPRD yang tertuang dalam dokumen Renja DPRD yang menjadi acuan yang mengikat dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
			SOP tentang fasilitasi kepada anggota DPRD belum dapat dilaksanakan secara optimal	Sosialisasi terkait SOP Sekretariat DPRD dalam pelayanan kesekretariatan DPRD belum optimal
	3	**Perencanaan**		
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan	a.	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	Belum optimlanya kualitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Sistem Informasi yang memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara komprehensif yang terintegrasi belum berjalan secara optimal
				Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Masih terdapatnya inkonsistensi dokumen perencanaan pada setiap jenjang
				Sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan belum dikelola secara optimal, karena data sekunder yang dibutuhkan belum tersedia oleh BPS
	4	**Keuangan**		
Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah	a.	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah belum optimal	Belum optimalnya penerimaan dari komponen PAD	Intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi potensi pendapatan asli daerah belum optimal
				Belum optimalnya penataan multifungsi di lokasi-lokasi strategis yang mampu meningkatkan potensi pajak dan retribusi (misal stadion, pasar dll)
				Belum adanya data potensi pajak
				Belum terintegrasinya informasi pajak dengan aplikasi pelayanan di seluruh PD
				Basis data wajib pajak dan retribusi belum akurat
				Tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak / retribusi masih lemah
			Kompetensi dan jumlah aparat pajak masih kurang	Peningkatan kompentensi secara reguler belum dilaksanakan secara optimal
				Regulasi perpajakan masih kurang (terkait pemeriksaan, penilaian, penyitaan dll)

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Sosialisasi tentang SPT tidak menunjukkan kepemilikan belum optimal
	b.	Menurunnya PD yang penyerapan anggaran nya di atas 90%	Kedisiplinan PD dalam penyerapan anggaran masih kurang	Belum adanya sanksi pd yang realisasinya rendah
	c.	Menurunnya persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen keuangan tepat waktu	Kurang disiplinnya PD dalam mematuhi jadwal penyerapan dana (SPD) yang telah ditentukan	Belum adanya mekanisme *reward and punishment* terkait ketepatan penyusunan laporan dan penyerapan anggaran
				Data penyusunan laporan keuangan belum terintegrasi
				Data bidang aset dan bidang pendapatan belum terintegrasi dengan SIP Keuangan sehingga masih dilakukan rekonsiliasi yang membutuhkan waktu
	d.	Penyajian data aset daerah belum optimal	Tingkat pemahaman pengelola barang PD tentang pengelolaan aset daerah dan penyajian serta pelaporan data aset daerah masih kurang	Kurangnya kesadaran pengelola barang PD untuk memahami pengelolaan aset daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku
	5	**Kepegawaian**		
Optimalisasi manajemen sistem kepegawaian secara profesional	a.	Belum optimalnya kualitas system manajemen kepegawaian	Belum optimalnya jumlah rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan	Belum optimalnya analisis formasi pegawai
			Belum optimalnya mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensi	Minimnya pegawai yang mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan
	6	**Pendidikan dan Pelatihan**		

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
Peningkatan kapasitas ASN	a.	Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN	Belum adanya standar kompetensi jabatan pada semua jabatan	Belum ada analisis kesenjangan kompetensi
			Pelaksanaan diklat belum sesuai kebutuhan organisasi dan individu	Belum ada data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan struktural dan pelaksana
	7	**Penelitian dan Pengembangan**		
Peningkatan tata Kelola pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan	a.	Belum optimalnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan Kota Blitar	Belum optimlanya kuantitas dan kualitas Hasil studi/kajian/penelitian	Mekanisme pemetaan kebutuhan kajian/analisa sektoral dan litbang belum berjalan optimal
				Belum optimalnya kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan kelitbangan
				Belum optimalnya koordinasi dan harmonisasi pengelolaan inovasi daerah
	8	**Inspektorat Daerah**		
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap PD	a.	Temuan pemeriksaan berulang	Tingkat kepatuhan belum optimal	Sistem pengendalian internal belum optimal
	b.	Belum optimalnya pembangunan zona integritas pada PD	Belum ada PD yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan pemahaman bersama tentang WBBM
	9	**Kewilayahan**		
Peningkatan kapasitas ASN kewilayahan	a.	Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat	Belum terintegrasi pelayanan Kecamatan dan Kelurahan melalui penggunaan aplikasi SILPUSITRON	SILPUSITRON masih sebatas menyediakan form bukan sistem yang terintegrasi antara Kelurahan dan Kecamatan
				SILPUSITRON belum bisa diakses oleh Kecamatan

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
				Belum ada standar pelayanan di kecamatan
			Belum optimalnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Beban pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah personil di Kecamatan dan Kelurahan
				Belum ada pelimpahan kewenangan sebagaian urusan
	10	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
	a.	Masih adanya potensi konflik sosial	Belum optimalnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Belum optimalnya kelembagaan kerukunan umat beragama
				Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan
				Belum optimalnya pencegahan gangguan ketahanan sosial
	b.	Belum optimalnya kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat	Belum optimalnya pembinaan budaya politik masyarakat	Belum optimalnya pembinaan organisasi politik
				Belum optimalnya pemberdayaan ormas
	11	**Statistik**		
Penguatan dan optimalisasi data Kota yang terintegrasi	a.	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral	Pelaporan data statistik PD belum terpenuhi	Kurangnya kesadaran produsen data PD akan pentingnya data statistik sektoral
			pengelolaan data statistik sektoral belum optimal	Belum optimalnya system informasi yang digunakan dalam pengelolaan data statistik
				Belum adanya pedoman teknis pengelolaan data statistik sektoral
	12	**Persandian**		

ISU PER URUSAN	No	Urusan/Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5
Penguatan keberfungsian akun resmi PD dan ASN	a.	Potensi terganggunya kerahasiaan (confidentiality, keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), keaslian (authenticity) dan kenirsangkalan (non repudiation) informasi dan dokumen pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	Belum optimalnya pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada dokumen kedinasan	Belum adanya Peraturan Wali Kota Blitar yang mengatur tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
				Belum adanya sosialisasi / bimtek tentang pemanfaatan Sertifikat Elektronik
Penguatan peran Gov-CSIRT Pemkot Blitar	b.	Potensi ancaman siber terhadap system informasi layanan pemerintah	Belum optimalnya peran Gov-CSIRT Pemkot Blitar dalam mendukung keamanan informasi	Belum adanya Peraturan/ Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gov-CSIRT di Pemkot Blitar
				Belum adanya dokumen pendukung Go-CSIRT Pemkot Blitar sebagai bahan pertimbangan ke tingkat Prov Jatim
				Belum adanya sosialisasi/bimtek tentang Gov-CSIRT Pemkot Blitar
	13	**Kearsipan**		
Peningkatan tata kearsipan pemerintah daerah	a.	Belum optimalnya tata kearsipan pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan kearsipan	Belum optimalnya kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK
				Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip daerah
				Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kearsipan

Sumber: Hasil FGD Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis bersama Perangkat Daerah, 2020

Berbagai kendala atau permasalahan tersebut memberi informasi hal-hal yang telah dilalui oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Sebagian kendala atau permasalahan tersebut telah dapat ditanggulangi namun masih ada yang memerlukan upaya besar untuk penyelesaiannya sampai dengan saat ini. Bahkan mulai Maret 2020, seluruh negara masih dihadapkan dengan permasalahan pandemi COVID-19 dan dampaknya yang meluas ke berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.

4.1. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.Isu strategis daerah akan menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

Isu strategis pembangunan daerah Kota Blitar didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis Internasional, (2) isu strategis kebijakan nasional, (3) isu strategis kebijakan provinsi Jawa Timur, (3) Isu Strategis dari kebijakan pembangunan daerah Kota Blitar, dan (5) isu strategis daerah sekitar Kabupaten Blitar.

4.1.1. Telaahan Isu Internasional

4.2.1.1. Capaian *Suistainable Development Goals* di Kota Blitar melalui Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Ketujuhbelas tujuan SDGs dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan.

1. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan
   Dicapai dengan usaha dalam pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan
   Dicapai dengan usaha dalam mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera
   Dicapai dengan usaha dalam menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas
   Dicapai dengan usaha dalam memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan 5 - Kesetaraan gender
   Dicapai dengan usaha dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

6. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

   Dicapai dengan usaha dalam menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

   Dicapai dengan usaha dalam memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

8. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

   Dicapai dengan usaha dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

   Dicapai dengan usaha dalam membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

    Dicapai dengan usaha dalam mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

11. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

    Dicapai dengan usaha dalam membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

12. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

    Dicapai dengan usaha dalam memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

    Dicapai dengan usaha dalam mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

14. Tujuan 14 - Ekosistem laut

    Dicapai dengan usaha dalam pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Tujuan 15 - Ekosistem daratan

    Dicapai dengan usaha dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

    Dicapai dengan usaha dalam mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan akhir

    Dicapai dengan usaha dalam menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan, serta terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka disusun Rancangan Awal RPJMD dan KLHS RPJMD. Berikut disajikan telaahan KLHS RPJMD:

4.2.1.2. Capaian TPB Kota Blitar

Pada subbab ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB. Kategori capaian TPB Kota Blitar berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC);
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TTT);
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA); dan
6. Indikator TPB tidak sesuai dengan kewenangan daerah (TKD).

Hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Blitar yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 35 indikator atau 16% dari total 222 indikator yang menjadi kewenangan kota. Capaian indikator TPB Kota Blitar terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel di bawah.

Tabel 4. 2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Blitar

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	5	3	9	0	8	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	2	1	4	1	3	0
3	Menjamin Hidup yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	13	1	9	4	7	0
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meingkatkan Kesempatan Belajar	13	5	2	3	0	3	0

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
	Sepanjang Hayat untuk Semua							
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	6	1	1	2	4	0
6	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	18	1	3	3	0	9	2
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	0	0	0	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	1	2	3	3	10	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatakan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	4	4	0	0	1	3	4
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	11	2	0	1	0	3	0
11	Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	2	1	6	0	8	3
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	0	0	1	0	4	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0	1	0	1	0
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Semudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola	4	0	0	3	0	1	0

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
	Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman							
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	0	0	4	4	13	0
17	Menguatkan Sarana Pelaksana dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16	1	1	4	2	7	0
	Jumlah	222	42	15	53	17	87	11
	Persentase		19%	7%	24%	7%	39%	5%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2024

Dari 222 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kota Blitar, Indikator TPB yang telah dilaksanakan sebanyak 42 indikator (19%) sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Terdapat 15 indikator (6%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan walaupun menjadi target daerah. Sebanyak 67 indikator terdapat data dari PD namun hanya digunakan untuk pertimbangan ketercapaian karena tidak ada target daerah dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, yaitu 53 indikator (23%) telah dianggap tercapai dan 15 indikator (7%) dianggap belum tercapai. Sebanyak 11 indikator (5%) tidak sesuai kewenangan Kota Blitar dan 84 indikator (38%) tidak ditemukan data dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian

dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Blitar pada periode RPJMD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kota Blitar terhadap target nasional, maka terdapat 2 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

a. Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 13 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan 9 indikator walaupun tidak memiliki target daerah tetapi mencapai target nasional.
b. Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 5 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan 9 indikator walaupun tidak memiliki target daerah tetapi mencapai target nasional.

4.1.2. Isu Strategis Kota Blitar Dalam KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

Hasil penjaringan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Tabel di bawah ini menunjukkan daftar permaslahan dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Blitar.

Tabel 4. 3. Isu Strategis Kota Blitar Berdasarkan Analisis dalam KLHS

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Ekonomi	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perpakiran perlu perbaikan
		Perlu penataan PKL
		Dampak Negatif perkembangan kota - Menurunnya kualitas udara (kendaraan bermotor) - Menurunnay kualitas air (limbah rumah tangga) - Konversi lahan hijau untuk permukiman - Build up are semakin padat, reapan makin mengecil, beban drainase semakin berat, genangan kota (musim penghujan) - Sistem transportasi dan perpakiran semakin rumit
	Kondisi Infrastruktur Kota	kondisi Infrastruktur perlu ditingkatkan
	Pengembangan ekonomi Lokal	Pengembangan ekonomi belum maksimal
	Penurunan angka pengangguran	Penurunan angka pengangguran belum maksimal
Lingkungan	Kondisi Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan masih tinggi
		Perubahan Iklim semakin mengkhawatirkan: - kualitas iklim semakin menurun - Ancaman penurunan supply air tanah
		Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
		Penurunan kuantitas sumberdaya air
		Ruang Terbuka Hijau Terbatas
		Belum tertatanya kawasan permukiman
		Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
		Daya dukung lingkungan menurun
	Bencana (Alam dan Non-Alam)	Ancaman Bencana semakin tinggi baik alam maupun non alam
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
	Alih Fungsi Lahan	Alih Fungsi Lahan Pertanian
Sosial	Kemiskinan	Angka Kemiskinan terancam naik
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan karena kewaspadaan terhadap konversi lahan pertanian yang semakin tinggi dan rusaknya daerah tangkapan air

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah
		Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
	Tingkat Pendidikan	Perlunya Peningkatan Kualitas, Akses dan mutu Pendidikan yang Adil dan Merata
Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Sumber : KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

4.1.3. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB

4.2.3.1. Pilar Sosial

Terdapat 4 (empat) isu dalam pilar sosial di Kota Blitar yaitu kemiskinan, ketahanan pangan dan tingkat Kesehatan masyarakat serta menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat. Kemiskinan dan Kesehatan masyarakat terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Kecukupan pangan di Blitar menjadi isu strategis akibat lahan pertanian yang semakin menyempit akibat alih fungsi lahan. Tabel di bawah menunjukkan keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB Pilar Sosial.

Tabel 4. 4. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Sosial

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
Kemiskinan	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
	10.1.1*	Koefisien Gini.
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Ketahanan Pangan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
Tingkat Kesehatan Masyarakat	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.
	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.
	3.3.3.(a)	Angka kejadian malaria

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
	3.3.4.(a)	Persentase Puskesmas melakukan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
	3.3.5.(a)	Release From Treatment (RFT) penderita kusta
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
Tingkat Pendidikan	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

4.2.3.2. Pilar Ekonomi

Isu strategis di pilar ekonomi mencapai 4 (empat) yaitu tekanan perkembangan kota, kondisi infrastruktur kota, pengembangan ekonomi lokal dan penurunan pengangguran. Tekanan perkembangan perkotaan dicerminkan oleh indikator persentase rumah tangga perkumuhan perkotaan. Akses air minum, sanitasi, listrik dan transportasi umum terkait dengan isu peningkatan infrastruktur. Indikator kunjungan wisata dan UMKM menggambarkan isu pengembangan ekonomi lokal di Kota Blitar. Persentase pengangguran dan tingkat setengah pengangguran terkait dengan isu penurunan pengangguran. Tabel di bawah menunjukkan keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB Pilar Ekonomi.

Tabel 4. 5. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Ekonomi

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
Tekanan Perkembangan Kota	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
Kondisi Infrastruktur kota	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
Pengembangan ekonomi lokal	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
	8.9.1*	Persentase nilai PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Penurunan pengangguran	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor informal
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

4.2.3.3. Pilar Lingkungan

Indikator pilar lingkungan di Kota Blitar memiliki isu strategis sebanyak 4 (empat) isu strategis. Empat isu strategis tersebut yaitu pencemaran lingkungan, kualitas lingkungan hidup, bencana (alam dan non alam), pengelolaan sampah dan alih fungsi lahan pertanian. Isu strategis pencemaran terkait indikator kualitas air atau insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Indikator TPB seperti kerugian ekonomi akibat bencana, pendampingan psikososial korban bencana atau dokumen pengurangan resiko bencana menggambarkan isu bencana. Lebih lengkapnya keterkaitan isu strategis dengan TPB Pilar Lingkungan akan ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4. 6. Tabel Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Lingkungan

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
Pencemaran Lingkungan	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Kualitas Lingkungan Hidup	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
	15.1.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
	11.5.1.(b)	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Pengelolaan Sampah dan alih fungsi lahan pertanian	11.6.1.(a)	Persentase sampah terolah di TPA
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

Sumber: KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

4.2.3.4. Pilar Tata Kelola

Isu strategis untuk pilar tata Kelola di Kota Blitar adalah reformasi birokrasi. Indikator TPB yang terkait antara lain penggunaan *e-procurement,* persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi Birokrasi baik, peningkatan persentase Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Aspek kepemilikan administasi masyarakat juga terkait isu strategis seperti persentase anak yang memiliki akta kelahiran atau proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat lembaga pencatatan sipil.

Tabel 4. 7. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Tata Kelola

Kelompok Isu Strategis	No. Indikator	Indikator
Reformasi Birokrasi	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.
	16.6.1.(d)	Persentase PD yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas
	16.6.2.(a)	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
	16.9.1.(a)	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Sumber : KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026

4.2.3.5. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2021-2026 adalah kesiapan Pemerintah Kota Blitar dalam mempersiapkan SDM terutama dalam hal mental dan ketrampilan hidup penduduk Kota Blitar menghadapi MEA; yaitu : (a) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (b) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi ketrampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (c) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

4.1.4. Telaahan Isu/Kebijakan Nasional

4.2.4.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yang selanjutnya menjadi pedoman pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun. Adapun penjelasan secara umum mengenai RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut :

a. Visi

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**".

b. Misi

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Adapun misi tersebut meliputi:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

c. Agenda pembangunan

Pembangunan nasional periode 2020-2024 memiliki 7 (tujuh) agenda, yaitu:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhumhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

d. Sasaran

Sasaran pembangunan nasional periode 2020-2024, terdiri atas:

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian;
3) Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera;
4) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
5) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
6) Terpenuhinya layanan dasar;
7) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda;
8) Terwujudnya pengentasan kemiskinan;
9) Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
11) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
12) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
13) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
14) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
15) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif;
16) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
17) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;

18) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
19) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;
20) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
21) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
22) Pembangunan Rendah Karbon; dan
23) Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.4.2. Kebijakan Nasional Dalam Percepatan Penanganan COVID-19

Momentum perbaikan perekonomian yang mulai terlihat pada awal tahun 2020 berubah arah karena pandemi global *corona virus disease* (COVID-19). COVID-19 menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, mengakibatkan gangguan kesehatan dan ancaman kematian. Wabah yang dimulai di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Penyebaran masih eskalatif di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Tidak ada satu negara pun yang dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Perppu 1/2020 sebagai dasar hukum untuk mengatasi kondisi kegentingan yang memaksa dengan langkah-langkah antisipatif dan luar biasa. Dengan Perppu 1/2020, Pemerintah memiliki fleksibilitas mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk mengatasi dampak COVID-19, dengan

tiga prioritas yaitu untuk penanganan masalah kesehatan, menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan, dan memberikan dukungan terhadap dunia usaha terutama UMKM agar terhindar dari kebangkrutan massal. Perppu 1/2020 juga mengatur penyesuaian batasan defisit APBN untuk bisa lebih tinggi dari 3 persen, mengatur mengenai insentif dan fasilitas perpajakan guna mendukung dunia usaha, serta mengatur penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran.

Lebih lanjut, melalui Perppu 1/2020 diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga medis, masyarakat, dan pelaku usaha di sektor riil serta sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi secara lebih merata.

4.1.5. Telaahan Isu/Kebijakan Provinsi

4.2.5.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun sampai 2024. Dalam rangka mewujudkan sinergi pembangunan provinsi dan kabun/kota, maka dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar perlu menelaah RPJMD Provinsi Jawa Timur. Adapun uraian secara umum RPJMD Provinsi Jawa Timur disajikan sebagai berikut :

a. Isu Strategis

Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan;

2) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat;
3) Tata kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi;
4) Demokrasi Kewargaan; dan
5) Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

b. Visi

Adapun Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"

c. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; dan

4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

d. Tujuan

Rumusan Tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Misi tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Penjabaran Tujuan Pada Misi 1: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah.

Penjabaran Tujuan Pada Misi 2:

1) Menurunnya Angka Kemiskinan;
2) Meningkatnya Keseteraan Gender;
3) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar; dan
4) Menurunnya Pengangguran.

Penjabaran Tujuan Pada Misi 3:

1) Terwujudnya Pemerintahan yang Baik; dan
2) Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Penjabaran Tujuan Pada Misi 4:

Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

e. Sasaran

Penjabaran Sasaran Pada Misi 1:

1) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
3) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian;
4) Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
5) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
6) Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
7) Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;

8) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan;
9) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan
10) Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.

Penjabaran Sasaran Pada Misi 2:

1) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan;
2) Meningkatnya Kemandirian PMKS;
3) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;
4) Meningkatnya kualitas Pendidikan;
5) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
6) Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat.

Penjabaran Sasaran Pada Misi 3:

1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;
3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah;
4) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5) Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
6) Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan
7) Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.

Penjabaran Sasaran Pada Misi 4:

1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; dan
2) Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.

f. Arah Pengembangan Wilayah Klaster Wilis Selatan

Kota Blitar dalam arah kebijakan pengembangan wilayah RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 berada di dalam Klaster Wilis Selatan bersama Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung dan Blitar. Klaster Wilis Selatan memiliki sektor unggulan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Arah pengembangan klaster ini adalah:

- **Aspek Sosial:** peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomwilayah berbasis komoditas unggulan.
- **Aspek Ekonomi:**Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan STP (*Science Techno Park*) Atsiri; peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; dan Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional.
- **Aspek Infrastruktur:**Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; dan peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan *Realignment* jalur Malang-Blitar.

4.1.6. Telaahan Isu/Kebijakan Daerah

4.2.6.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030

Penataan ruang Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030. Sebagai dokumen perencaaan jangka menengah daerah, penyusunan RPJMD Kota Blitar juga mempedomani RTRW Kota Blitar. Hal ini bertujuan agar terwujud keselarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur

dan rencana pola ruang wilayah. Adapun muatan RTRW secara umum diuraikan pada bagian ini.

a. Isu Strategis

Beberapa isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Blitar, yaitu:

1) Geografis
   a) Posisi geografis Kota Blitar yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Blitar dalam perkembangan kedepan akan sangat terpengaruh oleh perkembangan Kabupaten Blitar, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut merupakan tantangan yang tidak ringan bagi proses pelaksanaan pembangunan di masa mendatang karena sebelum menetapkan kebijakan pembangunan yang berskala kawasan baik Kota maupun Kabupaten Blitar harus selalu melakukan sinkronisasi dan koordinasi terlebih dahulu;
   b) Kota Blitar yang minim sumberdaya alam dalam pelaksanaan pembangunan ke depan dituntut untuk mampu menciptakan sumberdaya buatan sebagai sumber daya alternatif. Dalam prakteknya upaya tersebut akan membutuhkan lahan yang cukup besar, sementara luas wilayah Kota Blitar relatif kecil ditambah lagi proses alih fungsi lahan dari persawahan atau tegalan menjadi fungsi lainnya tidak dapat dihindari;
2) Demografis

   Perkembangan jumlah penduduk selain dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian, juga dipengaruhi oleh migrasi baik keluar maupun masuk. Untuk Kota Blitar dalam 5 tahun terakhir ini pengaruh migrasi terutama migrasi masuk sangat besar, hal ini disebabkan karena pesatnya kemajuan pembangunan di Kota Blitar sehingga menjadi daya tarik bagi warga dari daerah lain untuk melakukan aktifitas ekonomi di Kota Blitar yang selanjutnya menetap menjadi penduduk Kota Blitar. Kondisi ini

diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

3) Sosial Budaya

Kota Blitar secara kewilayahan kultural dikategorikan sebagai daerah mataraman paling timur, karena posisinya yang jauh dari pusat kebudayaan mataraman (Jogyakarta, Surakarta). Dalam perkembangannya, budaya masyarakat juga berorientasi ke Kota Malang dan Surabaya, sehingga melahirkan masyarakat yang memiliki sosio kultural yang khas yaitu perpaduan antara pengaruh Jawa Timur yang dikenal pemberani dan budaya Jawa Tengah yang terkenal lembut dengan filosofinya yang kuat. Dari perpaduan keduanya itulah Kota Blitar melahirkan tokoh-tokoh nasional yang dikenal memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme tinggi seperti Bung Karno, Suprijadi dan lain-lain. Semangat nasionalisme dan patriotisme inilah yang selama ini melandasi dan mewarnai setiap gerak kehidupan masyarakat Kota Blitar baik dalam pembangunan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

4) Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kota Blitar dalam 20 tahun mendatang diperkirakan akan mampu mengembalikan predikat yang pernah disandang Kota Blitar tempo dulu yaitu sebagai Kota Pendidikan, dimana akhir-akhir ini predikat tersebut secara perlahan namun pasti sudah mulai nampak kembali. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta didik terutama untuk tingkat SLTA/SMK lebih dari separuhnya adalah warga luar Kota Blitar.

Kurikulum pendidikan dan proses belajar mengajar yang berbasiskan teknologi informasi semakin mendominasi perkembangan pendidikan di Kota Blitar dengan semakin banyaknya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Perkembangan ini di satu sisi sangat menggembirakan sebagai suatu kemajuan karena pendidikan sudah berwawasan global, namun di sisi lain jika tidak diambil langkah yang tepat akan menimbulkan jurang

pemisah antara pendidikan bagi si kaya dan si miskin, karena keluarga miskin relatif akan kesulitan membiayai anaknya yang sekolah di SBI yang relatif lebih mahal.

5) Kesehatan

Kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Blitar sampai dengan Tahun 2025 akan meningkat, hal ini disebabkan selain karena perkembangan masyarakat Kota Blitar sendiri juga karena kebutuhan pelayanan kesehatan dari masyarakat Kabupaten Blitar. Dengan semakin banyaknya arus keluar masuk manusia dan barang di Kota Blitar maka resiko penularan penyakit juga akan semakin meningkat. Selain itu akibat pemanasan global dan berubahnya lingkungan di Kota Blitar dan sekitarnya diperkirakan jumlah penderita penyakit ISPA akan meningkat tajam. Termasuk penyakit yang lebih disebabkan oleh gaya hidup masyarakat seperti HIV/AIDS juga menjadi ancaman yang cukup serius.Dengan semakin tingginya Usia Harapan Hidup masyarakat, maka jumlah lansia di Kota Blitar ditengarai juga akan meningkat secara signifikan sehingga kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi mereka juga akan meningkat.

6) Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan struktur usia penduduk Kota Blitar sesuai prediksi nasional pada kisaran tahun 2015 sampai 2025 diperkirakan akan terjadi suatu kondisi dimana penduduk pada usia produktif sangat besar persentasenya jika dibandingkan penduduk usia non produktif. Hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri jika pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang memadai karena angka pengangguran akan tinggi. Penduduk usia produktif ini selain harus menanggung hidupnya sendiri mereka juga harus menanggung beban akibat ketergantungan dari penduduk usia non produktif. Apabila mereka tidak bisa terserap pasar kerja seluruhnya, maka angka kemiskinan akan sulit ditekan termasuk resiko-resiko lanjutannya berupa kerawanan sosial yang mungkin timbul.

7) Pariwisata

Perkembangan pariwisata Kota Blitar kedepan diperkirakan akan semakin dominan perannya dalam menggerakkan perekonomian Kota Blitar, hal ini selain dikarenakan jumlah dan lama kunjungan wisatawan yang meningkat juga karena peran Kota Blitar sebagai pusat distribusi barang bagi daerah sekitarnya yang menurun. Angka kunjungan wisatawan diperkirakan akan meningkat tajam seiring dengan semakin banyak dan variatifnya obyek wisata yang ada di Kota Blitar, termasuk dengan semakin longgarnya aturan keemigrasian sebagai konsekuensi dari pemberlakuan area perdagangan bebas yang memicu meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara. Peningkatan itu diperkirakan juga dipengaruhi oleh kerinduan masyarakat akan sosok nasionalis dan patriotis seperti Bung Karno dan Suprijadi akibat kejengahan masyarakat terhadap situasi perpolitikan nasional yang saat ini cenderung elitis. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar untuk belajar tentang nasionalisme dengan mengunjugi makam Bung Karno, menelusuri jejak Suprijadi sebagai tokoh PETA dan obyek wisata sejarah lainnya yang ada di Kota Blitar.

8) Keagamaan

Kondisi kehidupan beragama di Kota Blitar dalam 20 tahun mendatang diperkirakan masih ditandai dengan semakin rukunnya kehidupan umat beragama dan meningkatnya jumlah tempat ibadah sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka jumlah umat Islam yang akan berangkat haji akan semakin banyak, sementara kuota yang tersedia relatif tetap, maka implikasinya adalah semakin lamanya daftar tunggu haji di Kota Blitar. Meski kondisi kerukunan umat beragama relatif kondusif namun kedepan perlu diwaspadai kemungkinan munculnya aliran sesat/radikal yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan

beragama di Kota Blitar dan juga kemungkinan Kota Blitar digunakan sebagai daerah operasi terorisme. Dalam beberapa tahun kedepan kesadaran umat Islam tentang pentingnya produk halal akan semakin mewarnai pola konsumsi masyarakat yang harus disikapi dan diantisipasi oleh pengusaha makanan dan minuman di Kota Blitar.

9) Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah Kota Blitar ke depan masih ditandai dengan semakin kuatnya dominasi sektor tersier terutama kelompok perdagangan dan jasa jika dibandingkan sektor sekunder dan primer. Bahkan penurunan kontribusi sektor primer akan semakin tajam seiring terjadinya alih fungsi lahan, sampai tahun 2025 diperkirakan kontribusi sektor tersier sudah lebih dari 71 persen. Kontribusi sektor tersier ini bahkan bisa tumbuh lebih cepat lagi apabila isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan semakin kuat seperti eco label, *global warming* yang kesemuannya akan mengurangi ketersediaan bahan baku industri terutama kerajinan bubut kayu yang selama ini menjadi salah satu produk andalan Kota Blitar, sehingga sektor sekunder ini juga akan mengalami penurunan produktifitas. Pemberlakuan area perdagangan bebas seperti CAFTA pada tahun 2010, serta AFTA dan WTO beberapa tahun mendatang sedikit banyak juga akan mempengaruhi perekonomian Kota Blitar baik itu pengaruh positif maupun negatif. Karena basis ekonomi Kota Blitar ada pada sektor tersier maka dampaknya relatif positif karena justru akan semakin mendorong tumbuhnya sektor perdagangan barang dan jasa. Namun untuk sektor sekunder dan primer, area perdagangan bebas tersebut bisa berdampak negatif, karena barang produksi termasuk buah-buahan terutama dari Cina dan Thailand yang terkenal sangat kompetitif bisa menjadi ancaman bagi petani blimbing dan pelaku industri pengolahan di Kota Blitar.

10) Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, komposisi penduduk serta peran suatu daerah bagi wilayah sekitarnya. Melihat posisi Kota Blitar yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Blitar serta peran Kota Blitar sebagai pusat pengembangan untuk SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) Blitar dalam RTRW Jawa Timur, maka kebutuhan sarana prasarana di Kota Blitar akan sangat besar karena tidak saja melayani masyarakat Kota Blitar tetapi juga masyarakat Kabupaten Blitar dan daerah lainnya yang melakukan aktifitas sosial ekonomi di Kota Blitar.Selain itu kebutuhan sarana akomodasi, tempat rekreasi dan hiburan, serta ruang publik untuk aktifitas sosial masyarakat diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup mencolok, hal ini tidak lepas dari posisi dan peran Kota Blitar yang strategis bagi daerah sekitarnya.

11) Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi politik, hukum, keamanan dan ketertiban di Kota Blitar diperkirakan akan tetap kondusif sampai dengan Tahun 2025. Pemahaman masyarakat terhadap politik dan hukum akan semakin meningkat, sehingga ketika terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat akan mengedepankan aspek hukum daripada melakukan pengerahan massa seperti demonstrasi. Jumlah demonstrasi di Kota Blitar diperkirakan akan menurun seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar, sebab demonstrasi yang terjadi di wilayah Kota Blitar selama ini lebih banyak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blitar. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat karena sampai dengan Tahun 2025 mendatang komposisi jumlah penduduk akan didominasi oleh penduduk usia produktif, jika pemerintah kurang berhasil menyediakan lapangan kerja bagi mereka maka diperkirakan kondisi keamanan dan

ketertiban akan terganggu dengan meningkatnya angka kriminalitas.

12) Penerapan Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan aspirasi dan potensi yang ada di Kota Blitar. Agar dapat berkembang menjadi lebih baik sesuai tantangan jaman pemerintah daerah perlu melakukan reformasi birokrasi menuju birokrasi pemerintahan yang baik. Upaya reformasi birokrasi yang diikuti peningkatan kualitas aparatur, kualitas pelayanan dan penyempurnaan manajemen pemerintahan dan pembangunan kedepan diperkirakan tetap menjadi isu penting sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang bergerak kearah terbentuknya masyarakat madani dimana peran pemerintah semakin berkurang dan akan lebih banyak pada fungsi regulasi saja.

13) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan Kota Blitar sampai tahun 2026 mendatang diperkirakan masih mampu mengimbangi perkembangan jumlah penduduk dengan segala kebutuhan fasilitasnya. Namun yang perlu dicermati adalah terjadinya alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama sawah dan tegalan menjadi lahan terbangun, dimana saat ini kurang lebih sekitar 10 ha sawah tiap tahunnya beralih fungsi menjadi perumahan/perkantoran. Alih fungsi ini diperkirakan akan semakin cepat terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemanfaatan lahan di Kota Blitar harus dikendalikan agar tercipta keseimbangan lingkungan. Perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH.

Mengingat kontur tanah Kota Blitar yang miring ke selatan, maka untuk kebijakan pengembangan permukiman lebih diarahkan ke wilayah selatan, timur dan barat Kota Blitar. Sedangkan untuk wilayah utara tetap dipertahankan sebagai kawasan perlindungan

daerah bawahan. Dengan bergesernya pusat pemerintahan Kabupaten Blitar di Kanigoro, maka akan semakin menarik perkembangan Kota Blitar kearah timur dan selatan, sehingga kesenjangan perkembangan kota dengan wilayah barat dan utara akan semakin kentara. Adanya pusat pertumbuhan baru di wilayah utara Kabupaten Blitar dengan rencana dibangunnya stadion standart nasional di Nglegok akan mempengaruhi kualitas lingkungan Kota Blitar karena secara geografis Kota Blitar berada di bawah dan selama ini wilayah utara menjadi kawasan lindung daerah bawahan (resapan air).

b. Tujuan

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

c. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang Kota meliputi:

1) Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
2) Pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
3) Pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;
4) Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
5) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
6) Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
7) Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
8) Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;
9) Pelestarian kawasan cagar budaya;
10) Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan
11) Penetapan kawasan-kawasan strategis kota.

12) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman untuk menurunkan dan mencegah timbulnya Kawasan kumuh baru di Kota Blitar.

d. Strategi

Strategi penataan ruang Kota meliputi:

1) Strategi pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya, meliputi:
   a) meningkatkan dan mengembangkan objek wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;
   b) mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata;
   c) meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata;
   d) meningkatkan pemasaran wisata; dan
   e) meningkatkan kerjasama pariwisata lintas wilayah.
2) Strategi pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota, meliputi:
   a) mengembangkan kegiatan perdagangan pelayanan regional;
   b) mengarahkan pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis dengan mengutamakan usaha ekonomi kerakyatan;
   c) mengembangkan sektor pendukung perekonomian yang melayani kawasan regional;
   d) meningkatkan penyediaan fasilitas kota yang mempunyai skala pelayanan regional;
   e) meningkatkan aksesibilitas pelayanan skala regional;
   f) mendorong peran para pelaku ekonomi dalam memperkuat daya saing daerah; dan
   g) menjalin kerja sama lintas wilayah dalam Wilayah Pengembangan Blitar untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan regional dalam berbagai sektor kegiatan.
3) Strategi pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan, meliputi:

a) membagi wilayah kota ke dalam bagian wilayah kota, yang masing-masing dilayani oleh pusat-pusat pelayanan;
b) menetapkan peran, fungsi dan struktur kegiatan utama bagian wilayah kota secara spesifik; dan
c) memantapkan peran pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan dalam sistem wilayah kota.

4) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan, meliputi:
a) meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;
b) memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota;
c) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota;
d) mengembangkan sistem transportasi massal;
e) mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, dan sub terminal angkutan umum;
f) mengembangkan terminal angkutan barang; dan
g) meningkatkan integrasi sistem antarmoda.

5) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi:
a) meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
b) memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
c) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
d) mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;

e) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
f) mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
g) meningkatkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
h) mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
i) meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
j) meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
k) mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi.

6) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, meliputi:
a) melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
b) mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang; dan
c) mengelola kawasan lindung secara terpadu.

7) Strategi pengembangan kegiatan pertanian perkotaan, meliputi:
   a) meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
   b) meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
   c) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   d) mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.
8) Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota, meliputi:
   a) mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
   b) mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
   c) meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya; dan
   d) mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.
9) Strategi pelestarian kawasan cagar budaya, meliputi:
   a) menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
   b) melakukan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;
   c) mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat; dan
   d) mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.
10) Strategi pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang, meliputi:
   a) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal dikawasan pusat kota;

b) mendistribusikan pengembangan perumahan yang diarahkan pada kawasan selatan kota; dan
c) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang proporsional dengan sistem insentif dan disinsentif.

11) Strategi penetapan kawasan-kawasan strategis kota, meliputi:
a) menetapkan kawasan pusat perdagangan dan jasa sebagai kawasan strategis ekonomi;
b) menetapkan kawasan yang mewakili karakteristik kota dan sebagai penanda budaya kota sebagai kawasan strategis sosial budaya;
c) menetapkan kawasan yang mendukung keseimbangan lingkungan kota sebagai kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
d) mendorong peran dan fungsi masing-masing kawasan strategis untuk mencapai tujuan penataan ruang kota.

e. Telaahan Isu Strategis Penataan Ruang

Target indikasi program dalam RTRW yang belum terwujud sampai dengan tahun 2020 antara lain:

1) Pengembangan Prasarana Kereta Api (double track, revitalisasi rambu & perlintasan jaringan);
2) Rencana Sistem Jaringan Energi (pengembangan pembangkit tenaga mikrohidro di Kec.Kepanjenkidul);
3) Penyediaan Menara Telekomunikasi bersama di 3 kecamatan;
4) Pengembangan TPA Regional Blitar;
5) Peningkatan kualitas air minum & sarpras melalui jaringan perpipaan;
6) Pembangunan IPAL Industri;
7) Penyediaan TPU bersama di 3 kecamatan;
8) Pembangunananan Buisiness Center di Kel.Kepanjenkidul;
9) Pembangunan Kawasan Wisata Perjuangan PETA (relokasi SMP 5 dan SMP 6);
10) Penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);

11) Pembangunan Perpustakaan skala kawasan di 3 kecamatan;
12) Pengembangan Islamic Center di KelurahanKauman;
13) Penyediaan ducting komunal bagi para penyedia jasa layanan telekomunikasi.

Selain isu yang sesuai dengan RTRW Kota Blitar, isu yang lain yaitu:

1) Integrasi Sistem Informasi Tata Ruang dengan Perijinan
2) Pengembangan Sumber Air Regional

4.2.6.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar pada periode Tahun 2020-2025

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 menjadi salah satu dokumen yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD. Mempedomani RPJPD dilakukan dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Secara umum telaahan RPJPD Kota Blitar Tahun 2020-2025 disajikan sebagai berikut:

a. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Blitar saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah kota maka Visi Pembangunan Kota Blitar Tahun 2005–2025 adalah:

“KOTA BLITAR SEBAGAI KOTA PARIWISATA, PUSAT PELAYANAN PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP”

Visi Pembangunan Kota Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Blitar dengan

tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Blitar. Visi Pembangunan Kota Blitar tersebut haruslah terukur sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam rangka mewujudkan "**Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan hidup".**Adapun yang dimaksud dengan "**Kota Pariwisata",** adalah Blitar sebagai kota tujuan wisata, yang kegiatan pariwisatanya lebih diarahkan pada wisata sejarah perjuangan baik bersifat fisik maupun non fisik. Kegiatan kepariwisataan dilaksanakan melalui penciptaan terobosan baru serta menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**Pelayanan Perdagangan dan Jasa",** ialah sektor perdagangan baik berupa barang maupun jasa serta pelayanan publik harus dibangun lebih maju dan mandiri yang memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

"**Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup**", mengandung makna bahwa setiap upaya yang dilaksanakan untuk membangun dan memajukan Kota Blitar dilakukan secara terencana dengan memadukan nilai-nilai kebangsaan dan lingkungan hidup, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dan yang akan datang.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Blitar tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1) **Menguatkan predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah**, dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.
2) **Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan dan jasa**, melalui **peningkatan** pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengembangan SDM yang berkualitas sekaligus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3) **Mewujudkan *good governance* di Kota Blitar**, dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum.
4) **Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman**, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif.

c. Tujuan

Tujuan dari pembangunan jangka Panjang Kota Blitar yaitu:

1) Menguatkan predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah.
2) Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan barang dan jasa.
3) Mewujudkan *good governance* di Kota Blitar.
4) Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, tentram dan nyaman melalui penciptaan lingkungan hidup dan kehidupan yang kondusif.

d. Sasaran

Sebagai ukuran tercapainya Kota Blitar sebagai Kota Wisata Sejarah, dan Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa, yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup maka pembangunan jangka panjang dalam 20 tahun mendatang difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1) Terpeliharanya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pembela Tanah Air yang Tertib, Rapi, Indah dan Aman sebagai salah satu tujuan wisata sejarah perjuangan Indonesia;
2) Terwujudnya keunggulan dan daya saing daerah khususnya sektor perdagangan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar;
3) Terwujudnya *Good Governance* di Kota Blitar; dan
4) Terwujudnya Kota Blitar yang aman, tertib, tentram dan nyaman.

e. Arah Kebijakan Pembangunan 2020-2025

Pada periode ini akan dilakukan langkah–langkah cerdas untuk menuntaskan pengukuhan identitas Kota Blitar sebagai dapur nasionalisme dan patriotisme Indonesia yang dalam penjabarannya mewarnai praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan sosial kemasyarakatan, maka RPJM Daerah tahap terakhir diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan yang dicapai pada tahap–tahap sebelumnya melalui:

1) Memantapkan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan lingkungan hidup.
2) Memantapkan Kota Blitar yang eksis dalam aktivitas pelayanan perdagangan dan jasa regional dan nasional serta transformasi dari pola pengembangan perdagangan berbasis keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
3) Memantapkan Kota Blitar sebagai kota pendidikan berkualitas yang didukung masyarakat berwawasan pendidikan.
4) Memantapkan Kota Blitar sebagai pusat layanan kesehatan.
5) Memantapkan penerapan *good governance.*
6) Memantapkan penyelenggaraan pelayanan prima pemerintah dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, informatika dan e-government
7) Memantapkan nilai-nilai sosio-religius dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, demokratis dan berkelanjutan.
8) Memantapkan karakter dan budaya lokal sebagai identitas Kota Blitar yang beriman dan berakhlak mulia, berbudi luhur, toleransi tinggi, bergotong-royong yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme.
9) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang.

4.2.7. Telaahan Kebijakan Daerah Sekitar

4.2.7.1. Telaahan RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026

Kota Blitar berbatasan dengan Kabupaten Blitar di seluruh sisi wilayah, oleh karenaitu perlu dilakukan telaah RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan sinergi pembangunan antardaerah dan turut merespon isu strategis Kabupaten Blitar yang memiliki dampak regional atau lintas wilayah. Berikut diuraikan isu strategis, visi dan misiRPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026

a. Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Blitar periode 2021-2026 yang perlu diperhatikan oleh Kota Blitar sebagai berikut:

1) Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal dan nonformal.
2) Memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi.
3) Percepatan pengentasan *stunting* dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
4) Pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD.
5) Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.
6) Akselerasi pembangunan kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan srana prasarana dasar.
7) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana-prasarana.

8) Keberpihakan terhadap keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difabel, dan penyandang kesejahteraan sosial.
9) Integrasi *treatment* pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.
10) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
11) Tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

b. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2021-2026

Arah pembangunan secara umum direpresentasikan dalam rumusan visi dan misi. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026, yaitu:

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar
	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas
	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan

c. Telaah Rencana Struktur Ruang dengan Kabupaten Blitar

Bahwa Kota Blitar secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Blitar baik batas utara, selatan, barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 – 2031, beberapa hal yang terkait dengan Kota Blitar di antaranya sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhandan pemerataan pembangunan wilayah melalui mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar kePantai Serang dan menyatu dengan JLS.
2. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan
   agroindustri di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan strategi salah satunya adalah mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Blitar denganbekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karnodengan Candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial.
3. Pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu :
   a) Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk - Pantai Pangi;
   b) Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo
   c) Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang
   d) Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro
4. Rencana sistem air minum kota diantaranya berupa pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar.

5. Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Kanigoro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa Papungan, Balai Desa Kuningan,Klampok Kota Blitar, Boro Tuliskriyo Sanankulon, Balai Kelurahan danKecamatan Kanigoro, Masjid Tegalrejo, Putuk, Masjid Kr. Sono, Monggalan, dan selatan Bendungan Serut.
6. Pengembangan kawasan perumahan skala besar diarahkan di Desa MaliranKecamatan Ponggok dan kawasan-kawasan yang berada di sekitar perbatasanKota Blitar seperti di Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Talun.
7. Pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

4.2.8. Penetapan Isu Strategis Kota Blitar 2021-2026

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, telaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, isu/kebijakan Kota Blitar, dan telaahan RPJMD daerah sekitar, serta KLHS Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu strategis Kota Blitar, sebagai berikut:

4.2.8.1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu isu yang penting dalam pembangunan Kota Blitar. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Blitar mengupayakan berbagai upaya dan langkah konkrit untuk penanganan masalah kemiskinan. Selama 2 (dua) tahun terakhir, persentase penduduk miskin dapat diturunkan secara signifikan dari yang sebelumnya mencapai 8,03% pada Tahun 2017 menjadi 7,13% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka kemiskinan kembali naik utamanya karena pengaruh pandemi covid-19.

Berbeda dengan kemiskinan yang menunjukkan penurunan, tingkat pengangguran di Kota Blitar mengalami peningkatan.

Pengangguran di Kota Blitar sejak Tahun 2017 menunjukkan tren meningkat dan saat telah terjadi pandemi meningkat mencapai 6,68% pada Tahun 2020. Bila kondisi ini berlangsung terus, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi daerah. Angkatan kerja dan usia produktif yang tidak terserap lapangan kerja dan menganggur akan berpotensi menyumbang angka kemiskinan. Makin banyak pengangguran maka tingkat kesejahteraan akan menurun dan jumlah penduduk miskin akan bertambah. Dampak berkelanjutan dari angka kemiskinan yang meningkat adalah munculnya permasalahan-permasalahan di bidang sosial, antara lain tidak kriminal akibat kesenjangan sosial dan pendapatan, PMKS, kawasan kumuh, dan sebagainya. Masalah pengangguran dan kemiskinan lama kelamaan akan berdampak pada menurunnya daya saing SDM dan daya saing daerah.

Masalah kemiskinan dan pengangguran telah melanda Indonesia termasuk Jawa Timur dan kabupaten/kota di wilayah provinsi ini. Meningkatnya persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi yang minus dan banyaknya PHK dan tutup/pembatasan produksi dan layanan berbagai lapangan usaha menjadi masalah utama yang harus dihadapi sejak pandemi COVID-19. Hal ini menjadi isu strategis yang harus mendapatkan prioritas untuk pembangunan Kota Blitar kedepan.

4.2.8.2. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing

Kota Blitar perlu terus meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai dan tenaga pendidik dan kependidikan serta kesehatan, dan diharapkan dapat memberikan jangkauan yang luas dengan kualitas pelayanan yang baik dan berdaya saing.

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 (sebelum kondisi pandemi) dipercepat oleh petumbuhan di sektor Jasa-jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya. Percepatan pertumbuhan sektor jasa-jasa ini berefek pada percepatan pertumbuhan PDRB kota

Blitar pada tahun 2019. Pada tahun 2019 jasa pendidikan menyumbang sebesar 6,80 persen terhadap total perekonomian Kota Blitar, menurun dibanding dengan tahun 2015 yang sebesar 7,16 persen. Namun jika dinilai secara nominal kontribusinya meningkat dari 345 miliar rupiah menjadi 461,59 miliar rupiah di tahun 2019. Tren pertumbuhan kategori ini berfluktuasi namun pada tahun 2019 mengalami percepatan pertumbuhan dari 5,26 persen di tahun 2018 menjadi 6, 19 persen pada tahun 2019.

Sementara itu, Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh cukup stabil pada periode sebelum pandemi dan memberi kontribusi sebesar 1,90% terhadap perekonomian Kota Blitar pada Tahun 2019. Dalam memingkatkan kontribusi jasa Kesehatan, maka perlu disusun kebijakan dan langkah operasional untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. Namun demikian pada tahun 2020, dampak pandemi covid-19 menjadi pertumbuhan ekonomi Kota Blitar terkontransi hingga -2,28%.

4.2.8.3. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan, kebudayaan dan lingkungan hidup

Kota Blitar merupakan kota dimana Ir. Soekarno yang adalah proklamator Indonesia sekaligus presiden pertama Republik Indonesia pernah tinggal dan dimakamkan. Terdapat obyek wisata sejarah/minat khusus yaitu Makam Aryo Blitar, Monumen PETA, Istana Gebang, Makam Proklamator dan Perpustakaan Bung Karno. Destinasi wisata selain makam Bung Karno yang dapat dikunjungi pada saat berkunjung ke Blitar, yaitu Istana Gebang, yaitu komplek rumah tua penuh sejarah, yang ditempati Bung Karno semasa kecil. Bersamaan dengan makam Bung Karno yang tak pernah sepi pengunjung, Istana Gebang ini pun menjadi tempat yang wajib dikunjungi saat datang ke Kota Blitar. Lebih lanjut, Monumen PETA

didirikan sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan pemberontakan PETA melawan tentara Jepang.

Gencarnya promosi kampung wisata di wilayah Kota Blitar turut meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menarik minat kunjungan wisata adalah penyelenggaran acara yang teragendakan rutin. Diantaranya Blitar Jadul pada saat peringatan hari jadi, Bedhola Pusaka dan Upacara Grebeg Pancasila pada saat peringatan hari lahir Bung Karno, Kenduri Seribu Tumpeng saat Haul Bung Karno, dan even lainnya.

Upaya promosi dan penataan destinasi wisata perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan dan pusat penumbuhkembangan kembali semangat nasionalisme Indonesia, Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku seni dan budaya, pelaku industri pariwisata, masyarakat, Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi perlu dilakukan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengetahui berapa kontribusi pariwisata terhadap perekonomian sebuah daerah, seringkali melalui kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sebelum pandemi melanda, Tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Blitar sebesar 365,96 miliar rupiah atau 5,39 persen, dan menduduki peringkat ke delapan. Sekitar 5,02 persen dari PDRB total (atau 93,08 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Makan Minum dan sebesar 0,37 persen (6.92 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Akomodasi. Setelah pandemi terjadi, pada tahun 2020,nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan.

Kota Blitar merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budaya. Secara kewilayahan kultural, Kota Blitar dikategorikan sebagai daerah mataraman paling timur, karena posisinya yang jauh dari pusat kebudayaan mataraman (Jogyakarta,

Surakarta). Dalam perkembangannya, budaya masyarakat lebih berorientasi ke Kota Malang dan Surabaya, sehingga melahirkan masyarakat yang memiliki sosio kultural yang khas yaitu perpaduan antara pengaruh Jawa Timur yang dikenal pemberani dan budaya Jawa Tengah yang terkenal lembut dengan filosofinya yang kuat.

4.2.8.4. Peningkatan nilai-nilai religius dan sosial dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, dan demokratis

Secara umum kehidupan umat beragama di Kota Blitar dalam kondisi baik ditandai dengan kesemarakan dan kerukunan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Sikap saling menghormati antar umat beragama dan gotong royong perlu selalu dihidupkan untuk menjaga terciptanya kerukunan, demokrasi dan keamanan. Dengan daerah yang aman dan tenteram, maka Kota Blitar menjadi daerah yang kondusif untuk melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi, investasi, sosial, budaya dan keagamaan, dan sebagainya. Guna mewujudkan daerah yang aman dan tertib, dibutuhkan peningkatan kualitas penegakan perda dan peraturan hukum lainnya secara terpadu, konsisten dan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dalam penerapannya di lapangan.

4.2.8.5. Peningkatan Kota Blitar sebagai kota layanan perdagangan dan jasa

Selama periode 2016 - 2020 struktur perekonomian Kota Blitar didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan dan Konstruksi. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang paling besar berkontribusi bagi perekonomian Kota Blitar. Pada tahun 2019, sebelum pandemi covid terjadi, kontribusi kategori ini mencapai 1,68 triliun rupiah atau sekitar 24,66 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 88,20% merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan

Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 11,80% merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Di tahun 2020, ketika pertumbuhan ekonomi terkontraksi, kontribusi kategori ini juga mengalami penurunan.

Selama sebelum pandemi, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki potensi yang besar pada sektor perdagangan dan perlu tetap dikembangkan pada masa datang. Selain perdagangan, sektor lain yang potensial dikembangkan adalah jasa.

Kegiatan ekonomi pada Subkategori Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selain itu, terdapat beberapa sektor yang cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Sektor ini meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

4.2.8.6. Peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan

Pembangunan Kota Blitar memasuki periode akhir dari RPJPD Kota Blitar. Ini berarti tujuan akhir pembangunan jangka panjang kota harus dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Blitar yang dimuat dalam RPJPD. Perwujudkan sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap dalam RPJMD memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Penyediaan infarstruktur untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksananaan, serta pengendalian dan evaluasi yang terpadu. Mengingat pembangunan infrastruktur wilayah seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Hal lain yang seringkali ditemui dalam pembangunan yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang, dan pilihan antara kepentingan ekonomi atau lingkungan hidup. Pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang, baik struktur maupun pola ruang. Selain itu, pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah.

4.2.8.7. Pemantapan penerapan *good governance* danpelayanan prima berbasis teknologi informasi

Pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik merupakan tujuan akhir yang perlu diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan refomasi birokrasi yang menyeluruh dan terpadu. Upaya peningkatan kinerja penyelenggraan pemerintahan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil telah dilakukan oleh Pemda Kota Blitar, yang ditunjukkan oleh capaian nilai SAKIP BB dan opini BPK terhadap LKPD mandapat predikat WTP.

Pencapaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar dapat mewujudkan *good*

governance. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk seluruh jenis pelayanan. Perlu adanya inovasi dan dukungan teknologi informatika untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah. Rumusan visi dan misi merupakan petunjuk bagi perumusan tujuan dan sasaran, sedangkan rumusan tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang akan diwujudkan pada periode perencanaan lima tahun ke depan berdasarkan isu strategis dan permasalahan yang dirumuskan pada bab sebelumnya.

5.1. Visi

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi daerah merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi yang lebih mikro pada level misi, tujuan, dan sasaran. Visi RPJMD Kota Blitar didasarkan pada pada beberapa nilai luhur yaitu nilai – nilai religius, kebudayaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.

Kota Blitar adalah kota bersejarah yang terletak di bagian Selatan Jawa Timur. Meski termasuk kota kecil dengan luas wilayah 32,57 km persegi atau kedua terkecil se Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, gaung dan nama besarKota Blitar terus tercatat dalam tinta emas perjuangan bangsa. Diantaranya Sejak Aryo Blitar mengusir tentara Tartar kembali ke negaranya pada abad 13 M. Kemudian Pada masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar juga menjadi saksi patriotisme Shoedanco Soeprijadi beserta PETA Blitar melawan kekejaman tentara Jepang. Sebuah peristiwa yang kemudian menyulut perjuangan

merebut kemerdekaan di daerah-daerah lain dan meneguhkan Kota Blitar sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air.

Predikat sebagai kota Patria semakin menguat dengan kisah Bung Kamo yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Blitar. Di kota inilah Bung Kamo tinggal dan dibesarkan, hingga menjadi bumi tempat peristirahatan terakhir putra Sang Fajar. Berbagai memorabilia presiden pertama tersebut, tersusun rapi dan lengkap di Perpustakaan Bung Kamo dan Istana Gebang. Peringatan hari lahir Pancasila dan Bulan Bung Kamo pun dirayakan dengan meriah dan penuh khidmat. Menjadikan Kota Blitar layak mendapat julukan sebagai "Bumi Bung Karno" dan "Kota Proklamator". Selain dikenal dengan patriotisme dan peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik wisata, Kota Blitar juga memiliki banyak potensi ekonomi termasuk perikanan, industri makanan, industri kerajinan dan lain sebagainya.

Berbagai potensi tersebut menjadi modal besar yang dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota unggul dan KEREN di Jawa Timur. Ditambah dengan semangat patriotisme yang mendarah daging sejak Aryo Blitar, Shoedanco Soeprijadi hingga Bung Karno, yang berpadu dengan nilai – nilai religius memperkokoh Blitar sebagai kota yang aman dan nyaman dalam keberagaman. Komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun dengan semangat gotong-royong tetap dikedepankan. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT

Penjelasan kalimat visi tersebut yaitu:

KOTA BLITAR KEREN: Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas KEberagaman tetap dalam kondisi REligius dan

Nasionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.

UNGGUL : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai–nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

MAKMUR : Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

BERMARTABAT : Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

Berdasarkan rumusan di atas, maka terdapat empat poin visi yaitu Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat. Keempat poin visi ini bersifat luas yang mencakup berbagai isu besar yaitu peningkatan kualitas tata kehidupan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditopang oleh penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

5.2. Misi

Berdasarkan visi "Terwujudnya **KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat**", terdapat lima misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

MISI 1

Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai– nilai kearifan lokal. Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi 1 memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

MISI 2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis. Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan

melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat.

MISI 3
Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain. Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan *urban farming*, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

MISI 4
Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

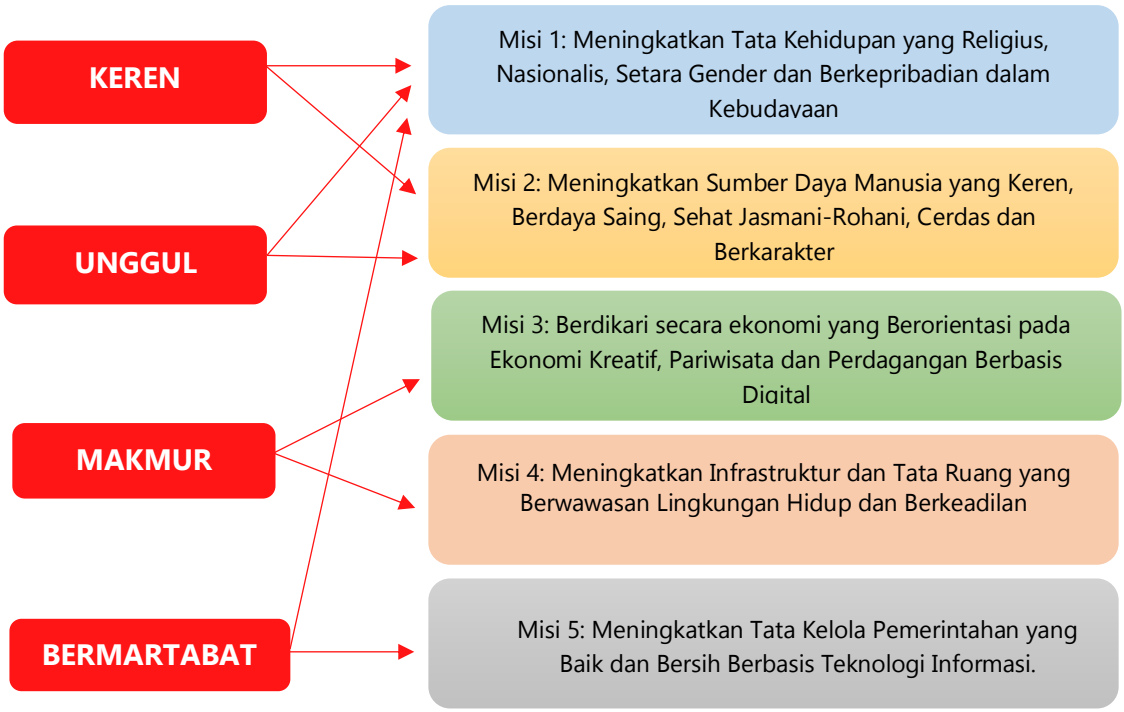
Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi

harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

MISI 5
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partsipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

Kelima misi tersebut sangat erat kaitannya dengan poin-poin kalimat visi yang sudah dijabarkan. Keterkaitan antara visi dan misi dapat diilustrasikan pada diagram berikut:



Gambar 5. 1. Keterkaitan antara Kalimat Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar

Gambar di atas menunjukkan bahwa tiap kata kunci dalam visi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai misi sehingga secara internal cukup sinergis. Di samping sinergis secara internal, rumusan Visi dan Misi Kota Blitar juga dapat dilihat keterkaitannya dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur dan juga Visi dan Misi RPJMN sebagai berikut :

Tabel 5. 1. Keterkaitan antar Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJM Nasional

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	RPJMD Kota Blitar 2021-2026	RPJM Nasional 2020-2024
Visi: Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	**Visi:** Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur, Bermartabat	**Visi:** Terwujudnya Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	**Misi 1:** Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.	**Misi 5:** Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
Misi 2: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan	**Misi 2:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.	**Misi 1:** Peningkatan Kualitas Manusia Indonesi
Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah	**Misi 3:** Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.	**Misi 2:** Struktur Ekonomi produktif, Mandiri, Berdaya Saing
Misi 4: Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan	**Misi 4:** Meningkatkan Inftrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan	**Misi 4:** Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
		Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	RPJMD Kota Blitar 2021-2026	RPJM Nasional 2020-2024
untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya	Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.	
Misi 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	**Misi 5:** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.	**Misi 6:** Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
		Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
		Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Visi Kota Blitar sejalan dengan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur dan juga Visi RPJM Nasional. Ketiganya mempunyai cita-cita yang sejalan yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, unggul, dan berkeadilan. Pada saat yang sama, poin-poin misi juga sangat sinergis dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Misi 1 RPJMD Kota Blitar mengarah pada upaya mewujudkan masyarakat yang berkepribadian yang demokratis dan nasionalis. Hal ini sejalan dengan semangat misi 5 RPJMN tentang memajukan budaya bangsa yang berkpribadian. Misi ini juga sinergis dengan spirit yang terkandung dalam Misi 3 RPJMD mengenai upaya mewujudkan tata pemerintahan dan masyarakat yang lebih demokratis. Selanjutnya, Misi 2 RPJMD Kota Blitar tentang peningkatan kualitas dan daya saing SDM sangat terkait dengan Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Misi RPJM Nasional tentang peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

Misi 3 tentang berdikari secara ekonomi juga sejalan dengan Misi 1 RPJMD Provinsi Jawa Timur yang menekankan pada upaya pemerataan pembangunan ekonomi dan juga Misi 2 RPJM Nasional

tentang upaya mewujudkan ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing. Misi 4 tentang pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan juga sejalan dengan Misi 4 RPJMD Jawa Timur dan Misi 3 dan 4 RPJM Nasional yang juga menekankan pada pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terakhir, Misi 5 tentang tatakelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sangat sinkron dengan Misi 3 RPJMD Provinsi Jawa Timur dan juga Misi 6 dan 8 RPJM Nasional tentang pewujudan tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

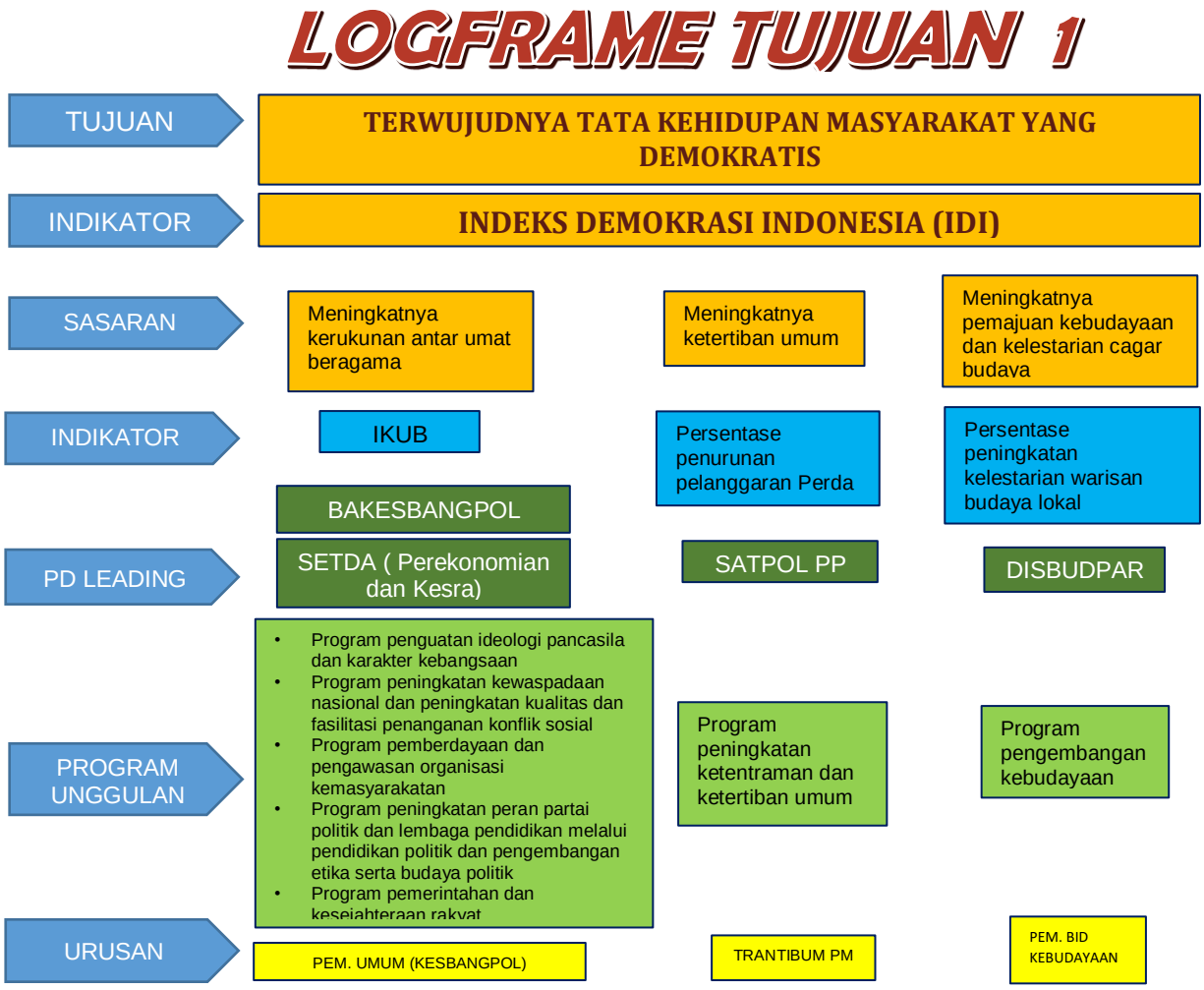
Penjabaran visi dan misi ke tujuan dan sasaran merupakan tahap yang sangat krusial dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan 5 misi di atas, terdapat sembilan tujuan yang akan diwujudkan pada periode perencanaan RPJMD Kota Blitar 2021-2026. Pada satu sisi, perumusan tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari poin-poin misi. Pada saat yang sama, perumusan tujuan dan sasaran juga harus memperhatikan rumusan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan pada bab 4. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat sinergitas antara tujuan dengan penjabaran isu strategis. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 5. 2. Keterkaitan antara Isu Strategis dengan Misi dan Tujuan RPJMD Kota Blitar

Misi 1 berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Secara khusus misi ini fokus pada upaya menciptakan menata kehidupan sosial masyarakat. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan empat sasaran, yaitu:

- Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
    1) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
    2) Meningkatnya ketertiban umum;
    3) Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya.



Gambar 5. 3. Logframe Tujuan 1

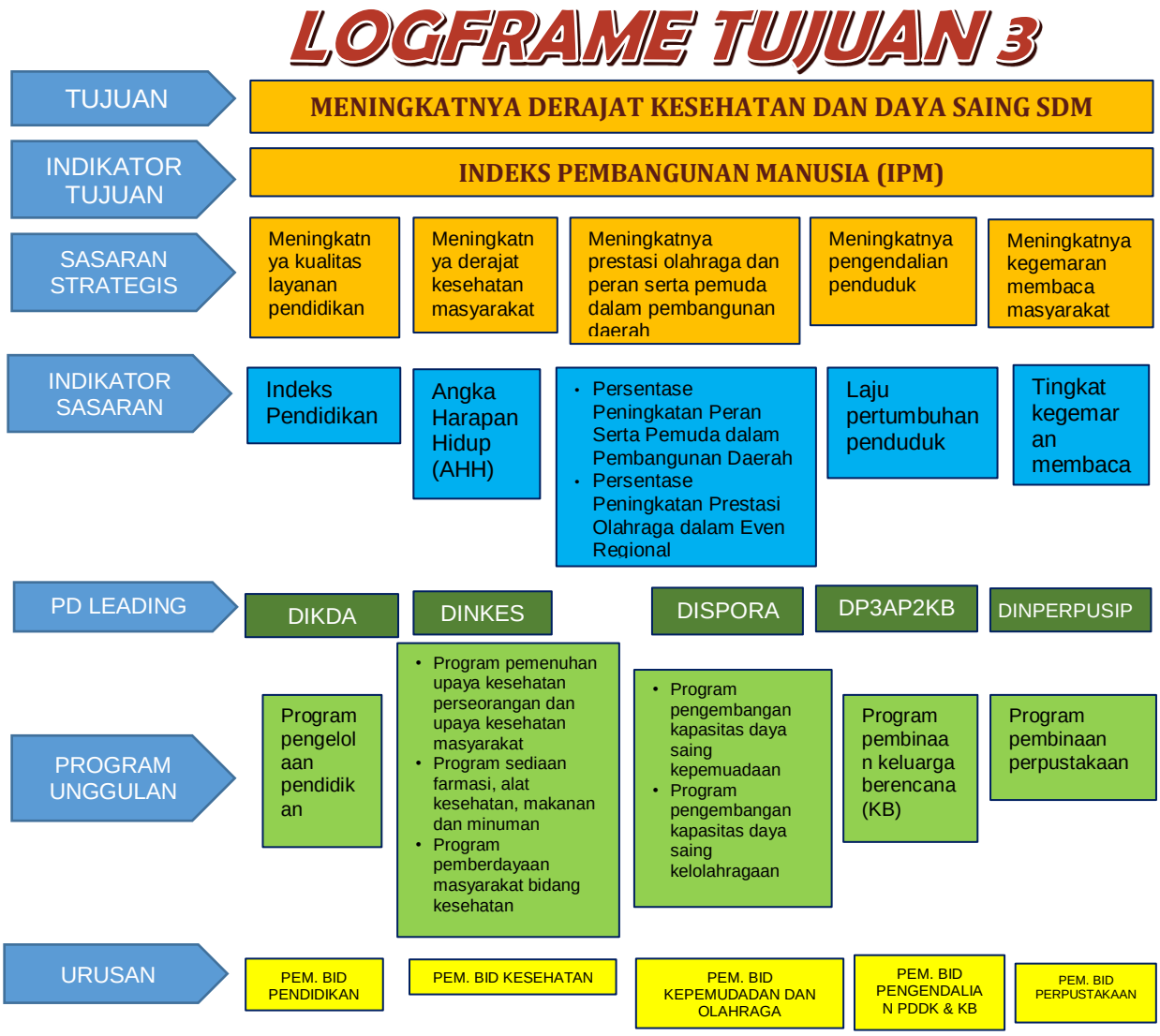
- Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
    1) Menurunnya kesenjangan gender.



Gambar 5. 4. Logframe Tujuan 2

Selanjutnya, Misi 2 fokus pada upaya meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter. Secara spesifik misi menyasar perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Misi ini diperinci ke dalam satu tujuan dan lima sasaran, yaitu:

- Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
    1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
    2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
    3) Meningkatnya prestasi olahraga dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah;
    4) Meningkatnya pengendalian penduduk;
    5) Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat.

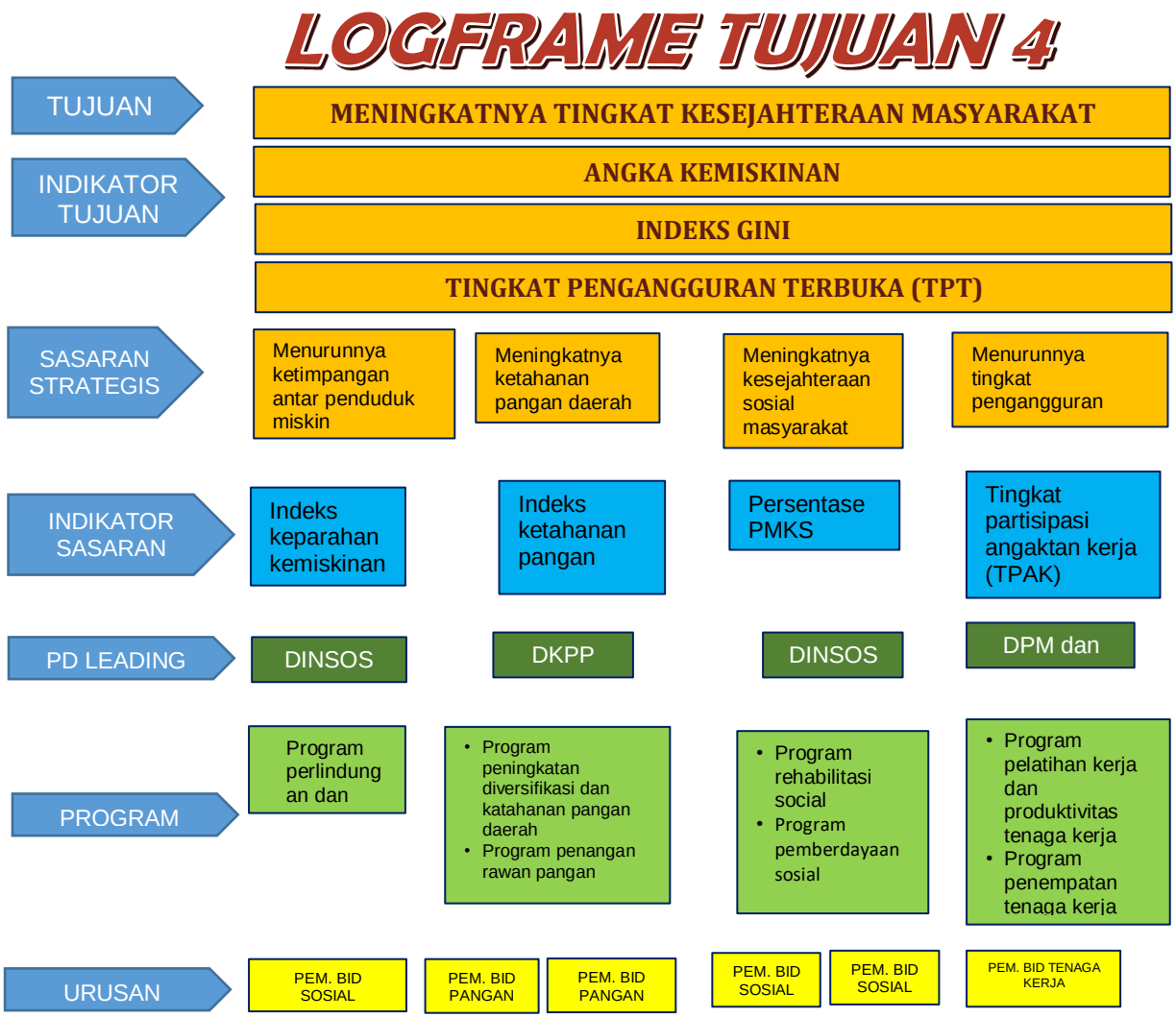


Gambar 5. 5. Logframe Tujuan 3

Pada Misi 3, kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital menjadi spirit pembangunan ekonomi pada misi tiga. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan sembilan sasaran, yaitu:

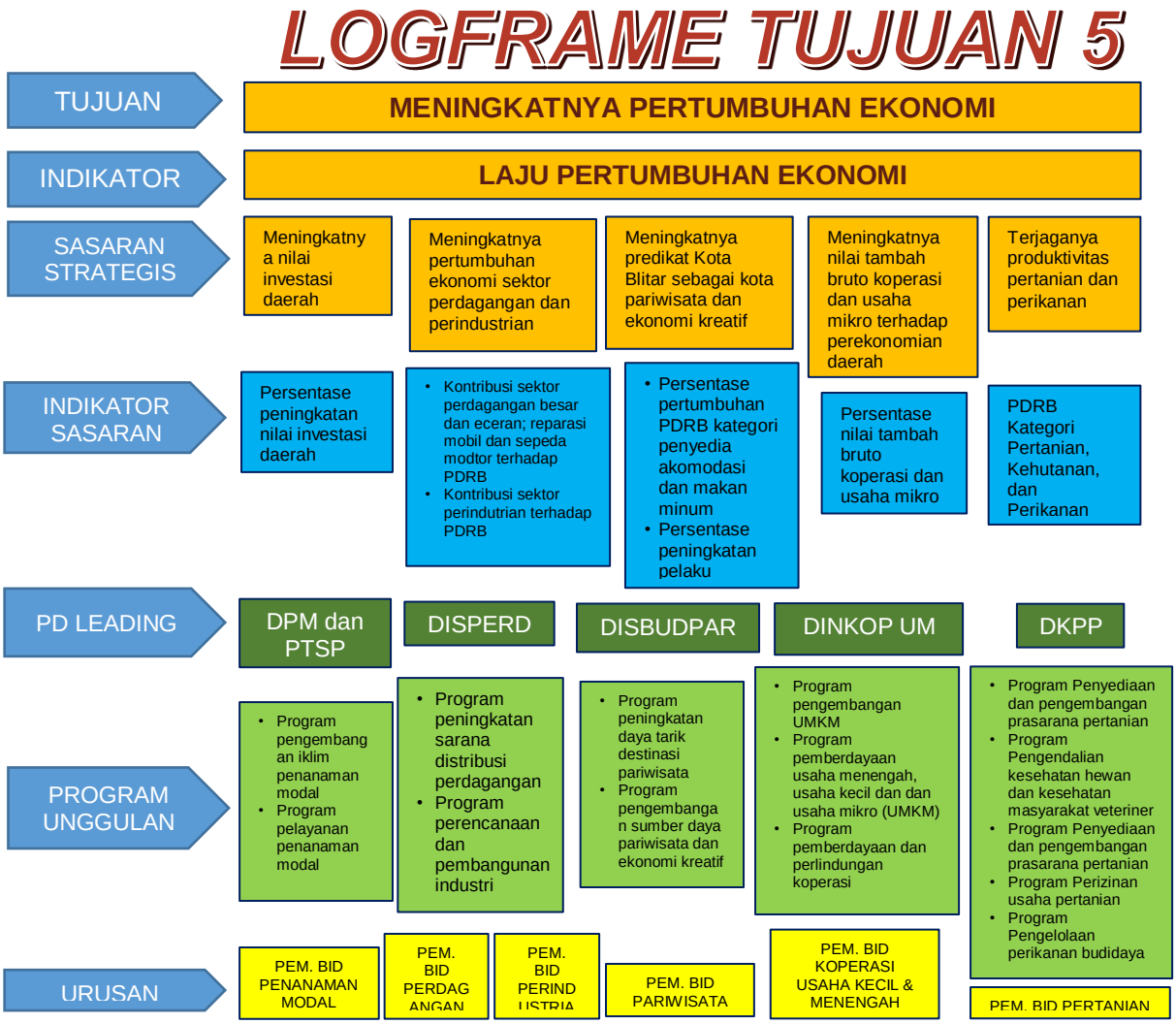
- Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
    1) Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin;
    2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
    3) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;

4) Menurunnya tingkat pengangguran.



Gambar 5. 6. Logframe Tujuan 4

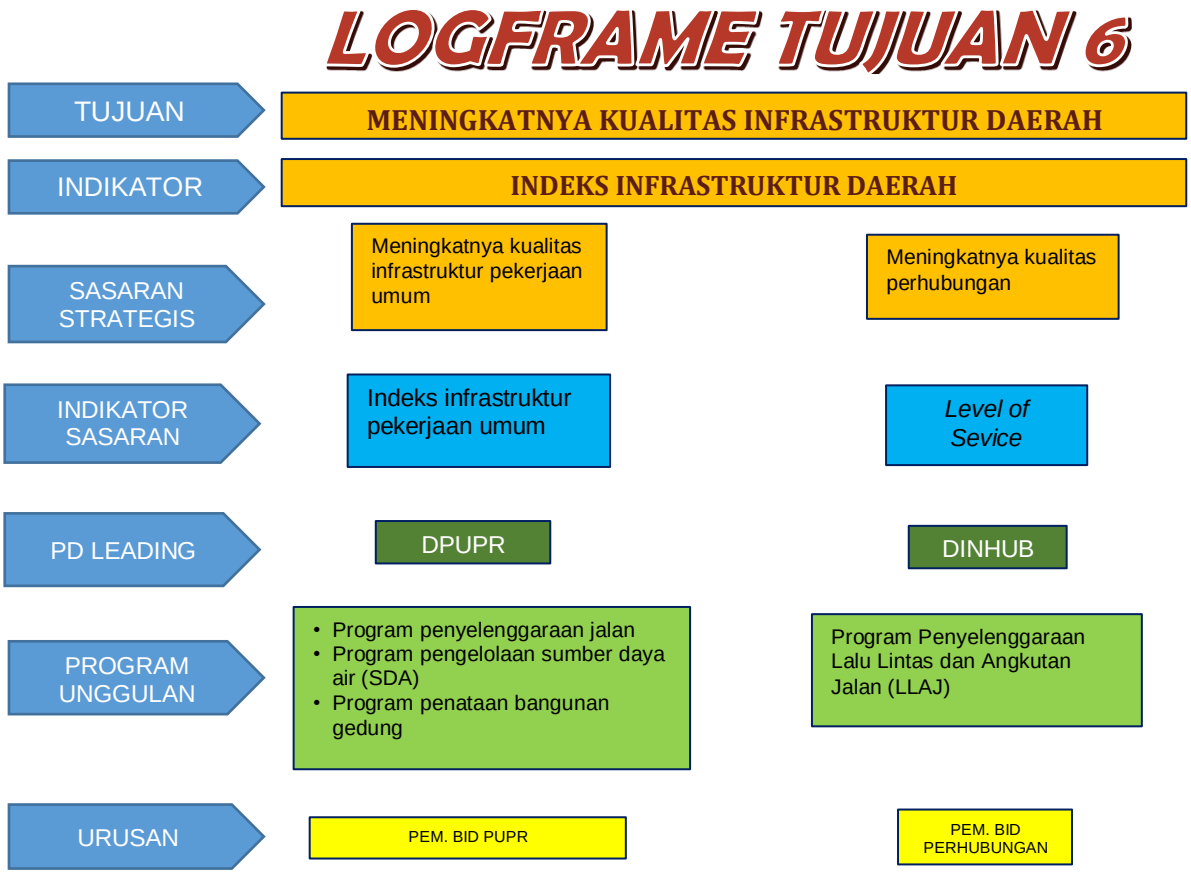
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
  1) Meningkatnya nilai investasi daerah;
  2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian;
  3) Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif;
  4) Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah;
  5) Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan.



Gambar 5. 7. Logframe Tujuan 5

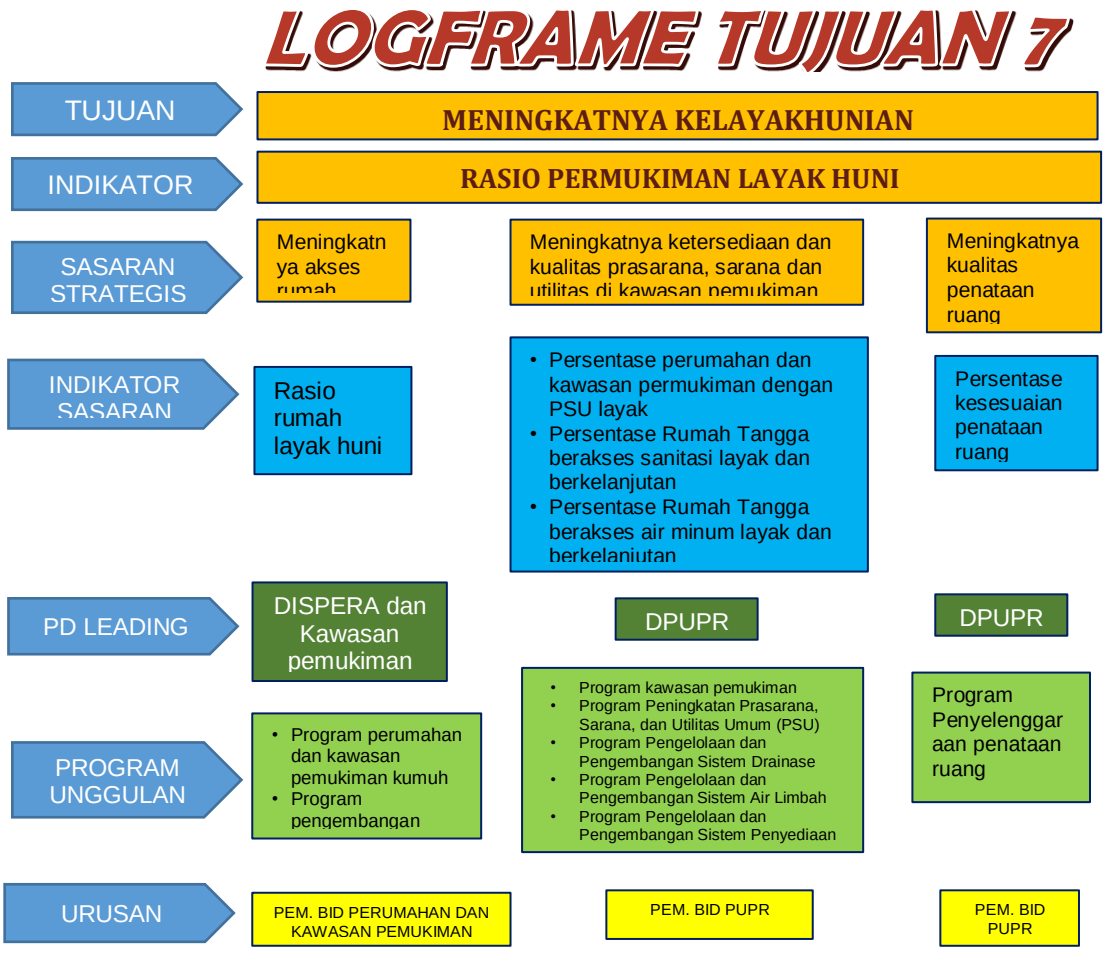
Selanjutnya, Misi 4 fokus pada upaya meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan. Kata kunci yang diusung pada misi ini berupa wawasan lingkungan hidup dan berkeadilan sebagai spirit peningkatan kualitas infrastruktur. Misi ini kemudian diturunkan ke dalam tiga tujuan dan delapan sasaran, yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
    1) Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum;
    2) Meningkatnya kualitas perhubungan.



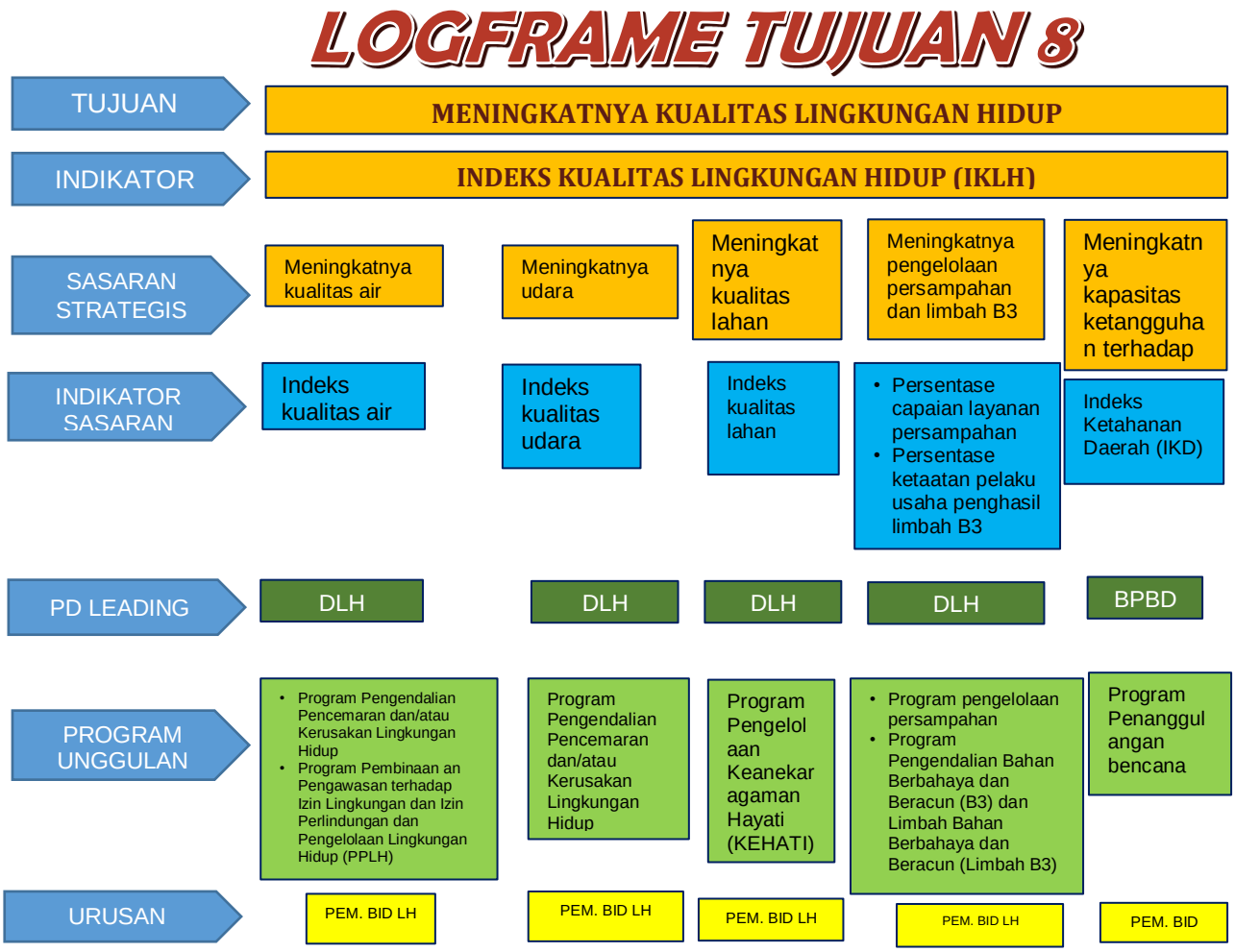
Gambar 5. 8. Logframe Tujuan 6

- Meningkatnya Kelayakhunian
    1) Meningkatnya akses rumah layak huni;
    2) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman;
    3) Meningkatnya kualitas penataan ruang.



Gambar 5. 9. Logframe Tujuan 7

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
    1) Meningkatnya kualitas air;
    2) Meningkatnya kualitas udara;
    3) Meningkatnya kualitas lahan;
    4) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
    5) Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

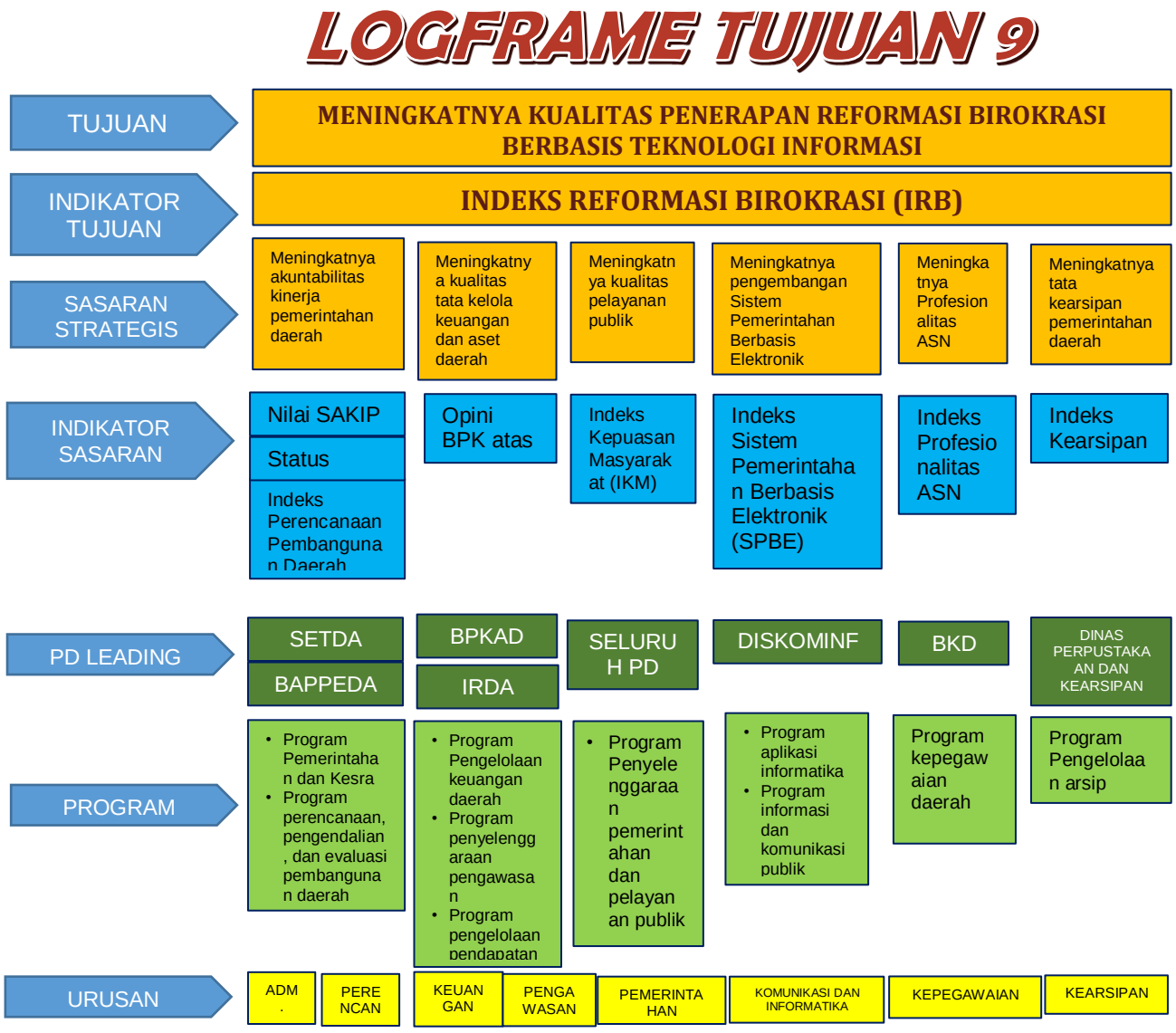


Gambar 5. 10. Logframe Tujuan 8

Terakhir, Misi 5 berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintahan mulai akan diarahkan pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misi ini akan dijabarkan ke dalam satu tujuan dan enam sasaran, yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi
    1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
    2) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;

3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4) Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5) Meningkatnya Profesionalitas ASN;
6) Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah.



Gambar 5. 11. Logframe Tujuan 9

Secara lebih rinci, tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 2. Indikator Tujuan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

VISI: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	1.1	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	1.1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	86,31	83,25	83,5	83,75	84	84,25	84,25
		1.2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	97,6	97,6	97,7	97,8	97,9	98	98
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter	2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78, 57	78,58	78,59	78,60	78,61	78,62	78,62
3	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi	3.1	Meningkatnya tingkat	3.1.1	Angka Kemiskinan	Persen	7,78	7,26	7,21	7,16	7,11	7,06	7,06
				3.1.2	Indeks Gini	Angka	0,344	0,345	0,344	0,343	0,342	0,341	0,341

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan		Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2022	2023	2024	2025	2026	
	kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital		kesejahteraan masyarakat	3.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,68	5,90	5,55	5,22	4,90	4,61	4,61
		3.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,28	3,50 – 3,75	4,00	4,50	5,00	5,50	5,50
4	Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	4.1.1	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	58,07	58,27	58,37	58,47	58,57	58,67	58,67
		4.2	Meningkatnya kelayakhunian	4.2.1	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,93	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99
		4.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,52	68,86	70,03	71,20	72,37	73,54	73,54
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	5.1	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	5.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	67,17 (B)	67,67 (B)	68,17 (B)	68,67 (BB)	69,17 (BB)	69,67 (BB)	69,67 (BB)

Tabel 5. 3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	84,38	83,6	83,7	83,85	84	84,25	84,25
			Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	1,97	2,01	3,87	5,92	8,06	10,41	10,41
			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Persen	0,50	0,99	1,49	1,98	2,48	2,97	2,97
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,66	67,8	67,87	67,94	68	68,07	68,07
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,73	0,73	0,73	0,735	0,735	0,74	0,74
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,75	73,95	74,00	74,10	74,20	74,30	74,30

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
	dan Berkarakter		Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persen	NA	0,89	0,74	0,88	0,87	0,87	4,25
				Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional	Persen	NA	12,79	10,68	2,91	3,95	1,09	31,42
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,67	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65
			Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	NA	47	48	48,5	49	49,5	49,5
3	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,22	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,38	74,18	74,68	75,18	75,68	76,18	76,18
			Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	Persen	7,71	7,48	7,37	7,26	7,15	7,04	7,04

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,53	70, 00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,00
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Persen	-37,15	0,30	0,36	0,42	0,47	0,53	2,08
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	23,55	24,70	24,75	24,80	24,85	24,90	24,90
				Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	9,75	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,91
			Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	-9,29	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	1,75
				Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Persen	4	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	1,90
			Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi	Persentase Nilai Tambah Bruto	Persen	2,02	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,25

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Koperasi dan Usaha Mikro								
			Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Angka (dalam miliar)	195,65	196,82	197,81	198,80	199,79	200,79	200,79
4	Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	85,47	86,36	86,77	87,18	87,59	88,00	88,00
			Meningkatnya kualitas perhubungan	*Level of Service*	Level	B (Ruas Jalan R.A. Kartini) C (Ruas Jalan Dr. Wahidin)	C	C	B	B	B	B
		Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,250	0,248	0,250	0,251	0,253	0,255	0,248
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas	Persentase perumahan dan Kawasan	Persen	63,30	70,74	74,47	78,19	81,91	85,64	85,64

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Permukiman dengan PSU layak								
				Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	95,14	96	97	98	99	100	100
				Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Persen	89,37	92	94	96	98	100	100
			Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Persen	95,30	95,35	95,40	95,45	95,50	95,55	95,55
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,32	59,92	61,72	63,52	65,32	67,12	67,12
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,63	84,53	85,48	86,43	87,38	87,40	87,40
			Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	54,23	55,23	55,73	56,23	56,73	56,78	56,78
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	Persen	92,10	93,00	94,00	95,00	96,00	98,00	98,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
				Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	67,00	67,00	72,00	72,00	75,00	75,00	75,00
			Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	Indeks	0,51	0,56	0,58	0,60	0,62	0,65	0,65
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72.06)	BB (72.15)	BB (72.20)	BB (72.25)	BB (72.30)	BB (72.35)	BB (72.35)
				Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan	Angka	25,47	25,49	25,51	25,53	25,55	25,57	25,57
				Status EKPPD	Status	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi (3,3532)	Sangat Tinggi (3,3534)	Sangat Tinggi (3,3536)	Sangat Tinggi (3,3538)	Sangat Tinggi (3,3538)
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,39	83	83,5	84,00	84,50	85,00	85,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,88	2,31	2,63	2,95	3,20	3,45	3,45
			Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,54	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	80,50
			Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	Indeks	NA	35	40	45	50	55	55
			Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	A	A (81 – 90)	A (81 – 90)	A (81 – 90)	A (81 – 90)	A (81 – 90)	A (81 – 90)

Penjabaran pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing misi sudah diturunkan dengan runtut ke dalam tujuan dan sasaran yang terperinci dengan indikator-indikator tersendiri. Secara garis besar, beberapa indikator utama yang menjadi tujuan akhir dari periode perencanaan hingga 2026 adalah Indeks Demokrasi, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Status Kota Layak Anak untuk indeksMisi 1. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk misi 2. Sedangkan Angka Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai indikator tujuan Misi 3. Misi 4 akan diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Daerah, Rasio Perumahan Layak Huni, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Terakhir Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) akan digunakan untuk pengukuran di Misi 5.

Rumusan tujuan, sasaran, berserta indikatornya akan menjadi panduan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah pada bab selanjutnya. Oleh karena itu, bab ini memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah pembangunan Kota Blitar dalam periode lima tahun ke depan.



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan kondisi ideal yang akan diwujudkan dalam rumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah. Bab ini akan fokus pada penjabaran dan deskripsi upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai kondisi yang dicapai pada akhir periode RPJMD melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan. Bab ini mencakup tiga poin bahasan yaitu: strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan pembangunan yang dirinci per tahun, serta program pembangunan daerah.

Strategi umum merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah pencapaian menuju terwujudnya visi misi dan dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

Namun demikian, penentuan kedua strategi tersebut juga memperhatikan hasil analisis SWOT. Analisis SWOT ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi kekuatan *(Strength),* kelemahan *(Weakness)*, peluang *(Opportunity),* dan ancaman *(Threat).* Keempat aspek tersebut dikategorikan berdasarkan analisis di internal maupun eksternal.

Tabel 6. 1. Tabel Analisis SWOT RPJMD Kota Blitar

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Internal		**External**	
1. Banyak objek wisata sejarah yang menjadi ciri khas pariwisata kota Blitar. 2. Kota Blitar merupakan tempat lokasi Makam Bung Karno (MBK), objek wisata yang populer secara nasional. 3. Masyarakat Kota Blitar merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nasionalisme. 4. Infrasktruktur transportasi cukup memadai 5. Masyarakat Kota Blitar dikenal sebagai masyarakat yang ramah, aman, tertib hukum, dan terbuka dengan pendatang sehingga gangguan keamanan sangat minimal terjadi. 6. Kota Blitar berada di jalur penting yang menghubungkan dua pusat ekonomi terbesar di	1. Terbatasnya lahan untuk kegiatan industri, pertanian, perikanan, dan perkebunan. 2. Minimnya sumberdaya alam untuk menopang pembangunan ke depan sehingga dituntut untuk mampu menciptakan sumberdaya buatan sebagai sumber daya alternatif. 3. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan perkantoran yang berdampak pada kualitas tutupan lahan. 4. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau. 5. Perekonomian sangat bergantung pada sektor ekonomi non primer	1. Blitar sebagai destinasi wisata regional/nasional yang telah memiliki karakteristik khusus. 2. Adanya rencana pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Malang-Blitar. 3. Tingginya angka migrasi masuk ke Kota Blitar. 4. Blitar semakin populer menjadi kota tujuan studi siswa luar kota Blitar. 5. Semakin besarnya proporsi penduduk usia produktif. 6. Kota Blitar sebagai pusat pengembangan untuk SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) Blitar dalam RTRW Jawa Timur. 7. Kota Blitar akan melayani masyarakat daerah sekitar dalam aktifitas sosial ekonomi. 8. Adanya pembangunan Bandara Kediri memberi peluang Kota Blitar untuk	1. Kota Blitar merupakan daerah rawan bencana terutama gempa bumi dan banjir. 2. Tingginya angka migrasi masuk ke Kota Blitar 3. Meningkatnya risiko penularan berbagai penyakit khas masyarakat urban. 4. Semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Kota Blitar sehingga menjadi ancaman bagi petani lokal. 5. Perkembangan kedepan sangat dipengaruhi oleh perkembangan di Kabupaten Blitar karena Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten. 6. Pembangunan Bandara Kediri menjadi tantangan

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
Internal		**External**	
wilayah selatan Jawa Timur yaitu Kediri dan Malang. 7. Kualitas tatakelola pemerintahan dan sistem pemerintahan berbasis elektoronik.	sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi nasional dan global. 6. Angka penganggur an dan kemiskinan masih relatif tinggi dibandingka n dengan kota-kota lain di Jawa Timur. 7. Lowongan kerja sangat terbatas karena ekspansi industri sangat terbatas.	mengembangk an ekonomi sektor jasa. 9. Potensi pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi berbasis digital.	bagi Kota Blitar dalam penciptaan jasa perkotaan yang kompetitif.

Sumber: Hasil analisis Tim RPJMD

Poin-poin analisis SWOT tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi umum pembangunan pembangunan melalui analisis pada setiap persandingan komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut:

Tabel 6. 2. Tabel Pengelompokan Strategi pada Analisis SWOT RPJMD Kota Blitar

Strategi Umum Pembangunan Kota Blitar			
S – O	**W – O**	**S – T**	**W – T**
• Membangun daya saing daerah dengan pengarusutama an ekonomi kerakyatan, kreatif, dan digital • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui	• Pembanguna n berkelanjuta n berbasis *human centered development* secara inklusif • Melaksanak an pembanguna n	• Memperku at kohesivitas sosial berbasis nilai religius, wawasan kebangsaa n dan nasionalis me	• Memperkuat pemberdayaa n masyarakat dan fasilitasi bantuan sosial • Perlindungan dan pengembang an produk lokal Kota Blitar

Strategi Umum Pembangunan Kota Blitar			
S – O	**W – O**	**S – T**	**W – T**
pembangunan kota tematik	infrastruktur secara berkelanjutan dan berbasis kawasan • Mendukung program strategis nasional	• Menjalin dan memperkuat kerjasama antar daerah	

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026. Strategi pembangunan dikategorikan menjadu dua, yaitu : Strategi Umum dan Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran.

Strategi umum merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah pencapaian menuju terwujudnya visi misi dan dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembangunan berkelanjutan berbasis peningkatan sumber daya manusia *(human centered development)* secara inklusif dengan memberikan akses partisipasi dan perlindungan hak–hak kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kota secara tematik, yaitu terwujudnya Kota Blitar sebagai Kota Sehat, Kota Layak Anak, Kota Tangguh Bencana, Kota Setara Gender dan Kota Peduli Sanitasi.
3. Memperkuat nilai – nilai religius, wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme, mengembangkan potensi Kota Blitar sebagai Bumi Bung Karno dan kota toleran yang harmonis dalam keberagaman.
4. Mengarusutamakan ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi digital sebagai strategi utama peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
5. Melaksanakan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, berbasis kawasan dan responsif terhadap potensi dan tantangan tiap–tiap wilayah. Termasuk memberikan perhatian khusus kepada perkembangan kelurahan-kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar.
6. Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan daerah lain khususnya Kabupaten Blitar dalam berbagai bidang dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian anggaran sampai tingkat RT/RW, fasilitasi internet kepada warga, pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial, fasilitasi pendidikan gratis, bantuan beasiswa kuliah, kesehatan gratis, menumbuhkan wirausaha baru, peningkatan kesejahteraan bagi warga miskin dan rentan miskin, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas even daerah.
8. Mendorong kebijakan perlindungan dan pengembangan produk lokal Kota Blitar melalui kebijakan “Dorong – Borong” produk Lokal Kota Blitar.
9. Mendukung kebijakan Program Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan Tahun yang ada di Kota Blitar dan sekitarnya.

10. Mendukung dan mengupayakan terwujudnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.

Sementara Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran dirumuskan dengan memperhatikan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan upaya yang lebih rinci dari tiap strategi. Pada saat yang sama, perumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah tiap urusan yang sudah dijabarkan pada Bab IV. Strategi dan arah kebijakan pada level RPJMD pada umumnya bersifat spesifik menyangkut urusan tertentu. Strategi akan menjadi panduan dalam perumusan program sedangkan arah kebijakan akan menjadi petunjuk bagi perumusan kegiatan pada level Renstra. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirinci pada tabel berikut :

Tabel 6. 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memperkuat kelembagaan kerukunan umat beragama
			Penguatan anti radikalisme
			Penguatan wawasan kebangsaan
			Peningkatan nilai religiusitas
			Peningkatan pencegahan gangguan ketahanan sosial
	Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan penegakan Perda	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan	Peningkatan pelestarian nilai budaya	Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
	Kelestarian Cagar Budaya	Peningkatan pelestarian cagar budaya	Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak	Menurunnya kesenjangan gender	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
			Peningkatan kapasitas perempuan
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
		Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
		Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya derajat kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Peningkatan tata kelola pendidikan	Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
			Optimalisasi pengelolaan data
		Peningkatan kualitas pendidikan	Penanaman nilai kebhinneka tunggal ikaan, religiusitas dan nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP
			Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
			Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
			Fasilitasi peningkatan kualitas siswa
			Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
		Peningkatan akses pendidikan	Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
			Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan
			Peningkatan sekolah inklusif
			Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
			Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan
			peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan
			peningkatan kunjungan K1 dan K4
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita	Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
			Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
			Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
			peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang
		Peningkatan penanganan stunting	Pemenuhan gizi ibu hamil
			Peningkatan gizi balita
		Peningkatan pelayanan kesehatan	Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan
			Peningkatan sistem pelayanan rujukan
			Pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit
			Peningkatan layanan kegawatdaruratan

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
			Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
			Pengembangan layanan *home care*
		Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan pengetahuan tentang PHBS
	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Pengembangan organisasi kepemudaan	Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
			peningkatan fasilitasi organisasi kepemudaan
			Peningkatan minat pemuda terhadap organisasi
		Peningkatan prestasi olahraga	Pembinaan klub olahraga
			Pembinaan atlet
			peningkatan promosi olahraga
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga
			Pemerataan akses fasilitas olahraga
		Peningkatan olahraga rekreasi	Peningkatan fasilitasi olahraga rekreasi
		Peningkatan akses olahraga bagi penyandang disabilitas	Peningkatan fasilitasi olahraga disabilitas
	Menigkatnya pengendalian penduduk	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera	Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
			Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
			Peningkatan kerjasama antar *Stakeholders* dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)
			Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Peningkatan kegemaran membaca dan literasi	Perumusan dan implemetasi regulasi daerah bidang Perpustakaan
			Peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
			Pengembangan taman baca masyarakat (TBM)
			Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital
			Peningkatan koleksi buku perpustakaan
Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin.
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan
			Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan validasi data PMKS
		Peningkatan manajemen pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
			Peningkatan kapasitas PSKS
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja
			Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
		Peningkatan penyelesaian konflik industrial	Optimalisasi mediasi konflik industrial

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	Optimalisasi identifikasi potensi investasi
			Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi
			Peningkatan promosi investasi
			Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran	Optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital
			Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana berbasis digital
			Optimalisasi pengawasan perdagangan
			Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan pemasaran hasil industri
			Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor
		Peningkatan Perencanaan dan Fasilitasi Kegiatan Industri	Pemantapan perencanaan industri/ Inisiasi Rencana Pembangunan Industri (RIP) Kota
			Peningkatan pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi pariwisata	Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada
			Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baru
		Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata
		Pemasaran pariwisata baru	Pemasaran pariwisata berbasis digital

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
		Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru
			Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan
	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Pengembangan Usaha Mikro	Optimalisasi pengembangan Usaha Mikro
			Inisiasi pemasaran Usaha Mikro berbasis digital
		Pengembangan koperasi	Optimalisasi pengembangan koperasi
	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
			Peningkatan pengendalian OPT
			Peningkatan ketersediaan sarana pertanian
			Peningkatan kapasitas SDM petani
			Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis
			Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan secara digital
		Peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan	Peningkatan produksi hasil ternak
			Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak
			Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
			Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak
		Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
			Peningkatan pemenuhan benih ikan
Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya
			Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jembatan
			Optimalisasi pemeliharaan jembatan
			Optimalisasi rehabilitasi jembatan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengaturan debet air untuk mencegah banjir
	Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
		Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah
			Pengembangan layananan uji KIR berbasis IT
			Optimalisasi pengelolaan parkir
			Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
			Penertiban pelanggaran lalu lintas

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya akses rumah layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak
			Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh
			Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
			Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan
			Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan
			Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase perkotaan
			Pengembangan sistem drainase perkotaan dan pengaturan debet air untuk pencegahan banjir
			Normalisasi fungsi sungai dan pengendalian banjir
		Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
		Peningkatan akses air minum	optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Peningkatan ketersediaan dan	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
		kualitas bangunan gedung	Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota
		Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
			Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi
		Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang dan perwujudan pola ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
			Peningkatan ketersedian dokumen perencanaan tata ruang
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
		Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan	Fasilitasi sengkata tanah garapan
			Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset pemerintah kota
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Peningkatan pengendalian pencemaran air	Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
			Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Peningkatan pembinaan pelaku usaha tentang lingkungan hidup
			Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
	Meningkatnya kualitas udara	Optimalisasi pengendalian pencemaran udara	Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca
			Optimalisasi penggunaan energi alternatif
			Optimalisasi pemantauan kualitas udara
	Meningkatnya kualitas lahan	Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Optimalisasi pengelolaan sampah	Optimalisasi layanan sampah perkotaan
			Peningkatan pengelolaan sampah 3R
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan khususnya mengupayakan terwujudnya TPA Regional
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
			Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
		Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
			Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan kelurahan tangguh bencana
			Optimalisasi koordinasi penanganan bencana
			Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan personil PMK yang bersertifikat
			Peningkatan sarana pemadam kebakaran
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan daerah
			Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah
		Peningkatan kualitas pengendaliaan dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan integrasi sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
			Peningkatan kualitas data dalam mendukung kinerja perencanaan
		Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan PD dalam implementasi SAKIP
			Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan
			Peningkatan validasi data pembangunan daerah
		Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan peta kebijakan daerah
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
			Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
			Peningkatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
			Peningkatan verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial
		Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah daerah	Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan daerah
			peningkatan pengelolaan perencanaan keuangan daerah
			Peningkatan penyusunan keuangan daerah sesuai standar
		Peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
			Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
			Peningkatan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah
			Peningkatan tertib pencatatan jumlah dan nilai inventaris barang milik daerah sesuai regulasi
		Peningkatan kualitas pengawasan daerah	Penguatan sistem pengendalian internal
			Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
			Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
		Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan identifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah
			Peningkatan koordinasi dengan PD penghasil retribusi
			Peningkatan pengelolaan piutang daerah

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
			Penguatan data wajib pajak dan retribusi secara akurat
			Pemberian insentif pajak daerah
			Peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak secara online
		Peningkatan transparansi dan kinerja keuangan daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah
			Penguatan keterbukaan sistem pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan
			Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
		Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilyahan
			Peningkatan pengendaliaan pelayanan publik
			Koordinasi dan faslitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta protokolal
		Peningkatan kualitas sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan
			Peningkatan kualitas data kependudukan
			Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan adminisrasi kependudukan
			Peningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil
		Peningkatan sinkronisasi layanan DPRD	Fasilitasi agenda pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dokumen perencanaan DPRD
	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan	Penguatan tata kelola SPBE	Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK
			peningkatan integrasi aplikasi layanan publik

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
	Berbasis Elektronik	Peningkatan keamanan informasi	Peningkatan peran dan kapasitas Gov-CSIRT
			Penyusunan regulasi dan pedoman teknis terkait keamanan informasi
		Peningkatan sistem keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas sistem layanan pemerintahan dan layanan publik
			Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi publik
			Peningkatan pelayanani data pembangunan daerah melalui e-governance
		Peningkatan pemanfaatan data statistik daerah	Peningkatan integrasi satu data dengan aplikasi lainnya
			Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Peningkatan kualitas sistem manajemen kepegawaian	Penguatan sistem rekrutmen pegawai berbasis kebutuhan
			Penempatan jabatan pegawai berbasis sistem merit
			Peningkatan kualitas data kepegawaian daerah
			Peningkatan sistem kinerja ASN
		Peningkatan kapasitas ASN	penyusunan data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan struktural dan pelaksana
			Analisis kesenjangan kompetensi ASN
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK
			Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan

Tabel di atas menjabarkan secara rinci turunan dari setiap misi ke dalam tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan. Strategi disusun dalam rangka menyelesaikan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan penjabaran yang dihasilkan dari setiap strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Rumusan arah kebijakan dalam beberapa hal sangat mikro dan spesifik menjadi kewenangan Perangkat Daerah tertentu. Pada saat yang sama, arah kebijakan tersebut juga menjadi petunjuk bagi perumusan program dan kegiatan pada level perangkat daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan tersebut sangat berbeda dengan arah kebijakan pembangunan pada sub bab berikut yang lebih berperan sebagai penjabaran tema pembangunan tahunan.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan merupakan tahapan menuju tercapainya visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kota Blitar sampai akhir periode perencanaan di tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan Tema Rencana Pembangunan Tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan ini diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Keselarasan arah kebijakan baik secara horizontal maupun secara vertikal akan menjamin keserasian dokumen perencanaan di Kota Blitar maupun dokumen perencanaan Kota Blitar dengan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, tahun 2022 adalah tahun peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi dengan tema: PEMENUHAN Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Keren, Sehat dan Berdaya Saing. Pemulihan ekonomi dimaksud adalah pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi. Sementara Pada saat yang sama, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu Penguatan Sumber daya Manusia untuk

mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan barang dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terdapat keselarasan yang kuat antara arah kebijakan pembangunan pembangunan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2023 adalah tahun Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan tema: PENINGKATAN Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Profesional Berbasis Teknologi Informasi. Normalisasi ekonomi daerah dimaksud adalah normalisasi ekonomi sebagai dampak pandemi. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023: Memantapkan Pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Pada tahun ini, arah kebijakan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur sama-sama menekankan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, tahun 2024 adalah tahun peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup dengan tema: PENINGKATAN DAN PEMERATAAN kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas Infrastruktur yang Berkualitas Serta Tata Ruang Yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan Hidup Dan Berkeadilan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun ini menekankan pada tidak hanya peningkatan tapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025 adalah tahun penguatan ekonomi dengan tema: PEMANTAPAN kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan Yang Berbasis Digital menuju kemandirian ekonomi daerah. Ruh dari penguatan ekonomi yang ditargetkan pada tahun 2025 adalah ekonomi kreatif dan berbasis digital. Target ini sangat krusial untuk dijadikan sebagai

momentum untuk mendorong digitalisasi dari sisi ekonomi dan menumbuhkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang khas dengan masyarakat perkotaan. Pada tahun ini, kesejahteraan masyarakat sudah ditargetkan pada titik kemantapan yang bermakna terpenuhinya seluruh aspek kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan komprehensif.

Terakhir, tahun 2026 adalah tahun pencapaian visi pembangunan dengan tema : PENGUATAN kesejahteraan masyarat melalui Tata Kehidupan Yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, Berkepribadian Dalam Kebudayaan, dan Tangguh Bencana menuju Terwujudnya Kota Blitar Yang Keren, Unggul, Makmur Dan Bermartabat. Ini merupakan target akhir periode perencanaan pembangunan yang menekankan tidak hanya pencapaian kesejahteraan tapi juga perbaikan tata kehidupan yang lebih religius dan nasionalis. Akhir dari periode perencanaan Kota Blitar di arahkan bukan lagi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan berbagai aspek pendukung seperti infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, tapi sudah diarahkan pada cita-cita perubahan tatanan kehidupan yang menganut dan nilai-nilai religiusitas, demokrasi, dan kesetaraan. Secara ringkas, arah kebijakan tahunan Kota Blitar dapat dilihat dalam bentuk milestone pada diagram berikut :

Tema Pembangunan Tahunan RPJMD Kota Blitar



Gambar 6. 1. Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kota Blitar 2021-2026

6.3. Program Pembangunan Daerah

Sesuai dengan ketentuan dalam penyajian Dokumen RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka Bab VI juga meliputi program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan merupakan program yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Pada satu sisi, Program Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang dipilih karena memiliki keterhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Pada sisi yang lain, Program Pembangunan Daerah ini juga dapat dimaknai sebagai program yang menjadi prioritas daerah yang nantinya sekaligus akan menjadi program perangkat daerah. Tabel berikut merinci seluruh program pembangunan daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran RPJMD.

Tabel 6. 4. Program Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan																			
Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis		**Indikator Tujuan:** Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			Indeks	86,31	83,25		83,5		83,75		84		84,25		84,25		
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			indeks	84,38	83,6		83,7		83,85		84		84,25		84,25		
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase penyelesaian Konflik Keagamaan	Persen	NA	100	623.972.900	100	655.171.545	100	687.930.122	100	722.326.628	100	758.442.960	100	3.447.844.155	
				Persentase kampung berkarakter Pancasila	Persen	NA	9,5		9,5		9,5		14,3		14,3		57,1		
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan	persen	100	100	8.575.519.600	100	9.972.553.403	100	10.072.278.937	100	10.173.001.726	100	10.274.731.743	100	49.068.085.409	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				yang ditindaklanjuti															
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	Persen	100	100	164.530.500	100	172.757.025	100	181.394.876	100	190.464.620	100	199.987.851	100	909.134.872	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	persen	NA	65	132.617.500	68	173.250.000	72	181.912.500	75	191.008.125	80	200.558.531	80	879.346.656	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	NA	100	747.232.075	100	784.593.679	100	25.781.888.893	100	862.917.807	100	906.063.698	100	29.082.696.152	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda			persen	1,97	2,01		3,87		5,92		8,06		10,41		10,41		
			Program Peningkatan Ketenteraman	Persentase gangguan trantibum	Persen	93,13	94,38	10,703.204.950	95.64	10.584.907.523	96,89	12.497.491.808	98,14	11.184.402.742	99,39	11.312.424.970	99,39	56.282.431.993	Satuan Polisi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			dan Ketertiban Umum	yang diselesaikan															Pamong Praja
				Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	persen	92,41	93,74		95,06		96,39		97,71		99,04		99,04		
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal			persen	0,50	0,99		1,49		1,98		2,48		2,97		2,97		
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	persen	50	60	868.171.300	75	911.579.865	85	957.158.858	100	1.005.016.801	100	1.055.267.641	100	4.797.194.465	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak		**Indikator Tujuan:** Indeks Pembangunan Gender (IPG)			indeks	97,6	97,6		97,7		97,8		97,9		98		98		
	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			indeks	67,66	67,8		67,87		67,94		68		68,07		68,07		
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	persen	100	100	869.774.900	100	969.128.540	100	1.016.548.692	100	1.067.376.129	100	1.120.744.940	100	5.043.573.201	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindun

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	persen	45,32	45		46		47		45		48		48		gan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis	persen	332	332		342		347		357		367		367		
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	persen	100	100	319.211.860	100	326.176.198	100	333.488.753	100	341.166.936	100	349.229.926	100	1.669.273.673	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	persen	100	100	313.266.460	100	319.503.465	100	326.052.320	100	332.928.618	100	340.148.731	100	1.631.899.594	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			Berencana
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter																			
Meningkatnya derajat kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		**Indikator Tujuan:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			indeks	78, 57	79,084		79,598		80,112		80,626		81,14		81,14		
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan			indeks	0,73	0,73		0,73		0,735		0,735		0,74		0,74		
			Program pengelolaan pendidikan																Dinas Pendidikan
				Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	persen	33,05	33,43	62.143.217.396	33,46	89.312.524.331	33,49	93.778.150.547	33,52	98.467.058.075	33,55	103.390.410.978	33,55	447.721.976.627	
				Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akredetasi SD/MI)	persen	95,83	95,84		95,85		95,86		95,87		95,88		95,88		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	persen	84,62	84,62		84,62		84,62		84,62		92,31		92,31		
				Persentase Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assesment	persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti korupsi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)			Tahun	73,75	73,95		74,00		74,10		74,20		74,30		74,30		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	masyarakat																		
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat																Dinas Kesehatan
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	89,94	100	59.184.694.886	100	93.534.320.036	100	84.177.867.580	100	78.120.522.785	100	81.049.825.928	100	396.067.231.215	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	persen	94,73	100		100		100		100		100		100		
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	persen	95,17	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	persen	53,17	100		100		100		100		100		100		
				Prevalensi Balita Wasting (Balita kurus dan sangat kurus)	persen	NA	10		9		9		8		8		8		
				Persentase capaian pelayanan anak usia pendidikan dasar, remaja dan lansia yang terlayani yang tercapai (SPM, PKP)	persen	33,33	66,67		66,67		100		100		100		100		
				Presentase Standar pelayanan minimal pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa Yang tercapai (SPM)	persen	40	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	persen	95	100		100		100		100		100		100		
				Persentase kelurana UCI (Universal Child Imunization)	persen	95,2	95,2		95,2		95,2		95,2		100		100		
				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang terlayani	persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase indikator penyehatan lingkungan yang tercapai	persen	50	66,67		83,3		83,3		83,3		83,3		83,3		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	persen	80	100		100		100		100		100		100		
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	persen	79,63	80,15	16.848.342.000	80,25	16.864.960.112	80,35	21.618.100.000	80,50	21.737.250.000	80,65	21.955.320.000	80,65	99.023.972.112	RSUD Mardi Waluyo
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman																Dinas Kesehatan
				Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	100	100	408.239.300	100	429.948.900	100	439.997.300	100	456.124.200	100	457.261.600	100	2.191.571.300	
				Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	persen	76,8	83		85		87		88		90		90		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	Persen	55,28	57,14	4.565.408.700	61,9	2.603.635.000	76,19	2.905.635.000	76,19	2.931.671.350	85,71	2.957.968.100	85,71	15.964.318.150	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah																		
		Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah			persen	NA	0,89		0,74		0,88		0,87		0,87		4,25		
		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional			persen	NA	12,79		10,68		2,91		3,95		1,09		31,42		
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan																Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase partisipasi pemuda dalam	persen	NA	80	722.288.000	80	1.215.000.000	83	1.360.000.000	83	1.265.000.000	90	1.450.000.000	90	6.012.288.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan															
				Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	persen	NA	6		6		7		7		7		7			
			Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan																Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	NA	40	10.43 1.337. 200	41	15.57 5.000. 000	41	20.07 5.000. 000	42	15.07 5.000. 000	43	18.57 5.000. 000	43	79.731. 337.20 0	
				Cakupan pelatih yang tersertifikasi	Persen	NA	68		69		70		70		71		71		
				Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	Persen	NA	63		67		70		73		77		77		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Menigkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk			persen	0,67	0,67		0,67		0,67		0,65		0,65		0,65		
			Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)																Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Persentase peserta KB aktif	Persen	74,31	74,32	2.990.029.900	74,35	3.139.531.395	74,4	3.296.507.965	74,46	3.461.333.363	74,67	3.634.400.031	74,67	16.521.802.654	
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)		9,09	9,01		8,98		8,55		8,25		8,01		8,01		
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat			Angka	NA	47		48		48,5		49		49,5		49,5		
			Program pembinaan perpustakaan																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	80,02	81,2	749.962.900	81,5	925.770.769	82	1.081.622.166	82,5	1.181.122.002	83	1.286.315.318	83	5.224.793.155	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	3 : 1	3,2 : 1		3,3 : 1		3,4 : 1		3,5 : 1		3,6 : 1		3,6 : 1		
Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital																			
Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat																			
		Indikator Tujuan : Angka Kemiskinan			persen	7,78	7,26		7,21		7,16		7,11		7,06		7,06		
	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan			indeks	0,22	0,25		0,24		0,23		0,22		0,21		0,21		
			Program Perlindungan dan jaminan sosial																Dinas Sosial
				Persentase peningkatan PMKS terlatih	Persen	28,79	32	18.792.409.200	24,2	19.750.900.365	19,5	20.738.445.383	16,3	21.775.367.652	14,04	21.772.466.899	160	102.829.589.499	
				Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh	persen	2,35	1,36		1,38		1,4		1,42		1,44		6,81		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				bantuan sosial															
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan			Skor	73,38	74,18		74,68		75,18		75,68		76,18		76,18		
			Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Angka konsumsi energi per kapita	Angka	2225	1971	174.387.060	2010	183.106.413	2051	192.261.734	2092	201.874.820	2133,34	211.968.561	2133,34	963.598.588	
				Angka ketersediaan energi perkapita/hari	Angka		2200		2200		2200		2200		2200		2200		
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	persen	12,12	13,1	68.000.000	13,8	71.400.000	14,5	74.970.000	15,2	78.718.500	16,00	82.654.425	16,00	375.742.925	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Indikator Tujuan : Indeks Gini			indeks	0,344	0,345		0,344		0,343		0,342		0,341		0,341		
	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase PMKS			Persen	7,71	7,48		7,37		7,26		7,15		7,04		7,04		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	masyarakat																		
			Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	persen	13,59	2,57	842.164.100	0,89	884.272.305	0,89	928.485.920	0,88	974.910.216	0,87	1.023.655.727	19,69	4.653.488.269	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	persen	100	100	1.227.630.700	100	1.341.512.235	100	1.408.587.847	100	1.479.017.239	100	1.552.968.101	100	7.059.716.122	Dinas Sosial
		Indikator Tujuan : Tingkat Penganggur an Terbuka (TPT)			Persen	6,68	5,90		5,55		5,22		4,90		4,61		4,61		
	Menurunnya tingkat penganggguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			persen	69,53	70,00		70,50		71,00		71,50		72,00		72,00		
			Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Persen	47,7	46	809.381.850	47	792.791.000	48	832.431.000	49	874.053.000	50	917.756.000	50	4.226.412.850	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Penempatan tenaga kerja																Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	82,98	77	92.963.100	79	1.285.461.500	81	1.349.485.000	82	1.418.728.000	83	1.460.115.000	83	5.606.752.600	
				Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	persen	0	12		14		16		18		20		20		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		**Indikator Tujuan :** Laju Pertumbuhan Ekonomi			persen	-2,28	2,50		3,00		3,50		4,50		5,50		5,50		
	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah			persen	-37,15	0,30		0,36		0,42		0,47		0,53		2,08		
			Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	40	45	63.999.850	50	352.000.000	55	369.600.000	60	388.081.000	65	407.484.000	65	1.581.164.850	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Program Pelayanan penanaman modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	persen	99,4	99,5	249.973.347	99,5	679,543,000	99,6	693,132,000	99,6	706,993,000	99,7	721,134,000	99,7	3.050.775.347	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Meningkatnya pertumbuhan																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian																		
		Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB			persen	23,55	24,70		24,75		24,80		24,85		24,90		24,90		
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB			persen	9,75	9,75		9,79		9,83		9,83		9,91		9,91		
			Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan																Dinas Perindustrian dan perdagangan
				Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	persen	66,0	69	5.863.964.550	70,5	38.267.316.800	72	32.656.432.000	73,50	32.716.888.000	75,0	6.146.480.300	75,0	115.651.081.650	
				Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas	persen	4,40	4,75		5,00		5,25		5,5		6,0		6,0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan IKM	persen	1,25	2,00	2,034.872.780	2,50	2.200.000.000	3,50	2.310.000.000	5,00	2.430.225.000	6,00	2.551.736.250	6,00	11.526.834.030	Dinas Perindustrian dan perdagangan
	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif																		
		Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			persen	-9,29	0,75		1,0		1,25		1,50		1,75		1,75		
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif			persen	4,0	1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		1,9		
			Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata																Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase peningkatan sarana dan	persen	4 unit	25	1.389.400.900	25	1.458.870.940	50	1.531.814.490	50	1.608.405.210	50	1.688.825.470	50	7.677.317.010	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				prasarana obyek pariwisata															
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno	persen	3 unit	30		30		30		65		65		65		
				Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	persen	NA	50		50		50		50		50		50		
				Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata	persen	23 usaha	20		20		20		20		20		20		
			Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	persen	NA	3,0	91.169.500	3,3	95.727.975	3,9	100.514.374	4,2	105.540.092	4,5	110.817.097	4,5	503.769.038	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Meningkatnya nilai tambah bruto koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekono	Persentase Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro			persen	2,02	2,05		2,1		2,15		2,2		2,25		2,25		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	mian daerah																		
			Program Pengembangan UMKM	Persentase wirausaha baru yang berhasil dikembangkan	Persen	1,50	1,60	238.812.400	1,70	600,000,000	1,80	700,000,000	1,90	750.000.000	2,00	750,000,000	2,00	3.038.812.400	Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)																Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja
				Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	persen	1,72	1,80	484.329.800	1,85	500.000.000	1,90	550.000.000	1,95	600.000.000	2,00	650.000.000	2,00	2.784.329.800	
				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	persen	2,00	2,20		2,30		2,40		2,50		2,60		2,60		
			Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan	persen	30,00	32,00	213.180.600	34,00	500,000,000.00	36,00	550,000,000.00	38,00	600,000,000.00	40,00	650,000,000.00	40,00	2.513.180.600	Dinas Koperasi Usaha kecil Menenga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				volume usaha															h dan Tenaga Kerja
	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Angka (dalam miliar)	195,65	196,82		197,81		198,80		199,79		200,79		200,79		
			Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	persen	49,88	50,88	2.512.081.200	51,39	2.637.685.260	51,9	2.497.913.523	52,42	2.622.809.199	52,94	2.753.949.659	52,94	13.024.438.841	
				Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	persen	100	100		100		100		100		100		100		
			Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	persen	32	36	280.863.022	40	294.906.173	44	309.651.482	48	325.134.056	52	341.390.759	52	1.551.945.492	
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	persen	22,22	38,89		44,44		55,56		61,11		72,22		72,22		
				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	persen	100	100		100		100		100		100		100		
			Program Perizinan usaha pertanian																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	persen	30,77	35,38	51.191.500	40,00	53.751.075	44,62	56.438.629	49,23	59.260.560	53,85	62.223.588	53,85	282.865.352	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Pengelolaan perikanan budidaya																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	persen	NA	1,59	320.045.590	2,92	336.047.870	4,24	352.850.263	5,57	370.492.776	6,9	389.017.415	6,9	1.768.453.714	
				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	persen	13,67	14,35		15,07		15,07		15,82		15,82		15,82		
Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan																			
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		**Indikator Tujuan :** Indeks Infrastruktur Daerah			indeks	58,07	58,27		58,37		58,47		58,57		58,67		58,67		
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum			indeks	85,47	86,36		86,77		87,18		87,59		88,00		88,00		
			Program Penyelenggaraan Jalan																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase jalan dalam kondisi baik	persen	98,15	99,20	8.136.773.062	99,40	8.488.984.000	99,60	8.913.435.000	99,80	9.359.106.000	100,00	9.827.062.000	100	44.725.360.062	
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	99,32	99,6		99,7		99,8		99,9		100		100		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	94,80	96	10.826.688.339	97	12.998.622.000	98	13.648.553.000	99	14.330.981.000	100	15.047.530.000	100	66.852.374.339	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	persen	66,67	83,33	7.004.439.588	87,50	7.367.100.000	91,67	7.549.955.000	95,83	7.846.750.000	100	8.158.417.500	100	37.926.662.088	
				Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	persen	78,26	82,61		86,96		91,30		95,65		100,00		100,00		
	Meningkatnya kualitas perhubungan	*Level of Service*			Level	B (Ruas Jalan R.A. Kartini) C (Ruas Jalan Dr. Wahidin)	C		C		B		B		B		B		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																Dinas Perhubungan
				Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	persen	84,00	85,00	18.457.749.439	87,00	19.430.000.000	89,00	22.000.000.000	90,00	22.500.000.000	91,00	23.000.000.000	91,00	105.387.749.439	
				Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	persen	99,35	99,45		99,5		99,55		99,6		99,7		99,7		
				IKM layanan angkutan sekolah gratis	Nilai	NA	baik (82.60)		baik (83.15)		baik (83.90)		baik (84.75)		baik (85.50)		baik (85.50)		
				IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Nilai	baik (79.50)	baik (81.00)		baik (81.75)		baik (82.45)		baik (82.90)		baik (83.50)		baik (83.50)		
				IKM terhadap pelayanan parker tepi jalan umum	Nilai	baik (80.72)	baik (81.60)		baik (82.10)		baik (82.75)		baik (83.25)		baik (83.80)		baik (83.80)		
				Persentase penurunan pelanggaran marka dan	persen	0,35	0,33		0,32		0,31		0,3		0,29		0,29		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				rambu ralu lintas															
Meningkatnya kelayakhunian		**Indikator Tujuan:** Rasio permukiman layak huni			Angka	0,93	0,95		0,96		0,97		0,98		0,99		0,99		
	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni			Rasio	0,250	0,248		0,250		0,251		0,253		0,255		0,255		
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Persen	4,8	17,2	2.165.755.400	20,11	2.589.043.170	20,11	2.718.495.400	20,11	2.854.420.170	22,40	3.249.141.200	99,93	13.576.855.340	
				Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasi	persen	0	1,03		1,03		1,03		1,03		1,03		1,03		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				lan Rendah (MBR)															
			Program Pengembangan Perumahan																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	persen	100	100	3.306.078.420	100	2.807.932.300	100	2.562.946.300	100	2.641.293.725	100	2.723.358.875	100	14.041.609.620	
				Persentase tingkat hunian Rusunawa	persen	100	95		95,		95		95		95,		95		
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman																		
		Persentase perumahan dan kawasan permukima			persen	63,30	70,74		74,47		78,19		81,91		85,64		85,64		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		n dengan PSU layak																	
		Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan			Persen	95,14	96		97		98		99		100		100		
		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan			Persen	89,37	92		94		96		98		100		100		
			Program Kawasan Permukiman																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	persen	62,65	65,90	11.705.181.880	67,52	12.290.441.150	69,15	12.904.963.500	70,77	13.550.211.714	72	14.227.722.435	72	64.678.520.679	
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	persen	56,88	63,10		66,27		69,40		72,53		75,66		75,66		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	persen	9,8	12,22		12,65		13,09		13,53		13,96		65,45		
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiilitas Umum (PSU)																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	persen	59	62	1.576.467.980	64	1.855.316.400	66	1.948.082.300	68	2.054.486.465	70	2.157.210.798	70	9.591.563.943	
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	persen	59	62		64		66		68		70		70		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	persen	97,49	98,00	2.968.788.068	98,50	3.773.741.000	99,00	3.962.428.000	99,50	4.160.550.000	100,00	4.368.577.000	100,00	19.234.084.068	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan	Persentase Sistem Pengelolaan	persen	80	82	1.204.155.500	83	1.353.671.000	84	1.421.354.000	85	1.492.422.000	86	3.074.535.470,97	86	8.546.137.971	Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengembangan Sistem Air Limbah	Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik															dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	Persen	88,6	88,8	1.029.807.000	88,9	1.216.527.000	90	1.277.355.000	90,1	1.341.223.000	90,2	1.408284.000	90,2	6.273.196.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang			persen	95,30	95,35		95,40		95,45		95,50		95,55		95,55		
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	persen	57,89	76,32	912.687.140	81,58	1.430.000.000	86,84	685.000.000	94,75	945.000.000	100,00	750.000.000	100,00	4.722.687.140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		**Indikator Tujuan :** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	66.52	68.86		70.03		71.20		72.37		73.54		73.54		
	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air			indeks	56,32	59,92		61,72		63,52		65,32		67.12		67,12		
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Persentase titik sampling badan air yang	persen	52.63	54	416.953.120	55	416.953.120	56	1.289.000.000	57	1.289.000.000	58	1.310.000.000	58	4.721.906.240	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Lingkungan Hidup	memenuhi baku mutu															
			Program Pembinaan an Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	persen	64,00	64,00	143.567.900	64,00	143.567.900	65,00	210.854.400	65,00	210.854.400	65,00	331.854.400	65,00	1.040.699.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara			indeks	82,63	84,53		85,48		86,43		87,38		87,40		87,40		
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	Persen	2,19	6,37	1.336.978.647	7,0	1.357.978.647	8,95	2.519.400.000	11,69	2.577.400.000	15,15	2.619.400.000	15,15	10.411.157.294	
				Persentase titik sampling udara ambien yang	persen	100	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				memenuhi baku mutu															
	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan			indeks	54,23	55,23		55,73		56,23		56,73		56,78		56,78		
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Persen	16,270	16,272	5.441.447.600	16,273	9.289.000.000	16,274	9.789.000.000	16,275	9.789.000.000	16,276	4.789.000.000	16,276	39.097.447.600	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3																		
		Persentase capaian layanan persampahan			persen	92,10	93,00		94,00		95,00		96,00		98,00		98,00		
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3			persen	67,00	67,00		72,00		72,00		75,00		75,00		75,00		
			Program Pengelolaan Persampahan																Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase sampah tertangani	persen	82,88	83,00	16.269.473.260	83,11	22.900.000.000	83,15	19.710.598.000	83,16	19.710.598.000	83,18	19.710.598.000	83,18	98.301.267.260	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	persen	9,62	11,00		11,89		12,85		14,84		14,82		14,82		
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	persen	100	100	20.689.100	100	30999,100	100	40999,100	100	50999.100	100	50.999.100	100	194.685.500	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kapasitas ketanggu han terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			indeks	0,51	0,56		0,58		0,60		0,62		0,65		0,65		
			Program Penanggulangan bencana																Badan Penanggulangan bencana Daerah
				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Persen	NA	40	1.153.077.430	50	1.289.481.301	60	1.353.955.366	70	1.421.653.134	80	1.492.735.791	80	6.710.903.022	
				Persentase SDM penanganan bencana	persen	NA	91		92		93		94		95		95		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				yang terlatih															
				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Jumlah	1	1		2		2		3		3		3		
				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	persen	NA	100		100		100		100		100		100		
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi																			
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi		**Indikator Tujuan :** Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	67,17 (B)	67,67 (B)		68,17 (B)		68,67 (B)		69,17 (B)		69,67(B)		69,67(B)		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Nilai SAKIP			Nilai	72,06 (BB)	72,15 (BB)		72,20 (BB)		72,25 (BB)		72,30 (BB)		72,35 (BB)		72,35 (BB)		
		Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan			Angka	25,47	25,49		25,51		25,53		23,55		25,57		25,57		
		Status EKPPD			Status	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3531)		Sangat Tinggi (3,3532)		Sangat Tinggi (3,3534)		Sangat Tinggi (3,3536)		Sangat Tinggi (3,3538)		Sangat Tinggi (3,3538)		
			Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	Persen	95,52	95.54	868.070.000	95.55	878.157.327	95.56	886.938.900	95.57	895.808.289	95.58	904.766.372	95.58	4.433.740.888	
				Persentase Capaian Sasaran RPJMD	persen	90.97	90.99		91		91.1		91.2		91.3		91.3		
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat																Sekretariat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang	persen	100	100	2.407.306.950	10	2.435.669.742	100	2.460.026.439	100	2.484.626.704	100	2.509.472.972	100	12.297.102.807	Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				ditindaklanjuti															
				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah daerah	Opini BPK atas LKPD			Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Pengelolaan keuangan daerah																Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	Persen	100	100	9.672.601.600	100	9.591.015.921	100	9.616.817.100	100	9.642.993.500	100	9.783567.250	100	48.306.995.371	
				Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggaranny a di atas 85 %	persen		92		94		96		98		100		100		
			Program penyelenggaraan pengawasan																Inspektorat
				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	persen	66.67	72.5	2.510.677.900	75	2.951.768.400	80	3.100.457.000	82.5	3.255.558.600	85	3.425.334.000	85	15.243.795.900	
				Persentase TLHP internal	persen	66.67	72.5		75		80		82.5		85		85		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2															
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	persen	90.65	86		87		89		90		92.5		92.5		
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	persen	90.65	86		87		89		90		92.5		92.5		
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	persen	80	80		90		90		100		100		100		
			Program pengelolaan pendapatan daerah																Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	persen	30,45	30,45	2.838.995.150	31,45	2.864.354.910	32,45	2.892.898.429	34,45	2.858.928.573	35,45	2.887.517.892	35,45	14.342.694.954	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	persen	NA	30,45		31,45		32,45		34,45		35,45		35,45		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks	76,61 – 88,30 Baik	76,61 – 88,30 Baik		76,61 – 88,30 Baik		76,61 – 88,30 Baik		76,61 – 88,30 Baik		76,61 – 88,30 Baik		76,61 – 88,30 Baik		
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks		89		89		89		89		89		89		Kecamatan Sukorejo
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks		84		86		87		89		90		90		Kecamatan Sananwetan
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks		90		91		92		93		94		94		Kecamatan Kepanjenkidul
			Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																Kecamatan
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	NA	97	2.576.820.140	97	2.646.481.128	97	2.784.925.412	98	2.934.904.590	98	3.095.226.974	98	14.038.358.244	Kecamatan Sukorejo
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	NA	97	2.553.562.230	97	2.665.773.328	97	2.783.440.311	98	2.708.765.368	98	2.828.267.957	98	13.539.809.194	Kecamatan Sananwetan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	NA	97	2.845.452.567	97	2.987.725.195	97	3.137.111.455	98	3.293.967.028	98	3.458.665.379	98	15.722.921.624	Kecamatan Kepanjenkidul
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan																Kecamatan
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	13.254.476.700	100	12.959.557.825	100	12.963.596.122	100	13.186.811.170	100	13.301.579.702	100	65.666.021.519	Kecamatan Sukorejo
				Persentase RT berdaya	Persen	NA	75		75		75		75		75		75		Kecamatan Sukorejo
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	17.329.074.300	100	18.195.528.015	100	19.105.304.416	100	20.060.569.637	100	21.063.598.118	100	95.754.074.486	Kecamatan Sananwetan
				Persentase RT berdaya	Persen	NA	75		75		75		75		75		75		Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			Sananwetan
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	14.608.816.400	100	15.339.257.220	100	16.106.220.081	100	16.911.531.085	100	17.757.107.639	100	80.722.932.425	Kecamatan Kepanjenkidul
				Persentase RT berdaya	Persen	NA	75		75		75		75		75		75		Kecamatan Kepanjenkidul
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks	83,02	84		84,5		85		85,5		86		86		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program pendaftaran penduduk																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	persen	0.48	0.03	161.459.080	0.03	410.645.089	0.03	431.177.343	0.03	450.475.522	0.03	470.738.328	2,55	1.924.495.362	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	persen	-0.48	2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	persen	100	100		100		100		100		100		100		
			Program Pencatatan Sipil																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	Persen	2.34	2.19	316.943.000	2.19	403.092.700	2.19	356.698.980	2.19	619.708.920	2.19	438.748.101	2.19	2.135.191.701	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	persen	3.36	2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		
				Persentase penerbitan dokumen akta kematian	persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	persen	1.77	0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Indeks	2,88	2,31		2,63		2,95		3,20		3,45		3,45		
			Program aplikasi informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen	45.69	86.35	7.213.911.948	90,00	8.058.813.219	92,89	8.288.199.022	95,00	8.759.134.892	100	9.290.512.776	100	41.610.571.857	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program informasi dan komunikasi publik																Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan	Persen	75	83	2.564.813.096	85	2.693.053.751	90	2.827.706.438	95	2.969.091.760	100	3.093.906.654	100	14.148.571.699	
				Persentase komunitas masyarakat /mitra	Persen	20	60		70		80		90		100		100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah															
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN			indeks	78.54	80.10		80.20		80.30		80.40		80.50		80.50		
			Program kepegawaian daerah																Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	persen	36.00	49.00	8.276.692.450	55.00	10.467.607.930	61.00	11.178.782.582	67.00	22.616.514.246	74.00	10.282.789.026	74.00	62.822.386.234	
				Persentase data kepegawaian yang valid	Persen	48.97	58.00		63.00		68.00		73.00		78.00		78.00		
				Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	persen	90.58	90.98		91.18		91.18		91.38		91.58		91.58		
				Persentase ASN yang memiliki nilai	persen	86.56	88.86		90.16		91.56		93.06		94.66		94.66		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				prestasi kinerja minimal 80															
				Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	persen	36.85	41.40		43.67		45.94		48.21		50.50		50.50		
				Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	persen	37.39	41.93		44.20		46.47		48.74		51.01		51.01		
	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan			indeks	NA	35		40		45		50		55		55		
			Program Pengelolaan arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Nilai	79.91	80,5	424.605.500	81	630.000.000	81,5	693.000.000	82	762.300.000	82,5	838.530.000	82,5	3.348.435.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah dan kontekstual berdasarkan perkembangan sosial yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan publik diharapkan semakin responsif dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan.

Tabel 6. 5. Sapta Program Prioritas/Program Unggulan Inovatif Kota Blitar 2021-2026

No	Sapta Program Prioritas	Konsep Operasional	Program Nomenklatur Perencanaan
1	Program Blitar Keren	• Program ini memuat program unggulan inovatif berupa: RT Keren dan Internet RT/RW • Konsep program adalah pembangunan partisipatif berbasis kewilayahan yang bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. • Setiap RT mendapat alokasi dana Rp 50 – 100 juta yang difokuskan untuk pembangunan fisik dan non fisik. • Warga di tingkat RT merumuskan kegiatan secara partisipatif, kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.	• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Program Blitar Melayani	• Program ini memuat program unggulan inovatif Blitar dalam Satu Genggaman, yaitu pelayanan publik terpadu dan terkoneksi lintas PD/instansi. • Blitar melayani berangkat dari konsep smart government and society untuk mewujudkan Blitar Smart City. Smart city yang dibangun melalui dua aspek yang saling berkolaborasi, yaitu tata kelola pemerintahan yang inovatif dan mengadopsi teknologi terpadu, serta masyarakat yang siap untuk bertransformasi menuju era digital. • Dalam konteks tata kelola pemerintahan, inovasi dan adopsi teknologi terpadu pada aspek pelayanan publik,	• Program Aplikasi Informatika

No	Sapta Program Prioritas	Konsep Operasional	Program Nomenklatur Perencanaan
		tata kelola birokrasi, dan pengambilan kebijakan. • Dalam konteks pembangunan smart society dimulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi secara merata mulai dari tingkat RT, yang disertai dengan penguatan budaya literasi masyarakat di tengah menguatnya keterbukaan informasi.	
3	Program Blitar Sehat	• Program ini memuat program unggulan inovatif Jebol Mas (Jemput Bola layanan masyarakat yang sakit) atau home care • Blitar Sehat sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui inovasi pelayanan yang diberikan kepada lansia, balita, ibu hamil, dan keadaan gawat darurat yang tidak mungkin hadir di fasilitas kesehatan. • Terdapat dokter jaga on call lengkap dengan tim dan peralatan medis yang berada di seluruh Puskesmas setiap hari selama 24 jam. • Program prioritas Blitar Sehat juga ditopang dengan program sambang sehat, fasilitasi kader posyandu, pembinaan pemuda serta olahraga prestasi dan olahraga masyarakat.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Program Blitar Cerdas	• Program ini memuat program unggulan inovatif Pemuda Keren Seminggu Bersama Pak Wali, yaitu pemuda berprestasi di Kota Blitar menjadi ajudan dan sekretaris pribadi Wali Kota/wakil wali kota/sekretaris daerah. Program unggulan inovatif ini juga bertujuan membangun ikatan sosial antara Wali Kota dengan pemuda jenjang SMA/SMK/MA yang tidak berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota. • Blitar Cerdas berupaya mempercepat peningkatan potensi SDM dalam rangka mewujudkan generasi muda unggul dan berkarakter Keren (kebhinekaan, religius, dan nasionalis) di Kota Blitar.	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Pembinaan Perpustakaan

No	Sapta Program Prioritas	Konsep Operasional	Program Nomenklatur Perencanaan
		• Blitar cerdas antara lain berupa pendidikan gratis yang bermutu dan berkualitas dengan ditunjang bantuan peralatan/sarana pendidikan, bantuan dan beasiswa bagi SMA sederajat dan mahasiswa, termasuk untuk mengakses perguruan tinggi, penguatan kegemaran membaca dan literasi melalui perpustakaan keliling dan pojok baca, serta fasilitasi pendidikan non formal.	
5	Program Blitar Makmur	• Program ini memuat program unggulan inovatif Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru dan Blitar Start-up Community • Satu Kelurahan, Dua Wirausaha Baru berupaya menciptakan dan menumbuhkan wirausaha dari setiap kelurahan yang dimulai dari perlombaan gagasan wirausaha inovatif kemudian difasilitasi hingga menjadi usaha yang berkembang. Program ini bertujuan semakin menumbuhkan industri kreatif dan kampung kreatif. • Blitar Start-up Community mengambil peran fasilitasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas start-up agar semakin tumbuh dan berkembang dalam penerapan inovasi dan teknologi informasi dalam menjalankan usaha, serta penguatan ruang dan akses e-commerce. • Blitar makmur secara umum semakin memperkuat citra Blitar sebagai kota jasa dan industri kreatif untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. • Selain melalui 2 program unggulan inovatif, Blitar Makmur juga ditopang fasilitasi bursa kerja online dan offline, kerjasama pengembangan inkubator bisnis, fasilitasi koperasi dan UM, revitalisasi pasar, gelaran even berstandar nasional, kemudahan izin berusaha, serta	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Peningkatan Daya Tarik Detinasi Pariwisata

No	Sapta Program Prioritas	Konsep Operasional	Program Nomenklatur Perencanaan
		menumbuhkan daya tarik dan destinasi wisata baru.	
6	Program Blitar Membangun dan Kondusif	• Pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan, antara lain melalui: revitalisasi Monumen PETA, diorama Istana Gebang, Taman Jingkrak, revitalisasi gedung layanan publik, peningkatan kualitas jalan dan saluran, pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana pemuda, jalur ramah pesepeda dan pejalan kaki, taman tematik, penataan estetika reklame modern, penataan TPU sebagai RTH, dan bedah rumah. • Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis kelurahan yang multifungsi, yakni selain memperindah wajah kota juga dapat menjadi taman bermain, sarana olahraga, dan ekspresi seni budaya. Pengembangan RTH dilengkapi dengan fasilitas wifi, perpustakaan, co-working space, dan display usaha lokal. • Sedangkan pada aspek sosial, program prioritas ini berupaya membangun kondusivitas Kota Blitar, yang antara lain melalui pemantapan kota tangguh bencana melalui pelatihan Tagana dan relawan sosial, peningkatan keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor, pembangunan inklusif melalui pemberdayaan perempuan, anak, PMKS dan penyandang disabilitas.	• Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pengelolaan Sumber Daya Air • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Penanggulangan Bencana • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak
7	Program Blitar Keberagaman	• Program ini memuat program unggulan inovatif yaitu Besek Berkah/Rantang Pedul Lansa berupa pemberian makan matang kepada warga miskin lansia, dan orang sakit, • Reward bagi Guru Ngaji, Pelaku Koperasi dan UM, Petani, Pedagang Pasar, Juru Parkir Berprestasi, Tukang Becak. Reward ini sebagai bentuk penghargaan atas	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Sapta Program Prioritas	Konsep Operasional	Program Nomenklatur Perencanaan
		berbagai profesi dan perannya dalam berpartisipasi aktif membangun Kota Blitar, baik melalui jalur edukasi, penguatan akhlak dan karakter masyarakat, dan menghidupkan perekonomian Kota Blitar. • Blitar dalam keberagaman berupaya mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya, agama, dan bertoleransi dalam keberagaman, atau membangun masyarakat Blitar Keren (Kebhinekaan, Religius, dan Nasionalis). • Kota Blitar dalam keberagaman juga ditopang melalui fasilitasi guru ngaji/kelas minggu, bantuan untuk pondok pesantren dan rumah ibadah, santunan anak yatim rutin, fasilitasi aliran kepercayaan, dn fasilitasi bagi penghafal Qur'an, serta pembangunan karakter Keren berbasis komunitas melalui penguatan Kelurahan berkarakter Pancasila.	

6.4. Integrasi Program Rekomendasi KLHS

Perumusan program pembangunan daerah dilakukan selain melalui berbagai pendekatan diantaranya pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*, juga memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dokumen perencanaan yang memperhatikan SDGs berupaya mengarahkan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Telaah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah dianalisis di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merumuskan beberapa rekomendasi program pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan di dalam dokumen RPJMD Kota Blitar 2021-2026. Berikut integrasi rekomendasi program KLHS dalam RPJMD Kota Blitar 2021-2026:

Tabel 6. 6. Integrasi Rekomendasi Program KLHS dalam RPJMDKota Blitar 2021-2026

REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KOTA BLITAR	SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026																																			
	Misi 1							Misi 2					Misi 3										Misi 4										Misi 5					
	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter					Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital										Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan										Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi					
	T1				T2			T1					T1					T2						T1				T2		T3				T1					
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum																											√											
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																											√											
Program Kawasan Permukiman																											√											
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																										√												
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																											√											
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																									√												

REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KOTA BLITAR	**SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026**																																							
	Misi 1							Misi 2					Misi 3										Misi 4										Misi 5									
	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter					Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital										Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan										Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi									
	T1				T2			T1					T1					T2					T1				T2		T3				T1									
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																				√																					
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif																				√																					
Program Pemasaran Pariwisata																				√																					
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																			√																						
Program Pengembangan Ekspor																			√																						
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)																					√																			
Program Pengembangan Umkm																					√																			

REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KOTA BLITAR	SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026																																							
	Misi 1							Misi 2					Misi 3										Misi 4										Misi 5							
	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter					Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital										Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan										Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi							
	T1				T2			T1					T1					T2						T1				T2		T3				T1							
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
Program Promosi Penanaman Modal																		√																						
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja															√		√																							
Program Pengelolaan Pendidikan								√																																
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									√																															
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial																																							
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																				√																				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																																			√					

REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KOTA BLITAR	SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026																																							
	Misi 1							Misi 2					Misi 3										Misi 4										Misi 5					
	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter					Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital										Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan										Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi					
	T1				T2			T1					T1					T2						T1				T2		T3				T1					
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Program Penempatan Tenaga Kerja																	√																						
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																								√															
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)																															√								
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																														√	√								
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																																							
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																																		√					

REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KOTA BLITAR	SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026																																					
	Misi 1							Misi 2					Misi 3										Misi 4										Misi 5					
	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter					Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital										Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan										Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi					
	T1				T2			T1					T1					T2						T1				T2		T3				T1					
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Program Penanggulangan Bencana														√																								
Program Pengembangan Perumahan																											√											
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			√																																			
Program Rehabilitasi Sosial													√																									
Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera											√																											
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	√																																				
Program Perindungan Perempuan						√																															

REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KOTA BLITAR	**SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026**																																							
	Misi 1							Misi 2					Misi 3												Misi 4												Misi 5					
	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter					Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital											Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan											Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi					
	T1				T2			T1					T1					T2						T1				T2		T3				T1					
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan																																							
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat																√																							
Program Penanganan Kerawanan Pangan																√																							
Program Pengawasan Keamanan Pangan																																							
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra																																							
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								√																															
Program Pendaftaran Penduduk																																				√			

REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KOTA BLITAR	**SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2021 -2026**																																							
	Misi 1							Misi 2					Misi 3										Misi 4										Misi 5							
	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan							Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter					Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital										Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan										Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi						
	T1				T2			T1					T1					T2						T1				T2		T3				T1						
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																																				√				
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																																				√				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah																																			√					
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																																		√						
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	√																																	√						
Program Informasi dan Komunikasi Publik																																					√			
Program Aplikasi Informatika																																					√			

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Blitar telah menghasilkan rekomendasi beberapa program yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kota Blitar. Adapun rekomendasi program KLHS terdiri dari 47 program. Dari seluruh rekomendasi program tersebut, secara nomenklatur terdapat 43 program yang sama dengan program RPJMD sebagaimana Tabel 6.6 yang bertanda (v). Sementara 4 program rekomendasi KLHS yang secara nomenklatur tidak sama dengan program RPJMD secara substansi telah diakomodir dalam RPJMD dengan nama program yang lain. Namun, ada dua program yang kurang kontekstual untuk dimasukkan dalam RPJMD yaitu program ketenagalistrikan dan program administrasi umum.

Tabel 6. 7. Rekomendasi Program KLHS yang secara substansi telah diakomodir dalam RPJMD

No	Program Rekomendasi KLHS	Program di RPJMD	Keterangan
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Kedua program memiliki kesamaan dalam upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengelolaan Sampah	Pengelolaan urusan persampahan sudah terakomodir dalam program pengelolaan sampah yang secara detail akan diturunkan dalam kegiatan dan sub kegitan
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan urusan pangan sudah terakomodir dalam program penanganan kerawanan pangan dan secara detail diturunkan dalam kegiatan dan sub kegiatan
4	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan kurikulum	Dalam program pengembangan kurikulum diarahkan pada muatan lokal yang salah satu fokusnya yaitu pengembangan bahasa



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai indikasi keseluruhan program Pemerintah Kota Blitar yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan yang memenuhi layanan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada Bab III (Tiga) RPJMD terutama berkaitan dengan kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				2022	2023	2024	2025	2026
1			2	3	4	5	6	7
			Kapasitas Riil Keuangan	612.590.118.652	621.756.421.946	631.142.163.516	640.723.794.100	653.723.246.229
5			**BELANJA**	**966.345.934.981**	**975.737.558.052**	**985.866.015.183**	**1.001.207.618.709**	**1.015.484.166.570**
5	01		**Belanja operasi**	**810.561.282.156**	**818.468.228.417**	**827.164.891.926**	**841.061.059.439**	**853.878.398.909**
5	01	01	Belanja pegawai	335.217.444.109	336.893.531.330	338.577.998.987	340.270.888.982	341.972.243.428
5	01	02	Belanja barang dan jasa	423.558.446.434	429.544.792.210	436.310.029.667	448.263.879.205	459.127.941.970
5	01	03	Belanja bunga	-	-	-	-	-
5	01	04	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
5	01	05	Belanja hibah	27.334.065.273	27.334.065.273	27.334.065.273	27.334.065.273	27.334.065.273
5	01	06	Belanja bantuan sosial	24.451.326.340	24.695.839.603	24.942.797.999	25.192.225.979	25.444.148.239
5	02		**Belanja modal**	**148.784.652.825**	**150.269.329.635**	**151.701.123.257**	**153.146.559.270**	**154.605.767.662**

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				2022	2023	2024	2025	2026
1			2	3	4	5	6	7
5	02	01	Belanja modal	148.784.652.825	150.269.329.635	151.701.123.257	153.146.559.270	154.605.767.662
5	03		**Belanja tidak terduga**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**
5	03	01	Belanja tidak terduga	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
5	04		Belanja transfer	-	-	-	-	-
5	04	01	Belanja bagi Hasil	-	-	-	-	-
5	04	02	Belanja bantuan Keuangan	-	-	-	-	-

Ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Blitar, Melainkan juga dari APBN, dari APBD Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah pada bagian ini hanya mencantumkan sumber pendanaan dari APBD Kota Blitar. Kerangka pendanaan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program atau pagu indikatifnya. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya menjadi acuan bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x			**Non Urusan**																
x	**xx**		**Non Urusan**																
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik	Baik (79-84)	522.157.387.898	Baik (79-84)	562.945.153.801	Baik (79-84)	562.001.354.642	Baik (79-84)	582.661.734.525	Baik (79-84)	605.829.181.733	Baik (79-84)	2.835.594.812.598	Seluruh Perangkat Daerah
				Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Persen	10,34	20,69		27,59		34,48		41,38		48,28		48,28		Sekretariat Daerah
				Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Persen	34,48	55,17		65,52		75,86		86,21		100		100		Sekretariat Daerah
1			**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																
1	1		**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	01	02	Program pengelolaan pendidikan																Dinas Pendidikan
				Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	Persen	33,05	33,43	62.143.217.396	33,46	89.312.524.331	33,49	93.778.150.547	33,52	98.467.058.075	33,55	103.390.410.978	33,55	447.091.361.327	
				Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	Persen	95,83	95,84		95,85		95,86		95,87		95,88		95,88		
				Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	Persen	84,62	84,62		84,62		84,62		84,62		92,31		92,31		
				Persentase Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assesment	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti korupsi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum																Dinas Pendidikan
				Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan	Persen	100	100	1.256.441.700	100	1.125.069.225	100	1.181.322.686	100	1.240.388.821	100	1.302.408.262	100	6.105.630.694	
				Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	Persen	NA	10		20		30		40		50		50		
1	01	04	Program pendidik dan Tenaga Kependidikan																Dinas Pendidikan
				Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	88,85	88,87	11.048.799.300	88,88	11.915.731.275	88,89	12.511.517.839	90,00	13.137093.731	90,50	13.793.948.417	90,50	62.407.090.562	
				Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	Persen	31,40	31,45		31,50		31,60		31,70		31,80		31,80		
1	01	05	Program pengendalian dan perizinan pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	Persen	76,74	76,77	44.980.300	76,80	47.229.315	76,83	49.590.781	76,86	52.070.320	76,89	54.673.835	76,89	248.544.551	Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1			**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																
1	**02**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat																Dinas Kesehatan
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	Persen	89,94	100	59.184.694.886	100	93.534.320.036	100	84.177.867.580	100	78.120.522.785	100	81.049.825.928	100	396.067.231.215	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	Persen	94,73	100		100		100		100		100		100		
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	Persen	95,17	100		100		100		100		100		100		
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	Persen	53,17	100		100		100		100		100		100		
				Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				gizi yang mendapatkan perawatan															
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	35,63	100		100		100		100		100		100		
				Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	26,78	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	75,53	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	9,31	100		100		100		100		100		100		
				Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	43,45	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	109,59	100		100		100		100		100		100		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	Persen	59,17	100		100		100		100		100		100		
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	Persen	125,63	100		100		100		100		100		100		
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	Persen	95,27	100		100		100		100		100		100		
				Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	Persen	95,2	95,2		95,2		95,2		95,2		95,2		95,2		
				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				bencana skala Kota Blitar yang tertangani															
				Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	Persen	52,78	60		63		65		70		73		73		
				Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	Persen	NA	25		26		27		28		29		29		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	79,63	80,15	16.848.342.000	80,25	16.864.960.112	80,35	21.618.100.000	80,50	21.737.250.000	80,65	21.955.320.000	80,65	99.023.972.112	RSUD Mardi Waluyo
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persen	100	100	602.904.700	100	1.348.219.900	100	1.350.913.900	100	1.353.634.900	100	1.356.625.500	100	6.012.298.900	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman																Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	Persen	100	100	408.239.300	100	429.948.900	100	439.997.300	100	456.124.200	100	457.261.600	100	2.191.571.300	
				Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	76,8	83		85		87		88		90		90		
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	Persen	55,28	57,14	4.565.408.700	61,9	2.603.635.000	76,19	2.905.635.000	76,19	2.931.671.350	85,71	2.957.968.100	85,71	15.964.318.150	Dinas Kesehatan
1	**03**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	94,80	96	10.826.688.339	97	12.998.622.000	98	13.648.553.000	99	14.330.981.000	100	15.047.530.000	100	66.852.374.339	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	Persen	88,6	88,8	1.029.807.000	88,9	1.216.527.000	90	1.277.355.000	90,1	1.341.223.000	90,2	1.408284.000	90,2	6.273.196.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	Persen	80	82	1.204.155.500	83	1.353.671.000	84	1.421.354.000	85	1.492.422.000	86	3.074.535.470,97	86	8.546.137.971	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	97,49	98	2.968.788.068	98,50	3.773.741.000	99	3.962.428.000	99,50	4.160.550.000	100	4.368.577.000	100	19.234.084.068	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	Persen	66,67	83,33	7.004.439.588	87,50	7.367.100.000	91,67	7.549.955.000	95,83	7.846.750.000	100	8.158.417.500	100	37.926.662.088	
				Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	Persen	78,26	82,61		86,96		91,30		95,65		100		100		
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	98,15	99,20	8.136.773.062	99,40	8.488.984.000	99,60	8.913.435.000	99,80	9.359.106.000	100,00	9.827.062.000	100	44.725.360.062	
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	99,32	99,6		99,7		99,8		99,9		100		100		
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	Persen	100	100	322.872.200	100	477.500.000	100	410,200,000	100	428,800,000	100	448,125,000	100	2.087.497.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	57,89	76,32	912.687.140	81,58	1.430.000.000	86,84	685.000.000	94,75	945.000.000	100	750.000.000	100	4.722.687.140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**04**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**																
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persen	100	100	3.306.078.420	100	2.807.932.300	100	2.562.946.300	100	2.641.293.725	100	2.723.358.875	100	14.041.609.620	
				Persentase tingkat hunian Rusunawa	Persen	100	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		
1	04	03	Program Kawasan Permukiman																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	62,65	65,90	11.705.181.880	67,52	12.290.441.150	69,15	12.904.963.500	70,77	13.550.211.714	72	14.227.722.435	72	64.678.520.679	
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	56,88	63,10		66,27		69,40		72,53		75,66		75,66		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Persen	9,8	12,22		12,65		13,09		13,53		13,96		65,45		
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Persen	4,8	17,2	2.165.755.400	20,11	2.589.043.170	20,11	2.718.495.400	20,11	2.854.420.170	22,40	3.249.141.200	99,93	13.576.855.340	
				Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persen	0	1,03		1,03		1,03		1,03		1,03		1,03		
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiilitas Umum (PSU)																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Persen	59	62	1.576.467.980	64	1.855.316.400	66	1.948.082.300	68	2.054.486.465	70	2.157.210.798	70	9.591.563.943	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Persen	59	62		64		66		68		70		70		
1	**05**		**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**																
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	93,13	94,38	10,703.204.950	95.64	10.584.907.523	96,89	12.497.491.808	98,14	11.184.402.742	99,39	11.312.424.970	99,39	56.282.431.993	
				Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	Persen	92,41	93,74		95,06		96,39		97,71		99,04		99,04		
1	05	03	Program Penanggulangan bencana																Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Persen	NA	40	1.153.077.430	50	1.289.481.301	60	1.353.955.366	70	1.421.653.134	80	1.492.735.791	80	6.710.903.022	
				Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	Persen	NA	91		92		93		94		95		95		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Jumlah	1	1		2		2		3		3		3		
				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	NA	100		100		100		100		100		100		
1	05	04	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Persen	95	100	528.905.400	100	3.055.350.700	100	3.060.511.050	100	1.588.126.200	100	8.617.532.550	100	16.850.425.900	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**06**		**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**																
1	06	02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	1.277.630.700	100	1.341.512.235	100	1.408.587.847	100	1.479.017.239	100	1.552.968.101	100	7.059.716.122	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persen	13,59	2,57	842.164.100	0,89	884.272.305	0,89	928.485.920	0,88	974.910.216	0,87	1.023.655.727	19,69	4.653.488.268	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan jaminan sosial																Dinas Sosial
				Persentase peningkatan PMKS terlatih	Persen	28,79	32	18.792.409.200	24,2	19.750.900.365	19,5	20.738.445.383	16,3	21.775.367.652	14,04	21.772.466.899	160	102.829.589.499	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	Persen	2,35	1,36		1,38		1,4		1,42		1,44		6,81		
1	06	06	Program Penanganan bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	100	100	345.017.300	100	362.268.165	100	380.381.573	100	399.400.652	100	419.370.685	100	1.906.438.375	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Persentase TMP dalam kondisi baik	Persen	100	100	62.127.960	100	65.234.358	100	68.496.076	100	71.920.880	100	75,516.924	100	343.296.198	Dinas Sosial
2			**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																
2	**07**		**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**																
2	07	03	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	Persen	47,7	46	809.381.850	47	792.791.000	48	832.431.000	49	874.053.000	50	917.756.000	50	4.226.412.850	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	07	04	Program Penempatan tenaga kerja																Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	82,98	77	92.963.100	79	1.285.461.500	81	1.349.485.000	82	1.418.728.000	83	1.460.115.000	83	5.606.752.600	
				Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap	Persen	0	12		14		16		18		20		20		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				melalui bursa kerja online															
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	Persen	100	100	57.729.100	100	196.000.000	100	205.800.000	100	216.181.000	100	226.991.000	100	902.701.100	Dinas Penanaman Modaldan PTSP
2	**08**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan																Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	100	100	869.774.900	100	969.128.540	100	1.016.548.692	100	1.067.376.129	100	1.120.744.940	100	5.043.573.201	
				Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	Persen	45,32	45		46		47		45		48		48		
				Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	Persen	NA	0,33		0,33		0,33		0,003		0,003		0,003		
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	319.211.860	100	326.176.198	100	333.488.753	100	341.166.936	100	349.229.926	100	1.669.273.673	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	08	06	Program pemenuhan hak anak	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	Persen	100	100	91.218.000	100	93.954.905	100	96.828.655	100	99.846.093	100	103.014.403	100	484.862.056	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	Persen	100	100	313.266.460	100	319.503.465	100	326.052.320	100	332.928.618	100	340.148.731	100	1.631.899.594	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2	**09**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**																
2	09	03	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Angka konsumsi energi per kapita	Angka	2225	1971	174.387.060	2010	183.106.413	2051	192.261.734	2092	201.874.820	213 3,34	211.968.561	213 3,34	963.598.588	
				Angka ketersediaan energi perkapita/hari	Angka	2200	2200		2200		2200		2200		2200		2200		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	Persen	12,12	13,17	68.000.000	13,83	71.400.000	14,52	74.970.000	15,24	78.718.500	16,00	82.654.425	16,00	375.742.925	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	Persen	100	100	12.000.000	100	12.600.000	100	13.230.000	100	13.891.500	100	14.586.075	100	66.307.575	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	**10**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**																
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	130.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	Persen	95,01	96,00	374.446.000	97,00	535.000.000	98,00	265.000.000	99,00	300.000.000	100	310.000.000	100	1.784.446.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	**11**		**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**																
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	Persen	100	100	245.787.500	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	1.095.787.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	Persen	2,19	6,37	1.336.978.647	7,0	1.357.978.647	8,95	2.519.400.000	11,69	2.577.400.000	15,15	2.619.400.000	15,15	10.411.157.294	
				Persentase titik sampling udara ambien yang	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				memenuhi baku mutu															
				Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	Persen	52.63	54		55		56		57		58		58		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Persen	16,270	16,272	5.441.447.600	16,273	9.289.000.000	16,274	9.789.000.000	16,275	9.789.000.000	16,276	4.789.000.000	16,276	39.097.447.600	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	Persen	100	100	20.689.100	100	30.999.100	100	40.999.100	100	50.999.100	100	50.999.100	100	194.685.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan an Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	Persen	64,00	64,00	143.567.900	64,00	143.567.900	65,00	210.854.400	65,00	210.854.400	65,00	331.854.400	65,00	1.040.699.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan	Persentase kelompok masyarakat peduli	Persen	100	100	587.347.900	100	587.347.900	100	600.000.000	100	625.000.000	100	650.000.000	100	3.049.695.800	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	lingkungan yang dibina															
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat																Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase kelurahan berseri	Persen	38,1	44,44	383.600.800	47,62	427.073.700	50,79	467.073.700	53,97	482.073.700	57,14	552.073.850	57,14	2.311.895.750	
				Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	Persen	17,48	21,84		24,03		26,21		28,40		30,58		30,58		
				Jumlah predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Angka	1	1		1		1		1		1		1		
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	19.997.400	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	219.997.400	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan																Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase sampah tertangani	Persen	82,88	83,00	16.269.473.260	83,11	22.900.000.000	83,15	19.710.598.000	83,16	19.710.598.000	83,18	19.710.598.000	83,18	98.301.267.260	
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	Persen	9,62	11,00		11,89		12,85		14,84		14,82		14,82		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	**12**		**Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**																
2	12	02	Program pendaftaran penduduk																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	Persen	0.48	0.03	161.459.080	0.03	410.645.089	0.03	431.177.343	0.03	450.475.522	0.03	470.738.328	2,55	1.924.495.362	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	Persen	-0.48	2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		2.55		
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
2	12	03	Program Pencatatan Sipil																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	Persen	2.34	2.19	316.943.000	2.19	403.092.700	2.19	356.698.980	2.19	619.708.920	2.19	438.748.101	2.19	2.135.191.701	
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	Persen	3.36	2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		
				Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase peningkatan kepemilikan	Persen	1.77	0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				dokumen akta kelahiran															
2	12	04	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Persen	NA	16	744.008.200	16	800.742.510	16	873.235.031	16	916.896.792	16	961.689.982	16	4.296.572.515	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standar	Persen	100	100	84.980.000	100	89.229.000	100	93.690.450	100	98.374.900	100	103.293.700	100	469.568.050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**13**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
2	13		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan tertib administrasi	Persen	23.81	42.86	103.562.800	57.14	104.598.428	71.43	105.644.412	85.71	106.700.856	100	107.767.865	100	528.274.361	Sekretariat Daerah
2	**14**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																
2	14	02	Program pengendalian penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	22,78	22,88	99.837.200	23,01	104.829.060	23,35	1100705113	23,75	115.574.039	24,01	121.352.741	24,1	551.663.553	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	03	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)																Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
				Persentase peserta KB aktif	Persen	74,31	74,32	2.990.029.900	74,35	3.139.531.395	74,4	3.296.507.965	74,46	3.461.333.363	74,67	3.634.400.031	74,67	16.521.802.654	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	9,09	9,01		8,98		8,55		8,25		8,01		8,01		Penduduk dan KB
2	14	04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase anggota kelompok tribina dan UPPK yang ber KB	Persen	74,31	74,32	170.291.200	74,35	178.805.760	74,4	187.746.048	74,46	197.133.350	74,67	206.990.018	74,67	940.966.376	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	**15**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**																
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																Dinas Perhubungan
				Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Persen	84,00	85,00	18.457.749.439	87,00	19.430.000.000	89,00	22.000.000.000	90,00	22.500.000.000	91,00	23.000.000.000	91,00	105.387.749.439	
				Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	99,35	99,45		99,5		99,55		99,6		99,7		99,7		
				IKM layanan angkutan sekolah gratis	indeks	81,97	baik (82.60)		baik (83.15)		baik (83.90)		baik (84.75)		baik (85.50)		baik (85.50)		
				IKM terhadap layanan uji	indeks	baik (80)	baik (81.00)		baik (81.75)		baik (82.45)		baik (82.90)		baik (83.50)		baik (83.50)		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				kendaraan bermotor															
				IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	indeks	baik (81)	baik (81.60)		baik (82.10)		baik (82.75)		baik (83.25)		baik (83.80)		baik (83.80)		
				Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	Persen	0,35	0,33		0,32		0,31		0,3		0,29		0,29		
2	**16**		**Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika**																
2	16	02	Program informasi dan komunikasi publik																Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
				Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan	Persen	75	83	2.564.813.096	85	2.693.053.751	90	2.827.706.438	95	2.969.091.760	100	3.093.906.654	100	14.148.571.699	
				Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	20	60		70		80		90		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	16	03	Program aplikasi informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen	45.69	86.35	7.213.911.948	90,00	8.058.813.219	92,89	8.288.199.022	95,00	8.759.134.892	100	9.290.512.776	100	41.610.571.857	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**17**		**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**																
2	17	02	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	Persen	21,00	22,00	34.255.200	23,00	95,000,000	24,00	95,000,000	25,00	95,000,000	26,00	95,000,000	26,00	414.255.200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	03	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase peningkatan kepatuhan koperasi	Persen	32,00	33,00	111.629.100	34,00	550,000,000	35,00	600,000,000	36,00	650,000,000	37,00	700,000,000.00	37,00	2.611.629.100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	04	Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	Persen	28,00	29,00	65.383.200	30,00	80,000,000	31,00	85,000,000	32,00	90,000,000	33,00	95,000,000	33,00	415.383.200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	05	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian (DAK)	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	Persen	35,00	35,7	369.785.050	36,4	459,181,000	37,1	459,181,000	37,8	459.181.000	38,5	459,181,000	38,50	2.206.509.050	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	17	06	Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha	Persen	30,00	32,00	213.180.600	34,00	500,000,000	36,00	550,000,000	38,00	600,000,000	40,00	650,000,000	40,00	2.513.180.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)																Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
				Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	Persen	1,72	1,80	484.329.800	1,85	500.000.000	1,90	550.000.000	1,95	600.000.000	2,00	650.000.000	2,00	2.784.329.800	
				Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	Persen	2,00	2,20		2,30		2,40		2,50		2,60		2,60		
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase wirausaha baru yang berhasil dikembangkan	Persen	1,50	1,60	238.812.400	1,70	600,000,000	1,80	700,000,000	1,90	750.000.000	2,00	750,000,000	2,00	3.038.812.400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2	**18**		**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**																
2	18	02	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	40	45	63.999.850	50	352.000.000	55	369.600.000	60	388.081.000	65	407.484.000	65	1.581.164.850	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Persen	40	40	64.279.000	45	970.060.000	50	1.018.563.000	55	1.069.491.000	60	1.122.965.000	60	4.245.358.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	Program Pelayanan	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Persen	99,4	99,5	249.973.347	99,5	679,543,000	99,6	693,132,000	99,6	706,993,000	99,7	721,134,000	99,7	3.050.775.347	Dinas Penanaman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			penanaman modal																Modal dan PTSP
2	18	05	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	70	75	372.641.850	75	483,400,000	80	507.571.000	80	532.950.000	85	559.597.500	85	2.456.160.350	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	**19**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**																
2	19	02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan																Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	Persen	NA	80	722.288.000	80	1.215.000.000	83	1.360.000.000	83	1.265.000.000	90	1.450.000.000	90	6.012.288.000	
				Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Persen	NA	6		6		7		7		7		7		
2	19	03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan																Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	NA	40	10.431.337.200	41	15.575.000.000	41	20.075.000.000	42	15.075.000.000	43	18.575.000.000	43	79.731.337.200	
				Cakupan pelatih yang tersertifikasi	Persen	NA	68		69		70		70		71		71		
				Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	Persen	NA	63		67		70		73		77		77		
2	19	14	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	NA	64	470.276.100	64	700.000.000	73	700.000.000	73	800.000.000	82	800.000.000	82	3.470.276.100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**20**		**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**																
2	20	02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Persen	NA	93,43	427.353.510	95,07	505.201.636	96,71	534.211.717	98,35	563.422.303	100	592.843.418	100	2.623.032.584	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**		**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**																
2	21	02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	20.31	38,76	358.315.370	46,51	376.231.359	64,26	395.042.927	62,02	414.795.073	69,77	435.534.827	69.77	1.979.919.556	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**22**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**																
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Persen	50	60	868.171.300	75	911.579.865	85	957.158.858	100	1.005.016.801	100	1.055.267.641	100	4.797.194.465	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	Persen	90	80	481.857.500	80	505.950.375	90	531.247.894	90	557.810.288	90	585.700.803	90	2.662.566.860	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	Persen	40	50	130.334.400	60	136.851.120	70	143.693.676	70	150.878.360	70	158.422.278	70	720.179.834	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**23**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**																
2	23	02	Program pembinaan perpustakaan																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	80,02	81,2	749.962.900	81,5	925.770.769	82	1.081.622.166	82,5	1.181.122.002	83	1.286.315.318	83	5.224.793.155	
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	3 : 1	3,2 : 1		3,3 : 1		3,4 : 1		3,5 : 1		3,6 : 1		3,6 : 1	3,6:1	
2	**24**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**																
2	24	2	Program Pengelolaan arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Nilai	79.91	80,5	424.605.500	81	630.000.000	81,5	693.000.000	82	762.300.000	82,5	838.530.000	82,5	3.348.435.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			**Urusan Pemerintahan Pilihan**																
3	**25**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**																
3	25	04	Program Pengelolaan perikanan budidaya																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	Persen	60,27	1,59	320.045.390	2,92	336.047.870	4,24	352.850.263	5,57	370.492.776	6,9	389.017.415	6,9	1.768.453.714	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	Persen	13,67	14,35		15,07		15,07		15,82		15,82		15,82		
3	25	06	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume penjualan hasil olahan perikanan (juta rupiah)	juta rupiah	1.066,5	33.891	122.642.500	34.230	128.774.625	34.572	135.213.356	34.918	141.974.024	35.267	149.072.725	35.267	677.677.230	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**26**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**																
3	26	02	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata																Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana obyek pariwisata	persen	4 unit	25	1.389.400.900	25	1.458.870.940	50	1.531.814.490	50	1.608.405.210	50	1.688.825.470	50	7.677.317.010	
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata Makam Bung Karno	persen	3 unit	30		30		30		65		65		65		
				Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	persen	NA	50		50		50		50		50		50		
				Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata	persen	23 usaha	20		20		20		20		20		20		
3	26	03	Program Pemasaran pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah	Persen	NA	0,04	298.796.800	0,06	313.736.640	0,08	329.423.472	0,11	345.894.646	0,13	363.189.378	0,13	1.651.040.936	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				dikunjungi oleh wisatawan															
3	26	05	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	Persen	NA	3,0	91.169.500	3,3	95.727.975	3,9	100.514.374	4,2	105.540.092	4,5	110.817.097	4,5	503.769.038	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**27**		**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**																
3	27	02	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase sarana pertanian yang tersedia	Persen	70,03	71	445.570.300	72	413.913.990	73	491.241.255	74	456.340.173	75	541.593.485	75	2.348.659.203	
				Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	Persen	NA	16,67		20,37		24,04		27,78		31,48		31,48		
				Persentase pengawasan peredaran obat hewan	Persen	9,68	16,13		19,35		22,58		25,81		29,03		29,03		
3	27	03	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	Persen	49,88	50,88	2.512.081.200	51,39	2.637.685.260	51,9	2.497.913.523	52,42	2.622.809.199	52,94	2.753.949.659	52,94	13.024.438.841	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
3	27	04	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persen	32	36	280.863.022	40	294.906.173	44	309.651.482	48	325.134.056	52	341.390.759	52	1.551.945.492	
				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	Persen	22,22	38,89		44,44		55,56		61,11		72,22		72,22		
				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
3	27	05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sesuai dengan prosedur	Persen	100	100	91.490.000	100	96.064.500	100	100.867.725	100	105.911.111	100	111.206.667	100	505.540.003	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	06	Program perizinan usaha pertanian																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	Persen	18,3	25,00	119.235.000	33,00	125.196.750	41,66	131.456.588	50,00	138.029.417	58,33	144.930.888	58,33	658.848.643	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	Persen	30,77	35,38		40,00		44,62		49,23		53,85		53,85		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan pertanian																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	Persen	0,73	0,93	237.670.110	0,93	249.553.617	0,93	262.031.299	0,93	275.132.866	0,93	288.889.510	0,93	1.313.277.402	
				Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	0	4,76		9,52		14,29		19,05		23,81		23,81		
				Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	Persen	0	22,22		25		30,56		33,33		38,89		38,89		
3	**30**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**																
3	30	03	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan																Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Persen	66,0	69	5.863.964.550	70,5	38.267.316.800	72	32.656.432.000	73,50	32.716.888.000	75,0	6.146.480.300	75,0	115.651.081.650	
				Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas	Persen	4,40	4,75		5,00		5,25		5,5		6,0		6,0		
3	30	04	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	Persen	100	100	177.202.700	100	250.000.000	100	275.000.000	100	291.500.000	100	306.075.000	100	1.299.777.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	Persen	1,19	35	576.037.200	40	6.633.675.000	45	669.525.000	50	709.696.500	55	745.181.325	55	9.334.115.025	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**		**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**																
3	31	02	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan IKM	Persen	1,25	2,00	2,034.872.780	2,50	2.200.000.000	3,50	2.310.000.000	5,00	2.430.225.000	6,00	2.551.736.250	6,00	11.526.834.030	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4			**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**																
4	**01**		**Sekretariat Daerah**																
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																Sekretariat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan	Persen	100	100	10.982.826.550	100	12.408.223.144	100	12.532.305.376	100	12.657.628.430	100	12.784.204.714	100	61.365.188.214	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti															
				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persen	50	66,67		83,33		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4	01	03	Program perekonomian dan pembangunan																Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	4.639.883.024	100	4.686.283.800	100	4.733.146.637	100	4.780.478.104	100	4.828.282.885	100	23.668.074.450	Sekretariat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	Persen	15,62	35		50		63.33		76.67		90		90		Sekretariat Daerah
4	**02**		**Sekretariat DPRD**																
4	02	02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD																Sekretariat DPRD
				Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100	13.742.406.300	100	14.525.554.475	100	15.224.667.867	100	15.822.506.969	100	16.227.119.025	100	75.542.254.636	
				Persentase dukungan terhadap tugas	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan															
5			**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**																
5	**01**		**Perencanaan**																
5	01	02	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	Persen	95,52	95.54	868.070.000	95.55	878.157.327	95.56	886.938.900	95.57	895.808.289	95.58	904.766.372	95.58	4.433.740.888	
				Persentase Capaian Sasaran RPJMD	Persen	90,97	90,99		91		91.1		91.2		91.3		91.3		
5	01	03	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program,	Persen	100	100	460.406.800	100	492.383.200	100	517.002.400	100	542.852.150	100	559.639.200	100	2.572.283.750	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kegiatan, dan Indikator)															
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	Persen	97,96	92,5		81		82		83		84		85		
5	**02**		**Keuangan**																
5	02	02	Program Pengelolaan keuangan daerah																Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	Persen	100	100	9.672.601.600	100	9.591.015.921	100	9.616.817.100	100	9.642.993.500	100	9.783567.250	100	48.306.995.371	
				Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	Persen		92		94		96		98		100		100		
5	02	03	Program Pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisir sesuai regulasi	Persen	20	30	2.041.553.628	35	2.051.969.000	40	2.106.104.220	45	2.103.413.850	50	2.273.357.520	50	10.576.398.218	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	02	04	Program pengelolaan pendapatan daerah																Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	Persen	30,45	30,45	2.838.995.150	31,45	2.864.354.910	32,45	2.892.898.429	34,45	2.858.928.573	35,45	2.887.517.892	35,45	14.342.694.954	
				Persentase peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Persen	NA	30,45		31,45		32,45		34,45		35,45		35,45		
5	**03**		**Kepegawaian**																
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah																Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	Persen	36.00	49.00	8.276.692.450	55.00	10.467.607.930	61.00	11.178.782.582	67.00	22.616.514.246	74.00	10.282.789.026	74.00	62.822.386.234	
				Persentase data kepegawaian yang valid	Persen	48.97	58.00		63.00		68.00		73.00		78.00		78.00		
				Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	Persen	90.58	90.98		91.18		91.18		91.38		91.58		91.58		
				Persentase ASN yang memiliki nilai prestasi kinerja minimal 80	Persen	86.66	88.86		90.16		91.56		93.06		94.66		94.66		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	Persen	36.85	41.40		43.67		45.94		48.21		50.50		50.50		
				Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	37.39	41.93		44.20		46.47		48.74		51.01		51.01		
5	**04**		**Pendidikan dan Pelatihan**																
5	04	02	Program pengembangan SDM	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	Persen	96.57	96.65	134.735.400	96.70	180.223.877	96.75	180.223.877	96.80	180.223.877	96.85	180.223.877	96.85	855.630.908	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**05**		**Penelitian dan Pengembangan**																
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	933.971.900	100	953.047.000	100	968.699.350	100	955.134.000	100	970.890.700	100	4.781.742.950	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6			**Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah**																
6	**01**		**Inspektorat Daerah**																
6	01	02	Program penyelenggaraan pengawasan																Inspektorat
				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	Persen	66.67	72.5	2.510.677.900	75	2.951.768.400	80	3.100.457.000	82.5	3.255.558.600	85	3.425.334.000	85	15.243.795.900	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	Persen	66.67	72.5		75		80		82.5		85		85		
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	Persen	90.65	86		87		89		90		92.5		92.5		
				Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	Persen	90.65	86		87		89		90		92.5		92.5		
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	Persen	80	80		90		90		100		100		100		
6	01	03	Program Perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi																Inspektorat
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	751.571.800	100	920.373.200	100	971.356.900	100	1.029.924.700	100	1,079,421,100	100	4.752.647.700	
				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Jumlah	29	29		29		29		29		29		29		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	Jumlah	0	1		1		1		1		1		1		
7			**Unsur Kewilayahan**																
7	**01**		**Kecamatan**																
7	01	02	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																Kecamatan
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	NA	97	2.576.820.140	97	2.646.481.128	97	2.784.925.412	98	2.934.904.590	98	3.095.226.974	98	14.038.358.244	Kecamatan Sukorejo
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	NA	97	2.553.562.230	97	2.665.773.328	97	2.783.440.311	98	2.708.765.368	98	2.828.267.957	98	13.539.809.194	Kecamatan Sananwetan
				Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	NA	97	2.845.452.567	97	2.987.725.195	97	3.137.111.455	98	3.293.967.028	98	3.458.665.379	98	15.722.921.624	Kecamatan Kepanjenkidul
7	01	03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan																Kecamatan
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	13.254.476.700	100	12.959.557.825	100	12.963.596.122	100	13.186.811.170	100	13.301.579.702	100	65.666.021.519	Kecamatan Sukorejo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase RT berdaya	Persen	NA	75		75		75		75		75		75		Kecamatan Sukorejo
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	17.329.074.300	100	18.195.528.015	100	19.105.304.416	100	20.060.569.637	100	21.063.598.118	100	95.754.074.486	Kecamatan Sananwetan
				Persentase RT berdaya	Persen	NA	75		75		75		75		75		75		Kecamatan Sananwetan
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	14.608.816.400	100	15.339.257.220	100	16.106.220.081	100	16.911.531.085	100	17.757.107.639	100	80.722.932.425	Kecamatan Kepanjenkidul
				Persentase RT berdaya	Persen	NA	75		75		75		75		75		75		Kecamatan Kepanjenkidul
7	01	05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum																Kecamatan
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	586.728.110	100	617.306.016	100	1.317.459.852	100	648.171.317	100	679.036.618	100	3.848.701.913	Kecamatan Sukorejo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	420.699.150	100	441.734.108	100	463.820.813	100	487.011.854	100	486.664.088	100	2.299.930.013	Kecamatan Sananwetan
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	511.764.900	100	537.353.145	100	1.014.220.800	100	591.088.460	100	620.642.882	100	3.275.070.187	Kecamatan Kepanjenkidul
8			**Unsur Pemerintahan Umum**																
8	**01**		**Kesatuan Bangsa dan Politik**																
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
				Persentase penyelesaian Konflik Keagamaan	Persen	NA	100	623.972.900	100	655.171.545	100	687.930.122	100	722.326.628	100	758.442.960	100	3.447.844.155	
				Persentase kampung berkarakter Pancasila	Persen	NA	9,5		9,5		9,5		14,3		14,3		57,1		
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	NA	100	747.232.075	100	784.593.679	100	25.781.888.893	100	862.917.807	100	906.063.698	100	29.082.696.152	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir 2026		PD Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Etika serta Budaya Politik																
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	persen	NA	65	132.617.500	68	173.250.000	72	181.912.500	75	191.008.125	80	200.558.531	80	879.346.656	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	Persen	NA	76	1.526.899.600	77	1.540.744.580	78	1.555.281.809	79	1.570.545.899	80	1.586.573.194	80	7.780.045.082	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	Persen	100	100	164.530.500	100	172.757.025	100	181.394.876	100	190.464.620	100	199.987.851	100	909.134.872	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Sementara itu, indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Perangkat Daerah PD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan untuk satu periode ke depan. Adapun IKU daerah Kota Blitar yang ditetapkan, yaitu sebanyak 11 IKU, sebagai berikut.

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,28	3,50 – 3,75	4,00	4,50	5,00	5,50	5,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,57	78,58	78,59	78,60	78,61	78,62	78,62
3	Angka Kemiskinan	Angka	7,78	7,26	7,21	7,16	7,11	7,06	7,06
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,68	5,90	5,55	5,22	4,90	4,61	4,61
5	Indeks Gini	Indeks	0,344	0,345	0,344	0,343	0,342	0,341	0,341
6	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	86,31	83,25	83,5	83,75	84	84,25	84,25
7	Indeks PembangunanGender (IPG)	Indeks	97,6	97,6	97,7	97,8	97,9	98	98
8	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	58,07	58,27	58,37	58,47	58,57	58,67	58,67
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,52	68,86	70,03	71,20	72,37	73,54	73,54
10	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72.06)	BB (72.15)	BB (72.20)	BB (72.25)	BB (72.30)	BB (72.35)	BB (72.35)
11	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal ini, IKU Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja level *impact* yang dipilih dari indikator sasaran atau indikator tujuan perangkat daerah atau indikator sasaran RPJMD sebagai wujud keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah. Basis perumusan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah tersebut dan secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berikut adalah rincian IKU masing-masing perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Persen	34,48	55,17	65,52	75,86	86,21	100	100	Sekretariat Daerah
2.	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi pembahasan Raperda serta peningkatan kapasitas DPRD	Persen	NA	80	80,5	81	81,5	82	82	Sekretariat DPRD
5.	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan pembahasan anggaran daerah	Persen	NA	80	80,5	81	81,5	82	82	
6.	Persentase PD dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
7.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	78,66	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
8.	SPM Bidang Pendidikan									Dinas Pendidikan
	a. Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	b. Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	c. Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	189,13	583,33	500	416,7	333,3	208,3	208,3	Dinas Kesehatan
10.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	11,82	10,40	9,93	9,46	8,98	8,51	8,51	
11.	Prevalensi balita stunting	Persen	7,25	7,05	7,00	6,95	6,90	6,80	6,80	
12.	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen	NA	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	
13.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Persen	45	45	65	75	85	100	100	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
14.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,24	0,50	0,60	0,70	0,80	0,85	0,85	
15.	Akreditasi RSUD	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
16.	Persentase fakir miskin yang berdaya	Persen	18,18	10	10	10	10	10	10	Dinas Sosial
17.	Persentase penurunan PMKS	Persen	-7,31	1,45	1,47	1,49	1,52	1,54	5,89	
18.	Persentase kelembagaan PUG aktif	Persen	47,25	47,26	47,28	47,30	47,32	47,35	47,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
19.	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
20.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
21.	*Total Fertility Rate* (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	Angka	2,14	2,14	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11	
22.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	50,08	50,53	50,90	51,35	51,80	52,25	52,25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
23.	Persentase prestasi olahraga	Persen	57	65	72	74	77	78	78	
24.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	NA	47	48	48,5	49	49,5	49,5	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
25.	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Persen	82,18	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Skor PPH Konsumsi	Angka	85,25	86,25	86,5	86,75	87	88,5	88,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27.	Produksi tanaman pangan dan holtikultura	Kwintal	197.890	198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	198.563,73	198.563,73	
28.	Produksi hasil peternakan	Kwintal	83.818	84.322	84.651	84.828	85.042	85.356	85.356	
29.	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal	2.310,3	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2.549,33	2.549,33	
30.	Produksi hasil budidaya ikan hias	Ekor	4.563.416	4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.783.628	4.783.628	
31.	Jumlah realisasi investasi	Milyar rupiah	167,1	167,2	167,8	168,5	169,3	170,2	170,2	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Persentase Pencari kerja berkompeten	Persen	NA	80	82	85	87	90	90	
33.	Persentase Perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persen	NA	16	18	19	21	22	22	
34.	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Persen	1,5	1,75	2,0	2,25	2,50	3,0	3,0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
35.	Persentase peningkatan produktivitas industri	Persen	-3,17	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
36.	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Persen	61	60	65	70	75	75	75	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
37.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Persen	452.552 wisatawan	9,24	9,30	9,40	9,52	9,66	9,66	
38.	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	Persen	0	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
39.	Persentase koperasi aktif	Persen	35	35,6	36,7	37,8	38,8	39,5	39,5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
40.	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	Persen	34	35	36	37	38	39	39	
41.	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Persen	1,7	1,80	1,85	1,90	1,95	2	2	
42.	Persentase Pertumbuhan wirausaha baru	Persen	1,5	1,60	1,75	1,90	1,95	2	2	
43.	Indeks Infrastruktur Bina Marga	Indeks	75,15	76,20	76,40	76,60	76,80	77,00	77,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44.	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks	96,15	97,00	97,75	98,50	99,25	100	100	
45.	Persentase gedung pemerintah sesuai standar	Persen	94.41	94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	95,00	
46.	Persentase peran aktif jasa konstruksi	Persen	34,78	43,48	47,83	52,17	56,52	60,87	60,87	
47.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persen	8,38	9,07	9,45	9,82	10,19	10,56	10,56	
48.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persen	2,01	2,45	2,70	2,95	3,19	3,44	3,44	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
49.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Persen	29,89	40,55	44,63	48,72	54,12	58,21	58,21	
50.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	90,99	93	94	95	96	97	97	Dinas Perhubungan
51.	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	98,31	96,37	96,99	97,61	98,23	98,79	98,79	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52.	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persen	63,30	68,62	73,94	79,26	84,57	89,89	89,89	
53.	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,32	59,92	61,72	63,52	65,32	65,32	65,32	Dinas Lingkungan Hidup
54.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,63	84,53	85,48	86,43	87,38	87,40	87,40	
55.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	54,23	55,23	55,73	56,23	56,73	56,73	56,73	
56.	Persentase capaian layanan persampahan	Persen	92,10	93,00	94,00	95,00	96,00	98,00	98,00	
57.	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	94,80	95	96	97	98	99	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
58.	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Persen	99,25	95	96	97	98	99	99	
59.	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	Persen	NA	51,7	58,6	65,5	72,4	79,3	79,3	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
60.	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Angka	81	89	94	98	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
61.	Nilai Hasil Monev PPID	Angka	71	81	86	91	96	100	100	
62.	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Persen	94,83	96	97	98	99	100	100	
63.	Indeks KAMI	Indeks	20,31	38,76	46,51	54,26	62,02	69,77	69,77	
64.	Persentase kejadian SARA tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa, politik dan PBD
65.	Persentase konflik sosial tertangani	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	
66.	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Persen	NA	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,5	
67.	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,38	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,61	
68.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	4,21	4,39	6,40	8,68	11,40	14,64	14,64	Satuan Polisi Pamong Praja
69.	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Persen	85	90	91	92	93	94	94	
70.	Indeks perencanaan pembangunan	Indeks	95,10	91,72	91,93	92,16	92,38	92,61	92,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026		
71.	Persentase realisasi PAD terhadap target pajak daerah	Persen	20,00	31,45	32,45	33,45	34,45	35,45	35,45	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
72.	Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
73.	Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Persen	20	30	35	40	45	50	50	
74.	Indeks Sistem Merit	Indeks	208	260	270	280	290	300	300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
75.	Peningkatan Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	Persen	8,30	11,32	13,02	14,73	16,40	18,15	18,15	
76.	IKM Kecamatan	Indeks	Baik (82,15)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)	Baik (88)	Baik (88)	Kecamatan Kepanjenkidul
			Baik (89,06)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Kecamatan Sukorejo
			Baik (81,37)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (87)	Baik (89)	Baik (90)	Baik (90)	Kecamatan Sananwetan

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK Kota Blitar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2022 – 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**								
1.1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	96.21	96.31	96.40	96.45	96.50	96.55	96.55
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98.93	98.94	98.95	98.96	98.97	98.98	98.98
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	97.27	97.29	97.31	97.32	97.33	97.34	97.34
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	83.70	83.83	83.87	83.89	83.93	83.95	83.95
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**								
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
2.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	83.33	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	105.87	100	100	100	100	100	100
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	96.87	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.00
3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	1.50	1.84	2.04	2.23	2.42	2.61	2.61
3.3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	6.35	6.88	7.17	7.46	7.75	8.04	8.04
3.4	Rasio kepatuhan IMB	Persen	31,99	33,60	34,40	35,20	36,00	36,80	36,80
3.5	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	98.15	99.20	99.40	99.60	99.80	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	50,7	68,25	77,02	85,79	94,56	100	100
3.7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	12.09	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	84.6
4.4	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah	236	236	236	236	236	236	1180
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah	40,463	40,761	41,059	41,357	41,655	41,953	41,953
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**								
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	93,13	94,38	95,64	96,89	98,14	99,39	99,39

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92,41	93.74	95.06	96.39	97.71	99.04	99.04
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu	8.35	15	15	15	15	15	15
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**								
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Blitar	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**								
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	80	80	82	84	85	90	90
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0	1	2	3	4	5	5
1.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	0	1	2	2	3	4	4
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	20	20	40	50	70	100	100
1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Blitar	Persen	90	91	92	93	94	95	95
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**								
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	25.42	26	27	28	29	30	30
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0.02	0.014	0.012	0.008	0.006	0.004	0.008
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**								
3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	43.83	44.83	45.33	45.83	46.33	46.83	46.83
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**								
4.1	Tersedianya *Tanah Obyek Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah	Tidak ada Tanah Obyek Landreform (TOL) di wilayah Kota Blitar						
4.2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	66,52	68.86	70.03	71.20	72.37	73.54	73.54
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	NA	93	94	95	96	98	98
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	64	64	64	65	65	65	65

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	80.22	82.77	85.32	87.87	90.42	92.97	92.97
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	95.43	95.76	96.09	96.42	96.75	97.08	97.08
6.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	13	2	2	2	2	2	23
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	Tidak ada pemerintahan desa di wilayah Kota Blitar						
7.2	persentase peningkatan status desa mandiri	Persen							
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8.1	*Total Fertility Rate* (TFR)	Angka	2.03	2.04	2.03	2.02	2.01	2	2
8.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Angka	20.02	20.5	20.75	21	21.25	21.5	21.5
8.3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	25	27.5	30	32.5	34.5	37.5	37.5
8.4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	74.31	74.32	74.35	74.4	74.46	74.67	74.67

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	43.77	43.80	43.95	44.1	44.25	44.50	44.50
8.7	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	Persen	45.48	45.5	45.6	45.75	45.8	45.95	45.95
8.8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	67.79	67.8	67.95	68.01	68.03	68.05	68.05
8.9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	24.3	24.5	24.75	24.85	24.95	25.04	25.04
9	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**								
9.1	Kinerja lalu lintas	Persen	B	C	C	B	B	B	B
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**								
10.1	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	81	89	94	98	100	100	100
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar	Persen	22.45	34	45.5	57	68.5	80	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**								
11.1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	35	35	36	37	38	39	39
11.2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	1.6	1.6	1.75	1.9	1.95	2	2
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**								
12.1	Persentase peningkatan investasi	Persen	0	0.30	0.36	0.42	0.47	0.53	0.53
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**								
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	79.06	80.26	81.56	82.86	84.16	85.56	87.12
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	NA	80	80	83	83	90	90
14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**								
14.1	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	94.83	100	100	100	100	100	100
14.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	94.83	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**								
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20.6	38.76	46.51	54.26	62.02	69.77	69.77
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**								
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	NA	47	48	48.5	49	49.5	49.5
16.2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Indeks	NA	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9
16.3	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	0.3	0.3	0.3	0.33	0.36	0.4	0.4
16.4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen	1 : 962,2	1 : 962,2	1 : 962,2	1 : 962,2	1 : 962,2	1 : 962,2	1 : 962,2
16.5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	0	0	1	1	1	1	4
16.6	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	3 : 1	3,2 : 1	3,3 : 1	3,4 : 1	3,5 : 1	3,6 : 1	3,6 : 1
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**								
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	58	58.8	59	59.5	60	60.5	60.5
17.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Persen	33.33	33.8	34	34.5	35	35.5	35.5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**								
18.1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	29.41	35.29	38.24	41.18	44.12	47	47
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**								
1.1	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Angka	2310.3	2404.8	2464.92	2489.33	2519.1	2549.33	2549.33
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**								
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-87,9 (174)	0.06	0.12	0.18	0.26	0.26	0.35
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Blitar	Persen	-85,71 (452378)	9.20	9.26	9.36	9.47	9.50	9.50
2.3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	86.77	87.10	87.21	87.33	87.47	87.60	87.60
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0.25	0.75	1	1.25	1.50	1.75	1.75
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	1,6	1,4	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**								
3.1	Produktivitas pertanian per hektas per tahun	Persen	18.61	18.64	18.65	18.66	18.67	18.68	18.68
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	41.6	5	5	5	5	5	25

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**								
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	15	15	15.5	16	16.5	17	17
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	71.24	70	70	70	70	70	70
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	NA	35	40	45	50	55	55
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**								
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persentase	1,25	1	1.3	1.5	1.7	2	2
5.2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	1,20	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di Kota Blitar	Persen	Kota Blitar tidak memiliki kawasan industri						
D	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
1	**Sekretariat Daerah**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	1.13	1.13	1.15	1.17	1.19	1.20	1.20
1.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	98.77	98.80	98.85	98.90	98.95	99.00	99.00
E	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**								
1	**Keuangan**								
1.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Rasio	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2
1.2	Rasio PAD	Persen	2.63	21.8	21.9	22.1	22.3	22.4	22.4
1.3	Rasio belanja urusana pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
1.4	Deviasi realisasi belanja terhadap belenja total dalam APBD	Persen	87.45	87.46	87.47	87.48	87.49	87.5	87.51
1.5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	102.17	102.18	102.19	102.2	102.21	102.22	102.23
1.6	Manajemen aset	Status	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA
1.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Infromasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.10	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	**Kepegawaian**								
2.1	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	93.83	95.79	95.84	95.89	95.94	95.99	95.99
2.2	Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	7.96	22.15	22.20	22.25	22.30	22.35	22.35
2.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	37.39	41.93	44.20	46.47	48.74	51.01	51.01
F	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**								
1	**Inspektorat Daerah**								
1.1	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
1.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3



RPJMD Kota Blitar
Tahun 2021 - 2026

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 merupakan panduan dalam melakukan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Blitar selama lima tahun ke depan. Secara administratif, dokumen ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini merupakan bentuk penjabaran visi dan misi serta program prioritas dari Drs. H. Santoso, M.Pd dan Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pilkada serentak.

Dokumen RPJMD merupakan instrumen untuk menuntaskan kewajiban pemerintah dalam menyejahterakan dan melayani kepentingan rakyat. Secara praktik, dokumen ini menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejaheraan rakyat Kota Blitar. Visi yang diusung berupa Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, Bermartabat telah dijabarkan ke dalam misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, serta program perangkat daerah sebagai panduan dalam merumuskan dokumen RKPD, RAPBD dan APBD serta dokumen Renstra pada level perangkat daerah.

Oleh karena itu, keberadaan dokumen RPJMD sangat strategisdalam rangka membangunan manajemen kinerja dan menjalankan pembangunan yang berorientasi hasil, serta sebagai

instrumen pengukuran kinerja daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akuntabilitas kinerja sangat bergantung pada penjabaran dan pelaksanaan dokumen RPJMD. Untuk memastikan adanya sinergitas antara perencanaan, implementasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam RPJMD ini diperlukan beberapa kaidah sebagai berikut :

9.1. Pedoman Transisi

1. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, perlu disusun RPJMD Kota Blitar Tahun 2026-2031 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya.
2. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 akan mendasarkan pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025-2045 dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029.
3. Transisi RPJMD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kota Blitar tahun 2026-2031. Pada RPJMD tahun 2026, khususnya target capaian pada tahun 2026 masih menggunakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan urusan pembangunan, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

2. RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, mulai Tahun 2022 sampai tahun 2026. Sedangkan capaian program dan kegiatan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2020 menjadi data/kondisi awal untuk menetapkan target-target capaian program tahun 2021-2026.

3. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerahberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

4. RPJMD Kota Blitar digunakan dalam penyusunan RKPD
   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar mulai tahun 2022 sampai tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026. RKPD merupakan implementasi RPJMD yang berisi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintah yang

menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.

5. Penguatan peran pemangku kepenting dalam pelaksanaan RPJMD RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam penyusunannya telah melibatkan *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Kota Blitar yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau perangkat daerah dengan nama lain yang melaksanakan urusan perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.
   RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk jangka menengah dan tahunan, dimana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026;

7. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah indikator dan target kinerja Kota. Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Selain itu, Perangkat Daerah juga wajib menetapkan indikator dan target kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;

8. Perlunya upaya-upaya yang berlandaskan pada prinsip kolaboratif, partisipatif, dan integratif di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Blitar dalam implementasi kebijakan pembangunan dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Seluruh perangkat daerah memiliki kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Blitar melalui berbagai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan sesuai dengan target-target yang ditetapkan;

9. Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.